



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) memuat Capaian Kinerja Makro, Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penyusunan LPPD merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 dalam rangka pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Kami sampaikan juga terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

Sebagai penutup, kami berharap kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan semoga materi LPPD ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Pusat dalam memberikan panduan dan pembinaan Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan lebih lanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Semarang, 26 Maret 2021
GUBERNUR JAWA TENGAH



M. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.1.1 Penjelasan Umum	I-1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	I-20
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	I-72
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II-1
2.1 Capaian Kinerja Makro	II-1
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-17
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	II-18
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome).....	II-148
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-181
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	II-188
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	III-1
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi.....	III-4
3.1.1 Target Kinerja	III-27
3.1.2 Realisasi	III-28
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	III-61
3.2.1 Target Kinerja	III-61
3.2.2 Realisasi	III-73
3.3 Permasalahan dan Kendala	III-82
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	III-82
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV-1
4.1 Urusan Pendidikan	IV-1
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-1
4.1.2 Target Pencapaian SPM	IV-2
4.1.3 Realisasi	IV-3
4.1.4 Alokasi Anggaran	IV-4
4.1.5 Dukungan Personil	IV-4
4.1.6 Permasalahan dan Solusi.....	IV-5
4.2 Urusan Kesehatan.....	IV-7

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-7
4.2.2 Target Pencapaian SPM	IV-7
4.2.3 Realisasi	IV-9
4.2.4 Alokasi Anggaran	IV-10
4.2.5 Dukungan Personil	IV-11
4.2.6 Permasalahan dan Solusi.....	IV-13
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	IV-14
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-14
4.3.2 Target Pencapaian SPM	IV-14
4.3.3 Realisasi	IV-15
4.3.4 Alokasi Anggaran	IV-16
4.3.5 Dukungan Personil	IV-17
4.3.6 Permasalahan dan Solusi.....	IV-17
4.4 Urusan Perumahan Rakyat.....	IV-18
4.4.1 Jenis Pelayanan dasar.....	IV-18
4.4.2 Target Pencapaian SPM	IV-18
4.4.3 Realisasi	IV-19
4.4.4 Alokasi Anggaran	IV-20
4.4.5 Dukungan Personil	IV-20
4.4.6 Permasalahan dan Solusi.....	IV-21
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-23
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-23
4.5.2 Target Pencapaian SPM	IV-23
4.5.3 Realisasi	IV-24
4.5.4 Alokasi Anggaran	IV-26
4.5.5 Dukungan Personil	IV-27
4.5.6 Permasalahan dan Solusi.....	IV-28
4.6 Urusan Sosial	IV-28
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-29
4.6.2 Target Pencapaian SPM	IV-29
4.6.3 Realisasi	IV-31
4.6.4 Alokasi Anggaran	IV-34
4.6.5 Dukungan Personil	IV-35
4.6.6 Permasalahan dan Solusi.....	IV-36
4.7 Program dan Kegiatan.....	IV-37
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penduduk Jateng Menurut Kab/Kota serta Luas Wilayah Tahun 2019 – 2020	I-7
Tabel 1.2. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	I-11
Tabel 1.3. Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Periode	I-11
Tabel 1.4. Jumlah PNS Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Periode	I-12
Tabel 1.5. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Gubernur	I-38
Tabel 1.6. Visi: MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”	I-60
Tabel 1.7. Tingkat Ketercapaian Program Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.....	I-66
Tabel 1.8. Tingkat Ketercapaian Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.....	I-68
Tabel 1.9. Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020	I-78
Tabel 1.10. Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020.....	I-79
Tabel 1.11. Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020	I-79
Tabel 1.12. Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2020	I-80
Tabel 1.13. Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020	I-80
Tabel 1.14. Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2020	I-81
Tabel 1.15. Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.....	I-83
Tabel 1.16. Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Kesehatan Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	I-84
Tabel 1.17. Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	I-86
Tabel 1.18. Integrasi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020....	I-87
Tabel 1.19. Integrasi SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Ke Dalam Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.....	I-88

Tabel 1.20.	Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	I-89
Tabel 2.1.	Capaian Indikator Kinerja Makro Provinsi Jawa Tengah	II-1
Tabel 2.2.	Perkembangan IPM Tahun 2019 – 2020	II-3
Tabel 2.3.	Perkembangan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2019–2020	II-3
Tabel 2.4.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka se-Jawa Periode Agustus 2019–2020	II-8
Tabel 2.5.	Pertumbuhan Lapangan Usaha yang Berkontribusi terhadap Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2019 –2020	II-11
Tabel 2.6.	Pertumbuhan Jawa Tengah Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2019 – 2020....	II-12
Tabel 2.7.	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 –2020	II-13
Tabel 2.8.	Perbandingan Realisasi IKU 2018-2020.....	II-206
Tabel 2.9.	Pengukuran Kinerja Tujuan 1	II-209
Tabel 2.10.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis pada Tujuan 2	II-213
Tabel 2.11.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis pada Tujuan 3	II-218
Tabel 2.12.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis pada Tujuan 4	II-221
Tabel 2.13.	Pengukuran Kinerja Tujuan 5	II-226
Tabel 2.14.	Pengukuran Kinerja Tujuan 6	II-234
Tabel 4.1.	Rencana Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Daerah Provinsi Tahun 2020 .	IV-1
Tabel 4.2.	Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Daerah Provinsi Tahun 2020	IV-3
Tabel 4.3.	Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020 di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jateng	IV-5
Tabel 4.4.	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020	IV-7
Tabel 4.5.	Rencana Capaian dan indikator penerima layanan SPM Kesehatan Tahun 2020	IV-8
Tabel 4.6.	Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020.....	IV-9
Tabel 4.7.	Alokasi Anggaran Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	IV-11
Tabel 4.8.	Jumlah Personil Berdasarkan Golongan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	IV-12
Tabel 4.9.	Jumlah Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	IV-13
Tabel 4.10.	Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	IV-15
Tabel 4.11.	Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020	IV-16
Tabel 4.12.	Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	IV-17
Tabel 4.13.	Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	IV-17

Tabel 4.14. Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2020	IV-18
Tabel 4.15. Capaian Realisasi terhadap Target SPM Perumahan Rakyat Tahun 202	IV-19
Tabel 4.16. Jumlah Penerima Bansos Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko bencana Tahun 2020	IV-20
Tabel 4.17. Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan SPM Perumahan Rakyat	IV-22
Tabel 4.18. Target Capaian Penerapan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	IV-24
Tabel 4.19. Capaian Penerapan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.....	IV-25
Tabel 4.20. Capaian Realisasi Target SPM Satpol PP	IV-25
Tabel 4.21. Jumlah Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	IV-27
Tabel 4.22. Jumlah Personil Berdasarkan Golongan Kepegawaian pada satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.....	IV-24
Tabel 4.23. Rencana Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi Tahun.....	IV-30
Tabel 4.24. Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi Tahun 2020	IV-32
Tabel 4.25. Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2019 di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	IV-35
Tabel 4.26. Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2020	IV-36
Tabel 4.27. Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020	IV-37
Tabel 4.28. Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun	IV-38
Tabel 4.29. Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020	IV-39
Tabel 4.30 Program/Kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Tahun 2020.....	IV-39
Tabel 4.31. Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	IV-40
Tabel 4.32. Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Tahun 2020	IV-41

GAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Persandingan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 I-15	
Grafik 1.2. Persandingan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 I-16	
Grafik 1.3. Persandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2020 I-17	
Grafik 1.4. Persandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020 I-19	
Grafik 1.5. Persandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020.... I-20	
Grafik 2.1.Perbandingan IPM Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 – 2020.....II-2	
Grafik 2.2. Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2014-2020 (Ribu Orang).....II-6	
Grafik 2.3.Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Jateng dan Nasional Tahun 2014-2020 (%) II-7	
Grafik 2.4. Penduduk Bekerja, Pengangguran dan TPT Jawa Tengah Tahun 2014 – 2020II-8	
Grafik 2.5.Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (%) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 – 2020 II-9	
Grafik 2.6.PDRB Perkapita Jateng (Rp Juta) dan Pertumbuhannya (%) Tahun 2014 – 2020 .. II-14	
Grafik 2.7.Gini Rasio Jawa Tengah Menurut Wilayah, 2014 (September) – 2020 (September) ..II-15	
Grafik 2.8.Perkembangan Gini Rasio Jateng, Jabar, Jatim dan Indonesia Tahun 2014 (September) – 2020 (September) II-16	
Grafik 2.9.Perbandingan Rata-rata Realisasi IKU 2018-2020 II-206	
Grafik 2.10. II-210	
Grafik 2.11.Peningkatan Predikat SAKIP Provinsi Jawa Tengah 2013-2019 II-215	
Grafik 2.12.Predikat SAKIP Kab/Kota 2019..... II-215	
Grafik 2.13.Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan 3 II-219	
Grafik 2.14.Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran pada Tujuan 4 II-223	
Grafik 2.15.Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5 II-227	
Grafik 2.16. Rata–Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017 – 2020 (Tahun)..... II-228	
Grafik 2.17.Capaian AHH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2020 II-229	
Grafik 2.18.Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran pada Tujuan 6 II-234	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah..... I-5

Gambar 1.2. Peta Topografi Provinsi Jawa Tengah I-6

Gambar 1.3. Persandingan Komponen Kontribusi Pendapatan Daerah Tahun 2019 dengan I-14

Gambar 1.4. Skema Strategi Pencapaian Misi 1 I-40

Gambar 1.5. Skema Strategi Pencapaian Misi 2 I-43

Gambar 1.6. Skema Strategi Pencapaian Misi 3 Tujuan 1..... I-49

Gambar 1.7. Skema Strategi Pencapaian Misi 3 Tujuan 2..... I-54

Gambar 1.8. Skema Strategi Pencapaian Misi 4 I-59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa dengan berbagai karakteristik didalamnya, berikut penjelasan mengenai kondisi umum Provinsi Jawa Tengah :

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah;

Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, pada Pasal 1 ayat (1) daerah yang meliputi daerah karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu dan Surakarta ditetapkan menjadi Provinsi Jawa Tengah, dan Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1950 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Menghapus Pemerintahan Daerah karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu dan Surakarta dan membentuk Provinsi Jawa Tengah;
- b) Kedudukan hukum Provinsi Jawa Tengah sebagai Daerah Otonom;
- c) Daerah (wilayah) Provinsi Jawa Tengah meliputi Eks Karesidenan karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu dan Surakarta dengan demikian sebagai daerah otonom wilayahnya mencakup seluruh Jawa Tengah;
- d) Kedudukan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang;
- e) Adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- f) Urusan-urusan rumah tangga dan kewajiban lain serta segala milik berupa barang tetap maupun barang tidak tetap dan perusahaan-

perusahaan dari pemerintahan daerah yang dihapuskan tersebut diatas menjadi milik Provinsi Jawa Tengah;

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, menimbang bahwa: 1) dalam rangka menumbuh kembangkan rasa persatuan, kesatuan dan kecintaan rakyat pada Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai keunggulan kualitatif, komparatif, kompetitif serta untuk memacu pengembangan sumber daya daerah, perlu ditetapkan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah; 2) bahwa penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tersebut merupakan kesepakatan pengakuan hukum terhadap keberadaan Provinsi Jawa Tengah yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri dan mempunyai pemerintahan daerah yang berkedudukan di Semarang dengan wilayah meliputi Daerah Eks Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu dan Surakarta; 3) berhubung dengan pertimbangan tersebut serta sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, maka dipandang perlu menetapkan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam:

- Pasal (1), dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah Otonom dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tanggal 15 Agustus 1950.
- Pasal (2), Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) diperingati setiap tahun pada tanggal 15 Agustus.
- Pasal (3), pada setiap peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) wajib diselenggarakan Upacara Bendera Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dan Kegiatan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah.
- Pasal (4), Tata Cara Dan Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) tetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

- Pasal (5), hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 dijelaskan bahwa penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada dasarnya adalah pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan dan perubahan ketatanegaraan, serta penghargaan kepada para Pemimpin Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Hukum Tata Negara Republik Indonesia.

Penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi sarana dalam rangka menumbuhkembangkan dan memperkuat rasa kecintaan serta keterikatan batin rakyat, lembaga politik, social, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan, dan pemerintahan di wilayah Provinsi Jawa Tengah terhadap keberadaan Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah Otonom dan sebagai wilayah administratif,serta terhadap penyelenggaran Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dapat juga digunakan sebagai sarana untuk menunjukkan jati diri Provinsi Jawa Tengah yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif, dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tersebut secara hukum ditandai adanya petunjuk tentang pembentukan, tata cara pembedaan, kedudukan, penyelenggara pemerintahan, wilayah pemerintahan, urusan pemerintahan, pusat pemerintahan dan waktu dimulainya pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah dalam Sistem Hukum Tata Negara Republik Indonesia.

Untuk menelusuri proses penentuan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan penelusuran, Seminar dan Studi Komparasi yang melibatkan Sejarawan, Pakar Hukum Tata Negara, Pemuka Masyarakat dan seluruh pihak-pihak terkait untuk secara bersama-sama merumuskan tanggal kelahiran Provinsi Jawa Tengah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu:

- a) Berdirinya Provinsi Jawa Tengah dengan berdasarkan ketentuan Staadblad 1929 Nomor 227 yaitu pada tanggal 1 Januari 1930, merupakan saatnya terbentuknya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai wilayah Karesidenan Semarang, Karesidenan Pekalongan, Karesidenan Kedu, Karesidenan Pati dan Karesidenan Banyumas, dimana Karesidenan Surakarta belum terbentuk disamping itu Negara Republik Indonesia belum merdeka.
- b) Berdirinya Provinsi Jawa Tengah dengan berdasarkan ketetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945 yang membagi Indonesia menjadi 8 (delapan) Provinsi termasuk di dalamnya adalah Provinsi Jawa Tengah dan menunjuk Raden Pandji Soeroso sebagai Gubernur Jawa Tengah.
- c) Berdirinya Provinsi Jawa Tengah dengan berdasarkan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 1950 pada tanggal 4 Juli 1950, pada saat terbentuknya Provinsi Jawa Tengah dengan berdasarkan ketentuan tersebut, maka wilayah Provinsi Jawa Tengah meliputi : Karesidenan Semarang, Karesidenan Pekalongan, Karesidenan Kedu, Karesidenan Pati dan Karesidenan Banyumas, Karesidenan Surakarta, dan pada UU tersebut telah dimuat kewenangan yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah, namun demikian UU tersebut sesuai ketentuan Pasal (7) akan ditetapkan berlakunya dengan Peraturan Pemerintah.

b. Data Geografis Wilayah;

Secara geografis Provinsi Jawa Tengah terletak di $5^{\circ}40'$ - $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $108^{\circ}30'$ - $111^{\circ}30'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa, luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 3.254.412 Ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa.

membujur di bagian tengah dan dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah yang umumnya adalah wilayah pantai. Sekitar 53% wilayah Provinsi Jawa Tengah berada pada ketinggian 0-99 m dpl, Peta Topografi dapat dilihat pada Gambar 1.2 dibawah ini :



Sumber: Data RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029

Gambar 1.2. Peta Topografi Provinsi Jawa Tengah

Kondisi fisiografis Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi fisiografis, yaitu Perbukitan Rembang, Zone Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jenis tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah meliputi organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, dan podsolik, dan didominasi jenis tanah latosol, aluvial, dangromosol, yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi. Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 6 (enam) gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Boyolali), Gunung Slamet (di Pemalang), Gunung Sindoro (di Temanggung-Wonosobo), Gunung

Sumbing (di Temanggung-Wonosobo), Gunung Dieng (di Banjarnegara) dan Gunung Merbabu (di Salatiga-Boyolali). Gunung berapi di sepanjang wilayah Jawa Tengah rata-rata mempunyai tingkat kerentanan terhadap bahaya bencana vulkanik tinggi, sehingga memerlukan pengawasan terus menerus.

c. Jumlah Penduduk;

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 berdasarkan data proyeksi hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 BPS sebanyak 34.738.244 jiwa meningkat 185.713 jiwa atau 0,54% dibandingkan tahun 2019 sebanyak 34.552.531 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kota Semarang sebanyak 1.832.753 jiwa, diikuti Kabupaten Brebes sebanyak 1.804.270 jiwa dan Kabupaten Cilacap sebanyak 1.724.302 jiwa. Jumlah penduduk paling sedikit berada di Kota Magelang sebanyak 121.704 jiwa selanjutnya diikuti Kota Salatiga sebanyak 195.565 jiwa dan Kota Tegal sebanyak 249.193 jiwa. Kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah tercatat 1.059 jiwa/km². Wilayah terpadat di Kota Surakarta sebesar 11.260 jiwa/km², diikuti Kota Magelang sebesar 7.578 jiwa/km² dan Kota Pekalongan sebesar 6.800 jiwa/km². Wilayah dengan kepadatan paling rendah yaitu Kabupaten Blora sebesar 478 jiwa/km², diikuti oleh Kabupaten Wonogiri sebesar 533 jiwa/km² dan Kabupaten Purworejo sebesar 656 jiwa/km². Data lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Penduduk Jateng Menurut Kab/Kota serta Luas Wilayah Tahun 2019 – 2020

No.	Kab/Kota	2019	2020	Luas
1	Kab. Cilacap	1,727,098	1.944.857	2124.47
2	Kab. Banyumas	1,693,006	1.776.918	1335.3
3	Kab. Purbalingga	933,989	998.561	677.55
4	Kab. Banjarnegara	923,192	1.017.767	1023.73
5	Kab. Kebumen	1,197,982	1.350.438	1211.74
6	Kab. Purworejo	718,316	769.880	1091.49

No.	Kab/Kota	2019	2020	Luas
7	Kab. Wonosobo	790,504	879.124	981.41
8	Kab. Magelang	1,290,591	1.299.859	1102.93
9	Kab. Boyolali	984,807	1.062.713	1008.45
10	Kab. Klaten	1,174,986	1.260.506	658.22
11	Kab. Sukoharjo	891,912	907.587	489.12
12	Kab. Wonogiri	959,492	1.043.177	1793.67
13	Kab. Karanganyar	886,519	931.963	775.44
14	Kab. Sragen	890,518	976.951	941.54
15	Kab. Grobogan	1,377,788	1.453.526	2013.86
16	Kab. Blora	865,013	884.333	1804.59
17	Kab. Rembang	638,188	645.333	887.13
18	Kab. Pati	1,259,590	1.324.188	1489.19
19	Kab. Kudus	871,311	849.184	425.15
20	Kab. Jepara	1,257,912	1.184.947	1059.25
21	Kab. Demak	1,162,805	1.203.956	900.12
22	Kab. Semarang	1,053,786	1.053.094	950.21
23	Kab. Temanggung	772,018	790.174	837.71
24	Kab. Kendal	971,086	1.018.505	1118.13
25	Kab. Batang	768,583	801.718	788.65
26	Kab. Pekalongan	897,711	968.821	837
27	Kab. Pemalang	1,302,813	1.471.489	1118.03
28	Kab. Tegal	1,440,698	1.596.996	876.1
29	Kab. Brebes	1,809,096	1.978.759	1902.37
30	Kota Magelang	122,111	121.526	16.06
31	Kota Surakarta	519,587	522.364	46.01
32	Kota Salatiga	194,084	192.322	57.36
33	Kota Semarang	1,814,110	1.653.524	373.78
34	Kota Pekalongan	307,097	307.150	45.25
35	Kota Tegal	249,905	273.825	39.68

Sumber: Data SP2020 BPS Jateng, 2021

d. Jumlah Kabupaten / Kota;

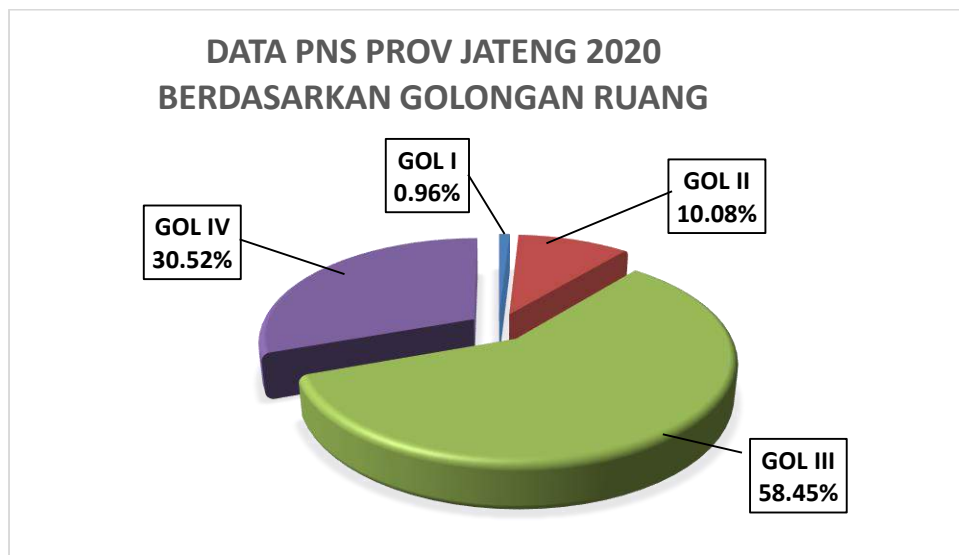
Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota meliputi : Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal,

Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Kota: Magelang, Surakarta, Salatiga, Semarang, Pekalongan dan Tegal.

e. Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai Pemerintah

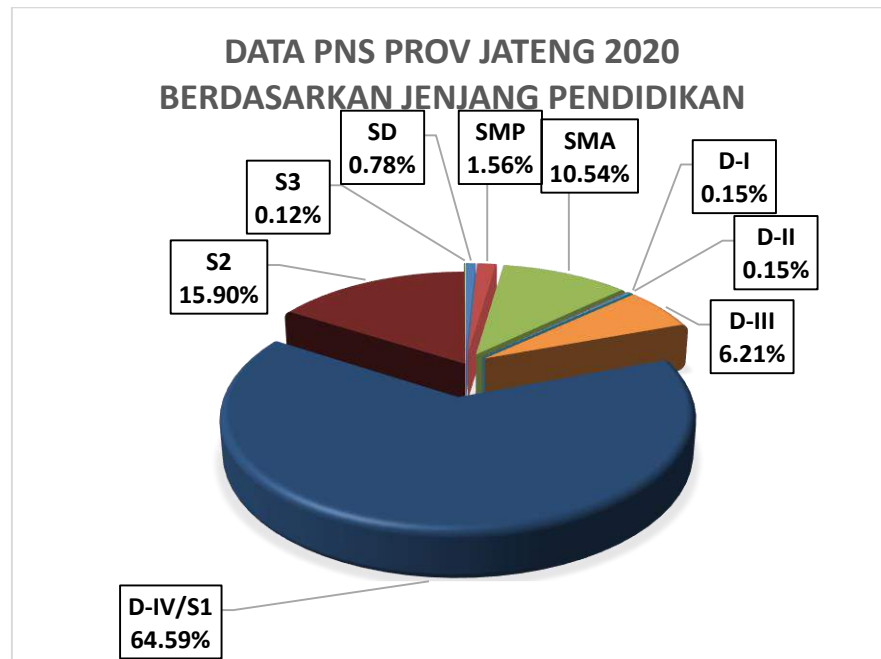
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki 49 Perangkat Daerah, dengan 49 Unit Kerja Perangkat Daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tersebut didukung pegawai yang berstatus PNS semula 41.752 orang pada Januari 2020 menjadi 40.543 orang pada Desember 2020. Terjadi penurunan PNS secara signifikan di setiap Perangkat Daerah, disebabkan oleh lebih banyaknya PNS yang memasuki purna tugas, yang tidak sebanding dengan penambahan PNS baru.

Dari jumlah tersebut PNS sebanyak 39.811 orang, laki-laki sejumlah 20.860 atau 52,4% dan perempuan sebanyak 18.951 atau 47,6 %. Apabila dilihat dari golongan ruang, PNS golongan I sebanyak 382 orang atau 1 %, PNS golongan II sebanyak 4.011 orang atau 10,1 % , PNS golongan III dan 23.269 orang atau 58,4 %, dan untuk PNS golongan IV sebanyak 12.149 orang atau 30,5 %. Berikut ini diagram PNS Provinsi Jawa Tengah per golongan :

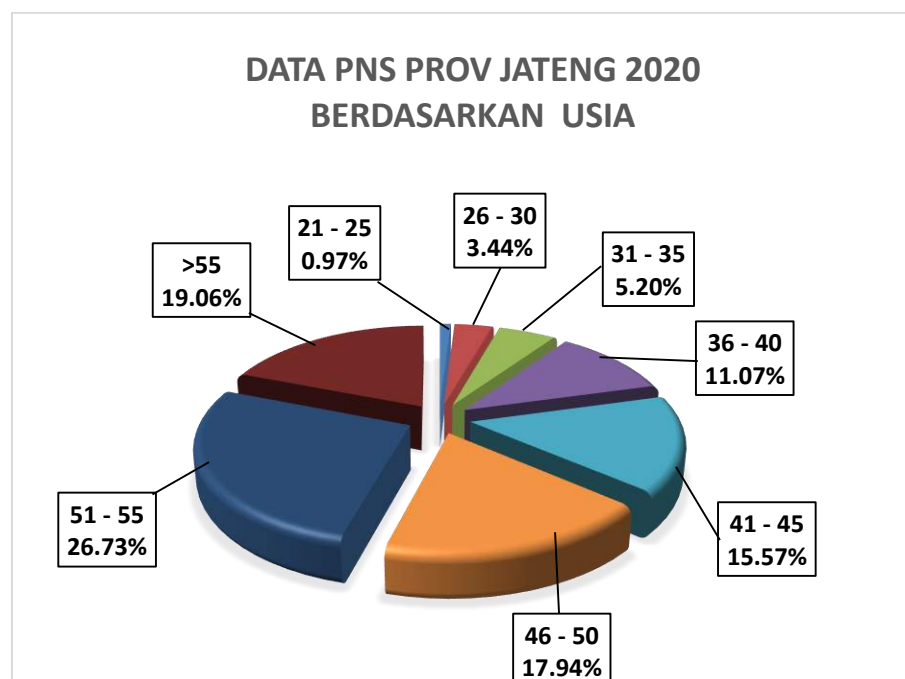


Sementara itu dilihat dari jenjang Pendidikan, proporsi terbesar pendidikan PNS di Jawa Tengah berpendidikan S-1 sebesar 64,6 % disusul

kemudian pendidikan S-2 sebanyak 15,9 % dan SLTA sebesar 10,5%. Berikut adalah diagram PNS Prov. Jawa Tengah per jenjang Pendidikan :



Selanjutnya jika dilihat dari usia, maka proporsi terbanyak adalah PNS berusia 51 - 55 Th sejumlah 26,7%, disusul PNS berusia > 55 Th sebesar 19,1 % dan usia 46 – 50 sebesar 17, 9%. Berikut ini adalah diagram PNS Prov.Jawa Tengah berdasarkan Usia :



Selengkapnya data PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan Ruang, Pendidikan dan Usia sebagaimana tercantum dalam Tabel I.a, I.b dan I.c sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Periode : Oktober 2020

NO	Golongan	L		P		TOTAL	
		JML	%	JML	%	JML	%
1	I	353	0,9	29	0,1	382	1
2	II	2.806	7	1.205	3	4.011	10,1
3	III	10.938	27,5	12.331	31	23.269	58,4
4	IV	6.763	17	5.386	13,5	12.149	30,5
TOTAL		20.860	52,4	18.951	47,6	39.811	100

Sumber Data : BKD Provinsi Jawa Tengah Th.2020

Tabel 1.3.
Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Periode : Oktober 2020

NO	Pendidikan	L		P		TOTAL	
		JML	%	JML	%	JML	%
1	SD	283	0,7	27	0,1	310	0,8
2	SLTP	590	1,5	31	0,1	621	1,6
3	SLTA	2963	7,4	1234	3,1	4.197	10,5
4	D-I	45	0,1	16	0,1	61	0,2
5	D-II	29	0,1	31	0,1	60	0,2
6	D-III	904	2,3	1.569	3,9	2.473	6,2
7	S-1	12.389	31,1	13.324	33,5	25.713	64,6
8	S-2	3.627	9,1	2.703	6,8	6.330	15,9
9	S-3	30	0,1	16	0	46	0,1
TOTAL		20.860	52,4	18,951	47,6	39,811	100

Sumber Data : BKD Provinsi Jawa Tengah Th. 2020

Tabel 1.4.
Jumlah PNS Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Periode :
Oktober 2020

NO	Usia (Th)	L		P		TOTAL	
		JML	%	JML	%	JML	%
1	21 - 25	96	0,2	292	0,7	388	1
2	26 - 30	569	1,4	802	2	1.371	3,4
3	31 - 35	896	2,3	1.173	2,9	2,069	5,2
4	36 - 40	2.046	5,1	2.362	5,9	4.408	11,1
5	41 - 45	2.897	7,3	3.303	8,3	6.200	15,6
6	46 - 50	3.625	9,1	3.519	8,8	7.144	17,9
7	51 - 55	6.120	15,4	4.522	11,4	10.642	26,7
8	➤ 55	4.611	11,6	2.978	7,5	7.589	19,1
TOTAL		20.860	52,4	18.951	47,6	39,811	100

Sumber Data : BKD Provinsi Jawa Tengah Th.2020

Dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Aparatur dimaksud, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan merit system dalam pengembangan karir PNS. Guna kepentingan dimaksud, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan metode penelusuran kader potensial /talent scouting untuk promosi ke Jabatan Administrator/eselon III dan Jabatan Pengawas/ eselon IV, secara operasional telah diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penelusuran Kader Potensial (Talent Scouting) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dan Mekanisme Promosi dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

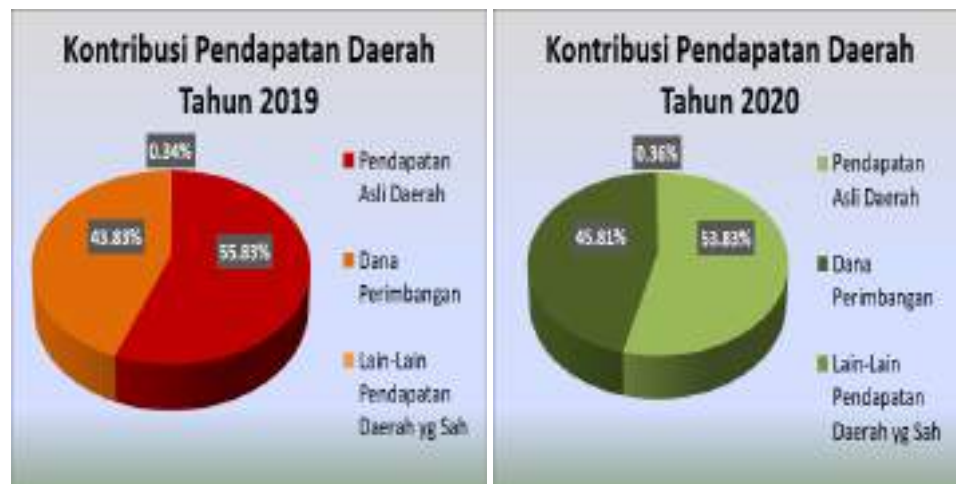
Sementara itu untuk promosi Jabatan Pimpinan Tinggi /Eselon II juga telah diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah tanpa perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan sebagai penambah ekuitas daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dan memberikan stimulus dalam mendukung kondisi perekonomian yang lebih berkualitas dengan memperhatikan potensi yang ada, guna tercapainya peningkatan kemandirian daerah serta mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat. Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 yang melanda hampir seluruh negara berdampak pada perekonomian negara maupun daerah. Hal ini mengakibatkan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2019.

Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan sumber lain yang sah ditargetkan sejumlah Rp26.225.251.903.000,00 terealisasi sejumlah Rp25.393.556.957.897,00 atau 96,72%, mengalami penurunan sejumlah Rp466.223.180.039,00 atau 1,80% dibandingkan Tahun Anggaran 2019. Kontribusi setiap sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 memberikan kontribusi sebesar 53,83%, lebih rendah apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 55,83%;
- b. Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 memberikan kontribusi sebesar 45,81%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 43,83%; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2020 memberikan kontribusi sebesar 0,36%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 0,34%.

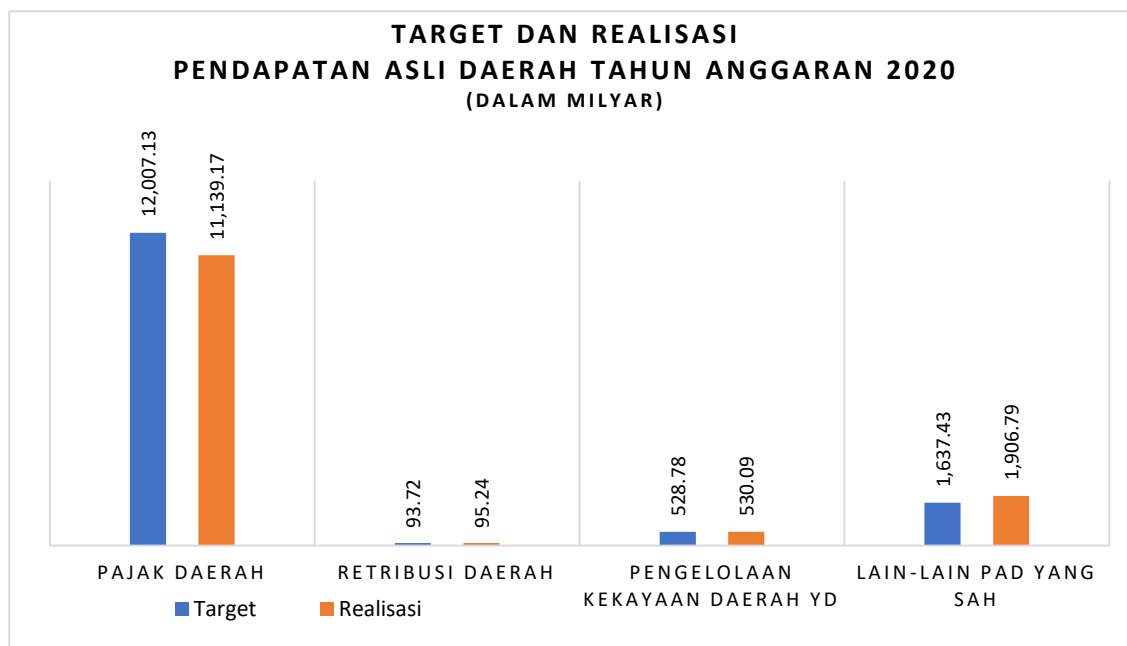


Gambar 1.3.

Persandingan Komponen Kontribusi Pendapatan Daerah Tahun 2019 dengan 2020

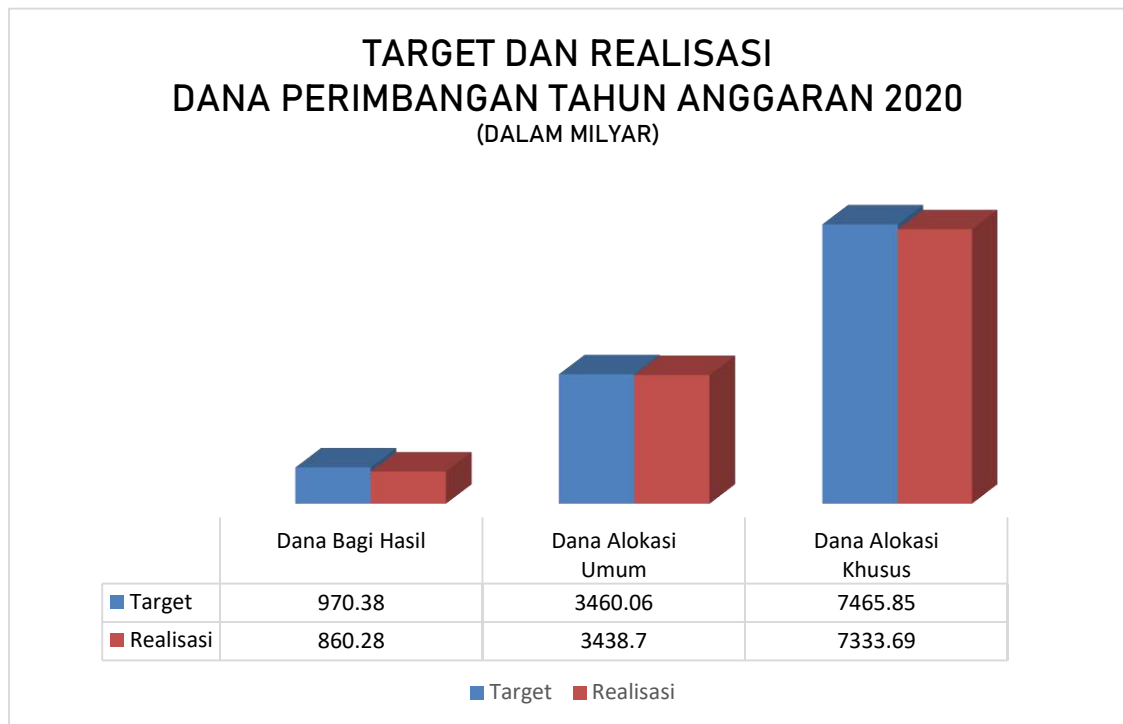
Komponen pendapatan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan Rp14.267.084.822.000,00 terealisasi sejumlah Rp13.669.303.111.604,00 atau 95,81%, mengalami penurunan Rp768.611.124.794,00 atau 5,32% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019, terdiri dari :
 - Pajak Daerah ditargetkan sejumlah Rp12.007.135.432.000,00 terealisasi Rp11.139.173.309.780,00 atau 92,77%, mengalami penurunan Rp812.746.225.603,00 atau 6,80% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
 - Retribusi Daerah ditargetkan sejumlah Rp93.728.474.000,00 terealisasi Rp93.240.993.301,00 atau 99,48%, mengalami penurunan Rp21.620.065.550,00 atau 18,82% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sejumlah Rp528.788.165.000,00 terealisasi Rp530.091.029.137,00 atau 100,25%, mengalami kenaikan Rp17.389.035.198,00 atau 3,39% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sejumlah Rp1.637.432.751.000,00 terealisasi Rp1.906.797.779.386,00 atau 116,45%, mengalami kenaikan Rp48.366.131.161,00 atau 2,60% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.



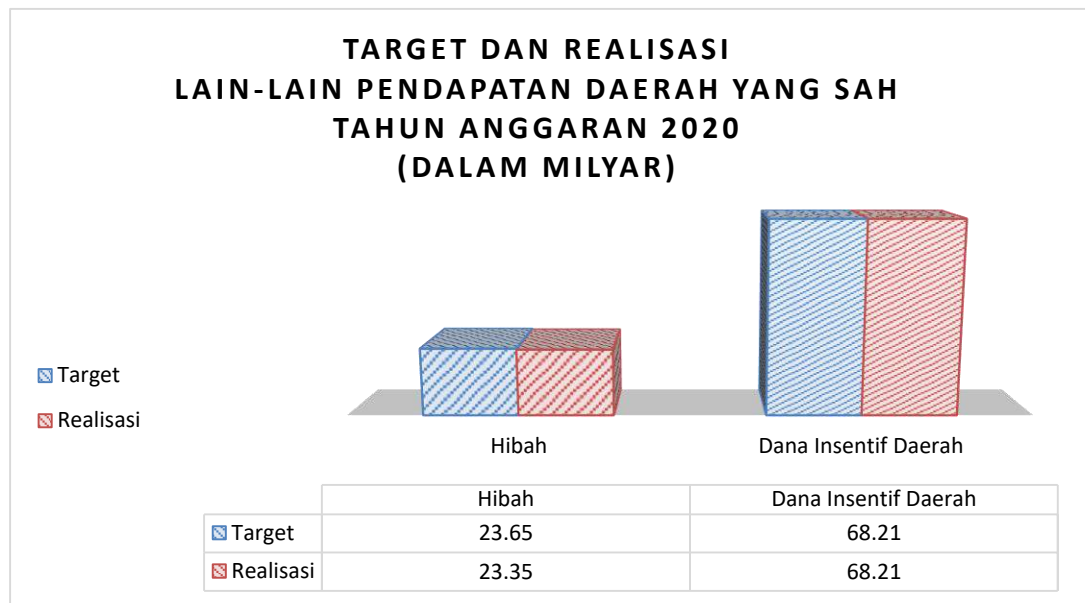
Grafik 1.1.
Persandingan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020

- b. Dana Perimbangan ditargetkan Rp11.896.302.626.000,00 terealisasi Rp11.632.689.391.293,00 atau 97,78%, mengalami kenaikan Rp297.786.330.620,00 atau 2,63% apabila dibandingkan realisasi tahun 2019 terdiri dari:
- Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak ditargetkan sejumlah Rp970.386.689.000,00 terealisasi Rp860.280.136.541,00 atau 88,65%, mengalami kenaikan Rp284.311.814.907,00 atau 49,36% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
 - Dana Alokasi Umum ditargetkan sejumlah Rp3.460.064.369.000,00 terealisasi Rp3.438.709.973.000,00 atau 99,38%, mengalami penurunan Rp345.802.540.000,00 atau 9,14% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
 - Dana Alokasi Khusus ditargetkan sejumlah Rp7.465.851.568.000,00 terealisasi Rp7.333.699.281.752,00 atau 98,23%, mengalami kenaikan Rp359.277.055.713,00 atau 5,15% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.



Grafik 1.2.
Persandingan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp91.864.455.000,00 terealisasi Rp91.564.455.000,00 atau 99,67% dari target, mengalami kenaikan Rp4.601.614.135,00 atau sebesar 5,29% apabila dibandingkan realisasi tahun 2019 terdiri dari:
- Pendapatan Hibah ditargetkan sejumlah Rp23.652.000.000,00 terealisasi Rp23.352.000.000,00 atau 98,73% mengalami kenaikan Rp168.000.000,00 atau 0,72% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
 - Dana Insentif Daerah ditargetkan sejumlah Rp68.212.455.000,00 terealisasi Rp68.212.455.000,00 atau 100,00% mengalami kenaikan Rp5.824.034.000,00 atau 9,34% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.



Grafik 1.3.
Persandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2020

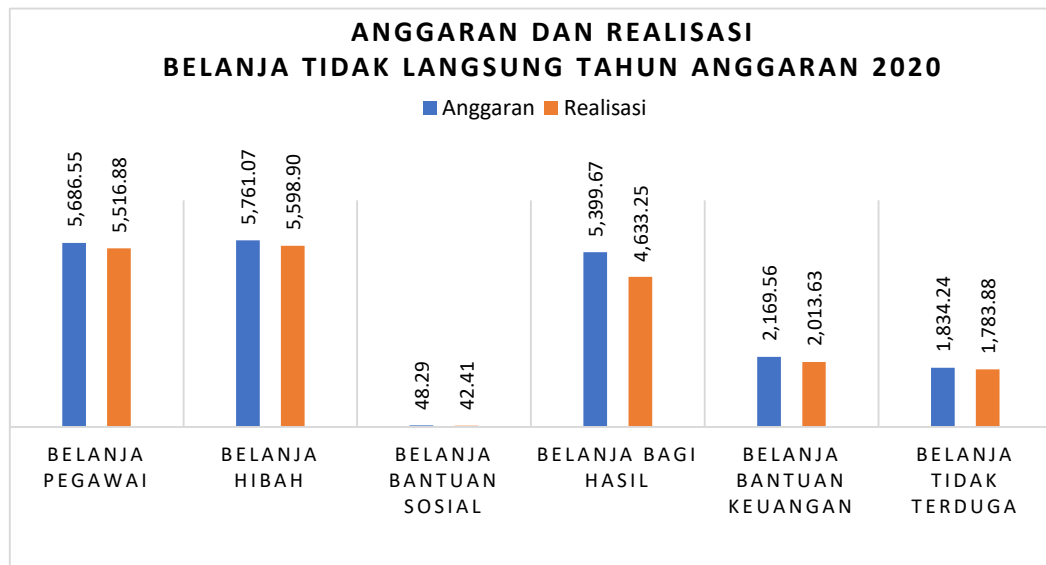
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pilihan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Peningkatan belanja daerah diprioritaskan pada kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program/kegiatan strategis yang memiliki kontribusi terhadap capaian pembangunan daerah. Namun demikian, dengan adanya kejadian pandemi COVID-19 di awal Tahun 2020 maka kebijakan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan penyesuaian yang diarahkan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sejumlah Rp27.374.409.350.000,00 terealisasi sejumlah Rp25.712.522.969.890,00 atau 93,93% mengalami penurunan sejumlah Rp438.539.872.567,00 atau 1,68% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sejumlah Rp26.151.062.842.457,00 Komponen Belanja Daerah terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sejumlah Rp20.899.401.933.000,00 terealisasi sejumlah Rp19.590.521.195.805,00 atau 93,74% mengalami kenaikan sejumlah Rp823.917.470.678,00 atau 4,39% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sejumlah Rp18.766.603.725.127,00 terdiri dari :

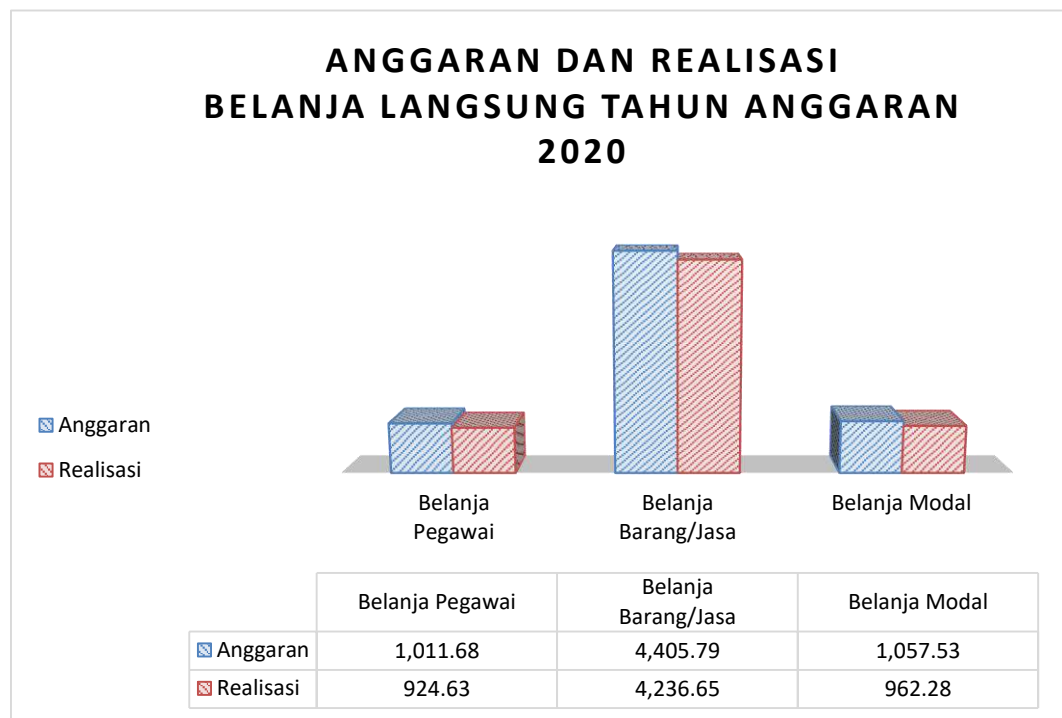
- Belanja Pegawai dianggarkan Rp5.686.554.746.000,00 terealisasi sejumlah Rp5.516.883.603.475,00 atau 97,02%, mengalami penurunan sejumlah Rp352.778.996.777,00 atau 6,01% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019;
- Belanja Hibah dianggarkan sejumlah Rp5.761.071.145.000,00 terealisasi sejumlah Rp5.598.903.973.109,00 atau 97,19% mengalami kenaikan sejumlah Rp443.077.892.358,00 atau 8,59% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019;
- Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sejumlah Rp48.292.000.000,00, terealisasi sejumlah Rp42.407.250.000,00 atau 87,81%, mengalami penurunan sejumlah Rp1.918.500.000,00 atau 4,33% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019;
- Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dianggarkan sejumlah Rp5.399.670.659.000,00 terealisasi sejumlah Rp4.633.245.749.888,00 atau 85,81%, mengalami penurunan sejumlah Rp615.226.552.382,00 atau 11,72% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019;
- Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sejumlah Rp2.169.569.542.000,00 terealisasi sejumlah Rp2.013.634.831.241,00 atau 92,81%, mengalami penurunan sejumlah Rp432.019.729.407,00 atau 17,66% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019;
- Belanja Tidak Terduga dianggarkan sejumlah Rp1.834.243.841.000,00 terealisasi sejumlah Rp1.783.884.978.571,00 atau 97,25%, mengalami kenaikan sejumlah Rp1.781.222.547.365,00 atau 66.902,11% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019.



Grafik 1.4.
**Persandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2020**

b. Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sejumlah Rp6.475.007.417.000,00 sejumlah Rp6.123.562.283.606,00 atau 94,57%, mengalami penurunan sejumlah Rp1.260.896.533.724,00 atau 17,08% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.384.459.117.330,00, terdiri dari :

- Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sejumlah Rp1.011.687.312.000,00. Terealisasi sejumlah Rp924.632.449.207,00 atau 91,40%, mengalami kenaikan sejumlah Rp202.391.907.881,00 atau 28,02% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019;
- Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sejumlah Rp4.405.786.353.000,00. Terealisasi sejumlah Rp4.236.647.899.480,00 atau 96,16%, mengalami penurunan sejumlah Rp325.851.551.664,00 atau 7,14% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019;
- Belanja Modal dianggarkan sejumlah Rp1.057.533.752.000,00 Terealisasi sejumlah Rp962.282.234.919,00 atau 90,99%, mengalami penurunan sejumlah Rp1.137.436.889.941,00 atau 54,17% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019.



Grafik 1.5.
Persandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020

Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Target Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp1.119.157.447.000,00 terealisasi sejumlah Rp1.119.409.987.600,00 atau 100,02%, mengalami penurunan sejumlah Rp511.366.614.165,00 atau 31,36% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019, sedangkan Target Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi sehingga mengalami penurunan sejumlah Rp220.336.450.544,00 atau 100%.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Beberapa permasalahan strategis dalam pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2020 yang juga tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:

1). Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu daerah saat ini. Sejalan dengan amanat *Sustainable Development Goals* (SDG's), kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (*zero poverty*).

Penduduk Jawa Tengah yang berada di bawah garis kemiskinan sampai dengan September 2020 berjumlah 4,12 juta jiwa atau 11,84 persen, meningkat dibandingkan bulan Maret 2020 (11,41 persen). Sebaran penduduk miskin di Jawa Tengah masih didominasi di wilayah pedesaan sebanyak 2.175.250 jiwa (12,80 persen), sedangkan penduduk miskin perkotaan sebanyak 1.805.650 jiwa (10,09 persen). Masih tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan khususnya pada kelompok sasaran petani (buruh petani, petani gurem dan pekerja serabutan) dan kelompok nelayan (buruh nelayan dan nelayan kecil).

Tiga kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah:

- a). angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (*underutilized*) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (*part time worker*), termasuk di dalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan;
- b). usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (*unpaid worker*); dan
- c). penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan.

Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin Jawa Tengah adalah masih rendahnya akses pelayanan dasar (*basic needs access*) meliputi akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan, dan kesehatan; serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (*sustainable livelihood*) yang ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan. Kondisi ini didukung dimensi sosial masyarakat yang menyangkut dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keisolasian, kelemahan

jasmani dan psikologi, serta munculnya gejala kultur komodifikasi data di masyarakat, dengan memanfaatkan data untuk kepentingan mencari keuntungan sendiri.

Selain itu, masih adanya ketidaktepatan sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan juga menjadi penyebab penanganan kemiskinan yang tidak optimal dilakukan oleh pemerintah. Hal ini akibat belum terintegrasinya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, belum tervalidasinya data kemiskinan secara periodik, belum efektifnya sistem pengawasan secara partisipatif, dan belum optimalnya pemberdayaan kelompok sasaran (petani dan nelayan) menuju industrialisasi komoditas pertanian (industri pengolahan hasil pertanian), dan belum optimalnya pendampingan berkelanjutan kepada kelompok sasaran penerima program.

Kemiskinan juga dipengaruhi dimensi politik yang dikarenakan struktur politik dan ekonomi yang timpang, serta tidak memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan pondasi masyarakat miskin yang kokoh, dalam dimensi politik yang lebih luas, dengan menciptakan ruang aspirasi masyarakat dalam proses politik dan pembangunan, dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

2). Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tahun 2020, IPM Jawa Tengah terus membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 71,87 dan masuk dalam kategori tinggi. Namun demikian angka ini masih dibawah angka nasional sebesar 71,94. Kondisi ini terutama ditunjukkan dari indikator rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Harapan lama sekolah Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 12,70 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 7,69 tahun (setara SMP kelas I atau kelas VII),

angka harapan hidup sebesar 74,37 tahun, dan pengeluaran per kapita sebesar 10.930 ribu rupiah.

Isu pendidikan yang utama adalah bagaimana sistem pendidikan yang ada dapat diakses oleh setiap penduduk usia sekolah yang memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, mulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan sampai pendidikan tinggi. Isu lain adalah terkait pemerataan pendidikan guna mendorong partisipasi sekolah masyarakat, serta memperkuat pendidikan budaya dan pendidikan karakter.

Isu lain berkaitan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif. Tantangan lima tahun kedepan adalah bagaimana memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, dengan memanfaatkan penduduk usia produktif sebagai tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing. Paska terjadinya bonus demografi yang diproyeksikan terjadi di Jawa Tengah sampai dengan sepuluh tahun kedepan adalah terjadinya penuaan penduduk (*population ageing*) dimana jumlah penduduk usia lanjut akan meningkat proporsinya. Lanjut usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan. Potensi dan kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan lanjut usia baik potensial maupun non potensial oleh pemerintah daerah secara sinergis perlu ditingkatkan antara lain melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual, kesehatan, pelayanan penyakit ketuaan (*senescent diseases*) dan degeneratif, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum serta bantuan hukum, jaminan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta pemberian literasi tentang pentingnya tabungan (*savings*) sebagai bentuk jaminan perlindungan hari tua.

Isu kesehatan juga masih menjadi hal penting kaitannya dengan kualitas hidup manusia. Meskipun angka harapan hidup masyarakat Jawa

Tengah lebih baik dibandingkan daerah lain di Pulau Jawa dan nasional, namun angka kesakitan dan angka kematian masih cukup tinggi. Sehingga penanganan kesehatan masyarakat tetap menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam pembangunan kedepan. Paradigma pembangunan kesehatan selama ini yang mengarah pada tindakan kuratif, yang kedepan akan mulai bergeser pada tindakan preventif dan promotif. Apalagi dengan melihat gejala penuaan penduduk sebagai dampak bonus demografi, serta tren penyakit katastropik yang semakin meningkat dan berdampak pada beban pembiayaan jaminan kesehatan yang semakin tinggi, maka upayaupaya kesehatan masyarakat mulai mengarah pada tindakan preventif dan promotif. Hal tersebut tetap harus didukung dengan upaya penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan prasarana dan sarana kesehatan, serta tenaga kesehatan, yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Ancaman terhadap sumber daya manusia lainnya yang saat ini tengah menggejala secara nasional adalah melemahnya pemahaman budaya bangsa, dan sendi “kebinekatunggalikaan”, serta banyaknya kasus kekerasan karena tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme yang memungkinkan akan merambat masuk di Jawa Tengah. Selain itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang cenderung meningkat telah mengawatirkan semuanya dan dapat mengancam kualitas sumber daya manusia. Ancaman peredaran NAPZA juga telah menjadi isu krusial secara nasional, bahkan Indonesia telah menetapkan “darurat narkoba” sebagai implikasi peredaran NAPZA yang semakin tak terkendali. Kelompok anak dan remaja merupakan salah satu yang menjadi sasaran korban penyalahgunaan NAPZA. Isu ini menjadi isu penting tersendiri yang harus tetap diperhatikan, mengingat bonus demografi telah terjadi di Jawa Tengah saat ini. Bukan hanya pemahaman tentang budaya bangsa, namun isu pentingnya adalah bagaimana menginternalisasi nilai-nilai budaya ke dalam perilaku masyarakat Jawa Tengah. Penguatan identitas dan bangunan nilai masyarakat demikian penting ditegaskan untuk memastikan jalinan

hubungan antar masyarakat untuk maju dan berkembang bersama, maupun sikap dalam menghadapi tantangan global yang pada satu sisi membuka ruang komunikasi dan informasi seluas-luasnya, pada sisi lain menghadirkan ancaman melunturnya identitas dan kekuatan budaya, sehingga terdominasi dan disubordinasi oleh kepentingan materialisme komersial pasar dan neoliberalisme. Upaya internalisasi nilai-nilai budaya dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai dan menguatkan identitas kebudayaan Jawa Tengah melalui pengakuan keragaman budaya dan memfasilitasi ruang-ruang ekspresi dan kreasi berbagai budaya yang hidup di masyarakat. Ekspresi kebudayaan dipahami dalam cakupan ekspresi kebudayaan materiil yang menunjuk pada hasil karya dan kerja produktif masyarakat berbasis potensi wilayah maupun ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal; maupun ekspresi kebudayaan non-materiil menyangkut hasil karya dan kreatifitas seni budaya maupun ekspresi upacara adat, kenduri dan perayaan. Keseluruhan ekspresi kebudayaan materiil dilandasi bangunan sistem nilai yang menjadi preferensi sikap, watak dan perilaku masyarakat.

3). Daya Saing Ekonomi dan Peningkatan Kesempatan Berusaha

Ekonomi Jawa Tengah dalam konstelasi nasional dalam beberapa tahun terakhir masih dinilai cukup baik, dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang relatif stabil dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terkoreksi -2,65 persen. Tiga sektor unggulan ekonomi Jawa Tengah (industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan jasa), hanya sektor pertanian yang memiliki pertumbuhan positif sebesar 0,80 persen.

Antisipasi yang dilakukan untuk mengurangi perlambatan pada kondisi perekonomian Jawa Tengah kedepan meliputi:

a). Sektor Industri Pengolahan

Pada saat ini industri yang berkembang masih didominasi oleh industri padat karya, yang lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah. Disisi lain perkembangan

industri sudah mulai mengarah pada industri padat modal yang menuntut tingkat pendidikan, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja tinggi. Ditambah dengan perkembangan industri global menuju pada industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi). Kondisi lain yang harus diantisipasi adalah ketergantungan industri terhadap bahan baku dan barang modal impor. Secara nasional, hampir 75 persen impor nasional berupa bahan baku/penolong industri. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk dapat menjamin ketersediaan bahan baku lokal, dan mendukung industri dengan tingkat kandungan dalam negeri tinggi. Ketersediaan energi juga menjadi tantangan penting kedepan untuk disiapkan dalam rangka pengembangan industri di Jawa Tengah. Persoalan lainnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana industri yang belum memadai, kurang tersedianya sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri, serta tingkat kesiapterapan teknologi yang masih rendah.

b). Sektor Perdagangan dan Jasa

Persoalan yang dihadapi di sektor perdagangan adalah neraca perdagangan defisit, dimana impor masih lebih tinggi dibandingkan ekspor. Penyebabnya antara lain rendahnya ekspor antardaerah, dan pasar ekspor yang masih terbatas pada pangsa pasar konvensional. Selain itu, sektor produksi didominasi pada skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menghadapi teknologi sederhana, lemahnya akses permodalan, akses pasar, daya saing produk, dan manajemen usaha. Tren pengembangan *e-commerce* juga belum dibarengi kemampuan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan *e-commerce* tersebut. Pengembangan usaha pada sektor jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif juga masih perlu didorong untuk menjadi kekuatan pertumbuhan ekonomi yang baru. Pariwisata sebagai salah satu penyumbang ekonomi daerah dan pendapatan daerah, perlu didorong terutama bagaimana menyiapkan prasarana dan sarana pariwisata pada destinasi wisata unggulan, konektivitas antar destinasi wisata,

promosi wisata, dan penyiapan sumberdaya manusia. Pengembangan pariwisata Jawa Tengah mempertimbangkan potensi geografis dan sosiografis yang dimiliki Jawa Tengah dan diharapkan dapat dikembangkan menjadi daya tarik serta memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*) yang kuat. Pengembangan sektor pariwisata Jawa Tengah mestinya ditekankan pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan lingkungan hidup (*EcoSocio Tourism*), dengan memperhatikan kekhasan geografis dengan konteks zonasi pegunungan, laut, sungai, karts, danau, dan pantai, serta melalui berbagai koridor sektoral dan budaya, dengan kreativitas termasuk eduwisata. Pengembangan pariwisata juga diarahkan dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan serta didukung interkoneski antar desa, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, komunitas dan pelaku wisata.

c). Sektor Pertanian

Persoalan yang terjadi saat ini adalah sektor pertanian dari tahun ke tahun semakin menurun atas kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, persoalan lain adalah makin kurangnya minat angkatan kerja yang menekuni sektor pertanian, dan memilih untuk bekerja di sektor industri serta perdagangan. Hal tersebut didukung dengan semakin terbatasnya lahan pertanian karena meningkatnya permintaan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman dan industri. Persoalan sektor pertanian sudah seharusnya menjadi perhatian utama dalam pembangunan Jawa Tengah kedepan. Hal tersebut dikarenakan pertama, sebagian besar masyarakat Jawa Tengah bekerja di sektor pertanian, meskipun kecenderungannya semakin menurun dan yang tersisa adalah petani usia tua. Kedua, dinamika sektor pertanian masih terbatas karena penggunaan teknologi yang belum begitu maju. Ketiga, sebagian besar penduduk yang dikategorikan hidup dalam garis kemiskinan adalah masyarakat petani. Keempat, infrastruktur yang mendukung proses produksi dan pemasaran, seperti irigasi serta transportasi dan

komunikasi belum memadai. Kelima, terbatasnya akses pada informasi pasar. Sebagian besar petani belum memiliki atau menggunakan teknologi untuk pertukaran informasi tentang kebutuhan dan harga-harga komoditas di pasar. Kondisi tersebut kemudian pada akhirnya menyebabkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan rendah.

d). Investasi

Realisasi investasi Jawa Tengah membaik dari tahun ke tahun, namun pertumbuhannya belum cukup tinggi. Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa dan Bali, investasi di Jawa Tengah cenderung lebih kecil. Permasalahan investasi adalah pada belum optimalnya kecepatan pelayanan perijinan, promosi investasi yang belum optimal, jaminan keamanan dan kenyamanan investasi, informasi peluang investasi yang belum optimal, didukung dengan pelayanan birokrasi yang belum efisien dan penggunaan teknologi belum optimal. Selain itu juga, pertumbuhan dan persebaran investasi belum merata di Jawa Tengah khususnya di wilayah perbatasan barat dan timur, serta wilayah selatan.

Selain itu, isu penting terkait dengan ekonomi daerah adalah peran pemerintah provinsi dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang dapat dilihat dari kontribusi APBD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB. Kontribusi APBD Provinsi Jawa Tengah dalam waktu lima tahun terakhir terhadap konsumsi pemerintah pada PDRB mengalami peningkatan, dari 19,25 persen (2013) menjadi 25,22 persen (2017). Sedangkan peran APBD dalam pembentukan modal tetap bruto dalam lima tahun terakhir yang dilihat dari kontribusi belanja modal terhadap PMTB juga mengalami tren peningkatan, meskipun angkanya cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini berkorelasi dengan pertumbuhan PMTB yang relatif tetap, dimana belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum bisa berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan PMTB.

Namun demikian, kondisi perekonomian daerah yang stabil akan memberikan peluang kesempatan kerja dan kesempatan berwirausaha yang

semakin luas. Akan tetapi persoalan kualitas calon tenaga kerja dan tenaga kerja menjadi hal penting untuk diperhatikan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Jawa Tengah berdampak pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dengan dominasi pendidikan sekolah dasar pada usia angkatan kerja, dan pengangguran terbesar pada pendidikan SMK, diperlukan peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, program link and match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha, penguasaan teknologi dan inovasi, serta hasil litbang sebagai instrumen peningkatan perekonomian dan daya saing daerah. Kondisi ini berkaitan juga dengan kualitas dan daya serap tenaga kerja yang mampu bersaing dengan tenaga kerja daerah lain. Maka tantangan ke depan adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar kerja global.

4). Keberlanjutan Pembangunan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam

Isu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di mana 3 dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat.

Isu berkaitan dengan sumberdaya air di Jawa Tengah adalah penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih di Jawa Tengah, yang disebabkan oleh terganggunya kawasan tangkapan air/catchment area, pencemaran industri, eksploitasi air tanah oleh industri, dan pemanfaatan kawasan pesisir/mangrove untuk tambak. Kondisi ini menjadi ancaman bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam pengelolaan hutan, berbagai permasalahan masih terjadi seperti tekanan pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat, pencurian dan kebakaran hutan, kurang terpenuhinya kebutuhan hasil hutan berasal dari pengelolaan hutan berkelanjutan dan serta konflik satwa liar dengan masyarakat, serta pengelolaan hutan negara belum mampu memenuhi standar pengelolaan hutan lestari.

Persoalan penting lainnya terkait pengelolaan lingkungan adalah peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan jumlah timbunan sampah. Jika melihat dari sisi pelayanan persampahan secara total, tingkat pelayanannya masih rendah yaitu masih di bawah 30 persen. Sedangkan untuk tingkat pelayanan persampahan perkotaan sudah relatif tinggi yaitu 70-78 persen. Dari sejumlah 58 TPA yang ada, kondisi sebagian TPA telah melebihi usia pakai dengan sistem pengelolaannya 22 persen TPA menggunakan sistem controlled landfill dan sisanya masih menggunakan sistem open dumping.

Selain itu, isu lainnya adalah masih maraknya kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) yang berpotensi merusak lahan. Kondisi ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur, sementara disisi lain perijinan belum banyak dipahami oleh masyarakat karena berpindahnya kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi. Sehingga perlu ditingkatkan lagi pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tanpa ijin yang melibatkan penegak hukum.

Sedangkan dari sisi kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup juga dirasa masih rendah antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya, pengelohan lahan yang kurang memperhatikan konservasi tanah dan air, serta kurangnya budaya hemat energi dan air.

Persoalan sumberdaya daya alam yang juga tidak kalah penting adalah kerusakan sumber daya pesisir. Kondisi tersebut dapat dilihat dari adanya abrasi dan sedimentasi akibat rusaknya ekosistem mangrove karena beberapa varietas mangrove tidak bisa beradaptasi, konflik kewenangan pengelolaan kawasan pesisir (pusat, provinsi, kabupaten/kota), dan konflik

sosial terkait pengkaplingan lahan tambak yang menyulitkan pengelolaan, dan kurangnya SDM yang terlibat baik masyarakat dan aparatur. Pemanfaatan pesisir yang tidak sesuai dengan peruntukannya (sebagian wilayah dimiliki oleh masyarakat/pihak tertentu dengan hak ijin guna pakai), serta adanya penambangan di wilayah pesisir dan pantai (pasir laut) juga menjadi persoalan yang cukup penting untuk diperhatikan kedepan.

Akibat dari pengelolaan sumber daya alam yang kurang memperhatikan keberlanjutannya adalah semakin meningkatnya kejadian bencana. Jawa Tengah merupakan daerah dengan risiko bencana yang cukup tinggi dilihat dari frekuensi kejadian bencana yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kejadian bencana yang sering terjadi antara lain tanah longsor, banjir, rob, kebakaran hutan dan kekeringan yang disebabkan perubahan iklim global. Berbagai permasalahan yang harus ditangani kedepan antara lain rendahnya pelaksanaan kegiatan konservasi di wilayah rawan longsor dan wilayah yang memiliki potensi sumber air, kurangnya SDM dan prasarana sarana dalam penanganan bencana, dan perilaku masyarakat (buang sampah sembarangan, penggundulan hutan). Selain itu, masih kurangnya pengetahuan mitigasi/deteksi dini bencana oleh masyarakat dan tanggap bencana masyarakat untuk mengantisipasi bencana tsunami, banjir, kekeringan, longsor, belum optimalnya koordinasi dan integrasi antar sektor, lintas sektor/lintas bidang dan lintas wilayah, serta kurangnya dukungan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan, dan kurangnya keterlibatan masyarakat.

5). Kedaulatan Pangan dan Energi

Produksi pertanian akan mempengaruhi pada penyediaan pangan bagi masyarakat. Perkembangan produksi pertanian di Jawa Tengah saat ini secara statistik mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat utamanya beras, bahkan mampu berkontribusi terhadap produksi beras nasional. Namun tidak demikian dengan produksi pertanian lainnya seperti kedelai dan jagung, yang masih harus ditingkatkan kedepan. Disisi lain, arus bahan pangan impor semakin terbuka dan tidak dibarengi dengan kebijakan mekanisme pengamanan yang kuat dari pemerintah. Menyempitnya Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) karena desakan kebutuhan lahan untuk industri dan permukiman, serta makin menurunnya tenaga kerja di sektor pertanian akan berpotensi menurunnya persediaan dan produksi pangan.

Isu lain adalah terkait sistem distribusi pangan, dimana pemerintah harus mampu memfasilitasi kemudahan akses pasar produk-produk pangan lokal yang sehat, yang terbentuk dalam satu sistem logistik daerah. Hal tersebut juga harus didukung dengan penyediaan jaringan informasi tepat guna hingga level desa guna memudahkan akses informasi pasar dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan pertanian lokal. Selain itu, penting juga untuk penguatan jaringan pergudangan melalui sistem resi gudang, penguatan kelembagaan koperasi pertanian melalui pendampingan secara berkelanjutan, dan penyediaan infrastruktur sebagai sarana distribusi pangan, kesemuanya harus berbasis masyarakat.

Tingkat keberagaman konsumsi pangan masyarakat juga masih menjadi isu penting dalam kedaulatan pangan. Melihat skor Pola Pangan Harapan dibawah angka 100 dan cakupan konsumsi masyarakat Jawa Tengah tertinggi adalah beras, bisa digambarkan bahwa konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah belum beragam. Hal tersebut berkaitan dengan budaya pangan masyarakat pada umumnya, yang memiliki ketergantungan pada beras. Mutu dan keamanan pangan juga harus tetap diperhatikan, karena saat ini mulai banyak ditemukan produk pangan yang diindikasikan tidak terjamin mutu dan keamanannya. Satu tantangan lain adalah bagaimana menyiapkan produk pangan kita berorientasi ekspor, dan mampu bersaing di pasar global nasional, baik produk pangan mentah maupun olahan dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi petani.

Isu lain adalah terkait dengan kedaulatan energi. Kebutuhan energi masyarakat yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan pemakaian energi menunjukkan masih adanya kecenderungan yang sama sebagaimana dialami di tingkat nasional, yaitu ketergantungan terhadap sumber energi fosil, yang potensinya semakin lama semakin berkurang. Komposisi pemakaian energi sampai dengan tahun 2017 berdasarkan

Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) adalah minyak bumi 39,76 persen, gas bumi 13,51 persen, batubara 37,16 persen, dan Energi Baru Terbarukan (EBT) 9,67 persen. Dalam dokumen RUED Provinsi Jawa Tengah diharapkan sampai dengan tahun 2050 terjadi peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 28,82 persen, sehingga akan mengurangi ketergantungan pemanfaatan energi fosil.

Tantangan pemenuhan energi di Jawa Tengah kedepan adalah penyediaan energi untuk industri, perlunya penguatan kehandalan sistem dan sistem pasokan bagi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam upaya mendorong investasi, serta pemanfaatan energi baru terbarukan yang masih rendah saat ini.

Permasalahan lainnya adalah terkait pelayanan energi (listrik dan migas) yang masih terbatas, belum merata dan optimal serta belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan dari potensi energi lokal setempat. Rasio elektrifikasi Jawa Tengah sampai dengan bulan Agustus tahun 2018 sebesar 98,15 persen. Masih terdapat 1,85 persen kepala keluarga (KK) belum berlistrik yang sebagian besar berasal dari rumah tangga miskin dan terdapat di wilayah pedesaan terpencil. Pemenuhan tersebut akan dilakukan melalui sambungan listrik murah bagi rumah tangga miskin.

Dalam rangka kehandalan penyediaan listrik beberapa upaya akan dilakukan antara lain dengan pengembangan jaringan listrik pedesaan yang sudah ada dengan *upgrading*, serta mengembangkan sumber energi baru terbarukan seperti mikro hidro, solar cell, dan panas bumi. Pengembangan potensi energi baru terbarukan juga masih mengalami banyak kendala antara lain teknologi yang digunakan masih mahal, efisiensinya masih rendah, potensi energi yang ada biasanya bersifat lokal sehingga pemanfaatannya juga oleh masyarakat setempat, padahal biasanya ketersediaan potensi pada wilayah dengan kepadatan penduduk yang jarang, dan belum optimal kelembagaannya.

Budaya hemat energi di masyarakat juga masih perlu digalakkan lagi. Upaya pemerintah daerah untuk mendorong gerakan budaya hemat energi

telah dilakukan dengan mengadakan kompetisi hemat energi bagi kantor pemerintah kabupaten/kota dan sekolah-sekolah menengah atas/kejuruan yang telah dilakukan sejak tahun 2014. Provinsi Jawa Tengah sendiri telah menjadi contoh pengelolaan hemat energi di tingkat nasional 5 (lima) tahun berturut-turut.

6). Kesenjangan Wilayah

Isu lainnya bukan hanya tentang daya saing ekonomi, namun juga ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan merata. Wilayah Jawa Tengah saat ini perkembangannya belumlah merata, yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson sebesar 0,62 di tahun 2016. Selain itu masih cukup banyak kabupaten yang masuk kategori relatif tertinggal dibanding kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota maupun antara kota-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan.

Untuk itu membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, transportasi kota-desa, pergantian antar moda, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa. Penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan, dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai (termasuk revitalisasi kereta api antar kota), jaringan komunikasi, dan jaringan energi menjadi penting.

Untuk mendukung perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah juga diperlukan rencana pengembangan/grand desain infrastruktur perhubungan diantaranya meliputi pengembangan pelabuhan utama di wilayah utara Jawa Tengah yang setara dengan Pelabuhan Tanjung Perak, dan pengembangan pelabuhan pengumpul di selatan Jawa yang dilengkapi dengan kapal logistik ke Indonesia Bagian Timur, serta pengembangan bandara sebagai hub/transit internasional.

7). Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima.

Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Dalam rangka mempertahankan kinerja akuntabilitas daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus meningkatkan kinerja, yang dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten.

Isu yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah salah satunya adalah tentang kemandirian fiskal. Dari tingkat kontribusi PAD dan DBH Provinsi Jawa Tengah terhadap pendapatan daerah, Jawa Tengah termasuk daerah yang mandiri. Namun demikian, dari tren selama lima tahun terakhir diketahui bahwa kemampuan fiskal daerah Jawa Tengah yang dilihat dari kontribusi PAD dan DBH terhadap pendapatan daerah cenderung menurun. Kondisi tersebut menggambarkan dua hal, yaitu pertama adalah belum optimalnya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD di Provinsi Jawa Tengah. Sumber-sumber PAD yang ada selama ini

(kondisi eksisting) sepertinya sudah tidak lagi mampu membiayai kenaikan beban belanja APBD Provinsi Jawa Tengah yang terus meningkat setiap tahunnya. Yang kedua adalah adanya kenaikan secara signifikan beban belanja APBD Provinsi Jawa Tengah yang relatif memberikan tekanan pembiayaan APBD. Implikasinya adalah pada kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga kelangsungan pelayanan pemerintahan, umum sekaligus pembangunan di daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari kelembagaan tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

Sedangkan dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah selama 5 (lima) tahun ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh elemen masyarakat Jawa Tengah. Aspek kondusivitas wilayah menjadi prasyarat penting dan strategis dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan program-program pembangunan di Jawa Tengah. Penciptaan kondusivitas wilayah ini juga diharapkan mampu mewujudkan iklim sejuk untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, meningkatkan perlindungan bagi kebebasan sipil masyarakat, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang harmonis dari dimensi ketertiban sosial.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari; Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Sejahtera*, adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.
- b. *Berdikari*, merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu, berdikari menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, baik sumberdaya alam, manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan sumberdaya yang berasal dari luar merupakan tambahan apabila diperlukan.
- c. Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari dilandasi semangat dan nilai utama **"Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"**. Nilai ini dimanifestasi dalam sikap, tindakan, dan laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama mencapai kesejahteraan yang berdikari.

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan *guyub* untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota.

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan.

Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, Gubernur Jawa Tengah membuat perjanjian kinerja Tahun 2020 yang memuat Target Kinerja Tujuan dan Sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 dan merupakan penjabaran dari visi-misi Gubernur Jawa Tengah. Lampiran Perjanjian Kinerja Gubernur Jawa Tengah Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.5. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Gubernur

NO	URAIAN IKU	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase penurunan konflik SARA	%	15
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77,00
3	Angka Kemiskinan	Angka	13,40
4	Indeks Gini	Angka	0,34
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,75
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,30
7	Inflasi	%	3,00
8	PDRB per kapita	Juta Rupiah	40,30
9	Indeks Williamson	Angka	0,59
10	Nilai Tukar Petani	Angka	102,42
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,98
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	89,00

13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	66,87
----	---	-------	-------

Strategi Pembangunan Daerah

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut.

1. Membangun Masyarakat Jawa Tengah yang Religius, Toleran dan Guyup untuk Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia

Makna yang terkandung dalam misi ini adalah bagaimana menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, kerukunan antar umat beragama, pluralisme, tanpa ada konflik sosial maupun agama bahkan konflik SARA, dan tercipta kohesi sosial masyarakat yang baik. Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu persentase penurunan konflik bernuansa SARA, melalui penciptaan kohesi sosial di masyarakat, maka beberapa strategi yang akan dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi yaitu:

- a) Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik;
- b) Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan fokus pada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.

Salah satu program unggulan yang mendukung pada pencapaian tujuan dan sasaran misi ini adalah pelatihan tentang

demokrasi dan pemilu, yang merupakan salah satu bentuk implementasi program sekolah tanpa sekat. Program tersebut merupakan bagian dari upaya edukasi politik bagi masyarakat yang mengajarkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan. Edukasi politik bagi masyarakat juga akan mendorong inisiatif masyarakat untuk mampu menyelesaikan permasalahan, menjawab tantangan dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada serta menegaskan bahwa Negara milik rakyat, dikelola oleh rakyat dan diperuntukkan bagi kepentingan rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan untuk memperkuat landasan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang semakin religius, toleran, dan guyup, juga dilakukan upaya peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah, dan guru agama. Program ini adalah sebagai media komunikasi antar agama dan penghayat untuk membangun hubungan yang saling menyejahterakan menuju kehidupan yang saling menghormati, serta terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi.



Gambar 1.4.
Skema Strategi Pencapaian Misi 1

2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota

Selama tahun 2013-2018 capaian reformasi birokrasi yang paling mendasar adalah berhasil menempatkan rakyat pada tempat yang terhormat dimana ruang rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, penentuan arah dan pengawasan pembangunan menjadi semakin terbuka. Pada gilirannya partisipasi masyarakat mampu mendorong reformasi birokrasi yang semakin berpihak kepada kepentingan publik dan tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat secara dinamis. Birokrasi telah ditempatkan sebagai subyek reformasi yang mendapatkan manfaat (benefit) dari reformasi itu sendiri, serta juga telah berhasil meningkatkan semangat dan kenyamanan bekerja, kemauan bekerjasama, transparansi, dan akuntabel.

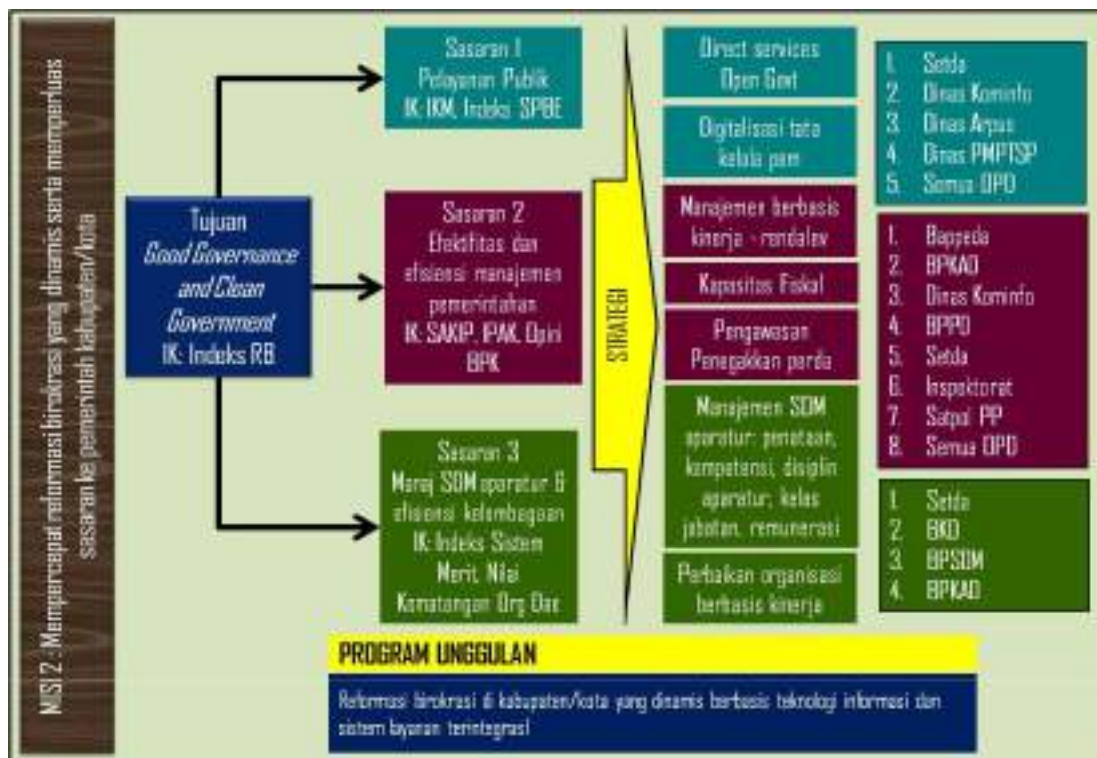
Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi di Jawa Tengah tetap dilandaskan pada nilai utama tetep mboten korupsi, mboten ngapusi, yang diarahkan pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis dan terbuka; efektivitas, efisiensi dan akutabilitas manajemen pemerintahan; serta efisiensi kelembagaan, dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik. Cakupan penguatan reformasi birokrasi tidak hanya pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun juga semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Misi kedua ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government), dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu: 1) meningkatnya kualitas pelayanan publik; 2) meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan; dan 3) meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct services*), serta membangun pemerintahan yang terbuka (*open government*) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik antara lain melalui kunjungan lapangan (*roadshow*);
- b. meningkatkan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan), dengan memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (e-government), dan meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunaannya;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui: pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif; penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (SPIP) secara baik, perkuatan kapabilitas APIP dari sisi *quality assurance* dan *consulting partner*, serta pengendalian produk hukum dan penegakkan perda dengan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum dan penindakan produk hukum daerah;
- d. mewujudkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik, melalui: 1) pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN; pengembangan sistem penilaian kinerja, penerapan sistem renumerasi, penataan ASN; penyusunan kelas jabatan, evaluasi jabatan, serta pemetaan nilai jabatan; penerimaan pegawai secara transparan dan akuntabel, promosi jabatan secara terbuka dengan talent scouting (penelusuran bakat), serta mutasi ASN dilakukan dengan dasar merit sistem secara transparan, obyektif dan akuntabel; penegakan

disiplin aparatur; serta pengembangan jabatan fungsional tertentu;
b) perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang tidak hanya diukur dari hasil (output) tetapi juga dampak (outcome) dan didukung perbaikan tata laksana organisasi.

Pencapaian tujuan dan sasaran misi kedua ini didukung dengan program unggulan reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi. Program ini ditujukan tidak hanya untuk pemerintah provinsi namun juga diarahkan untuk pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Karena keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya sampai pada tataran pemerintah provinsi tetapi juga hingga level pemerintah kabupaten/kota. Upaya yang dilakukan pemerintah provinsi antara lain adalah koordinasi, pembinaan, dan advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota terkait dengan penerapan reformasi birokrasi, terutama mendorong penerapan teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi di kabupaten/kota.



Gambar 1.5.
Skema Strategi Pencapaian Misi 2

3. Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat dan Membuka Lapangan Kerja Untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran

Penurunan kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2018 merupakan penurunan tertinggi selama kurun waktu lima tahun, bahkan menjadi provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi di Indonesia. Penurunan ini juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil meskipun tidak tumbuh tinggi sebagaimana provinsi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah semakin berkualitas dan inklusif.

Untuk itu, pembangunan ekonomi Jawa Tengah lima tahun kedepan juga didorong untuk semakin inklusif dan berkualitas. Artinya bahwa pembangunan ekonomi Jawa Tengah diarahkan untuk semakin banyak melibatkan masyarakat utamanya pelaku ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah, dan terintegrasi dengan usaha besar, sehingga diharapkan masyarakat akan mendapatkan manfaat atas kontribusi mereka. Kapabilitas individual ataupun kelompok masyarakat akan semakin meningkat dan merata secara bersama-sama sehingga akan mempersempit kesenjangan antar pelaku ekonomi. Disisi lain, pembangunan ekonomi ke depan juga harus tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial dan budaya yang diukur dari nilai-nilai sosial, kearifan hidup bersama alam, kelembagaan sosial dan budaya hidup masyarakat.

Dengan pembangunan ekonomi yang semakin berkualitas dan inklusif, diharapkan akan berdampak pada percepatan penurunan kemiskinan di Jawa Tengah selama lima tahun ke depan. Upaya tersebut diperkuat dengan dukungan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk bekerja bersama dan gotong royong dalam mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah. Dalam rangka pencapaian kondisi tersebut, maka strategi yang akan dilakukan sebagai berikut.

Tujuan kesatu adalah menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah secara merata, dengan sasaran meliputi: 1) meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan

kelompok rumah tangga dua desil terbawah serta kelompok rentan lainnya; dan 2) menurunnya pengangguran terbuka. Strategi yang dilakukan adalah:

- a. Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya, dengan upaya diantaranya:
 - 1). meningkatkan akses pendidikan berupa Beasiswa Siswa Miskin (BSM), penyelenggaraan SMK Negeri *Boarding School*, penyelenggaraan SMK Negeri *Semi Boarding* di kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi, Sekolah Tanpa Sekat, fasilitasi uji kompetensi siswa SMK, pemantapan pendidikan karakter, serta vokasi bidik miskin;
 - 2). peningkatan cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, pola hidup bersih dan sehat dan rumah sakit tanpa dinding;
 - 3). stimulan lumbung pangan pada daerah rawan pangan dan pemberian bantuan sumber pangan lainnya;
 - 4). bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni (RSLH) dan perbaikan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh termasuk diantaranya air bersih, sanitasi, dan listrik. Bantuan stimulan RSLH untuk menumbuhkan kembali gotong royong masyarakat; memperluas akses pembiayaan; serta sinergi penanganan dengan pusat, provinsi, kabupaten/kota, CSR, Baznas, dan lainnya;
 - 5). pemberian Kartu Jateng Sejahtera, dan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS melalui peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, pemberian bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin tidak produktif dan terlantar, penyiapan bimbingan sosial bagi fakir miskin, serta peningkatan peran PSKS dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial;

- 6). kepemilikan dan kemudahan perolehan dokumen administrasi kependudukan;
 - 7). meningkatkan penggunaan MKJP melalui advokasi kepada masyarakat; kemitraan dengan perusahaan, TNI, Polri, dan ormas, serta dengan upaya pengembangan Kampung KB.
- b. Penguatan *sustainable livelihood* (keberlanjutan ekonomi masyarakat) melalui:
- 1). Keperantaraan akses masyarakat terhadap modal dan jaminan kredit modal, teknologi, pasar, dan manajemen usaha, diantaranya dengan menyambungkan informasi tentang program pembiayaan/kredit (KUR/Kredit Usaha Rakyat, Mitra Jateng 25, Ultra Mikro/UMi) bagi KUMKM;
 - 2). Pengembangan startup wirausaha baru melalui pelatihan keterampilan usaha produktif berbasis sumber daya lokal/permintaan pasar/wira-usaha pemula dan pelatihan penumbuhan wirausaha baru termasuk bagi pemuda, perempuan rentan dan penumbuhan ekonomi pesantren (ekotren);
 - 3). Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat terutama pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, industri kreatif dan usaha kecil termasuk peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam rumah tangga (ekonomi rumah tangga); peningkatan peran dan produktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes); peningkatan peran dan keaktifan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Tri Bina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia).
- c. Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui peningkatan dan perluasan pengelolaan basis data, dan basis spasial dengan pengelolaan dan pemanfaatan Basis Data Terpadu; penanggulangan kemiskinan

berbasis komunitas, didukung pendampingan yang kontinyu, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan; pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat miskin yang belum memperoleh intervensi program penanggulangan kemiskinan; peningkatan peran PSKS dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial; serta mengkonsolidasikan dan mensinergikan program kerja seluruh pemangku kepentingan dalam satu lembaga Satuan Tugas Pengentasan Kemiskinan.

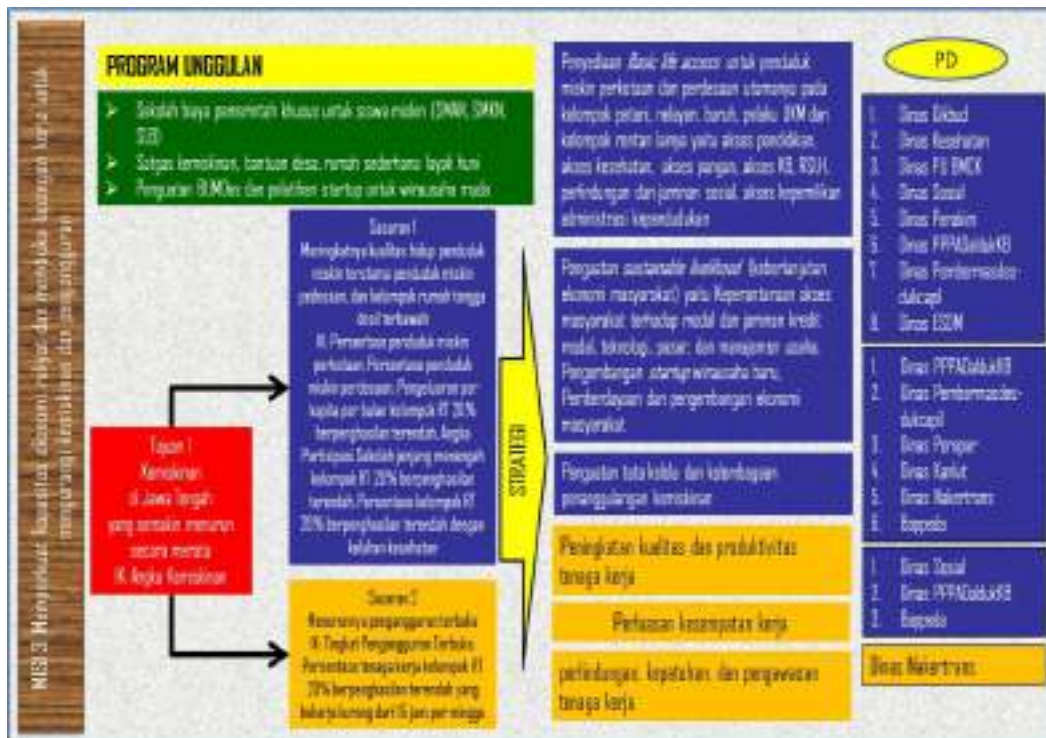
d. Menurunkan pengangguran melalui upaya:

- 1). peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar memiliki kompetensi, kualifikasi, daya saing, dan jiwa kewirausahaan tinggi, yang *link and match* dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan perekonomian kedepan melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja, dan penguatan program *link and match* melalui pengembangan dan penyelarasan kurikulum SMK dengan industri Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI);
- 2). perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan ramah bagi investasi utamanya investasi industri padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan industri dengan supply chain dari UMKM lokal, membuka akses pasar tenaga kerja dan pelaksanaan padat karya pekerjaan umum;
- 3). peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja diantaranya melalui BPJS Ketenagakerjaan, dan perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak.

Strategi tersebut didukung dengan program unggulan daerah yaitu:

- a. Satgas kemiskinan, yang secara fungsional merupakan upaya penguatan tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk memastikan kebijakan, rencana program, kegiatan, dan

- sasaran penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana, terutama dalam hal pengelolaan data, perumusan masalah dan perumusan kebijakan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pelaporan penanggulangan kemiskinan;
- b. Bantuan desa, merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan prasarana dan sarana desa, pembangunan kawasan perdesaan, peningkatan ketahanan masyarakat desa, dan operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDes);
 - c. Rumah sederhana layak huni, dimaknai sebagai upaya perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi Rumah Tangga Miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dengan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin dengan dukungan keswadayaan dan sifat gotong royong dari masyarakat;
 - d. Penguatan BUMDes, melalui peningkatan peran, dan produktivitas BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa melalui lembaga keuangan milik desa;
 - e. Pelatihan startup untuk wirausaha muda, merupakan program daerah untuk mendorong penumbuhan jiwa kewirausahaan dan keterampilan bagi masyarakat terutama bagi kelompok pemuda, dan penganggur dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja;
 - f. Sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB), merupakan sekolah yang dikembangkan untuk anak sekolah dari keluarga miskin, yang pembiayaan operasionalnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara penuh.



Gambar 1.6.
Skema Strategi Pencapaian Misi 3 Tujuan 1

Tujuan kedua misi ketiga adalah menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan, dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai dengan kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah:

- Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, melalui:
 - Peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Kemampuan petani pada aspek *on-farm* dilakukan melalui penerapan teknologi berbasis kearifan lokal termasuk mekanisasi pertanian dan pengembangan pertanian organik. Selain itu untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian (*off-farm*), usaha tani diarahkan melalui pengolahan hasil pertanian potensi lokal kawasan perdesaan dan fasilitasi akses pemasaran serta permodalan;

2. Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani. Kelembagaan diarahkan untuk mengelola usaha pada skala lebih besar berbasis korporasi;
 3. Pengembangan kawasan pertanian dengan konsep "agriculture estate", yaitu pendampingan dan pengembangan usaha tani melalui integrasi usaha pertanian dari hulu sampai hilir berbasis kawasan sesuai dengan potensi lokal kawasan;
 4. Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya disertai upaya-upaya menjaga ketersediaan airnya.
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui:
1. Peningkatan kapasitas nelayan, jaminan kemudahan dan perlindungan bagi nelayan, peningkatan teknologi dan akses permodalan, serta asuransi nelayan;
 2. Peningkatan prasarana sarana perikanan tangkap dan air payau, melalui peningkatan fasilitas pelabuhan dan teknologi dalam penangkapan ikan;
 3. Peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah ikan;
 4. Perbaikan tata niaga perikanan.
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu, melalui legalisasi sertifikasi kayu dan perijinan industri primer pengolahan hasil hutan kapasitas lebih besar menuju 6.000 m³ dengan tetap memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung dan keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan dilakukan melalui perwujudan sistem logistik daerah yang menjamin ketersediaan terutama ketersediaan stok pangan yang ada di masyarakat, memperpendek rantai distribusi serta adanya pengelolaan stok melalui cadangan pangan dan stabilisasi harga, konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta mutu dan keamanan pangan segar.
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah melalui:
1. pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja, yang tersebar merata di seluruh wilayah Jawa Tengah;
 2. peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan hilirisasi industri melalui standarisasi produk dan inovasi produk;

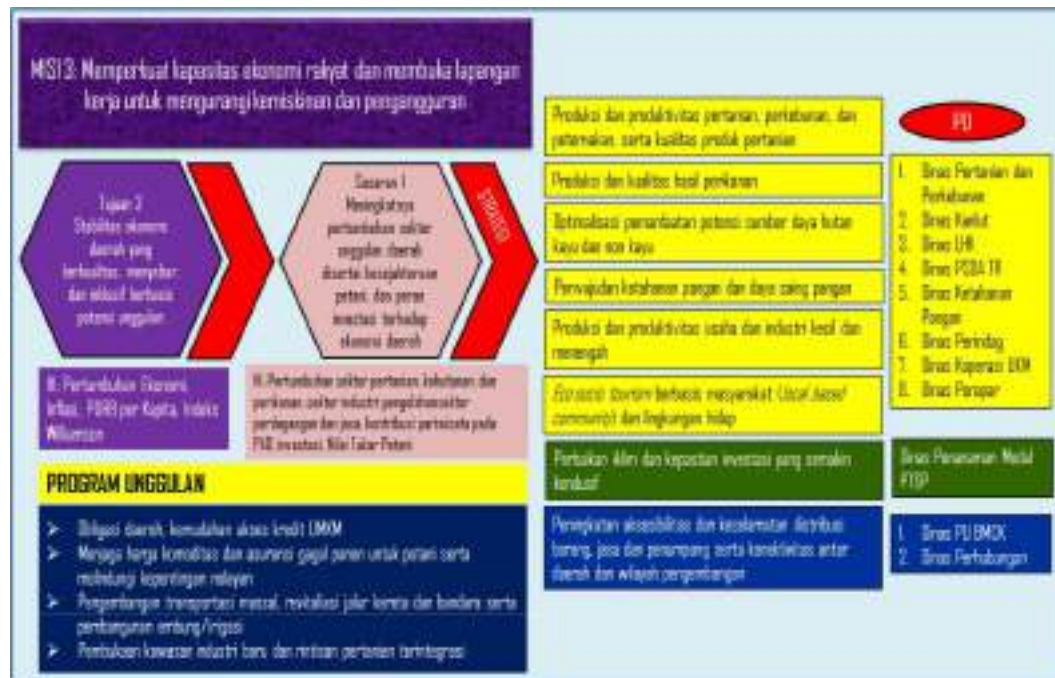
3. pengembangan inovasi teknologi produksi, agar tingkat efisiensi industri dapat menjadi lebih baik;
 4. penguatan industri kecil dan menengah yang mencakup didalamnya aspek modal, pemasaran, dan standarisasi produk melalui program pembiayaan/kredit (KUR/Kredit Usaha Rakyat, Mitra Jateng 25), program standarisasi produk yang dapat meningkatkan nilai tambah produk;
 5. pengembangan bahan baku industri substitusi impor melalui pengembangan industri yang menghasilkan produk antara yang digunakan sebagai bahan baku bagi industri lain;
 6. penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi dalam rangka mendukung pengembangan UMKM melalui peningkatan, pendampingan, pembinaan dan pengawasan dengan tujuan koperasi dan UMKM dapat berkembang dan berjalan baik;
 7. integrasi antar sektor pendukung urusan industri melalui keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*).
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah yaitu kekhasan geografis, yang dilakukan melalui pengembangan desa ekowisata sebagai upaya menyelaraskan pendekatan ekologi dan ekonomi. Disamping itu, juga dikembangkan Daya Tarik Wisata untuk mendukung koridor pariwisata Jawa Tengah, khususnya pada kawasan yang memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi melalui program pengembangan destinasi pariwisata dan program pengembangan pemasaran pariwisata. Pengembangan pariwisata perlu memperhatikan industri dan ekonomi kreatif dengan mengembangkan pariwisata sebagai ruang temu budaya masyarakat dan berdaya dukung hasil-hasil produksi masyarakat setempat. Hal ini diimplementasikan dengan strategi utamanya sebagai berikut:
1. Perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata;
 2. Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata;
 3. Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata;
 4. Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata;

5. Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata.
- g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif melalui: 1) Perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, dan tepat serta terbuka; 2) Pengembangan digital investment promotion; 3) Mendorong perwujudan investasi hijau; serta didukung dengan peningkatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dengan dunia usaha.
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan. Upaya yang akan dilakukan antara lain peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata, kawasan industri, pusat pertumbuhan, wilayah kemiskinan dengan fasilitasi pengembangan bandara, pelabuhan dan terminal; peningkatan jalan-jalan provinsi dan sinergi dengan jalan Nasional dan Kabupaten/Kota; konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan melalui pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan pada kawasan aglomerasi perkotaan diantaranya pada wilayah Kedungsepur, Barlingmascakeb, Subosukowonosraten, dan Purwo-manggung, serta pembangunan dan revitalisasi Terminal Tipe B; peningkatan jalan provinsi di daerah perbatasan dengan Jatim, Jabar, dan DIY; serta menghubungkan kawasan pengembangan industri dan pusat pertumbuhan baru di Barlingmascakeb, Purwomanggung, Bregasmalang, Kedungsapur, dan Banglor.

Program unggulan daerah yang mendukung pada tujuan kedua misi ketiga ini yaitu:

- a) Obligasi daerah, merupakan pembiayaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi di luar Pendapatan Asli Daerah;
- b) Kemudahan akses kredit UMKM merupakan program fasilitasi bagi UMKM untuk mendapatkan akses kredit dari perbankan;
- c) Menjaga harga komoditas yaitu program untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan dengan perlindungan harga dan menjamin pemasaran produk pertanian; intervensi dan penguasaan stok oleh pemerintah dengan membeli secara langsung produk pertanian dengan menugaskan BUMD sebagai operator; serta penguatan kelembagaan petani di tingkat desa;
- d) Asuransi gagal panen untuk petani merupakan upaya pemberian jaminan bagi petani dari risiko gagal panen akibat bencana alam, serangan hama penyakit dan gangguan lainnya;

- e) Melindungi kepentingan nelayan merupakan program untuk memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan dari risiko selama beraktifitas dan kecelakaan kerja, termasuk fasilitasi kepentingan dasar;
- f) Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara, yang dilakukan dengan melakukan pengembangan koridor angkutan umum massal berbasis jalan (BRT); pengelolaan BRT Trans Jateng dengan Sistem BLUD; fasilitasi peningkatan layanan KA Semarang-Solo; fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur kereta api diantaranya yang menghubungkan wilayah Kedungsepur dengan PSN Borobudur, wilayah pantura timur serta wilayah tengah; fasilitasi pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas wilayah;
- g) Pembangunan embung/irigasi dalam rangka menciptakan ketahanan air dan pemenuhan air baku guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan pangan, penyediaan air bersih bagi masyarakat, dan mendukung pengembangan kawasan industri;
- h) Pembukaan kawasan industri baru melalui afirmasi kebijakan tumbuhnya kawasan industri baru di perbatasan barat dan selatan, dalam mempercepat proses persebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
- i) Rintisan pertanian terintegrasi merupakan konsep integrasi vertikal hulu hilir, integrasi holistik, pertanian terintegrasi sektoral (mayor sektoral) dan sektor terintegrasi dalam pertanian (pertanian mayor), integrasi berbasis konsolidasi lahan (penerapan mekanisasi penuh), serta integrasi berbasis organisasi pertanian, yang dikembangkan antara lain melalui pengembangan *agriculture estate*, integrasi dibawah tegakan, *zero waste*, agrowisata, minapadi, dan pertanian organik.



Gambar 1.7.
Skema Strategi Pencapaian Misi 3 Tujuan 2

4. Menjadikan Rakyat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya, dan Mencintai Lingkungan

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan.

Tujuan pertama pada misi ini adalah membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan sasaran meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas; dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan meningkatnya akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- a) Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas melalui: a) peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah dengan program bantuan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus, baik sekolah negeri maupun swasta; b) peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan; c) peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; d) pengembangan kurikulum berbasis

skill, knowledge, attitude dan *learning culture*; e) penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; f) peningkatan literasi masyarakat; g) pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat. Strategi ini dilakukan dengan tetap mengarusutamakan gender dan anak, untuk dapat memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan anak di dibidang pendidikan;

- b) Meningkatkan upaya promotif, dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif, dan rehabilitatif, dengan upaya:
- 1) Peningkatan upaya penerapan paradigma sehat melalui optimalisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat/GERMAS dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); intervensi pencegahan dan penanganan *stunting*; peningkatan peran posyandu dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak; pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kesehatan di lingkungan masyarakat; dan mendorong pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) termasuk penuntasan *Open Defecation Free* (ODF); serta peningkatan peran dan keaktifan Tri Bina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia);
 - 2) Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan melalui standarisasi pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan di 35 kabupaten/kota; peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dengan pengembangan teknologi informasi di 7 RSUD/RSJD; peningkatan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat dengan kegiatan bakti sosial dan aksi penanganan cepat termasuk penyediaan RS Lapangan dalam rangka mendukung penanggulangan bencana dan Kejadian Luar Biasa sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - 3) Peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan, serta sumberdaya kesehatan melalui pembangunan rumah sakit rujukan khusus daerah, serta pengembangan rumah sakit

- rujukan kanker; peningkatan sarana prasarana kesehatan dan farmasi; serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
- 4) Pembudayaan/permasalahan olahraga kepada masyarakat, termasuk melalui sekolah yang didukung dengan peningkatan prasarana sarana olahraga sekolah.
- c) Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak melalui: a) pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak; b) pengurangan risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak; c) penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan sesuai standar dan terintegrasi dengan layanan dasar, program perlindungan sosial, serta penerapan kebijakan di sekolah.

Program unggulan daerah yang sejalan dengan strategi pencapaian tujuan tersebut yaitu:

- a. Sekolah tanpa sekat merupakan integrasi pendidikan formal, informal, dan non formal kepada seluruh masyarakat yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi serta sebagai perwujudan bahwa urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat, antara lain melalui penerapan pendidikan terjangkau bagi seluruh siswa SMA/SMK dan SLB;
- b. Pelatihan tentang gender merupakan salah satu bentuk implementasi program sekolah tanpa sekat, yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gender, termasuk kepada pendidik dan anak usia sekolah;
- c. Magang gubernur untuk siswa SMA/SMK merupakan salah satu bentuk implementasi program sekolah tanpa sekat, yang diperuntukkan bagi siswa untuk dapat mengikuti aktifitas gubernur dalam menjalankan tugasnya dalam waktu tertentu, dan diharapkan siswa dapat mengetahui dinamika penyelenggaraan pemerintahan secara nyata yang dijalankan oleh pejabat publik;
- d. Pendidikan anti korupsi, juga merupakan salah satu bentuk program sekolah tanpa sekat, yang dilakukan melalui internalisasi

- kurikulum pemahaman tentang korupsi dan dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- e. Bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel dengan pemberian stimulan Bantuan Operasional Sekolah kepada SMA/SMK/SLB Swasta dan bantuan lembaga pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jenjang pendidikan dan unsur pendidikan;
 - f. Rumah sakit tanpa dinding diharapkan untuk mengubah paradigma kesehatan dari kuratif ke promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan ini menempatkan tenaga medis jemput bola untuk mendatangi pasien; penyediaan ambulan; bidan, perawat, dokter datang ke orang sakit. Program ini dilakukan dengan memastikan pemerataan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kesehatan dasar terutama di wilayah dengan angka kematian dan angka kesakitan tinggi. Program ini juga disamping mempercepat pelayanan sekaligus memberikan penyuluhan kesehatan sesuai dengan kasus-kasus yang ditangani, juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat;
 - g. Festival seni dilakukan dengan mendorong kegiatan-kegiatan seni, pengembangan dan penguatan hubungan kebudayaan melalui rembug dan pertukaran kesenian dan budaya, penyelenggaraan festival dan gelar seni budaya dengan masyarakat dan provinsi lain maupun dengan masyarakat negara lain, serta pengembangan ekonomi kreatif untuk penciptaan nilai tambah yang berbasis kreativitas pada seni pertunjukan dan seni rupa;
 - h. Rumah kebudayaan diarahkan pada penyediaan ruang bersama yang terbuka dan mudah dijangkau untuk penggiatan, pengembangan dan pemajuan daya kritis, kreatif, produktif dan apresiatif terhadap hasil kerja dan temuan karya yang berakar pada nilai budaya masyarakat Jawa Tengah;

- i. Pengembangan infrastruktur olahraga, dilakukan dalam rangka meningkatkan kebugaran masyarakat serta meningkatkan prestasi olahraga Jawa Tengah.

Tujuan kedua dalam misi ini adalah mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan dengan sasaran pertama yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan dengan:

- a. pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan melalui pendidikan lingkungan bagi masyarakat mulai usia dini, dan pengembangan budaya hemat energi dan hemat air;
- b. konservasi lingkungan melalui rehabilitasi hutan dan lahan; peningkatan konservasi sumberdaya air, peningkatan pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pengendalian banjir; rehabilitasi kawasan mangrove dan terumbu karang; serta konservasi energi dan audit energi;
- c. pemulihan kembali lingkungan melalui penanganan limbah industri dan rumah tangga; peningkatan perijinan dan pemantauan lingkungan; serta penegakkan hukum.

Sasaran kedua yang ingin dicapai adalah meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana, yang dilakukan dengan strategi meningkatkan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana dengan upaya diarahkan pada pengembangan masyarakat tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis masyarakat, pengurangan risiko bencana lintas sektor, identifikasi daerah rawan bencana, dan inventarisasi daerah terdampak bencana.

Program unggulan daerah yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu program kepedulian lingkungan. Program ini mendorong peningkatan kesadaran bahwa manusia menjadi bagian yang tidak terpisah dari lingkungan sekaligus berusaha untuk berbuat sebaik mungkin bagi lingkungannya. Sikap kepedulian lingkungan ini harus dibangun sebagai salah satu nilai karakter

masyarakat Jawa Tengah, yang akan mendukung upaya konservasi dan pemulihan kembali fungsi lingkungan. Ditambah dengan peningkatan masyarakat tangguh bencana sebagai salah satu upaya pengurangan risiko bencana agar terwujud keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan.



Gambar 1.8.
Skema Strategi Pencapaian Misi 4

Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan jangka menengah Jawa Tengah tertuang dalam tabel berikut:

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Tabel 1.6. Visi: MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI "Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia	Membangun masyarakat Jawa Tengah semakin religius, toleran, dan guyup	Terciptanya kohesi sosial masyarakat	Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman dan toleransi
			Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal
Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (<i>direct services</i>), serta membangun pemerintahan yang terbuka (<i>open government</i>) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan)
			Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: a) pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu; b) penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; c) peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (SPIP) secara baik, perkuatan kapabilitas APIP dari sisi <i>quality assurance</i> dan <i>consulting partner</i> , serta pengendalian produk hukum dan penegakkan perda dengan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum dan penindakan produk hukum daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Mewujudkan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya, melalui: a) pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN; pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan ASN, penataan ASN; penyusunan kelas jabatan, evaluasi jabatan, serta pemetaan nilai jabatan; penerimaan pegawai secara transparan dan akuntabel, promosi jabatan secara terbuka; penegakan disiplin aparatur; serta pengembangan jabatan fungsional tertentu; b) perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja dan didukung perbaikan tata laksana organisasi
Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah secara merata	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah	Penyediaan <i>basic life access</i> untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan, pada kelompok petani, nelayan, buruh, dan pelaku UKM, meliputi: a) Akses pendidikan, kesehatan, dan pangan; b) Akses rumah sederhana dan lingkungan kawasan permukiman layak huni termasuk air bersih, sanitasi, dan listrik; c) Perlindungan, dan jaminan sosial; d) Kepemilikan administrasi kependudukan; e) Akses KB.
			Penguatan <i>sustainable livelihood</i> (keberlanjutan ekonomi masyarakat) melalui: a) Keperantaraan akses masyarakat terhadap modal dan jaminan modal, teknologi, pasar, dan manajemen usaha; b) Pengembangan <i>startup</i> wirausaha baru; c) Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
			Penguatan kelembagaan, basis data, basis spasial, berbasis komunitas, pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan, peningkatan peran PSKS, serta mengkonsolidasikan dan mensinergikan program kerja seluruh pemangku kepentingan dengan pembentukan Satuan Tugas Pengentasan Kemiskinan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Menurunnya pengangguran terbuka	Menurunkan pengangguran melalui upaya: a) peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar memiliki kompetensi, kualifikasi, serta berdaya saing tinggi dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja b) perluasan kesempatan kerja; dan c) peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja
	Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, utamanya melalui: a) Peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Kemampuan petani pada aspek <i>on-farm</i> dilakukan melalui penerapan teknologi berbasis kearifan lokal termasuk mekanisasi pertanian dan pengembangan pertanian organik. Selain itu untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian (<i>off-farm</i>), usaha tani diarahkan melalui pengolahan hasil pertanian potensi lokal kawasan perdesaan dan fasilitasi akses pemasaran serta permodalan; b) Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani. Kelembagaan diarahkan untuk mengelola usaha pada skala lebih besar berbasis korporasi; c) Pengembangan kawasan pertanian dengan konsep "<i>agriculture estate</i>", yaitu pendampingan dan pengembangan usahatani melalui integrasi usaha pertanian dari hulu sampai hilir berbasis kawasansesuai dengan potensi lokal kawasan; d) Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya disertai upaya-upaya menjaga ketersediaan airnya Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui: a) Peningkatan kapasitas nelayan, jaminan kemudahan dan perlindungan bagi nelayan, melalui peningkatan kapasitas SDM

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			nelayan, peningkatan teknologi dan akses permodalan serta asuransi nelayan; b) Peningkatan prasarana sarana perikanan tangkap dan air payau, melalui peningkatan fasilitas pelabuhan dan teknologi dalam penangkapan ikan; c) Peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah ikan; d) Perbaikan tata niaga perikanan
			Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu, melalui legalisasi sertifikasi kayu dan perijinan industri primer pengolahan hasil hutan kapasitas lebih besar sama dengan 6.000 m3
			Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah yang menjamin ketersediaan, distribusi, cadangan pangan, stabilitas harga dan pasokan pangan, konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta mutu dan keamanan pangan
			Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah melalui: a) pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja; b) peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan hilirisasi industri; c) pengembangan inovasi teknologi produksi; d) penguatan industri kecil dan menengah yang mencakup didalamnya aspek modal, pemasaran, dan standarisasi produk; e) pengembangan bahan baku industri substitusi impor; f) penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi mendukung pengembangan UKM; dan g) integrasi antar sektor pendukung urusan industri
			Peningkatan <i>eco socio tourism</i> berbasis masyarakat (<i>local based community</i>) dan lingkungan hidup melalui: a) Perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata; b) Peningkatan promosi wisata; c) Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata; d) Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata; e) Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui: a) Perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, dan tepat; b) Pengembangan digital investment promotion; serta c) Mendorong perwujudan investasi hijau.
			Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan
Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas melalui: a) peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah dengan program bantuan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus, baik sekolah negeri maupun swasta; b) peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan; c) peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; d) pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude dan learning culture; e) penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; f) peningkatan literasi masyarakat; g) pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, melalui: a) Peningkatan upaya penerapan paradigma sehat; b) Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan masyarakat; c) Peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan, serta sumberdaya kesehatan; d) Pembudayaan/permasalahan olahraga.
		Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Meningkatkan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak melalui: a) Pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak; b) pengurangan risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak; c) penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan sesuai standar dan terintegrasi dengan layanan dasar, program perlindungan sosial, serta penerapan kebijakan di sekolah

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
	Mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan	Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui: a) rehabilitasi hutan dan lahan; b) peningkatan konservasi sumberdaya air, konservasi daerah hulu dan tangkapan air berbasis pemberdayaan masyarakat; c) peningkatan pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, dan pengendalian banjir; d) penanganan limbah industri dan rumah tangga; e) peningkatan perijinan dan pemantauan lingkungan, serta penegakan hukum; f) pendidikan lingkungan bagi masyarakat mulai masyarakat usia dini, pengembangan budaya hemat energi dan hemat air; g) konservasi energi dan audit energi; h) rehabilitasi kawasan mangrove dan terumbu karang
		Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Meningkatkan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana dengan upaya diarahkan pada pengembangan masyarakat tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis masyarakat, pengurangan risiko bencana lintas sektor, identifikasi daerah rawan bencana dan inventarisasi daerah terdampak bencana

Pada Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki 137 Program dengan 927 indikator kinerja program dengan tingkat capaian sebagai berikut : Sangat Tinggi sebanyak 817 indikator, Tinggi sebanyak 24 indikator, Sedang sebanyak 13 indikator, Rendah sebanyak 7 indikator dan capaian Sangat Rendah sebanyak 67 indikator. Rekapitulasi capaian jumlah program dan indikator kinerja program dapat dilihat pada tabel ... :

Tabel 1.7.
Tingkat Ketercapaian Program Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN PROGRAM				
				ST	T	S	R	SR
	WAJIB PELAYANAN DASAR							
1	Urusan Pendidikan	5	177	165	2	3	4	3
2	Urusan Kesehatan	7	76	74	2	0	0	0
3	Urusan PU dan PR	10	64	63	1	0	0	0
4	Urusan Perakim	3	4	4	0	0	0	0
5	Urusan Trantibum	8	14	14	0	0	0	0
6	Urusan Sosial	4	31	31	0	0	0	0
	JUMLAH	37	366	351	5	3	4	3
	WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							
1	Tenaga kerja	4	17	17	0	0	0	0
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	5	5	0	0	0	0
3	Pangan	1	14	13	1	0	0	0
4	Pertanahan	1	1	1	0	0	0	0
5	Lingkungan Hidup	2	5	5	0	0	0	0
6	Adm. Dukcapil	1	3	3	0	0	0	0
7	Permades	3	9	8	0	0	0	1
8	Pengendalian Penduduk dan KB	2	7	6	0	1	0	0
9	Perhubungan	2	24	24	0	0	0	0
10	Kominfo	3	3	3	0	0	0	0
11	Koperasi	8	10	6	0	0	0	4
12	Penanaman Modal	6	8	8	0	0	0	0
13	Pemuda dan Olahraga	2	7	6	0	0	1	0
14	Statistik	1	2	2	0	0	0	0
15	Persandian	1	1	1	0	0	0	0
16	Kebudayaan	1	6	6	0	0	0	0

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN PROGRAM				
				ST	T	S	R	SR
17	Perpustakaan	2	4	4	0	0	0	0
18	Kearsipan	3	3	3	0	0	0	0
	JUMLAH	45	122	115	1	1	1	5
	PILIHAN							
1	Kelautan dan Perikanan	5	27	18	3	2	0	4
2	Pariwisata	3	6	6	0	0	0	0
3	pertanian	3	27	21	1	0	1	4
4	Kehutanan	3	51	39	7	5	0	0
5	ESDM	4	54	52	2	0	0	0
6	Perdagangan	4	5	5	0	0	0	0
7	Perindustrian	5	5	3	0	0	0	2
8	Transmigrasi	1	1	1	0	0	0	0
	JUMLAH	28	176	145	13	7	1	10
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
1	Perencanaan	4	7	7	0	0	0	0
2	Keuangan	3	164	108	5	2	1	48
3	Kepegawian dan Diklat	4	13	13	0	0	0	0
4	Penelitian dan Pengembangan	1	2	2	0	0	0	0
5	Pengawasan	5	16	16	0	0	0	0
6	Fungsi Lainnya	10	63	62	0	0	0	1
	JUMLAH	27	263	206	5	2	1	49
	JUMLAH TOTAL	137	927	817	24	13	7	67

Sumber data: e-controlling GRMS Jateng, 2020

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Pada Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki 1127 Kegiatan dengan 2009 indikator kinerja kegiatan dengan tingkat capaian sebagai berikut : Sangat Tinggi sebanyak 1792 indikator, Tinggi sebanyak 61 indikator, Sedang sebanyak 19 indikator, Rendah sebanyak 22 indikator dan capaian Sangat Rendah sebanyak 115 indikator. Rekapitulasi capaian jumlah kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel ... :

Tabel 1.8.
Tingkat Ketercapaian Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan
RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

No	URUSAN	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN				
				ST	T	S	R	SR
	WAJIB PELAYANAN DASAR							
1	Urusan Pendidikan	145	157	142	0	0	0	15
2	Urusan Kesehatan	87	184	183	0	0	0	1
3	Urusan PU dan PR	94	179	164	0	1	1	13
4	Urusan Perakim	9	10	10	0	0	0	0
5	Urusan Trantibum	32	85	79	0	1	1	4
6	Urusan Sosial	66	66	64	0	1	0	1
	JUMLAH	433	681	642	0	3	2	34
	WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							
1	Tenaga kerja	26	97	95	0	0	1	1
2	Pemberdayaan Perempuan	12	17	17	0	0	0	0
3	Pangan	14	29	29	0	0	0	0
4	Pertanahan	3	3	3	0	0	0	0
5	Lingkungan Hidup	9	15	14	0	0	0	1
6	Adm. Dukcapil	3	3	3	0	0	0	0
7	Permades	10	20	14	0	0	0	6
8	Pengendalian Penduduk dan Kb	9	10	10	0	0	0	0
9	Perhubungan	27	141	141	0	0	0	0
10	Kominfo	9	9	9	0	0	0	0
11	Koperasi	18	30	27	0	0	0	3
12	Penanaman Modal	15	16	16	0	0	0	0
13	Pemuda dan Olahraga	9	19	16	0	0	0	3
14	Statistik	4	4	4	0	0	0	0
15	Persandian	3	3	3	0	0	0	0
16	Kebudayaan	8	10	8	0	0	0	2
17	Perpustakaan	6	6	6	0	0	0	0
18	Kearsipan	7	7	7	0	0	0	0
	JUMLAH	192	439	422	0	0	1	16
	PILIHAN							
1	Kelautan dan Perikanan	37	81	65	2	3	3	8
2	Pariwisata	9	22	22	0	0	0	0
3	pertanian	40	81	58	1	0	1	21
4	Kehutanan	31	90	66	0	1	2	21
5	ESDM	55	123	115	6	2	0	0

No	URUSAN	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN				
				ST	T	S	R	SR
6	Perdagangan	19	20	17	1	1	0	1
7	Perindustrian	19	23	20	2	0	0	1
8	Transmigrasi	1	1	1	0	0	0	0
	JUMLAH	211	441	364	12	7	6	52
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
1	Perencanaan	12	12	12	0	0	0	0
2	Keuangan	100	177	107	49	7	12	2
3	Kepegawaian dan Diklat	38	85	71	0	2	1	11
4	Penelitian dan Pengembangan	6	6	6	0	0	0	0
5	Pengawasan	20	20	20	0	0	0	0
6	Fungsi Lainnya	115	148	148	0	0	0	0
	JUMLAH	291	448	364	49	9	13	13
	JUMLAH TOTAL	1127	2009	1792	61	19	22	115

Sumber data: e-controlling GRMS Jateng, 2020

e. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan Perjanjian Kinerja Gubernur Tahun 2020

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
	Misi 1 : Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia			
	Tujuan :			
	Membangun masyarakat Jawa Tengah semakin religius, toleran, dan guyup	Persentase penurunan konflik SARA	%	15,00
	Sasaran :			
1	Terciptanya kohesi sosial masyarakat	1) Indeks Toleransi	%	74,48
		2) Persentase tindak pidana yang tertangani	%	83,00
	Misi 2 : Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota			
	Tujuan :			
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77,00

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
	<i>governance and clean government)</i>			
	Sasaran :			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,00
		2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,88
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	1) Nilai SAKIP	Angka	82,00
		2) Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	3,47
		3) Opini BPK	Opini	WTP
3	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	1) Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Angka	20,00
		2) Indeks Sistem Merit	Angka	0,68
	Misi 3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran			
	Tujuan 1:			
	Menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah secara merata	1) Angka Kemiskinan	%	9,81-8,81
		2) Indeks Gini	Angka	0,34
	Sasaran :			
1	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah	1) Persentase penduduk miskin perkotaan	%	9,44
		2) Persentase penduduk miskin pedesaan	%	12,65
		3) Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Ribu Rupiah	478,76
		4) Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Angka	61,00
		5) Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan terendah dengan keluhan kesehatan	%	30,50
2	Menurunnya	1) Tingkat Pengangguran	%	4,33

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
	pengangguran terbuka	Terbuka		
		2) Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu	%	5,65
	Tujuan 2:			
	Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan	1) Pertumbuhan Ekonomi	%	5,4-5,7
		2) Inflasi	%	3,0±1
		3) PDRB per kapita	Juta Rupiah	39,25
		4) Indeks Williamson	Angka	0,59
	Sasaran :			
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	1) Pertumbuhan sektor pertanian	%	2,90
		2) Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	5,10
		3) Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa	%	5,67
		4) Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD	%	3,15
		6) Pertumbuhan investasi	%	9,00
		7) Nilai Tukar Petani	Angka	102,42
	Misi 4 : Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan			
	Tujuan 1:			
	Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,00
	Sasaran :			
1	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	1) Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,34
		2) Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,92
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,09
3	Meningkatnya akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,06
	Tujuan 2 :			

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
	Mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	66,87
	Sasaran :			
1	Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan	1) Indeks Kualitas Air	Angka	49,17
		2) Indeks Kualitas Udara	Angka	84,71
		3) Indeks Tutupan Lahan	Angka	66,76
2	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Angka	3,54

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dasar Pertimbangan SPM:

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang ketentraman ketertiban umum & perlindungan masyarakat dan bidang sosial. Namun dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tahun 2020 ini, Pemerintah Pusat dan Daerah tidak hanya membutuhkan tenaga tetapi juga sumber biaya yang sangat besar, diperoleh dari realokasi dan refocusing program atau kegiatan yang salah satu diantaranya adalah bersumber dari pembiayaan program dan kegiatan terkait dengan SPM. Tanpa pandemi COVID-19 pun tantangan yang dihadapi dalam mencapai target SPM tahun 2020 sudah sangat berat apalagi ditambah dengan situasi saat ini. Terutama untuk beberapa daerah yang masuk dalam kategori zona merah penyebaran COVID-19.

Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan dasar pada urusan wajib yang berpedoman pada SPM apapun kondisinya, termasuk pada masa pandemi. Walaupun sudah cukup jelas pada Bidang Kesehatan akan sangat membutuhkan support sumber daya, dan masih harus

berjuang mensosialisasikan dan menyadarkan masyarakat untuk tidak khawatir datang memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan (faskes) karena takut tertular Covid-19. Hal ini akan sangat berpengaruh pada capaian target SPM Bidang kesehatan. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru, pelayanan faskes telah banyak dilakukan perubahan untuk mengantisipasi potensi meningkatnya kembali kasus Covid-19. Selain pelayanan dalam bentuk virtual, pelayanan langsung kepada masyarakat tetap harus dilaksanakan dengan memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Hal ini pun dilaksanakan oleh semua bidang SPM, karena dalam kondisi apapun pelayanan dasar untuk masyarakat harus tetap berjalan, dengan segala keterbatasan.

Program dan kegiatan terkait koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi penerapan SPM pun harus tetap dilaksanakan, metode yang digunakan menyesuaikan dengan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru, yaitu dengan model pembelajaran yang menggunakan system online/daring menggunakan aplikasi, diantaranya google classroom, zoom meeting atau cisco webex meeting, dirasakan amat membantu pada masa adaptasi kebiasaan baru saat ini. Sesuai Pergub 16/2019, tentang Pedoman Pembentukan Tim Penerapan SPM Prov Jateng, Keputusan Gubernur Jateng 400/118/2019, tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Penerapan SPM Prov Jateng & Keputusan Sekda Jateng Selaku Ketua Tim Penerapan SPM 120.01/0001066/2020, tentang Sekretariat Tim Penerapan SPM Jateng, pelaksanaan koordinasi Tim SPM Prov Jateng juga dilaksanakan secara daring.

Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, tanggal 2 April 2020. Instruksi Mendagri ini menyatakan bahwa substansi perubahan Peraturan Kepala Daerah mencakup 3 (tiga) hal, yakni: (1) Penanganan Kesehatan dan hal-hal lain terkait Kesehatan; (2) Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan (3) Penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net). Memperhatikan instruksi tersebut, dalam penerapan SPM dapat diketahui bahwa realokasi

penganggaran paling banyak akan mengalir pada dua urusan wajib, yaitu kesehatan dan social. Sehingga dimungkinkan akan ada anomaly capaian target SPM pada kedua urusan tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh penentuan jumlah sasaran dan besaran anggaran pada tahun 2020 yang beberapa kali mengalami penyesuaian.

Dampak dari pandemi Covid-19 terutama pada sektor ekonomi dan keuangan yang juga akan berdampak pada urusan wajib pelayanan dasar diperkirakan bukan hanya berdampak pada tahun 2020 ini saja, tetapi juga dapat berlanjut untuk beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi yang memadai diikuti oleh pengambilan keputusan secara tepat, khususnya dalam penerapan dan pencapaian target SPM, terutama untuk 21 (dua puluh satu) Kab/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak pada tahun 2020 ini yang dalam penyusunan RPJMD nya harus mengakomodir penganggaran SPM. Sehingga instansi pemerintah untuk dapat meminimalisasi dampak negatif pada sektor krusial yaitu ekonomi dan keuangan.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan minimal yang harus diperoleh oleh masyarakat dan disusunlah Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, yang memuat laporan yang telah dilakukan SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota pengampu 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);

3. Peraturan Pemerintah nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kab./Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikiasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. PERMENDAGRI 18/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Jawa Tengah;
19. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 400/118 Tahun 2019, tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Jawa Tengah;
20. Keputusan Sekda Jateng Selaku Ketua Tim Penerapan SPM 120.01/0001066/2020, tentang Sekretariat Tim Penerapan SPM Jateng.

Kebijakan Umum

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, menyebutkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa Tengah tahun 2013-2018, yaitu **"Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari" *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi***. Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Misi ini memiliki tujuan membangun masyarakat Jawa Tengah semakin religius, toleran, dan guyup, dengan sasaran terciptanya kohesi sosial masyarakat. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator persentase penurunan kejadian konflik bernuansa SARA di Jawa Tengah, dengan indikator sasarannya adalah indeks toleransi dan persentase tindak pidana yang tertangani.

2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota;

Misi kedua bertujuan untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu: 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik; 2) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan; dan 3) Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik.

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;

Misi ketiga ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu: 1) Menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah secara merata; dan 2) Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan. Ukuran keberhasilan yang diharapkan dari tujuan ini adalah angka kemiskinan yang menurun, Indeks Gini, pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB per kapita, dan Indeks Williamson. Untuk itu sasaran yang ingin dihasilkan dalam rangka mencapai tujuan ini adalah: 1) Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga dua desil terbawah; 2) Menurunnya pengangguran terbuka; dan 3) Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah.

4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan. Misi ini bertujuan untuk: 1) Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM); dan 2) Mewujudkan sumberdaya alam dan

lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sasaran yang ingin dicapai adalah: 1) Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas; 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 3) Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender; 4) Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan; dan 5) Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

Muatan Standar Pelayanan Minimal telah terintegrasi ke dalam Kebijakan Umum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan 6 (enam) bidang urusan, baik dalam rencana penerapan maupun capaian SPM. Berikut ini tabel program/kegiatan untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah terintegrasi di dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.

Tabel 1.9.
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM
Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020

MISI KE- 4	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROG. (%)
Menjadi Rakyat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya dan Mencintai Lingkungan	Perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB	Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja	1. Program Pembinaan SMA	Disparitas APK SMA/SMK/SLB	12,62
			2. Program Pembinaan SMK	APK SMA/SMK/SLB	47,36
			3. Program Pembinaan Pendidikan Khusus	Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar	78,14
			Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB	0,07
				Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi Akademik	97,44

Sumber : Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

Tabel 1.10.
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM
Bidang Kesehatan Tahun 2020

MISI KE- 4	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROG. (%)
Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Menurunnya Angka Kesakitan Dan Kematian	Surveilans, Imunisasi dan Penanganan KLB dan Bencana	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	100
				Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	100

Sumber : Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

Tabel 1.11.
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020

MISI KE- 3	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROG. (%)
Memperkuat kapasitas Ekonomirakyat danmembuka Lapangankerja untuk mengurangikemi skinandan pengangguran	Menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah secara merata	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan dan kelompok rumah tangga dua desil terbawah serta kelompok rentan lainnya	Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi	Persentase akses air layak perkotaan	88,15
				Persentase akses air layak pedesaan	78,05
				Persentase akses sanitasi air limbah domestik	90,6

Sumber : Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

Tabel 1.12.
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM
Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2020

MISI KE- 3	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROG. (%)
Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	Program Pembangunan Perumahan	% RLH yang disediakan	1,92
				% RTLH yang tertangani	6,58
				% Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	4,21

Sumber : Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

Tabel 1.13.
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM
Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020

MISI KE- 1	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROG. (%)
Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI	Terpeliharanya kondusivitas daerah di Jawa Tengah	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan hukum daerah serta kapasitas Linmas	Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/ Hukum dan masyarakat pada produk hukum daerah	Persentase penegakan pelanggaran produk hukum daerah	100%

Sumber : Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

Tabel 1.14.
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM
Bidang Urusan Sosial Tahun 2020

MISI KE- 3	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROG. (%)
Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga dua desil terbawah serta kelompok rentan lainnya	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penanganan PMKS yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti, dan persentase keberfungsian PMKS dalam panti	0,82
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS NonProduktif	0,36

Sumber : Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Jawa Tengah lima tahun kedepan, ditetapkan arah kebijakan yang akan menjadi arah kebijakan perencanaan pembangunan tahunan dalam lima tahun. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama lima tahun kedepan.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2020 ditujukan untuk **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah;

3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.

Arah kebijakan tahun 2020 yang menjadi prioritas pembangunan untuk Urusan wajib Pelayanan dasar, khususnya yang terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi :

1. Bidang Urusan Pendidikan :

Arah kebijakan tahun 2020 yang menjadi prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Sedangkan program prioritas pembangunan daerah untuk mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar SPM bidang pendidikan meliputi :

- a. Program Pembinaan SMA, yang diarahkan pada peningkatan APK SMA, persentase prasarana sarana SMA sesuai standar, persentase serapan kurikulum SMA, dan penurunan disparitas prestasi SMA.
- b. Program Pembinaan SMK, yang diarahkan pada peningkatan APK SMK, persentase prasarana sarana SMK sesuai standar, persentase serapan kurikulum SMK, dan penurunan disparitas prestasi SMK.
- c. Program Pembinaan Pendidikan Khusus, yang diarahkan pada peningkatan APK SLB, persentase prasarana sarana SLB sesuai standar, persentase serapan kurikulum SMK, dan penurunan disparitas prestasi SLB.
- d. Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, yang diarahkan pada peningkatan rasio guru SMA dengan rombongan belajar SMA; rasio guru SMK dengan rombongan belajar SMK; rasio guru SLB dengan rombongan belajar SLB; persentase guru SMA memenuhi kualifikasi akademik; persentase guru SMK memenuhi kualifikasi akademik; dan persentase guru SLB memenuhi kualifikasi akademik.

Berikut ini tabel arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal:

Tabel 1.15.
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan
Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2020

Prioritas Provinsi	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB	Disparitas APK SMA/SMK/SLB	Menjamin pemenuhan SPM SMK/SMA/SLB	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kebudayaan melalui Revitalisasi Dikbud didukung peningkatan sarpras serta pemanfaatan IPTEK
	APK SMA/SMK/SLB		
	Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar		
	Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB		
	Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi Akademik		
Penguatan karakter dan ketahanan budaya	Angka Partisipasi Seni dan Budaya	Penguatan Pelestarian Budaya Guna Menjamin Pendidikan Karakter	
	Persentase Jenis seni budaya yang terlayani		
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai kepuasan masyarakat	Menjamin Layanan Masyarakat Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	
	Nilai kepuasan masyarakat		
	Nilai sikip perangkat daerah		

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

Berdasarkan Tabel 1.7 di atas menggambarkan bahwa orientasi dan komitmen Pemerintah Provinsi JawaTengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk menerapkan dan mencapai target SPM Bidang Pendidikan yang telah ditentukan menjadi arah kebijakan yang ditetapkan di tahun 2020 dan telah dituangkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Besaran anggaran yang tertuang di dalam KUA 2020 untuk Program Pembinaan SMA sebesar Rp 852.781.783.000, Program Pembinaan SMK sebesar Rp. 1.029.633.899.000, dan Program Pembinaan Pendidikan Khusus sebesar Rp. 31.925.151.000

2. Bidang Urusan Kesehatan :

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Jawa Tengah lima tahun kedepan, ditetapkan arah kebijakan yang akan menjadi arah kebijakan perencanaan pembangunan tahunan dalam lima tahun. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama lima tahun kedepan.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2020 ditujukan pada “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia” dengan prioritas daerah diarahkan pada :

- a. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah;
- c. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;
- d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.

Dari penjelasan diatas maka arah kebijakan tahun 2020 yang menjadi prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana.

Tabel 1.16.
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Kesehatan
Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020

Prioritas Provinsi	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat	Penyiapan informasi terkait inventarisasi kemungkinan jenis KLB/bencana/krisis sekaligus pemetaan potensi; Penyiapan sumber daya kesehatan, Koordinasi dan monitoring

hidup dan risiko bencana	bencana provins	bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	program; Penanggulangan KLB/bencana dan krisis kesehatan (pengobatan, penyelidikan, lab, isolasi);
	Persentase kabupaten/kota dengan respon cepat penanggulangan KLB/bencana < 24 jam	Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Outbreak respon; Penyuluhan dan promosi kesehatan di daerah rawan bencana; Penanganan paska KLB/bencana dan krisis kesehatan

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

Tabel diatas menggambarkan orientasi dan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk menerapkan dan mencapai target SPM kesehatan yang telah ditentukan menjadi arah kebijakan yang ditetapkan di tahun 2020. Selain itu juga, penerapan dan pencapaian SPM kesehatan telah dituangkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Besaran anggaran yang tertuang di dalam KUA untuk penyelenggaraan SPM kesehatan sebesar Rp. 6.867.295.000,-.

Dalam upaya penanganan pandemi Corona Virus infection Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan dana untuk kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 yang ditampung dalam anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Jumlah anggaran BTT untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp. 383.944.445.000,-.

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum :

Arah kebijakan tahun 2020 yang menjadi prioritas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan CiptaKarya Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada penanggulangan kemiskinan dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum. Sedangkan program prioritas pembangunan daerah untuk mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar SPM bidang pekerjaan umum adalah Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, yang diarahkan pada peningkatan persentase akses aman air minum perdesaan; persentase akses aman air minum perkotaan; serta persentase akses sanitasi air limbah domestik. Berikut ini tabel arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan CiptaKarya Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2020 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal:

Tabel 1.17.
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Prioritas Provinsi	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Penanggulangan Kemiskinan	Persentase akses aman air aman perkotaan	Membangun sistem layanan aman air minum perkotaan dan sanitasi dengan pendekatan regional	Melakukan sinkronisasi dengan APBN serta sektor sumber daya air untuk pembangunan SPAM Regional secara bertahap
	Persentase akses aman air aman perdesaan	Memenuhi kebutuhan aman air minum perdesaan	Melakukan pendekatan pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS
	Persentase akses sanitasi air limbah domestik	Membangun sistem layanan sanitasi layak dengan pendekatan regional	Melakukan sinkronisasi dengan APBN untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik regional

Sumber : Dokumen Renstra Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menerapkan dan mencapai target SPM bidang pekerjaan umum, selain telah ditentukan menjadi arah kebijakan yang ditetapkan di Tahun 2019, juga telah dituangkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Besaran anggaran yang tertuang di dalam KUA untuk Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan pagu indikatif Tahun 2020 sebesar Rp 18.689.790.000,-

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat :

Arah kebijakan tahun 2020 yang menjadi prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada penanggulangan kemiskinan dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat daerah provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 terdiri atas: (1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan (2) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat

yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. Selain itu, kewenangan lain daerah provinsi yang tidak terlepas adalah penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dan penyelenggaraan prasarana sarana umum permukiman.

Tabel 1.18.
Integrasi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Prioritas Provinsi	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Penanggula ngan Kemiskinan	Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni	Penyelenggaraan penyediaan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	Pembangunan Perumahan yang difokuskan pada kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah terdampak bencana, fasilitasi relokasi program pemerintah, rumah umum dan rumah khusus beserta PSU nya diarahkan pada presentase peningkatan jumlah rumah layak huni
		Penyelenggaraan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi	

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menerapkan dan mencapai target SPM bidang perumahan rakyat, selain telah ditentukan menjadi arah kebijakan yang ditetapkan di Tahun 2019, juga telah dituangkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Besaran anggaran yang tertuang di dalam KUA untuk program pembangunan perumahan dengan pagu indikatif Tahun 2020 sebesar Rp 3.139.425.000,-.

5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat:

Arah kebijakan tahun 2020 yang menjadi prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Sedangkan program prioritas pembangunan daerah untuk mewujudkan

pemenuhan pelayanan dasar SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah program peningkatan kepatuhan aparat, badan usaha/hukum dan masyarakat pada Produk Hukum Daerah yang diarahkan pada peningkatan persentase penegakan pelanggaran produk hukum daerah. Berikut ini tabel arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal:

Tabel 1.19.
Integrasi SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Ke Dalam Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Prioritas Provinsi	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	Terpeliharanya kondusivitas daerah di Jawa Tengah	Penyelenggaraan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat yang terkena dampak akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Meningkatkan penindakan pelanggaran produk hukum daerah di fokuskan pada kegiatan penindakan pelanggaran produk hukum daerah Provinsi Jawa Tengah (Penegakan Perda dan Pergub diawali dengan tindakan premetif, preventif dilakukan melalui pendekatan persuasif sesuai standar operasional prosedur (SOP) melalui pembinaan, mediasi, komunikasi terakhir baru dilakukan penindakan pelanggaran produk hukum daerah)

Sumber : Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menerapkan dan mencapai target SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, selain telah ditentukan menjadi arah kebijakan yang ditetapkan di Tahun 2020, juga telah dituangkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Besaran anggaran yang tertuang di dalam KUA untuk program Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/ Hukum dan masyarakat pada produk hukum daerah dengan pagu indikatif Tahun 2020 sebesar Rp 25.000.000,-

6. Bidang Urusan Sosial:

Arah kebijakan tahun 2020 yang menjadi prioritas Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada penanggulangan kemiskinan dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial. Sedangkan program prioritas pembangunan daerah untuk mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar SPM bidang sosial meliputi :

- a. Program Rehabilitasi sosial, yang diarahkan pada peningkatan persentase penanganan PMKS yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti, dan persentase keberfungsian PMKS dalam panti;
- b. Program Perlindungan dan jaminan Sosial, yang diarahkan diarahkan pada peningkatan persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif.

Berikut ini tabel arah kebijakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal:

Tabel 1.20.
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Prioritas Provinsi	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Penanggulang an Kemiskinan	Menurunnya jumlah Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	Melakukan Rehabilitasi Sosial yang difokuskan pada kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS (penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis) di dalam panti baik milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan panti milik masyarakat dan diarahkan pada persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar PPKS terlantar didalam panti
		Penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah prov	Melakukan perlindungan dan jaminan sosial yang difokuskan pada kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban
	Meningkatnya peran PSKS dalam melaksanakan usaha	Penyelenggaraan pemberdayaan sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) guna	Melakukan pemberdayaan sosial yang difokuskan pada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam hal ini SDM penyelenggara kesejahteraan sosial

	kesejahteraan sosial	meningkatkan peran dalam melaksanakan Usaha kesejahteraan sosial	yang terlibat di dalam penerapan SPM bidang sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh Sosial dan Relawan Sosial yang tersertifikasi
--	----------------------	--	--

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Sosial Prov Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

Berdasarkan Tabel 1.12 di atas menggambarkan bahwa orientasi dan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk menerapkan dan mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yang telah ditentukan menjadi arah kebijakan yang ditetapkan di tahun 2020. Selain itu juga, penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial telah di tuangkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Besaran anggaran yang tertuang di dalam KUA untuk program rehabilitasi sosial dengan pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp 51.901.163.000, sedangkan program perlindungan dan jaminan sosial dengan pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp 1.375.617.000.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Berikut tabel Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Makro Provinsi Jawa Tengah

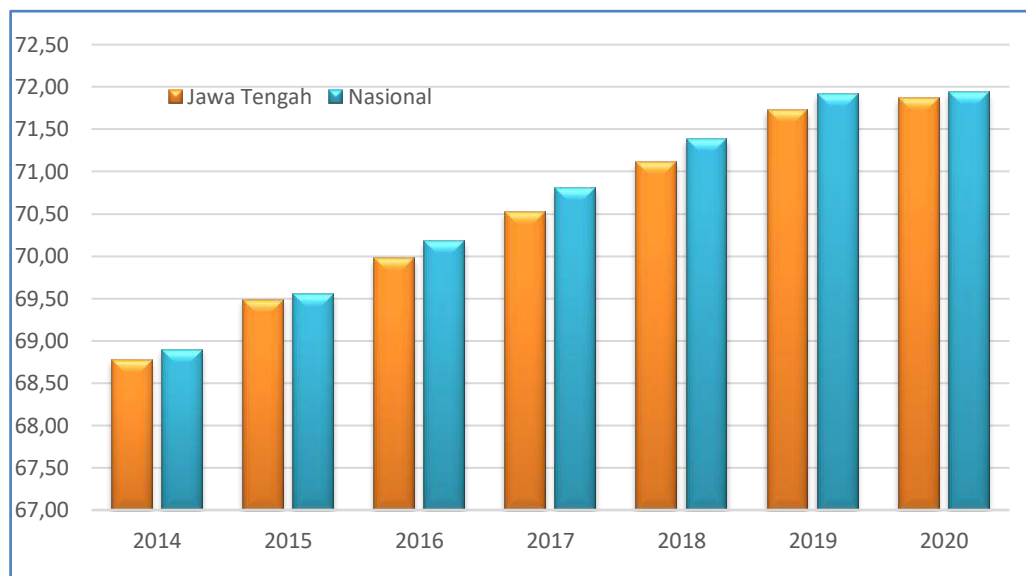
No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	71.73	71.87	0.20
2	Angka Kemiskinan	10.80	11.84	11.91
3	Angka Pengangguran	4.49	6.48	44.32
4	Pertumbuhan Ekonomi	5.41	-2.65	-8.06
5	Pendapatan Per Kapita	39,243,314	38,597,521	-1.58
6	Ketimpangan Pendapatan	0.361	0.359	0.28

Sumber: BPS, 2020

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk.

Grafik 2.1.
Perbandingan IPM Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 – 2020



Sumber: Data BPS Jateng, 2020 (diolah)

Pada tahun 2020, IPM Jawa Tengah adalah 71,87 atau mengalami kenaikan sebesar 0,14 poin dibandingkan tahun 2019 sebesar 71,73. Sejak tahun 2017, Jawa Tengah telah masuk dalam kategori provinsi dengan IPM Tinggi (70-80). Secara umum, seperti terlihat pada Grafik 2.1, sejak tahun 2014-2019 IPM Jawa Tengah terus mengalami kenaikan yang cukup berarti. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia semakin baik, sehingga diharapkan dapat menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik.

Perkembangan IPM Jawa Tengah Tahun 2019–2020 dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa dan nasional dapat dilihat pada Tabel 2.2. Pertumbuhan IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,20% merupakan tertinggi kedua setelah Provinsi Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan sebesar 0,29%.

Tabel 2.2. Perkembangan IPM Tahun 2019 – 2020

NO	PROVINSI/NASIONAL	CAPAIAN IPM		PERSENTASE PERTUMBUHAN IPM
		2019	2020	
1	Jawa Barat	72,03	72,09	0,08
2	Jawa Tengah	71,73	71,87	0,20
3	DI Yogyakarta	79,99	79,97	-0,03
4	Banten	72,44	72,45	0,01
5	Jawa Timur	71,50	71,71	0,29
6	DKI Jakarta	80,76	80,77	0,01
	Nasional	71,92	71,94	0,03

Sumber: Data BPS Jateng, 2020 (diolah)

Pada tingkat kabupaten/kota, capaian IPM tertinggi pada tahun 2020 diraih oleh Kota Salatiga sebesar 83,14. Sedangkan capaian IPM terkecil diperoleh Kabupaten Brebes sebesar 66,11 dan Kabupaten Pemalang sebesar 66,32. Sementara dari sisi persentase pertumbuhannya, pada level kabupaten, pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 dibukukan oleh Kabupaten Sragen sebesar 0,71% sementara pertumbuhan terendah dibukukan oleh Kabupaten Rembang sebesar -0,19%. Pada level kota, pertumbuhan tertinggi dibukukan Kota Surakarta, sementara terendah dibukukan oleh Kota Semarang.

Data lengkap IPM Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2019–2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2019–2020

NO.	KAB/KOTA	IPM		GROWTH (%)
		2019	2020	
1	Cilacap	69,98	69,95	-0,04
2	Banyumas	71,96	71,98	0,03
3	Purbalingga	68,99	68,97	-0,03
4	Banjarnegara	67,34	67,45	0,16
5	Kebumen	69,60	69,81	0,30
6	Purworejo	72,50	72,68	0,25
7	Wonosobo	68,27	68,22	-0,07
8	Magelang	69,87	69,87	0,00
9	Boyolali	73,80	74,25	0,61
10	Klaten	75,29	75,56	0,36
11	Sukoharjo	76,84	76,98	0,18

12	Wonogiri	69,98	70,25	0,39
13	Karanganyar	75,89	75,86	-0,04
14	Sragen	73,43	73,95	0,71
15	Grobogan	69,86	69,87	0,01
16	Blora	68,65	68,84	0,28
17	Rembang	70,15	70,02	-0,19
18	Pati	71,35	71,77	0,59
19	Kudus	74,94	75,00	0,08
20	Jepara	71,88	71,99	0,15
21	Demak	71,87	72,22	0,49
22	Semarang	74,14	74,10	-0,05
23	Temanggung	69,56	69,57	0,01
24	Kendal	71,97	72,29	0,44
25	Batang	68,42	68,65	0,34
26	Pekalongan	69,71	69,63	-0,11
27	Pemalang	66,32	66,32	0,00
28	Tegal	68,24	68,39	0,22
29	Brebes	66,12	66,11	-0,02
30	Kota Magelang	78,80	78,99	0,24
31	Kota Surakarta	81,86	82,21	0,43
32	Kota Salatiga	83,12	83,14	0,02
33	Kota Semarang	83,19	83,05	-0,17
34	Kota Pekalongan	74,77	74,98	0,28
35	Kota Tegal	74,93	75,07	0,19
36	Jawa Tengah	71,73	71,87	0,20

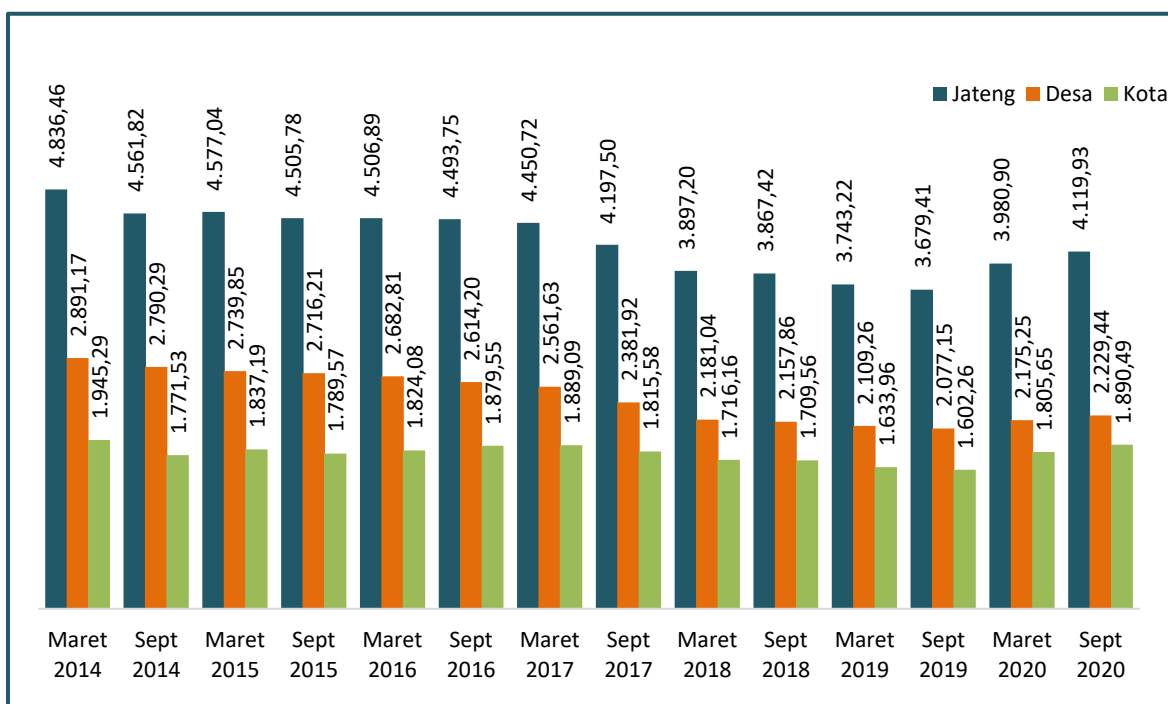
Sumber: Data BPS Jateng, 2020 (diolah)

Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan masyarakat dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Karena itu, penduduk miskin diartikan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Secara umum, jumlah penduduk miskin dan persentase tingkat kemiskinan penduduk Jawa Tengah terus menurun sejak tahun 2014 hingga 2019. Namun adanya pandemi COVID-19 yang dimulai sejak awal Maret 2020 memberikan dampak nyata pada kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk miskin Jawa Tengah pada bulan Maret 2020 berjumlah 3,981 juta orang (11,41%) bertambah sejumlah 238 ribu orang atau lebih tinggi dari bulan Maret 2019 sejumlah 3,743 juta orang. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin terus berlanjut hingga kondisi September 2020. Jumlah penduduk miskin bulan September 2020 berjumlah 4,120 juta orang (11,84%). Terlihat pada Grafik 2.2, terjadi tren penurunan jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan pada periode September di tahun 2017-2019. Namun pada tahun 2020 dengan adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami peningkatan baik pada periode Maret maupun September. Pada September tahun 2017, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 296 ribu orang, kemudian September tahun 2018 sebanyak 330 ribu orang dan pada September tahun 2019 sebanyak 188 ribu orang sedangkan pada September tahun 2020 terjadi peningkatan penduduk miskin sebanyak 440 ribu orang jika dibandingkan September tahun 2019 dan mengalami peningkatan sebanyak 139 ribu orang jika dibandingkan Maret 2020.

Grafik 2.2. juga memperlihatkan pola peningkatan jumlah penduduk miskin di kota dan desa, tren peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan selama tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan peningkatan jumlah penduduk miskin di perdesaan. Meski dari sisi jumlah, penduduk miskin di perkotaan lebih sedikit dibanding perdesaan, namun tren peningkatan lebih tinggi disaat Pandemi COVID-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pandemi COVID-19 sangat berdampak di daerah perkotaan dibandingkan perdesaan.

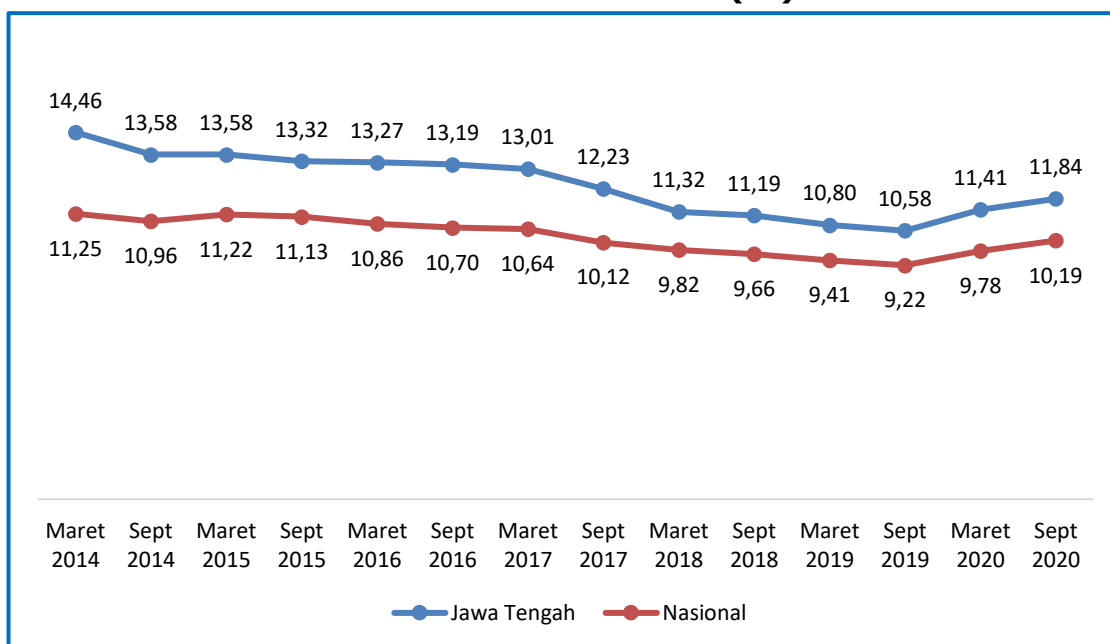
Grafik 2.2.
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan
Tahun 2014-2020 (Ribuan Orang)



Sumber: Data BPS Jateng, 2020 (diolah)

Apabila dibanding dengan kemiskinan nasional, harus diakui persentase kemiskinan Jawa Tengah masih lebih tinggi. Pada tahun 2020, persentase kemiskinan Jawa Tengah adalah 11,84% sementara persentase kemiskinan nasional adalah 10,19%. Peningkatan persentase kemiskinan Jawa Tengah saat Pandemi COVID-19 di tahun 2020 jauh lebih besar dibanding nasional. Terlihat dari gap persentase kemiskinan yang membesar antara Jateng dan Nasional seperti terlihat pada Grafik 2.3.

Grafik 2.3.
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Jateng dan Nasional
Tahun 2014-2020 (%)

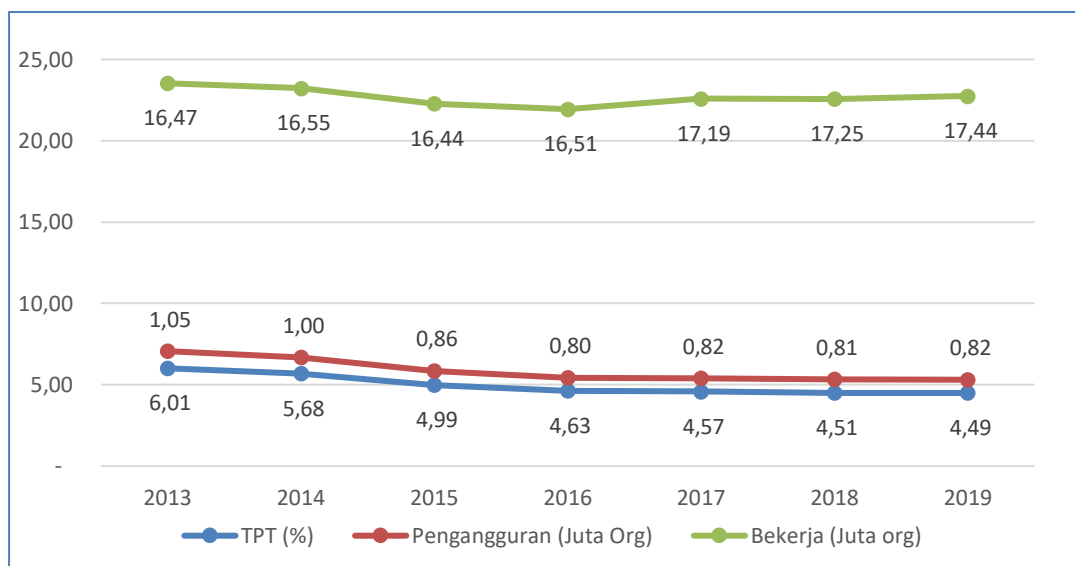


Sumber: Data BPS Jateng, 2020 (diolah)

Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2020 sebesar 6,48% lebih tinggi dibandingkan Agustus 2019 sebesar 4,44% atau terjadi peningkatan 2,04 poin. Peningkatan TPT untuk jenis kelamin laki-laki 2,39 poin dari 4,74% di tahun 2019 menjadi 7,13% di tahun 2020. Sedangkan peningkatan TPT untuk jenis kelamin perempuan 1,55 poin, dari 4,02% di tahun 2019 menjadi 5,57% di tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya pelemahan kegiatan ekonomi baik sebagai karyawan atau pekerja mandiri, akibat bencana non alam pandemi COVID-19. Adapun tren peningkatan jumlah pengangguran terbuka dan TPT sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.4.
Penduduk Bekerja, Pengangguran dan TPT Jawa Tengah Tahun 2014 – 2020



Sumber: Data BPS Jateng, 2020 (diolah)

TPT Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 6,48% lebih rendah dibandingkan TPT nasional sebesar 7,07%. Sedangkan dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, maka TPT Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan dengan DIY dan Jawa Timur, namun lebih rendah dibandingkan DKI, Jawa Barat dan Banten. Perbandingan TPT Provinsi se-Jawa sebagaimana tabel 2.4.

Tabel 2.4. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka se-Jawa Periode Agustus 2019–2020

NO	PROVINSI/NASIONAL	2019	2020
1	DI Yogyakarta	3,14	4,57
2	Jawa Timur	3,92	5,84
3	Jawa Tengah	4,44	6,48
4	DKI Jakarta	6,22	10,95
5	Jawa Barat	7,99	10,46
6	Banten	8,11	10,64
	Nasional	5,28	7,07

Sumber: Data BPS Jateng, 2020 (diolah)

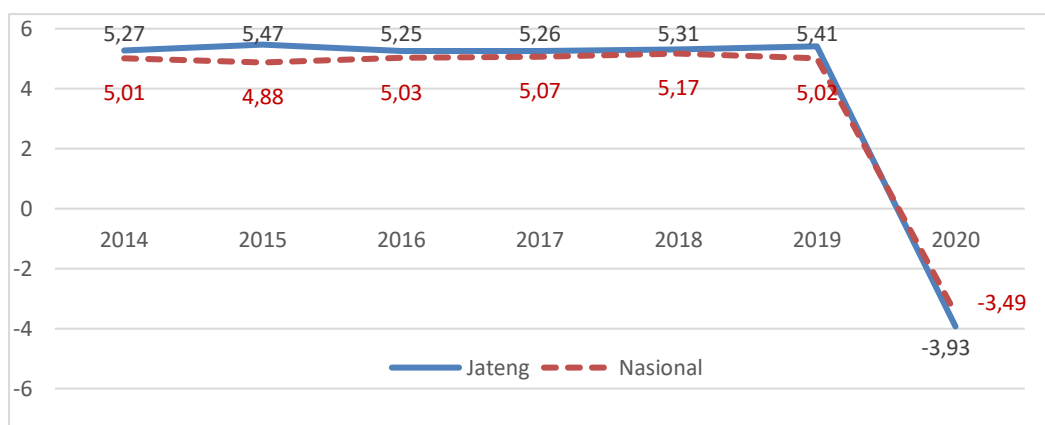
Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2020 terjadi bencana pandemi COVID-19 yang mulai terasa dampaknya pada kegiatan ekonomi mulai triwulan I. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II mencapai -5,91%. Namun seiring dengan upaya penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah bersama masyarakat, maka mulai terjadi pergerakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada periode berikutnya. Perbaikan ini terlihat pada pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV tahun 2020 meskipun masih -3,34% namun tidak sedalam pencapaian pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun 2020 yang mencapai -3,79%.

Pandemi COVID-19 merubah tren pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, dimana pada tahun 2014-2019 terus mengalami peningkatan dan selalu diatas pertumbuhan ekonomi Nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam yaitu -2,65% lebih tinggi

penurunannya dibandingkan dengan Nasional yaitu -2,07. Adapun tren pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana Grafik 2.5.

Grafik 2.5.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (%) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 – 2020



Sumber: Data BPS Jateng, 2021 (diolah)

Meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami minus, namun jika dilihat menurut lapangan usaha, maka sektor informasi dan komunikasi memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu 15,65%, diikuti lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu 8,19 % dan lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu 2,48%.

Tingginya pertumbuhan di lapangan usaha informasi dan komunikasi disebabkan karena pada masa Pandemi COVID-19 diberlakukan Work From Home (WFH) dan School From Home (SFH) sehingga penggunaan data internet untuk media sosial, transaksi online, pembelajaran daring mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Disisi lain, perkembangan teknologi yang diikuti dengan meningkatnya kesadaran teknologi masyarakat mendorong penggunaan teknologi informasi dalam berbagai macam kegiatan usaha. Pemanfaatan teknologi untuk pelaksanaan tugas oleh instansi pemerintah juga meningkat. Pertumbuhan pada penyediaan jasa kesehatan di dorong oleh adanya pengeluaran yang jauh lebih besar untuk biaya kesehatan baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat guna menangani dan mengendalikan penyebaran COVID-19. Adanya kebijakan pembatasan kegiatan

masyarakat berdampak pada terbatasnya pergerakan aktivitas masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, yang berdampak pada penurunan pendapatan. Hal ini mendorong pemerintah melakukan kebijakan penyaluran bantuan sosial yang cukup besar untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat.

Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi beberapa lapangan usaha, pandemi COVID-19 juga menurunkan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan yang merupakan penopang terbesar perekonomian Jawa Tengah dari 5,19% pada 2019 menjadi -3,74% pada 2020. Penurunan lapangan usaha industri disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat yang mengakibatkan permintaan menjadi berkurang sehingga produksi industri juga dibatasi. Selain itu, pelaksanaan protokol kesehatan dengan pembatasan jumlah tenaga kerja juga mengakibatkan produksi industri menjadi menurun.

Tabel 2.5. Pertumbuhan Lapangan Usaha yang Berkontribusi terhadap Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2019 –2020

NO	LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN (%)	
		2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,36	2,48
2	Pertambangan dan Penggalian	3,36	-0,80
3	Industri Pengolahan	5,19	-3,74
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,48	1,79
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,42	2,29
6	Konstruksi	4,95	-3,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,98	-3,80
8	Transportasi dan Pergudangan	8,49	-33,15
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,14	-7,98
10	Informasi dan Komunikasi	11,62	15,65
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,51	2,03
12	Real Estate	5,53	-0,28

NO	LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN (%)	
		2019	2020
13	Jasa Perusahaan	10,54	-7,19
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,71	-1,31
15	Jasa Pendidikan	7,59	-0,24
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,72	8,19
17	Jasa lainnya	9,02	-8,01
	PDRB	5,41	-2,65

Sumber: Data BPS Jateng, 2021 (diolah)

PDRB dari sisi pengeluaran memperlihatkan bahwa semua komponen pengeluaran pada Tahun 2020 mengalami penurunan. Konsumsi rumah tangga selaku komponen yang paling dominan pada PDRB Pengeluaran turun sebesar -1,42% pada 2020. Penurunan konsumsi rumah tangga tidak terlepas karena adanya pandemi COVID-19. Pembatasan kegiatan membuat masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi seperti biasa sehingga pendapatan masyarakat menjadi turun dan berdampak pada menurunnya daya beli.

Pembatasan kegiatan juga berdampak pada penurunan konsumsi lembaga non profit dari 10,90% menjadi -2,98%. Penurunan lembaga non profit didorong oleh pembatasan kegiatan sosial yang melibatkan banyak orang, serta pembatasan aktivitas keagamaan di tempat ibadah. Seperti halnya lembaga non profit, konsumsi pemerintah juga mengalami penurunan dari 3,98 persen pada tahun 2019 menjadi -4,30% pada tahun 2020. Larangan untuk mengadakan pertemuan di hotel merupakan salah satu penyebab penurunan konsumsi rumah tangga. Kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti rapat kemudian dilakukan secara daring.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan investasi dalam bentuk fisik (fixed capital) mengalami penurunan cukup tajam dari 4,85 persen pada tahun 2019 menjadi -6,98% pada tahun 2020. Penurunan ini dikarenakan adanya pemberhentian proyek pembangunan barang modal. Komponen lainnya yang mengalami penurunan paling tajam adalah ekspor dan impor. Ekspor produk dari Jawa Tengah ke luar negeri dan ke provinsi lain di Indonesia turun -13,84% dibandingkan tahun sebelumnya 5,76%. Adapun

impor dari luar negeri dan dari provinsi lain turun -14,82% di Tahun 2020 dimana tahun sebelumnya tumbuh 3,69%. Lebih lengkap data Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2019 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Pertumbuhan Jawa Tengah Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2019 – 2020

NO	KOMPONEN PENGELUARAN	PERSEN (%)	
		2019	2020
1	Konsumsi Rumah Tangga	4,62	-1,42
2	Konsumsi LNPRT	10,90	-2,98
3	Konsumsi Pemerintah	3,98	-4,30
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,85	-6,98
5	Perubahan Inventori	-	-
6	Ekspor Luar Negeri dan Antar Daerah	5,76	-13,84
7	Impor Luar Negeri dan Antar Daerah	3,69	-14,82
	PDRB	5,41	-2,65

Sumber: BPS Jateng, 2021 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2020 dibandingkan dengan provinsi lainnya di Jawa dapat dilihat pada Tabel 2.7. Pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Jawa menunjukkan bahwa seluruh provinsi mengalami penurunan sebagai dampak adanya pandemi COVID-19.

Tabel 2.7. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 –2020

NO	PROVINSI/NASIONAL	PERSEN (%)	
		2019	2020
1	DIY	6,60	-2,69
2	DKI Jakarta	5,89	-2,36
3	Jawa Timur	5,52	-2,39
4	Jawa Tengah	5,41	-2,65
5	Jawa Barat	5,07	-2,44
6	Banten	5,53	-3,38
	Nasional	5,02	-2,07

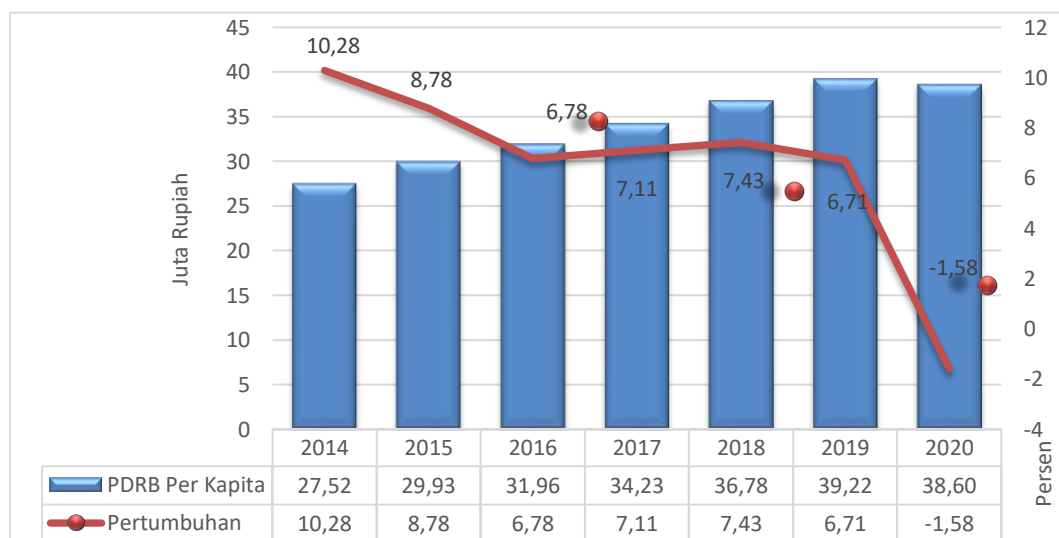
Sumber: BPS Jateng, 2021 (diolah)

PDRB Per Kapita

PDRB per kapita Jawa Tengah atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar Rp38,60 juta turun sebesar -1,58% dibanding PDRB per kapita

tahun 2019 sebesar Rp39,22 juta. Pertumbuhan PDRB perkapita selalu di atas nilai inflasi yang terjadi di Jawa Tengah yang menggambarkan adanya peningkatan kesejahteraan. Grafik 2.6. memperlihatkan PDRB Perkapita Jawa Tengah dan Pertumbuhannya tahun 2014 – 2020.

Grafik 2.6.
PDRB Perkapita Jateng (Rp Juta) dan Pertumbuhannya (%) Tahun 2014 – 2020



Sumber : BPS Jateng, 2021 (diolah)

Berdasarkan grafik 2.6 dapat dijelaskan bahwa disparitas pendapatan yang terjadi di Jawa Tengah periode 2020 sangat tinggi. Tidak meratanya pendapatan ekonomi ini menunjukkan perlunya strategi khusus dalam

meningkatkan perekonomian pada daerah-daerah dengan pendapatan per kapita rendah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Penyebab penurunan angka PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Perlambatan Ekonomi Global (ekspor/impor) utamanya komponen bahan baku, alat, dan mesin industri impor.
2. Penerapan kebijakan PSBB, pembatasan kegiatan ekonomi dan pembatasan mobilitas masyarakat akibat penyebaran pandemic *covid-19* yang massif dan luas.
3. Penurunan ketersediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*) akibat penurunan daya beli masyarakat.

Gini Ratio/Ketimpangan Pendapatan

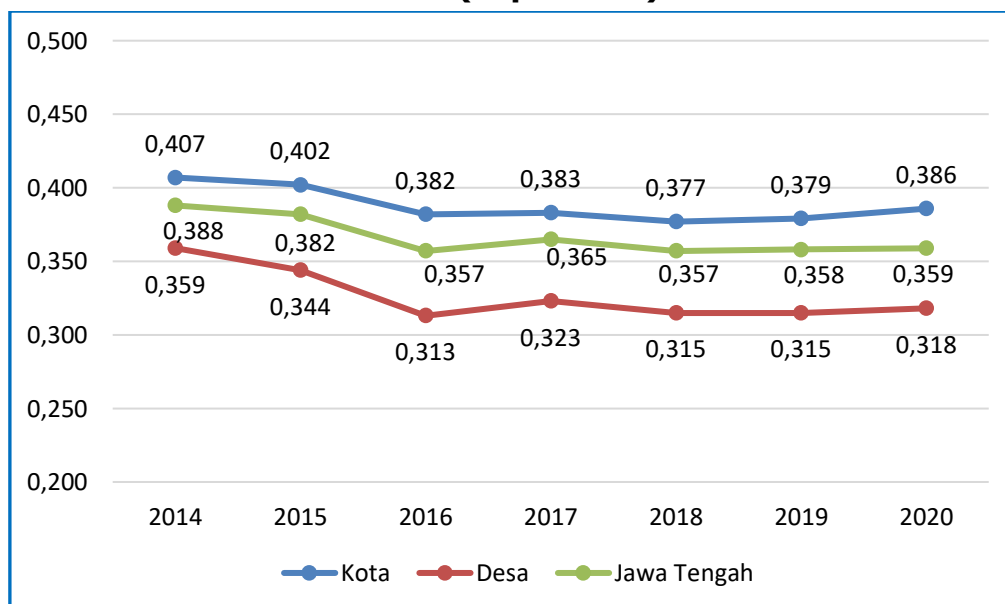
Rasio Gini merupakan indikator statistik yang mengukur dampak hasil pembangunan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan/pengeluaran antar kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, menengah dan rendah. Semakin tinggi nilai gini rasio menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan antar kelompok masyarakat. Meskipun berfluktuasi, secara umum gini rasio Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan setidaknya sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, Namun selama 2 tahun terakhir tren gini rasio sedikit mengalami peningkatan.

Pada September 2020, Rasio Gini Jawa Tengah adalah 0,359 atau sedikit meningkat 0,001 poin dibanding September 2019 sebesar 0,358. Peningkatan gini rasio tersebut tidak terlepas dari adanya pandemi COVID-19 yang melemahkan berbagai sektor ekonomi. Lemahnya ekonomi memicu adanya pengangguran maupun penurunan pendapatan. Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga meningkatkan pendapatan pada sebagian kelompok masyarakat misalnya yang berusaha di sektor informasi dan komunikasi. Peningkatan ketimpangan pendapatan tersebut memicu meningkatnya angka gini rasio.

Bila diperbandingkan antara ketimpangan perkotaan dengan perdesaan, Rasio Gini perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan Rasio Gini

wilayah perdesaan. Pada September 2020, Indeks Gini perdesaan adalah 0,318 sedangkan rasio Gini perkotaan adalah 0,386. Perbedaan tersebut menunjukkan masalah ketimpangan pendapatan atau pengeluaran masyarakat di wilayah perkotaan lebih tinggi dibanding di pedesaan (Grafik 2.7.). Penurunan rasio Gini di wilayah perkotaan dan perdesaan tersebut menunjukkan bahwa dampak Pandemi COVID-19 tidak hanya terasa di daerah perkotaan namun juga dirasakan oleh masyarakat perdesaan. Bahkan dampak terbesar Pandemi COVID-19 adalah di daerah perkotaan yang terlihat dari peningkatan gini rasio lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

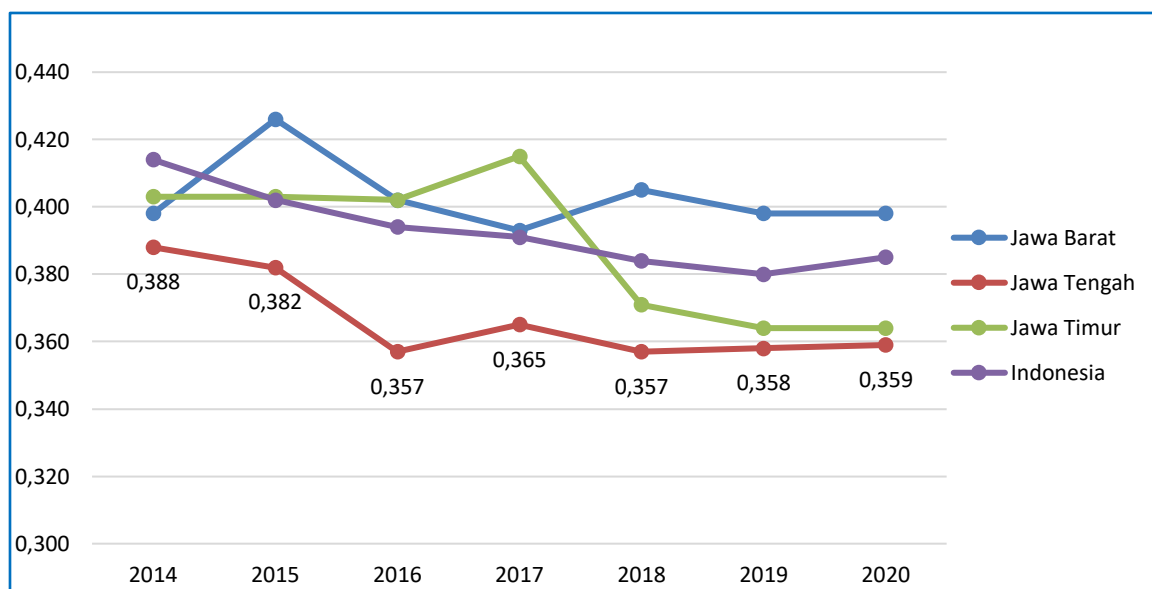
Grafik 2.7.
Gini Rasio Jawa Tengah Menurut Wilayah, 2014 (September) – 2020 (September)



Sumber: Data BPS Jateng, 2020 (diolah)

Seperti disajikan dalam Grafik 2.8. di bawah ini, meskipun laju penurunan Rasio Gini Jawa Tengah cenderung berfluktuasi, akan tetapi cenderung menurun dari tahun 2014. Selain itu nilai Rasio Gini Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan Rasio Gini Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan Nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan/pengeluaran antar kelompok masyarakat berpendapatan atau berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan atau berpendapatan menengah dan rendah di Jawa Tengah sangat rendah jika dibandingkan provinsi besar di pulau Jawa dalam enam tahun terakhir.

Grafik 2.8.
Perkembangan Gini Rasio Jateng, Jabar, Jatim dan Indonesia
Tahun 2014 (September) – 2020 (September)



Sumber: Data Susenas BPS Jateng, 2020 (diolah)

Upaya dalam rangka menurunkan ketimpangan pendapatan penduduk di Jawa Tengah telah dilakukan, seperti meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro kecil melalui program Kredit Usaha Rakyat dan Program Kredit Mitra Jateng 25, pendidikan vokasi, pengembangan wirausaha di masyarakat, pengembangan sektor industri pengolahan dan pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja, mempermudah layanan izin usaha melalui aplikasi Online Single Submission (OSS).

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari capaian indikator kinerja kunci keluaran, indikator kinerja kunci hasil dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
1.	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah					
		1	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri tereakreditasi	Unit	-	1,047	1,047	DISDIKBUD & KEMENAG
		2	Jumlah peserta didik sekolah menengah atas yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	-	591,822	591,822	DISDIKBUD & KEMENAG
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah Daerah	Orang	-	778,951	778,951	DISDIKBUD

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	-	591,822	591,822	DISDIKBUD & KEMENAG
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	-	778,951	778,951	DISDIKBUD
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	Orang	-	18,834	18,834	DISDIKBUD & KEMENAG
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	Orang	-	6,490	6,490	DISDIKBUD
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	Orang	-	38,481	38,481	DISDIKBUD & KEMENAG

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	Orang	-	45,071	45,071	DISDIKBUD
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	Orang	-	17,609	17,609	DISDIKBUD & KEMENAG
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	Orang	-	3,768	3,768	DISDIKBUD
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	Orang	-	22,346	22,346	DISDIKBUD & KEMENAG
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	Orang	-	13,355	13,355	DISDIKBUD

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S 1) dan sertiftkat pendidik	Orang	-	27,928	27,928	DISDIKBUD & KEMENAG
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang	-	21,392	21,392	DISDIKBUD
		16	Jumlah kepala sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjai1a (S 1) , sertiftkat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan	Orang	-	1,071	1,071	DISDIKBUD & KEMENAG

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			dan pelatihan calon kepala sekolah					
		17	Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikasi pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	-	392	392	DISDIKBUD
		18	Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	-	189	189	DISDIKBUD & KEMENAG
		19	Jumlah tenaga laboratorium/ bengkel / workshop pada jenjang Sekolah menengah kejuruan yang memiliki yang	Orang	-	180	180	DISDIKBUD

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			memiliki ijazah SMA/ sederajat					
		20	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	-	6,742	6,742	DISDIKBUD & KEMENAG
		21	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	-	3,530	3,530	DISDIKBUD
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus					
		1	Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	Unit	-	167	167	DISDIKBUD

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		2	Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	-	18,115	18,115	DISDIKBUD
		3	Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	-	18,115	18,115	DISDIKBUD
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus	Orang	-	577	577	DISDIKBUD
		5	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus	Orang	-	2,816	2,816	DISDIKBUD
		6	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	Orang	-	302	302	DISDIKBUD
		7	jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	Orang	-	934	934	DISDIKBUD

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		8	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang	-	1,298	1,298	DISDIKBUD
		9	Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	-	94	94	DISDIKBUD
		10	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	-	302	302	DISDIKBUD
2	Kesehatan	3	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan					

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		1	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Unit	-	283	283	DINKES & RS. PROV JTG
		4	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi					
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Unit	-	7	7	DINKES & RS. PROV JTG
		5	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Rupiah	-	3,793,302,000	3,793,302,000	DINKES & RS. PROV JTG
		2	Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Pos	-	3	3	DINKES & RS. PROV JTG
		3	Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi	Orang	-	120	120	DINKES & RS. PROV JTG

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi					
		4	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Orang	-	60	60	DINKES & RS. PROV JTG
		5	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Kegiatan	-	7	7	DINKES & RS. PROV JTG
		6	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi					

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	rupiah	-	3,793,302,000.00	3,793,302,000.00	DINKES & RS. PROV JTG
		2	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	orang	-	60	60	DINKES & RS. PROV JTG
		3	Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	pertemuan	-	0	0	DINKES & RS. PROV JTG
3.	PU TARU	7	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir					
		8	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi					
		1	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	Ha	-	40,571	40,571	PU SDA TARU

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	M	-	5,326,257	5,326,257	PU SDA TARU
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (HA)	Ha	-	41,845.71	41,846	PU SDA TARU
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	HA	-	412,251.85	412,252	PU SDA TARU
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Ada/Tidak	-	Ada	Ada	PU SDA TARU

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	Ada/Tidak	-	Ada	Ada	PU SDA TARU
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Jumlah	-	3	3	PU SDA TARU
		9	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi					
		1	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	%	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)	218.22	70.64%	PU SDA TARU
					Panjang jaringan irigasi primer (m)	308.94		
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	%	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)	736.25	73.41%	PU SDA TARU

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
					Panjang jaringan irigasi sekunder (m)	1002.94		
		3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi	%	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)	8,810,127	33.98%	DISTANBUN
					Panjang jaringan irigasi tersier (m)	25,926,926		
		10	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota					
		1	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	Ada/Tidak	-	Ada	Ada	PU BMCK
		2	Tersusun dan ditetapkan JAKSTRADA provinsi	Ada/Tidak	-	tidak	tidak	PU BMCK
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM	BUMD/UPTD	-	Ada	Ada	PU BMCK
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk	Izin	-	0	0	PU BMCK

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			penyelenggaraan SPAM					
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Kerjasama	-	Ada	Ada	PU BMCK
		11	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional					
		1	Jumlah SPALD Regional	Unit	-	0	0	PU BMCK
		2	Total kapasitas SPALD Regional		-	0	0	PU BMCK
		3	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional		-	0	0	PU BMCK
		4	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik		-	957	957	PU BMCK

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		5	Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	BUMD/UPTD	-	0	0	PU BMCK
		12	Rasio kemantapan jalan					
		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	KM	-	2.404,741 Km	2.404,741 Km	PU BMCK
		2	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	Ada/Tidak	-	0	0	PU BMCK
		3	Panjang jalan yang dibangun	KM	-	1,75	1,75	PU BMCK
		4	Panjang jembatan yg dibangun	M	-	0	0	PU BMCK
		5	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	KM	-	29,697	29697	PU BMCK

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		6	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	M	-	60	60	PU BMCK
		7	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	KM	-	1065	1065	PU BMCK
		8	Panjang jembatan yang direhabilitasi	M	-	11	11	PU BMCK
		9	Panjang jalan yang dipelihara	KM	-	2,372,229	2372229	PU BMCK
		10	Panjang jembatan yang dipelihara	M	-	23,776.19	23776.19	PU BMCK
		13	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli					
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	Orang	-	160	160	PU BMCK
		2	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	Orang	-	28,653	28653	PU BMCK
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Orang	-	5,816	5816	PU BMCK

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	Ada/Tidak	-	Ada	Ada	PU BMCK
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	Ada/Tidak	-	Ada	Ada	PU BMCK
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	Ada/Tidak	-	ada	ada	PU BMCK
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber	Ada/Tidak	-	0	0	PU BMCK

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			dari pendanaan lainnya					
		8	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	Ada/Tidak	-	Ada	Ada	PU BMCK
		9	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan latihan Kerja (LPKK)	Ada/Tidak	-	Ada	Ada	PU BMCK
		10	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan	Ada/Tidak	-	Ada	Ada	PU BMCK

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			sertifikat pelatihan ahli					
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Ada/Tidak	-	Ada	Ada	PU BMCK
		12	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak	-	0	0	PU BMCK

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		13	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak	-	0	0	PU BMCK
		14	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak	-	0	0	PU BMCK
4.	Perumahan Rakyat	14	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni					
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan	Unit	-	2287	2287	DISPERAKIM

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			rencana penanganannya					
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Unit	-	1386	1386	DISPERAKIM
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Orang	-	5367	5367	DISPERAKIM
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Unit	-	105	105	DISPERAKIM
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Unit	-	11	11	DISPERAKIM
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Unit	-	11	11	DISPERAKIM

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Unit	-	32	32	DISPERAKIM
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Orang	-	464	464	BPBD/disperakim
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Ha	-	0	0	DISPERAKIM
		15	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni					
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	RT	-	0	0	DISPERAKIM

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	RT	-	0	0	DISPERAKIM
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencanapemenuhan SPM	RT	-	116	116	DISPERAKIM
		4	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni	RT	-	1386	1386	DISPERAKIM

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			berdasarkan rencana pemenuhan SPM					
		16	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani					
		1	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh $\geq$ 10-15 Ha	Ha	-	35.54	35.54	DISPERAKIM
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Unit	-	10182	10182	DISPERAKIM
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Ha	-	967.08	967.08	DISPERAKIM
		17	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU					
		1	Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	Pemukiman	-	502	502	DISPERAKIM
		2	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Pengembang	-	0	0	DISPERAKIM

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		3	Jumlah pengembang yang teregistrasi	Pengembang	-	772	772	DISPERAKIM
		4	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Pengembang	-	0	0	DISPERAKIM
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan					
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Jumlah	-	300	300	SATPOL PP
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	-	560	560	SATPOL PP
		3	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	Jumlah	-	166	166	SATPOL PP
		4	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perda & Perkada	-	4	4	SATPOL PP
		5	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Orang	-	8	8	SATPOL PP

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		6	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkeda serta penanganan gangguan Trantibum	SOP	-	10	10	SATPOL PP
		19	Persentase Perda dan Perkeda yang ditegakkan					
		20	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal					
		1	Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	Ada/Tidak	-	ada	ada	BPBD
		2	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	Ada/Tidak	-	ada	ada	BPBD
		3	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	Ada/Tidak	-	ada	ada	BPBD
		21	Persentase penanganan pra bencana					

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		1	Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	Kegiatan	-	5	5	BPBD
		2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub- urusan bencana daerah kabupaten/kota	Kegiatan	-	1	1	BPBD
		22	Persentase penanganan tanggap darurat bencana					
		1	Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	Ada/Tidak	-	ada	ada	BPBD
		2	Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	Ada/Tidak	-	ada	ada	BPBD
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	Kegiatan	-	4	4	BPBD

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	Jumlah	-	5	5	BPBD
6.	Sosial	23	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti					
		1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Anak	-	3,864	3864	DINSOS
		2	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Anak	-	1,764	1,764	DINSOS
		3	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	Asrama	-	182	182	DINSOS
		4	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	Unit	-	559	559	DINSOS
		5	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Perbekalan	-	36	36	DINSOS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		6	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Orang	-	165	165	DINSOS
		7	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	Peralatan	-	201	201	DINSOS
		8	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	Orang	-	41	41	DINSOS
		9	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	Paket	-	95	95	DINSOS
		10	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Paket	-	19	19	DINSOS
		11	Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial	Orang	-	48	48	DINSOS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			yang disediakan di dalam panti					
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Orang	-	70	70	DINSOS
		13	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidilkan dan kesehatan dasar	Orang	-	1,764	1,764	DINSOS
		14	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Orang	-	77	77	DINSOS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	-	259	259	DINSOS
		24	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti					
		1	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Anak	-	2,895	2,895	DINSOS
		2	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Anak	-	1,195	1,195	DINSOS
		3	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (panti)	Asrama	-	86	86	DINSOS
		4	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	Unit	-	40	40	DINSOS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		5	Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	Perbekalan	-	493	493	DINSOS
		6	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Orang	-	87	87	DINSOS
		7	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Peralatan	-	61	61	DINSOS
		8	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Orang	-	22	22	DINSOS
		9	Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Orang	-	26	26	DINSOS
		10	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan	Paket	-	70	70	DINSOS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			sosial yang dilaksanakan dalam panti					
		11	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Paket	-	14	14	DINSOS
		12	Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	Anak	-	36	36	DINSOS
		13	Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Anak	-	1,195	1,195	DINSOS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		14	Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	Anak	-	182	182	DINSOS
		15	Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Anak	-	354	354	DINSOS
		25	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti					
		1	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	-	1,685	1,685	DINSOS
		2	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	-	1,285	1,285	DINSOS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		3	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	Asrama	-	110	110	DINSOS
		4	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	Unit	-	301	301	DINSOS
		5	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Perbekalan	-	56	56	DINSOS
		6	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Orang	-	124	124	DINSOS
		7	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	Peralatan	-	15	15	DINSOS
		8	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Orang	-	28	28	DINSOS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		9	Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Orang	-	33	33	DINSOS
		10	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Paket	-	13	13	DINSOS
		11	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Paket	-	88	88	DINSOS
		12	Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar	Orang	-	1,285	1,285	DINSOS
		13	Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan	Orang	-	39	39	DINSOS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			pelayanan penulusuran keluarga					
		14	Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	-	62	62	DINSOS
		15	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	Orang	-	184	184	DINSOS
		26	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti					
		1	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Anak	-	830	830	DINSOS
		2	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket	Anak	-	580	580	DINSOS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			sandang di dalam panti					
		3	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	Asrama	-	32	32	DINSOS
		4	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	Unit	-	16	16	DINSOS
		5	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Perbekalan	-	6	6	DINSOS
		6	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Orang	-	45	45	DINSOS
		7	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	Peralatan	-	30	30	DINSOS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		8	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Orang	-	13	13	DINSOS
		9	Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Orang	-	16	16	DINSOS
		10	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Paket	-	6	6	DINSOS
		11	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	Paket	-	580	580	DINSOS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		12	Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti	Orang	-	38	38	DINSOS
		13	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	-	580	580	DINSOS
		14	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penuluruhan keluarga	Orang	-	35	35	DINSOS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		15	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	-	131	131	DINSOS
		27	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi					
		1	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	Orang	-	11,532	11,532	DINSOS
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Orang	-	11,532	11,532	DINSOS
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Tempat	-	0	0	DINSOS
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Paket	-	986	986	DINSOS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Orang	-	986	986	DINSOS
		6	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Orang	-	1,345	1,345	DINSOS
7.	Tenaga Kerja	28	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja					
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	Ada/Tidak	-	ADA	ADA	DISNAKERTRANS
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	%	-	96.36	96.36	DISNAKERTRANS
		3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja.	Perusahaan	-	20	20	DISNAKERTRANS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		4	Jumlah kabupaten/kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan.	Kabupaten/ Kota	-	6	6	DISNAKERTRANS
		29	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi					
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi KKNi / okupasi	%	-	100%	1	DISNAKERTRANS
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	%	jumlah penerapan program PBK Kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun n	43	93.48%	DISNAKERTRANS
					Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n	46		

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan.	%	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n	46	1.99%	DISNAKERTRANS
					jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n	2317		
		4	Persentase penganggur yang dilatih	%	jumlah peserta pelatihan pada tahun n	2292	42.74%	DISNAKERTRANS
					jumlah penganggur pada tahun n	5363		
		5	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	%	jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n	2361	70.71%	DISNAKERTRANS
					jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	3339		
		6	Persentase penyerapan lulusan	%	jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n	1405	61.30%	DISNAKERTRANS
					jumlah lulusan pada tahun n	2292		

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		7	Persentase LPK yang terakreditasi	%	jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n	29	85.29%	DISNAKERTRANS
					jumlah seluruh LPK pada tahun n	34		
		8	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	Orang	jumlah CPMI dilatih	74	100%	DISNAKERTRANS
					jumlah CPMI terdaftar	74		
		9	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	Orang	-	79	79	DISNAKERTRANS
		30	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja					
		1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%	jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n	165	29.95%	DISNAKERTRANS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
					jumlah perusahaan pada tahun n	551		
		2	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	%	jumlah lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas pada tahun n	32	46.38%	DISNAKERTRANS
					jumlah lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan di provinsi pada tahun n	69		
		3	Data tingkat produktivitas total.		-	54.97	54.97	DISNAKERTRANS
		31	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).					
		1	Persentase perusahaan yang telah memiliki	%	jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n	4122	21.22%	DISNAKERTRANS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			Peraturan Perusahaan (PP)		jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	19427		
		2	Persentase Perusahaan yg telah memiliki PKB.	%	jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n	597	3.07%	DISNAKERTRANS
					jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	19427		
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh di perusahaan pada tahun n.	Orang	Jumlah anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh di perusahaan sesuai yang tercantum dalam formulir pendaftaran PKB di satu Provinsi pada tahun n.	538310	538310	DISNAKERTRANS
		4	Persentase perusahaan yang	%	jumlah perusahaan yang sudah menyusun	3697	15.65	DISNAKERTRANS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			sudah menyusun struktur skala upah.		struktur dan skala upah			
					jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP dan PKB)	23626		
		5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.	%	jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	1786094	96.56%	DISNAKERTRANS
					jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	1849716		
		6	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit.	%	jumlah perusahaan yang sudah membentuk LKS Bipartit	1919	47.59%	DISNAKERTRANS
					jumlah perusahaan berdasarkan	4032		

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
					perusahaan wajib lapor			
		7	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%	jumlah perusahaan yang berselisih	849	0.05%	DISNAKERTRANS
					jumlah perusahaan pada tahun n	1849716		
		8	Jumlah mogok kerja	Mogok	-	127	127	DISNAKERTRANS
		9	Jumlah penutupan perusahaan	Perusahaan	-	13	13	DISNAKERTRANS
		10	Jumlah perselisihan kepentingan	Kasus pertahun	-	42	42	DISNAKERTRANS
		11	Jumlah perselisihan hak		-	274	274	DISNAKERTRANS
		12	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan		-	1	1	DISNAKERTRANS
		13	Jumlah Perselisihan PHK		-	511	511	DISNAKERTRANS
		14	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		-	6519	6519	DISNAKERTRANS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	
		15	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		-	129	129	DISNAKERTRANS	
		16	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	Mediasi	-	430	430	DISNAKERTRANS	
		17	Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan.		-	35	35	DISNAKERTRANS	
		18	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional	%	Jumlah perjanjian bersama	357	43.12%	DISNAKERTRANS	
					jumlah kasus perselisihan	828			
		32	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.						
		1	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang	Rekomendasi	-	7	7	DISNAKERTRANS	

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			diberikan oleh dinas provinsi					
		2	Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	Surat	-	4	4	DISNAKERTRANS
		3	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	Orang	-	41970	41970	DISNAKERTRANS
		4	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	Lowongan Kerja	-	97081	97081	DISNAKERTRANS
		5	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu provinsi	Orang	-	62778	62778	DISNAKERTRANS
		6	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	Orang	-	62	62	DISNAKERTRANS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		7	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi.	Lembaga	-	8	8	DISNAKERTRANS
		8	Jumlah Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi.	Lembaga	-	6	6	DISNAKERTRANS
		9	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi Pasar Kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER).	Orang	-	65	65	DISNAKERTRANS
		10	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga	%	jumlah fasilitasi PMI yang dipulangkan	2312	69.37%	DISNAKERTRANS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya.		jumlah PMI yang pulang	3333		
		11	Jumlah ijin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)/PerusahaanP enempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang diterbitkan.	%	jumlah yang diterbitkan	30	1	DISNAKERTRANS
					jumlah pengajuan ijin kantor cabang	30		
		12	Jumlah Pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI).	Pos	jumlah pelayanan yang terbentuk	0	0.00%	DISNAKERTRANS
					jumlah debarkasi/embark asi	2		
		33	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan					
		1	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kebebasan Berserikat.	Perusahaan	-	145	145	DISNAKERTRANS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		2	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKWI).	Perusahaan	-	446	446	DISNAKERTRANS
		3	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Pengupahan.	Perusahaan	-	446	446	DISNAKERTRANS
		4	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Jaminan Sosial.	Perusahaan	-	359	359	DISNAKERTRANS
		5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Perempuan.	Perusahaan	-	114	114	DISNAKERTRANS
		6	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Perusahaan	-	4246	4246	DISNAKERTRANS
		7	Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.	Penyidikan	-	1	1	DISNAKERTRANS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		8	Jumlah Perusahaan yang mendaftar Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online.	Perusahaan	-	22417	22417	DISNAKERTRANS
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	34	Persentase ARG pada belanja langsung APBD					
		1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	Lembaga	-	35	35	DP3AKB
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	Prog/Keg	-	4	4	DP3AKB

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		35	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak					
		1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Media Massa	-	16	16	DP3AKB
		2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Lembaga	-	35	35	DP3AKB
		3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	jumlah korban keekrasan anak yang dilayani	1197	100.00%	DP3AKB
					jumlah korban kekerasan anak di tingkat provinsi	1197		
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Lembaga	-	35	35	DP3AKB

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	Lembaga	-	0	0	DP3AKB
		36	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)					
		1	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Kebijakan/Program	-	2	2	DP3AKB
		2	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Lembaga	-	1	1	DP3AKB

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		3	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan	809	100%	DP3AKB
					jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	809		
		4	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	Lembaga	-	1	1	DP3AKB
		5	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	Lembaga	-	0	0	DP3AKB
9.	Pangan	37	Persentase cadangan pangan					
		1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk	Ada/Tidak	-	Ada	Ada	DISHANPAN

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			penyimpanan cadangan pangan					
		2	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ton	-	139	139	DISHANPAN
		3	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	Ada/Tidak	-	Ada	Ada	DISHANPAN
		4	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	Ada/Tidak	-	tidak	tidak	DISHANPAN
		5	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	Ada/Tidak	-	Ada	Ada	DISHANPAN
		6	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	Ada/Tidak	-	Ada	Ada	DISHANPAN
		7	Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	Ada/Tidak	-	Ada	Ada	DISHANPAN

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		8	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	Ada/Tidak	-	ada	ada	DISHANPAN
		9	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	Ada/Tidak	-	Ada	Ada	DISHANPAN
		10	Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	Ada/Tidak	-	ada	ada	DISHANPAN
10.	Pertanahan	38	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan					
		1	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	%	jumlah SK Penetapan lokasi yang diterbitkan	0	0.00%	BIRO HUKUM DAN BAG KERJASAMA
					jumlah dokumen perencanaan yang diusulkan	1		
		2	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	%	jumlah masalah yang diselesaikan	7	100.00%	DISPERAKIM
					jumlah masukan terdaftar	7		

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	
		3	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	%	jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)	0	0.00%	BIRO HUKUM DAN BAG KERJASAMA	
			jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun		1				
		4	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	%	jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang disusun	0	0.00%	BIRO HUKUM DAN BAG KERJASAMA	
			jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang direncanakan dalam 1 tahun		1				
		39	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu						

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		40	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota					
11.	Lingkungan Hidup	41	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi					
		1	1. Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)		-	ada	ada	LH & KEHUTANAN
		42	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					
		1	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	%	izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	10	100.00%	LH & KEHUTANAN
					jumlah usulan permohonan yang teregistrasi	10		

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	%	jumlah PPLHD yang ada	7	70.00%	LH & KEHUTANAN
					jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	10		
		3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	%	jumlah MHA yang diakui dengan perda	1	100.00%	LH & KEHUTANAN
					jumlah usulan MHA	1		
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	%	jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan	0	0.00%	LH & KEHUTANAN
					jumlah MHA yang ada	1		
		5	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan	%	jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan	0	0.00%	LH & KEHUTANAN

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH		jumlah MHA yang ada	1		
		6	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsidan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	%	pengaduan masyarakat yang ditangani	15	100.00%	LH & KEHUTANAN
					total jumlah pengaduan masyarakat yang terregistrasi	15		
12.	Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil	43	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun					
		44	Pemanfaatan Data Kependudukan					
		1	Fasilitasi pelayanan Adminduk	%	jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan adminduk dalam satu tahun	35	100.00%	DISPERMADES DUKCAPIL

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
					jumlah kabupaten/kota	35		
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45	Persentase pengentasan desa tertinggal					
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Desa	-	39	39	DISPERMADES DUKCAPIL
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Desa	-	97	97	DISPERMADES DUKCAPIL
		46	Persentase peningkatan status desa mandiri					
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Lembaga	-	2371	2371	DISPERMADES DUKCAPIL

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Desa	-	590	590	DISPERMADES DUKCAPIL
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	47	TFR (angka kelahiran Total)					
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada/Tidak	-	Ada	Ada	BP3AKB
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Nilai Tengah	-	20.5	20.5	DISPERMADES DUKCAPIL
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		-	38.8	38.8	BKKBN

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	%	-	55.2%	55.2	DP3AKB
		5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Stakeholder	-	8	8	DP3AKB
		48	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)					
		1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	%	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP	1,266	70	DP3AKB/BKKB N
					Jumlah faskes	1,804		
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA)	%	Jumlah peserta KB Aktif	1,364,801	20.92	DP3AKB/BKKB N

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jumlah PUS	6,525,048		
		3	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	DP3AKB/BKKB N
		4	Persentase pelayanan KBPasca Persalinan	%	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern	12,015	98.27	DP3AKB/BKKB N
					jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan	12,226		
		49	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)					
		1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	%	-	34	34	DP3AKB
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima	%	jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI	1,305,556	100.00%	DP3AKB

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			Bantuan Iuran (PBI)		Jumlah keluarga PBI	1,305,556		
15.	Perhubungan	50	Rasio Konektivitas Provinsi					
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	%	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe B yang tersedia	275	52.08%	DISHUB
					Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan	528		
		2	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan	%	Jumlah penetapan tarif	260	95.59%	DISHUB

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi		jumlah trayek AKDP angkutan perkotaan dan pedesaan	272		
		51	Kinerja lalu lintas provinsi					
		1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	%	jumlah pemasangan perlengkapan jalan Provinsi	1337	100.00%	DISHUB
					Target kebutuhan perlengkapan jalan Provinsi	1337		
16.	Komunikasi dan Infomatika	52	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo					
		1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	41	100.00%	DISKOMINMFO

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
					Jumlah Perangkat Daerah	41		
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%	jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo	41	100.00%	DISKOMINMFO
					jumlah Perangkat Daerah	41		
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra	Ada/Tidak	-	Ada	Ada	DISKOMINMFO
		53	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi					

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	%	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	2123	100.00%	DISKOMINMFO
					kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah	2123		

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	41	100.00%	DISKOMINMFO
					jumlah perangkat daerah	41		
		3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	41	100%	DISKOMINMFO
					jumlah perangkat daerah	41		
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam	%	jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan)	8	100.00%	DISKOMINMFO

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik		yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik			
					jumlah layanan	8		
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	8	100.00%	DISKOMINMFO
					jumlah layanan	8		
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	371	100%	DISKOMINMFO
					jumlah sistem elektronik	371		

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	10	100%	DISKOMINMFO
					layanan publik dan layanan administrasi	10		
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	41	100.00%	DISKOMINMFO
					jumlah perangkat daerah	41		
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%	jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	20	48.78%	DISKOMINMFO

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
					jumlah perangkat daerah	41		
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	%	jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	41	100.00%	DISKOMINMFO
					jumlah perangkat daerah	41		
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	jumlah data yang dapat berbagi pakai	11	100.00%	DISKOMINMFO
					jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah	11		
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	41	100.00%	DISKOMINMFO
					jumlah perangkat daerah	41		

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	%	jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	18	100.00%	DISKOMINMFO
					jumlah ASN Pengelola TIK	18		
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e- government	Ada/Tidak	-	Ada	Ada	DISKOMINMFO
		54	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi					
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	%	jumlah komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	34,490,835	100.00%	DISKOMINMFO

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
					komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	34,490,835		
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	20	100.00%	DISKOMINMFO
					jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	20		
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi	%	jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan	6	100.00%	DISKOMINMFO

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP			
					jumlah diseminasi dan layanan informasi publik	6		
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	55	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas					
		1	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam, koperasi pada tahun yang dilaporkan	36	97.30%	DINKOP UMKM
					jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	37		
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha	%	Jumlah penerbitan izin pembukuan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas	21	100.00%	DINKOP UMKM

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan			
					jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	21		
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	335		
					jumlah koperasi yang ada	670	50.00%	DINKOP UMKM

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	128	35.56%	DINKOP UMKM
					jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	360		
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	386	57.61%	DINKOP UMKM
					jumlah koperasi yang ada	670		
		6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk	%	jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	480	0.0206%	DINKOP UMKM

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		jumlah anggota koperasi yang ada	2,330,341		
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan	291	43.4328%	DINKOP UMKM
					jumlah koperasi yang ada	670		
		8	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah	%	jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasinya	40	5.9701%	DINKOP UMKM

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		jumlah koperasi yang ada	670		
		9	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	125	18.6567%	DINKOP UMKM
					jumlah koperasi yang ada	670		
		10	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	0	0.0000%	DINKOP UMKM
					jumlah koperasi yang ada	670		

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		11	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan Lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	253	37.7612%	DINKOP UMKM
					jumlah koperasi yang ada	670		
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	0	0.0000%	DINKOP UMKM
					jumlah koperasi yang ada	670		
		56	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha					

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	%	jumlah pertumbuhan wirausaha baru	915	100.00%	DINKOP UMKM
					jumlah wirausaha yang ada	915		
		2	Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem <i>online</i> data system (ODS)	%	jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)	2,290	0.65%	DINKOP UMKM
					Jumlah usaha kecil yang ada	354,884		
		3	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	%	Jumlah usaha kecil yang bermitra	0	0.00%	DINKOP UMKM
					jumlah usaha kecil yang ada	354,884		
		4	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi	500	100.00%	DINKOP UMKM

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
					jumlah usaha kecil yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	500		
		5	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1,635	100.00%	DINKOP UMKM
					jumlah usaha kecil yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	1,635		
		6	Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	2,360	0.67%	DINKOP UMKM
					jumlah usaha kecil yang ada	354,884		
		7	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan	%	Jumlah Usaha Kecil yang diberikan pendampingan	4,524	1.27%	DINKOP UMKM

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			kelembagaan dan usaha		kelembagaan dan usaha			
					jumlah usaha kecil yang ada	354,884		
18.	Penanaman Modal	57	Persentase peningkatan investasi di provinsi					
		1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Ada/Tidak	-	Ada	Ada	DPMPTSP
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Ada/Tidak	-	ada	ada	DPMPTSP
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah Laporan	-	1	1	DPMPTSP

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, <i>one on one meeting</i>	<i>Jumlah Kegiatan</i>	-	14	14	DPMPTSP
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah Kegiatan	-	1	1	DPMPTSP
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah Kegiatan	-	11	11	DPMPTSP
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah Konsultasi	-	3337	3337	DPMPTSP
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	-	5726	5726	DPMPTSP
		9	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah Realisasi (Rupiah)	-	56,075,323,610,459	5.60753E+13	DPMPTSP
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	Jumlah Aparatur	-	19	19	DPMPTSP

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah Perusahaan	-	24	24	DPMPTSP
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi	Ada/Tidak	-	ada	ada	DPMPTSP
19	Kepemudaan dan Olahraga	58	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri					
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Orang	-	300	300	DISPORAPAR
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Orang	-	300	300	DISPORAPAR
		3	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Orang	-	200	200	DISPORAPAR
		59	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan					

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		1	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Orang	-	20	20	DISPORAPAR
		60	Peningkatan prestasi olahraga					
		1	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Orang	-	150	150	DISPORAPAR
		2	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	Orang	-	300	300	DISPORAPAR
		3	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Kegiatan	-	0	0	DISPORAPAR
		4	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	Orang	-	1758	1758	DISPORAPAR

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		5	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Organisasi	-	1	1	DISPORAPAR
20.	Statistik	61	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					
		1	Tersedianya buku profil daerah	Ada/tidak	-	ada	Ada	kominfo
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Survey	-	0	0	kominfo
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Kompilasi	-	1	1	kominfo
		62	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah					
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah Survey	-	0	0	DISKOMINFO
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Jumlah Kompilasi	-	0	0	DISKOMINFO

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	%	jumlah metadata kegiatan statistik sektoral	0	0	DISKOMINFO
					jumlah kegiatan statistik sektoral	1		
		7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	%	jumlah metadata kegiatan statistik sektoral	0	0	DISKOMINFO
					jumlah kegiatan statistik sektoral	1		
21.	Persandian	63	Tingkat keamanan informasi pemerintah					
		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	%	jumlah kegiatan strategis teramankan	5	100.00%	DISKOMINMFO
					jumlah kegiatan strategis yang ada	5		
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan	%	jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau	100	100.00%	DISKOMINMFO

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah		aplikasi penyandian			
					Jumlah SE yang ada	100		
		3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%	jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	16	100.00%	DISKOMINMFO
					jumlah SE yang ada	16		
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	%	jumlah titik teramankan	84	100.00%	DISKOMINMFO
					jumlah titik pada PHKS	84		

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
22.	Kebudayaan	64	Terlestarikannya Cagar Budaya					
		1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Obyek	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	442	442	DISDIKBUD
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Obyek	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	378	378	DISDIKBUD
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan	Obyek	-	442	442	DISDIKBUD

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			meningkatkan kesejahteraan masyarakat)					
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Orang	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	0	0	DISDIKBUD
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Cagar Budaya	Jumlah CB ditetapkan - Jumlah CB dihapuskan	67	67	DISDIKBUD

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		6	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran.	Cagar Budaya	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	2	2	DISDIKBUD
		7	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Cagar Budaya	-	0	0	DISDIKBUD
		8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Cagar Budaya	-	2	2	DISDIKBUD
		9	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Cagar Budaya	-	2	2	DISDIKBUD
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan	Koleksi	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan +	165229	165229	DISDIKBUD

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			pemanfaatan koleksi museum		dikembangkan + dimanfaatkan)			
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Orang	-	6436	6436	DISDIKBUD
		12	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		-	0	0	DISDIKBUD
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Tim	-	0	0	DISDIKBUD
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Tim	-	1	1	DISDIKBUD
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Tim	-	0	0	DISDIKBUD

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		16	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	Orang	-	143	143	DISDIKBUD
		17	Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman	Orang	-	0	0	DISDIKBUD
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Unit	-	0	0	DISDIKBUD
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	-	12	12	DISDIKBUD
23.	Perpustakaan	65	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat					
		1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	%	koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)	276,744	16.47%	DINAS ARPUS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
					jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	1,681,058		
		2	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun insite	2,159,347	128.50%	DINAS ARPUS
					jumlah penduduk di wilayahnya	1,681,058		
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	%	jumlah ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya	284	0.02%	DINAS ARPUS
					jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	1,681,058		
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	jumlah peprustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	407	2.37%	DINAS ARPUS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
					jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya	17,146		
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Kegiatan	-	2	2	DINAS ARPUS
		6	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	KCKR	-	2,140	2140	DINAS ARPUS
		7	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	Judul	-	2,030	2030	DINAS ARPUS
		8	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	Perpustakaan	-	20	20	DINAS ARPUS
		9	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	Terbitan	-	2,140	2140	DINAS ARPUS
		66	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat					

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Naskah Kuno	-	76	76	DINAS ARPUS
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Naskah Kuno	-	8	8	DINAS ARPUS
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Budaya Etnis	-	218	218	DINAS ARPUS
24.	Kearsipan	67	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan					
		1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	3530	100.00%	DINAS ARPUS
					jumlah seluruh arsip aktif	3530		

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	1560	100.00%	DINAS ARPUS
					jumlah seluruh arsip inaktif	1560		
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	10,947	100.00%	DINAS ARPUS
					jumlah seluruh arsip statis	10,947		
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	36,923	100.00%	DINAS ARPUS
					jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi	36,923		
		68	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat					
1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Jumlah Arsip	-	2920	2920	DINAS ARPUS		

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Jumlah Arsip	-	100	100	DINAS ARPUS
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	Jumlah Arsip	-	3,496	3496	DINAS ARPUS
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	Jumlah Arsip	-	32,571	32571	DINAS ARPUS
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar	Jumlah Arsip	-	0	0	DINAS ARPUS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			pencarian arsip yang sesuai NSPK					
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Jumlah Arsip	-	15,648	15648	DINAS ARPUS
Urusan Pilihan								
1	Kelautan dan Perikanan	69	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)					
		1	Jumlah laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang dikelola sumber daya ikannya (WPP)		-	2	2	DINLUTKAN
		2	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 – 30 GT	izin	-	2323	2323	DINLUTKAN

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		3	Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	%	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi minimal 3 (tiga) standar operasional	11	100%	DINLUTKAN
					jumlah seluruh pelabuhan perikanan	11		
		4	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	Izin	-	210	210	DINLUTKAN
		5	Jumlah kapal yang terdaftar	Kapal	-	1208	1208	DINLUTKAN
		6	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah	Izin	-	9	9	DINLUTKAN
		70	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku					

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		1	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku	1721892	100%	DINLUTKAN
					luas wilayah laut dan pesisir yang dimiliki	1721892		
		2	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau- pulau kecil yang dikelola	%	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara efektif	4,219.49	33.51%	
					keseluruhan kawasan konservasi perairan yang dimiliki	12,591.83		DINLUTKAN

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		3	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap Ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kapal	-	119	119	DINLUTKAN
		4	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	Pembudidayaan	-	29	29	DINLUTKAN
		5	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa	Unit Usaha	-	11	11	DINLUTKAN

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			kepatuhannya (<i>compliance</i>) terhadap peraturan perundangan yang berlaku.					
		6	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (<i>compliance</i>) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Izin	-	12	12	DINLUTKAN
		7	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	POKMASWAS	-	45	45	DINLUTKAN

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		8	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	Izin	-	12	12	DINLUTKAN
2	Pariwisata	71	Presentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan					
		72	Presentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi					
		73	Tingkat hunian akomodasi					
		74	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku					
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		-	6	6 i	DISPORAPAR
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		-	6	6	DISPORAPAR
		3	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	Rupiah	-	1,664,765,240,600,000	1,664,765,240,600,000	DISPORAPAR
		4	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata		-	1,664,765,240,600,000	1,664,454,400,000,000.00	DISPORAPAR

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		5	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	TDUP	-	213	213	DISPORAPAR
		6	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	hari	-	1.38	1.38	DISPORAPAR
		7	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	hari	-	1.34	1.34	DISPORAPAR
		8	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	orang	-	78290	78290	DISPORAPAR
		9	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	Perjalanan	-	22629085	22629085	DISPORAPAR
		10	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Kegiatan	-	23	23	DISPORAPAR
		11	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Kegiatan	-	0	0	DISPORAPAR
		12	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi	Industri	-	25	25	DISPORAPAR

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			pariwisata di dalam negeri					
		13	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikat	100	21.28%	
					jumlah tenaga kerja pariwisata	470		DISPORAPAR
		14	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	470	100.00%	DISPORAPAR
					jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan	470		
		15	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		-	7	7	DISPORAPAR
3	Pertanian	75	Produtivitas pertanian per hektar per tahun					
		76	Presentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular					

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Unit	-	2,484	2,484	DISTANBUN
		2	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman horikultura	Sertifikat	-	1126	1126	DISTANBUN
		3	Dokumen pengawasan benih yang beredar	Dokumen	-	12	12	DISTANBUN
		4	Prasarana pertanian yang digunakan	%	jumlah prasarana yang aktif digunakan	960	100%	DISTANBUN
					jumlah prasarana yang dibangun	960		
		5	Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	Ha	-	100,325	100325	DISTANBUN
		6	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	Ha	-	525,673	525673	DISTANBUN
		7	Penerbitan izin usaha pertanian	Izin	-	0	0	DISTANBUN

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		8	Persentase sarana pertanian yang digunakan	%	jumlah sarana yang aktif di gunakan	14644	100%	
					jumlah sarana yang dibangun	14644		DISTANBUN
		9	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	%	jumlah area yang dapat ditanggulangi	163301.46	320%	
					luas area terkena bencana	50961		DISTANBUN
		10	Persentase jumlah usulan usaha pertanian	%	jumlah usulan yang difasilitasi	0	0.00%	
					jumlah usulan usaha pertanian	1		DISTANBUN
4	Kehutanan	77	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial					
		78	Presentase kerusakan hutan pertahun (deforestarsi)					
		79	Presentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi					
		1	1. Dokumen penataan hutan wilayah KPH	%	jumlah dokumen penataan hutan wilayah KPH	20	100.00%	LH & KEHUTANAN
					jumlah total KPH dalam 1 provinsi	20		
		2	Dokumen rencana pengelolaan hutan	%	-	100.00%	100.00%	LH & KEHUTANAN

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			jangka panjang dan jangka pendek		jumlah dokumen rencana pengelola	20		
					jumlah total KPH dalam 1 provinsi	20		
					-	100.00%		
					jumlah dokumen rencana pengelola hutan jangka pendek yang disahkan	20		
					jumlah total KPH dalam 1 Provinsi	20		
		3	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	-	32389.06	32389.06	LH & KEHUTANAN
		4	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	Ha	luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	281.50	281.5	LH & KEHUTANAN
					luas kawasan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	636678.04	636678.04	

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		5	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	%	luas hutan yang terganggu	17.76	0.00%	LH & KEHUTANAN
					luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi	636,678.04		
		6	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000 m3 per tahun yang aktif	%	jumlah iji usaha industri premier hasil hutan kayu	32	3.20%	LH & KEHUTANAN
					jumlah ijin yang ada	999		
		7	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	Ada/tidak	-	ADA	ADA	LH & KEHUTANAN
		8	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Kelompok Masyarakat	-	1	1	LH & KEHUTANAN
		9	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Ha	-	15	15	LH & KEHUTANAN
		10	Menurunnya gangguan kawasan Tahura	Kejadian	-	2	2	LH & KEHUTANAN
		11	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	%	Jumlah penyuluh kehutanan	386	67%	

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
					jumlah kecamatan	576		LH & KEHUTANAN
		12	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	%	jumlah sarpras yang ada	381	99%	
					jumlah penyuluh	386		LH & KEHUTANAN
		13	jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	%	Jumlah KTH yang diberikan diklat	234	50%	
					Rencana atau target KTH yang akan diberikan diklat	470		LH & KEHUTANAN
		14	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial		-	85	85	LH & KEHUTANAN
		15	terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	%	Jumlah DAS yang ditetapkan rencana pengelolaan DAS lintas Daerah Kabupaten Kota dan dalam Daerah Kabupaten/kota	19	8.05%	LH & KEHUTANAN

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
					dalam 1 daerah provinsi			
					jumlah total DAS dalam 1 Provinsi	236		LH & KEHUTANAN
		16	Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor		Jumlah forum komunikasi DAS yang ditetapkan	4	4	LH & KEHUTANAN
5	Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	80	Presentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar Perda					
		1	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	ada/tidak	-	ADA	ADA	DINAS ESDM
		2	Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	ada/tidak	-	ADA	ADA	DINAS ESDM
		81	Presentase Desa yang teraliri listrik					

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		3	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	ada/tidak	-	ADA	ADA	DINAS ESDM
		4	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	ada/tidak	-	ADA	ADA	DINAS ESDM
		5	Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	ada/tidak	-	ADA	ADA	DINAS ESDM
		6	Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	ada/tidak	-	ADA	ADA	DINAS ESDM
		7	Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan	ada/tidak	-	ADA	ADA	DINAS ESDM

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			dalam daerah provinsi					
		8	Perda/Pergub terkait IUJP	ada/tidak	-	ADA	ADA	DINAS ESDM
		9	Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	ada/tidak	-	ADA	ADA	DINAS ESDM
		10	Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	ada/tidak	-	0	0	DINAS ESDM
		11	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	SKT	-	0	0	DINAS ESDM
		12	SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	Izin	-	0	0	DINAS ESDM
		13	Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	ada/tidak	-	ADA	ADA	DINAS ESDM

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		14	Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	ada/tidak	-	ADA	ADA	DINAS ESDM
		15	Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	ada/tidak	-	ADA	ADA	DINAS ESDM
		16	Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang	ada/tidak	-	Tidak Ada	Tidak Ada	DINAS ESDM

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		17	Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	Izin	-	501	501	DINAS ESDM
		18	Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	Unit Rumah	-	12,948	12948	DINAS ESDM
6	Perdagangan	82	Pertumbuhan nilai ekspor non migas					
		1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	%	jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	0	0%	DISPERINDAG

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
					jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitas promosi dagang	81		DISPERINDAG
		2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	%	jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	0	0%	DISPERINDAG
					jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitas promosi dagang	81		DISPERINDAG
		3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	%	jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	75	100%	DISPERINDAG
					jumlah pelaku usaha yang membutuhkan pelatihan atau	75		DISPERINDAG

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
					fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor			
		4	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	%	jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	152	203%	
					jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	75		DISPERINDAG
		5	Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra produk ekspor	Kegiatan	-	1	1	DISPERINDAG
		83	Persentase penanganan pengaduan konsumen					
		1	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	pengaduan	-	36	36	DISPERINDAG

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		2	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	konsumen	-	870	870	DISPERINDAG
		84	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku					
		1	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	komoditi	-	9	9	DISPERINDAG
		2	Indeks Kinerja BPSMB		-	9	9	DISPERINDAG
		85	Tertib Usaha					
		1	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	%	jumlah SIUP MBTBB yang terbit ≤ 5 hari kerja	0	0%	DISPERINDAG
					jumlah permohonan SIUP MB TBB	1		
		2	Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	%	Jumlah SIUP MB bagi distributor yang	0	0%	
					Jumlah rekomendasi SIUP MB bagi distributor	1		DISPERINDAG

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		3	Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	%	jumlah SIUP berbahaya bagi Pengecer yang diterbitkan <5 hari kerja	0	0%	
					Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengcer	1		DISPERINDAG
		4	Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	%	Jumlah SIUP Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat yang terbit < 5 hari kerja	0	0%	

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
					jumlah permohonan SIUP MB Gol B sedan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat	1		DISPERINDAG
		5	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu		jumlah SKA yang terbit $\leq$ hari kerja 1x24 jam	117408		
				%	jumlah permohona penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	117408	100%	DISPERINDAG

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		86	Persentase kinerja realisasi pupuk					
		1	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	Kab/kota	-	14	14	DISPERINDAG
		87	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					
		1	Jumlah barang beredar yang diawasi	Barang		2741	2741	DISPERINDAG
		88	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok					
		1	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi : a. Tersedianya bangunan pusat distribusi b. Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi c. Beroperasinya		-	0	0	DISPERINDAG

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			pusat industri d. Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani					
		2	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	-	2.08	2.08	DISPERINDAG
		3	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	%	-	83.44	83.44%	DISPERINDAG
7	Perindustrian	89	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi					
		90	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP					
		1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	%	-	1	100.00%	
					-	1		DISPERINDAG

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		91	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		1	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	%	jumlah realisasi izin yang diterbitkan	27	100.00%	DISPERINDAG
					jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	27		
		92	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri besar yang diterbitkan	%	jumlah realisasi izin yang diterbitkan	17	100.00%	DISPERINDAG
					jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	17		
		93	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan	%	jumlah realisasi izin yang diterbitkan	0	0	

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi		jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	1		DPMPTSP
		94	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini					
			Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	%	jumlah data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota di SHNas	0	0	
					total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas Kabupaten/kota	1		DISPERINDAG
8	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan	-	0	0	DISNAKERTRANS

No	Urusan		IKK Output	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Permukiman	-	0	0	DISNAKERTRANS
		3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Permukiman	-	0	0	DISNAKERTRANS

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
1.	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	Jumlah Anak Usia 16 (enam belas) sampai Dengan 18 (delapan belas) Tahun Yang Sudah Tamat atau Sedang Belajar di Sekolah Menengah Atas	1,203,289	83.65%	DISDIKBUD & KEMENAG
					Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16 -18 tahun pada provinsi yang bersangkutan	1,438,486		
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus	15780	69.94%	DISDIKBUD
					Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas pada provinsi yang bersangkutan	22561		

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
2	Kesehatan	3	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	%	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di Provinsi	54,047	1.46	DINKES & RS. PROV JTG
					Jumlah Penduduk Provinsi	36,896,752		
		4	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	%	Jumlah RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi minimal Tingkat Utama	7	100.00%	DINKES & RS. PROV JTG
					Jumlah RS Provinsi	7		
		5	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun	111,541	100.00%	DINKES & RS. PROV JTG
					Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama	111,541		

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		6	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	%	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	152,961	100%	DINKES & RS. PROV JTG
					Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB	152,961		
3.	PU TARU	7	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi (ha)	4,501.16	11.09%	PU SDA TARU
					Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Provinsi (ha)	40,571		
		8	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di	%	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi (ha)	3,888.71	9.29%	PU SDA TARU

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			WS Kewenangan provinsi		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Provinsi (ha)	41,845.71		
		9	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting	86,865	100.00%	PU SDA TARU
					Luas daerah irigasi kewenangan provinsi	86,865		
		10	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	939	100.00%	PU BMCK
					Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan.	939		

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		11	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	%	Total volume limbah yang masuk dalam SPALDomestik/Regional	90.72	100.13%	PU BMCK
					Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik/Regional	90.60		
		12	Rasio kemantapan jalan	%	Panjang jalan dan Jembatan kewenangan provinsi yang mantap	2,404.741	100.00%	PU BMCK
					Panjang jalan dan jembatan keseluruhan di wilayah provinsi	2,404.741		
		13	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	5,816	100.00%	PU BMCK
					Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi	5,816		
4.	Perumahan Rakyat	14	Persentase warga negara korban bencana yang	%	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2020	116	100.00%	DISPERAKIM

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			memperoleh rumah layak huni		Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2020	116		DISPERAKIM
		15	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	0	0.00%	DISPERAKIM
					Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	1		
		16	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	%	Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	35.54	7.49%	DISPERAKIM
					Luas kawasan kumuh 10-15 Ha	474.66		
		17	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	502	21.22%	DISPERAKIM

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
					Jumlah satuan perumahan	2,366		
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	61	100.00%	SATPOL PP
					Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	61		
		19	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	4	100.00%	SATPOL PP
					Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	4		
		20	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun	5	100.00%	BPBD
					Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun	5		
		21	Persentase penanganan pra bencana	%	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana	33	94.29%	BPBD

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
					Jumlah kabupaten/kota di wilayah Provinsi	35		
		22	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana	33	94.29%	BPBD
					Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana	35		
6.	Sosial	23	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	3,864	100.00%	DINSOS
					Populasi penyandang disabilitas telantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	3,864		
		24	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan	%	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	2,895	100.00%	DINSOS

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			dasarnya di dalam panti		Populasi Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	2,895		
		25	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1,685	100.00%	DINSOS
					Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	1,685		
		26	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	830	100.00%	DINSOS
					Populasi Gelandangan dan Pengemis Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	830		
		27	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi	%	jumlah korban bencana alam dan sosial yang	11,532	100.00%	DINSOS

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi		terpenuhi kebutuhan dasarnya			
					populasi korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah darurat bencana daerah provinsi	11,532		
7.	Tenaga Kerja	28	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	jumlah kab/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	34	97.14%	DISNAKERTRANS
					jumlah kabupaten/kota	35		
		29	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	2,361	0.01%	DISNAKERTRANS
					Jumlah tenaga kerja keseluruhan	17,536,935		
		30	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	964,021,414	54.97	DISNAKERTRANS
					Jumlah tenaga kerja	17,536,935		
		31	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	10,335	53.20%	DISNAKERTRANS

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			(PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).		Jumlah Perusahaan	19,427		
		32	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	%	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	81,835	37.07%	DISNAKERTRANS
					Jumlah pencaker yang terdaftar	220,763		
		33	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	Σ Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun n	5,954	26.56%	DISNAKERTRANS
					Σ Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n	22,417		
8.	Pemberdayaan Perempuan	34	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	233,313,140,500	3.89%	DP3AKB

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
	dan Perlindungan Anak				Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di Provinsi	5,999,501,499,577		
		35	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi	1,197	0.01%	DP3AKB
					Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	9,807,339		
		36	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	809	0.00%	DP3AKB
					Jumlah penduduk perempuan	17,503,749		
9.	Pangan	37	Persentase cadangan pangan	%	Jumlah cadangan pangan provinsi	876.81	25,83%	DISHANPAN
					Jumlah kebutuhan pangan provinsi	3,395		
10.	Pertanahan	38	Persentase pemanfaatan tanah	%	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi	0	0.00%	DPMPTSP

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	1		
		39	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu	4,934.437	100.00%	DISPERAKIM
					Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum	4,934.437		
		40	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota	%	Luas pemanfaatan yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya diatas izin lokasi lintas kab/ kota	0	0.00%	BPN
					Luas izin lokasi yang diterbitkan	1		
11.	Lingkungan Hidup	41	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	%	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67.37	67.37	LH & KEHUTANAN
					Indeks Kualitas Pencemaran Air (30%)	50.52	50.52	
					Indeks Kualitas Pencemaran Udara (30%)	84.73	84.73	
					Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40%)	51.13	51.13	

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		42	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi	15	100.00%	LH & KEHUTANAN
					Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	15		
12.	Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil	43	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	%	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	2 kali	2 kali	DISPERMADES DUKCAPIL
		44	Pemanfaatan Data Kependudukan	%	PD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	19	39.58%	DISPERMADES DUKCAPIL
					Seluruh PD Provinsi	48		
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	266	100.00%	DISPERMADES DUKCAPIL

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
					Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	266		
		46	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	5,560	100.60%	DISPERMADES DUKCAPIL
					Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	5,527		
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	47	TFR (angka kelahiran Total)		Σ ASFR	2.27	2.27	BKKBN
		48	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	Jumlah peserta KB Aktif Modern	4,757,722	72.91%	DP3AKB/BKKBN
					Jumlah Pasangan Usia Subur	6,525,048		
		49	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	839,434	12.86%	DP3AKB
					Jumlah Pasangan Usia Subur	6,525,048		

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
15.	Perhubungan	50	Rasio Konektivitas Provinsi	%	Rasio konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)- IK1	0.679	0.679	DISHUB

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
					(angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut)- IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut) Keterangan:IK1 (Angkutan Jalan)- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentuIK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)- Jumlah			

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
					lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan			

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
					dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas : a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5			

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		51	Kinerja lalu lintas provinsi		V/C ratio di jalan Provinsi	0.28	0.28	DISHUB
16.	Komunikasi dan Infomatika	52	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	41	100.00%	DISKOMINFO
					Jumlah PD	41		
		53	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	10	100.00%	DISKOMINFO
					Jumlah Layanan Publik	10		
		54	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	34,490,835	100.00%	DISKOMINFO
					Jumlah penduduk (diatas 17 tahun)	34,490,835		

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	55	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	291	43.43%	DINKOP UMKM
					Jumlah seluruh koperasi	670		
		56	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha	12,224	3.44%	DINKOP UMKM
					Jumlah usaha kecil keseluruhan	354,884		
18.	Penanaman Modal	57	Persentase peningkatan investasi di provinsi	%	(Jumlah investasi tahun 2020 - jumlah investasi tahun 2019) di provinsi	- 3,427,956,38 3,325	-5.80%	DPMPTSP
					Jumlah investasi tahun 2020 di provinsi	56,075,323,6 10,459		
					Jumlah investasi tahun 2019 di provinsi	59,503,279,9 93,784		
19	Kepemudaan dan Olahraga	58	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi	1,427,081	18.31%	DISPORAPAR
					Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi	7,794,000		

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		59	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di provinsi	100,150	1.28%	DISPORAPAR
					Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi	7,794,000		
		60	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	0	0.00%	DISPORAPAR
20.	Statistik	61	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	41	100.00%	DISKOMINFO
					Jumlah PD	41		
		62	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	41	100.00%	DISKOMINFO
					Jumlah PD	41		

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
21.	Persandian	63	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	Jumlah nilai per area keamanan informasi	0	0.00%	DISKOMINFO
					Jumlah area penilaian	5		
22.	Kebudayaan	64	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	67	100.00%	DISDIKBUD
					Jumlah cagar budaya yang terdata	67		
23.	Perpustakaan	65	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	63.35	467.87%	DINAS ARPUS
					Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	13.54		
		66	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13.54	1354.00 %	DINAS ARPUS

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
24.	Kearsipan	67	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		$T = (a + i + s + j)/4$ T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100	100	DINAS ARPUS
						100		
						100		
						100		
		68	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara,	%	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan	m = 2.920 berkas b = 100 berkas g = 3.496 berkas a = 32.571 berkas	m = 2.920 berkas b = 100 berkas g = 3.496 berkas a =	DINAS ARPUS

No	Urusan	IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		arsip dengan NSPK $b =$ tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK $g =$ tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK $a =$ tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK $c =$ tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK $I =$ tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	$c =$ (Surat Pernyataan) $I = 15.648$ berkas	32.571 berkas $c =$ (Surat Pernyataan) $I = 15.648$ berkas	

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
Urusan Pilihan								
1	Kelautan dan Perikanan	69	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton		1069950.027	1069950.027	DINLUTKAN
		70	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	Keterangan: x: Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku c_i: jumlah pelaku usaha KP yang patuh s_i: jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa i: jenis komponen pelaku usaha KP n: jumlah komponen pelaku usaha KP	78.88%	78.88%	DINLUTKAN
2	Pariwisata	71	Presentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	(Jumlah wisatawan tahun 2020 – Jumlah wisatawan tahun 2019)	-779420	-90.87%	DISPORAPAR

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			mancanegara per kebangsaan		Jumlah wisatawan tahun 2020	78290		
					Jumlah wisatawan tahun 2019	857710		
		72	Presentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	(Jumlah wisatawan tahun 2020 – Jumlah wisatawan tahun 2019)	-35271778	-60.92%	DISPORAPAR
					Jumlah wisatawan tahun 2020	22,629,085		
					Jumlah wisatawan tahun 2019	57,900,863		
		73	Tingkat hunian akomodasi	%	Jumlah kamar yang terjual	7,765,765	13007.76 %	DISPORAPAR
					Jumlah kamar yang tersedia	59,701		
		74	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (dalam satuan rupiah)	30,773.75	3.187	BPS
					Jumlah total PDRB (dalam satuan rupiah)	965,629.09		
3	Pertanian	75	Produtivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	16,942,653	659.60%	DISTANBUN
					luas panen	2,568,610		

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		76	Presentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	Jumlah kejadian penyakit/kasus hewan menular tahun berjalan (2020) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (2019)	-13,336	-90.70%	DISNAKESWAN
					Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2020	1,368		
					Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2019	14,704		
4	Kehutanan	77	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikan akses legal	85	100.00%	LH & KEHUTANAN
					Jumlah total usulan KTH yang terintegrasi	85		
		78	Presentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	%	Jumlah hutan yang rusak (ha)	17.76	0.00%	LH & KEHUTANAN
					Jumlah hutan keseluruhan (ha)	636678.04		
		79	Presentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha)	32389.06	8.62%	LH & KEHUTANAN
					Luas Lahan Kritis di provinsi (ha)	375733		

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
5	Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	80	Presentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar Perda	%	Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	581	100%	DINAS ESDM
					Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi	581		DINAS ESDM
		81	Presentase Desa yang teraliri listrik	%	Jumlah desa yang teraliri listrik	7,809	100%	DINAS ESDM
					Jumlah desa	7,809		DISPERMADES DUKCAPIL
6	Perdagangan	82	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	Nilai ekspor non migas tahun 2020 – nilai ekspor non migas tahun 2019	-508.69	- 0.066028 05	DISPERINDAG
					Nilai ekspor non migas tahun 2020	7704.15		
					Nilai ekspor non migas tahun 2019	8212.84		
		83	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun 2020	36	100%	DISPERINDAG

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
					Jumah pengaduan konsumen yang diterima dalam tahun 2020	36		DISPERINDAG
		84	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	Jumlah sampel yang sesuai ketentuan	34	59%	DISPERINDAG
					Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun (2020)	58		DISPERINDAG
		85	Tertib Usaha	%	Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB	0	0%	DISPERINDAG
					Jumlah pelaku usaha MB TBB	1		DISPERINDAG
		86	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	Realisasi	1,546,974	96%	DISTANBUN
					RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani)	1,608,400		
		87	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	2,717	99%	DISPERINDAG
					Jumlah barang beredar yang diawasi	2,741		

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		88	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	$KVpt = Sn \times 100\% \times P$ KVpt = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu Sn = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember P = rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember	2.08	2.08	DISPERINDAG
7	Perindustrian	89	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	%	(Jumlah Industri besar tahun 2020 - Jumlah industri besar tahun 2019)	13	1.11%	DISPERINDAG
					Jumlah industri besar tahun 2020	1,175		
					Jumlah industri besar tahun 2019	1,162		
		90	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	Jumlah Target Jenis Industri Prioritas Provinsi yang ditetapkan	19	100%	DISPERINDAG
					Jumlah Realisasi Jenis Industri Prioritas Provinsi	19		

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		91	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	27	100.00%	DISPERINDAG
					Jumlah izin yang dikeluarkan	27		
		92	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	17	100.00%	DISPERINDAG
					Jumlah izin yang dikeluarkan	17		
		93	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	0	DISPERINDAG
					Jumlah izin yang dikeluarkan	1		

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
		94	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini			ADA	ADA	DISPERINDAG

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO.	IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
1	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan (realisasi)	1,287,676,651,771	5.02%	BPKAD
			Jumlah APBD (realisasi)	25,649,971,108,816		
2	Rasio PAD	%	Jumlah PAD	13,669,322,852,991	1070995%	BPKAD
			Jumlah PDRB non migas	1,276,320,418.35		
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures (realiasi)	17,219,245,237,027	67,13%	BPKAD
			Jumlah belanja APBD (realisasi)	25,650,002,796,727		
4	Opini Laporan Keuangan	WTP	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	9	9	BPKAD
		WDP		1		
		TW		0		
		TMP		0		
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Realisasi Maturitas SPIP tahun 2019 sebesar 3,158 merupakan hasil Reviu oleh Perwakilan BPKP Jawa Tengah dan belum dilakukan Quality Assurance (QA) oleh BPKP Pusat yang terhambat karena	3	INSPEKTORAT

NO.	IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
				pandemi Covid-19. Quality Assurance direncanakan akan dilakukan pada akhir Tahun 2020. Dengan memperhatikan bahwa SDM/Personil Asesor dalam penilaian maturitas SPIP masih sangat terbatas dan Peraturan Kepala BPKP No. 4 Tahun 2016 sedang dalam proses revisi yang akan berimplikasi pada perubahan Pedoman dan Aplikasi SPIP Online pada Tahun 2021. Hal ini mengakibatkan ditanggungkannya Penilaian Maturitas SPIP Online 2020 yang telah berjalan dan akan dilanjutkan di Tahun 2021, sehingga dapat menghambat pencapaian Target Maturitas SPIP Provinsi Jawa Tengah		

NO.	IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
6	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Merupakan hasil QA BPKP Nomor SP-1177/D3/04/2019 Tanggal 6 Agustus 2019. Dikarenakan adanya realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19, penilaian mandiri kapabilitas APIP tidak terlaksana.	3	INSPEKTORAT
7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2020	2	4.44%	BIRO APBJ
			Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2020	45		
8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	10,525	121.37%	BIRO APBJ
			Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	8,672		

NO.	IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	6,466,748,226,999	100.00%	BIRO APBJ
			Total belanja langsung	6,466,748,226,999		
10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Jumlah pegawai menurut pendidikan Pendidikan Tinggi ke atas (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	10,126	207.08%	BKD
			Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	4,890		
11	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	1,665	11.09%	BKD
			Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15,016		
12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat	%	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	207	1.38%	BKD

NO.	IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
	Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			
			Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15,016		
13	Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	25,650,002,796,727	88.37%	BPKAD
			Total belanja APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)	29,026,574,743,000		
14	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	13,669,322,852,991	85.47%	BPKAD
			Total PAD dalam APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)	15,993,530,006,000		
15	Asset Management	Jumlah	Jumlah Asset Manajemen	4	4	BPKAD
			Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ada	Ada	

NO.	IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
			Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	ada	ada	
			Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	ada	ada	
			Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	ada	ada	
16	Cash Management : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi Total PAD dalam APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)	1,612,602,481,841.00 26,151,062,842,457.00	6.17%	BPKAD
17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	0 1	0.00%	BPKAD/kominfo

NO.	IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data
18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	12	100.00%	KOMINFO
			Total jumlah dokumen yang telah dirinci	12		

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
	Misi 1 : Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia			
	Tujuan :			
	Membangun masyarakat Jawa Tengah semakin religius, toleran, dan guyup	Persentase penurunan konflik SARA	%	15,00
	Sasaran :			
1	Terciptanya kohesi sosial masyarakat	1) Indeks Toleransi	%	74,48
		2) Persentase tindak pidana yang tertangani	%	83,00
	Misi 2 : Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota			
	Tujuan :			
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77,00
	Sasaran :			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,00
		2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,88
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	1) Nilai SAKIP	Angka	82,00
		2) Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	3,47
		3) Opini BPK	Opini	WTP
3	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	1) Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Angka	20,00
		2) Indeks Sistem Merit	Angka	0,68
	Misi 3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran			
	Tujuan 1:			
		1) Angka Kemiskinan	%	9,81-8,81

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
	Menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah secara merata	2) Indeks Gini	Angka	0,34
	Sasaran :			
1	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah	1) Persentase penduduk miskin perkotaan	%	9,44
		2) Persentase penduduk miskin perdesaan	%	12,65
		3) Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Ribu Rupiah	478,76
		4) Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Angka	61,00
		5) Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan terendah dengan keluhan kesehatan	%	30,50
2	Menurunnya pengangguran terbuka	1) Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,33
		2) Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu	%	5,65
	Tujuan 2:			
	Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan	1) Pertumbuhan Ekonomi	%	5,4-5,7
		2) Inflasi	%	3,0±1
		3) PDRB per kapita	Juta Rupiah	39,25
		4) Indeks Williamson	Angka	0,59
	Sasaran :			
1	Meningkatnya pertumbuhan	1) Pertumbuhan sektor pertanian	%	2,90
		2) Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	5,10

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
	sektor unggulan daerah dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	3) Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa	%	5,67
		4) Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD	%	3,15
		5) Pertumbuhan investasi	%	9,00
		6) Nilai Tukar Petani	Angka	102,42
		7) Nilai Tukar Petani	Angka	102,42
	Misi 4 : Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan			
	Tujuan 1:			
	Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,00
	Sasaran :			
1	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	1) Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,34
		2) Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,92
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,09
3	Meningkatnya akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,06
	Tujuan 2 :			
	Mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	66,87
	Sasaran :			
1	Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan	1) Indeks Kualitas Air	Angka	49,17
		2) Indeks Kualitas Udara	Angka	84,71
		3) Indeks Tutupan Lahan	Angka	66,76
2	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Angka	3,54

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	Misi 1 : Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia				
	Tujuan :				
	Membangun masyarakat Jawa Tengah semakin religius, toleran, dan guyup	Persentase penurunan konflik SARA	%	15,00	15,38
	Sasaran :				
1	Terciptanya kohesi sosial masyarakat	1) Indeks Toleransi	Angka	74,48	72,50*)
		2) Persentase tindak pidana yang tertangani	%	83,00	84,49
	Misi 2 : Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota				
	Tujuan :				
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77,00	84,93*)
	Sasaran :				
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,00	83,94
		2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,88	4,20
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	1) Nilai SAKIP	Angka	82,00	81,56**)
		2) Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	3,47	3,88***)
		3) Opini BPK	Opini	WTP	WTP****)
3	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	3) Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Angka	20,00	34,38
		4) Indeks Sistem Merit	Angka	0,68	0,70

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	Misi 3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran				
	Tujuan 1:				
	Menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah secara merata	1) Angka Kemiskinan	%	9,81-8,81	11,84
		2) Indeks Gini	Angka	0,34	0,359
	Sasaran :				
1	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah	1) Persentase penduduk miskin perkotaan	%	9,44	10,57
		2) Persentase penduduk miskin pedesaan	%	12,65	13,20
		3) Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Ribu Rupiah	478,76	396,87
		4) Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Angka	61,00	60,92
		5) Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan terendah dengan keluhan kesehatan	%	30,50	30,47
2	Menurunnya pengangguran terbuka	1) Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,33	6,48
		2) Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang	%	5,65	7,95

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		bekerja kurang dari 15 jam per minggu			
	Tujuan 2:				
	Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan	1) Pertumbuhan Ekonomi	%	5,4-5,7	-2,65
		2) Inflasi	%	3,0±1	1,56
		3) PDRB per kapita	Juta Rupiah	39,25	38,60
		4) Indeks Williamson	Angka	0,59	0,608
	Sasaran :				
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	1) Pertumbuhan sektor pertanian	%	2,90	2,48
		2) Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	5,10	-3,74
		3) Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa	%	5,67	-3,80
		4) Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD	%	3,15	15,12
		5) pertumbuhan investasi	%	9,00	-5,8
		6) Nilai Tukar Petani	Angka	102,42	101,49
	Misi 4 : Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan				
	Tujuan 1:				
	Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,00	71,87
	Sasaran :				
1	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	1) Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,34	7,69
		2) Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,92	12,70

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,09	74,37
3	Meningkatnya akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,06	91,89*
Tujuan 2 :					
	Mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	66,87	67,37
Sasaran :					
1	Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan	1) Indeks Kualitas Air	Angka	49,17	50,52
		2) Indeks Kualitas Udara	Angka	84,71	84,73
		3) Indeks Tutupan Lahan	Angka	66,76	51,13
2	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Angka	3,54	3,54

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	Misi 1 : Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia				
	Tujuan :				
	Membangun masyarakat Jawa Tengah semakin religius, toleran, dan guyup	Persentase penurunan konflik SARA	%	102,53	102,53
	Sasaran :				
1	Terciptanya kohesi sosial masyarakat	1) Indeks Toleransi	%	97,45	97,34
		2) Persentase tindak pidana yang tertangani	%	101,23	101,80
	Misi 2 : Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta				

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota				
	Tujuan :				
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	%	101,97	110,30
	Sasaran :				
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Indeks Kepuasan Masyarakat	%	103,18	101,50
		2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	139,49	145,83
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	1) Nilai SAKIP	%	101,95	99,46
		2) Indeks Persepsi Anti Korupsi	%	101,45	100,86
		3) Opini BPK	%	100	100
3	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	1) Nilai Kematangan Organisasi Daerah	%	145,76	122,79
		2) Indeks Sistem Merit	%	104,48	100
	Misi 3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran				
	Tujuan 1:				
	Menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah secara merata	1) Angka Kemiskinan	%	99,91	103,89
		2) Indeks Gini	Angka	97,76	102,78
	Sasaran :				
1	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah	1) Persentase penduduk miskin perkotaan	%	106,12	98,77
		2) Persentase penduduk miskin perdesaan	%	103,91	107,95
		3) Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	%	77,47	82,90

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		4) Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	%	98,37	99,87
		5) Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan terendah dengan keluhan kesehatan	%	86,04	100,10
2	Menurunnya pengangguran terbuka	1) Tingkat Pengangguran Terbuka	%	98,66	104,17
		2) Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu	%	77,23	71,07
	Tujuan 2:				
	Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan	1) Pertumbuhan Ekonomi	%	98,36	-115,22
		2) Inflasi	%	106,76	128,21
		3) PDRB per kapita	%	104,81	95,78
		4) Indeks Williamson	%	96,93	97,04
	Sasaran :				
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	1) Pertumbuhan sektor pertanian	%	46,90	227,52
		2) Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	107,01	-155,19
		3) Pertumbuhan sektor	%	105,47	-240,51

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		perdagangan dan jasa			
		4) Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD	%	395,87	480,00
		5) Pertumbuhan investasi	%	4,33	-145
		6) Nilai Tukar Petani	%	104,74	99,09
	Misi 4 : Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan				
	Tujuan 1:				
	Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas danberdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	100,18	99,85
	Sasaran :				
1	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	1) Rata-rata Lama Sekolah	%	102,17	100,52
		2) Harapan Lama Sekolah	%	98,75	99,69
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3) Angka Harapan Hidup	%	99,89	100,12
3	Meningkatnya akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak	4) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	99,88	103,25
	Tujuan 2 :				
	Mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	100,28	100,75
	Sasaran :				
1	Meningkatnya kualitas air,udara, serta tutupan lahan	1) Indeks Kualitas Air	%	104,77	102,75
		2) Indeks Kualitas Udara	%	100,35	100,02
		3) Indeks Tutupan Lahan	%	98,46	100,08
2	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	%	100,00	100,00

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Hasil Pembangunan Jangka Menengah

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023	% CAPAIAN Thp Target Akhir RJMD
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Misi 1 : Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia						
	Tujuan :						
	Membangun masyarakat Jawa Tengah semakin religius, toleran, dan guyup	Persentase penurunan konflik SARA	15,00	15,38	102,53	15,00	102,53
	Sasaran :						
1	Terciptanya kohesi sosial masyarakat	1) Indeks Toleransi	74,78	72,50	97,34	76,60	94,65
		2) Persentase tindak pidana yang tertangani	83,00	84,49	101,80	90,00	93,88
	Misi 2 : Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota						
	Tujuan :						
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	77,00	84,93*)	110,30	80,00	106,16
	Sasaran						
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00	83,94	101,50	88,00	95,39

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023	% CAPAIAN Thp Target Akhir RJMD
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,88	4,20	145,83	3,2	131.25
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	1) Nilai SAKIP	82,00	81,56	99,46	85,00	95,95
		2) Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,47	3,88	100,86	3,50	110,86,
		3) Opini BPK	WTP	WTP	100	WTP	100
3	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	1) Nilai Kematangan Organisasi Daerah	20,00	34,38	122,79	29,00	118,55
		2) Indeks Sistem Merit	0,68	0,70	100	0,71	98,59
	Misi 3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran						
	Tujuan 1:						
	Menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah secara merata	1) Angka Kemiskinan	9,81-8,81	11,84	103,89	9,17	129,12
		2) Indeks Gini	0,34	0,359	102,78	0,30	119,67
	Sasaran :						
1	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah	1) Persentase penduduk miskin perkotaan	9,44	10,57	98,77	9,17	115,27
		2) Persentase penduduk miskin perdesaan	12,65	13,20	107,95	11,97	110,28
		3) Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	478,76	396,87	82,90	523,15	75,86

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023	% CAPAIAN Thp Target Akhir RJMD
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4) Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	61,00	60,92	99,87	61,75	98,66
		5) Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan terendah dengan keluhan kesehatan	30,50	30,47	100,10	29,75	102,42
2	Menurunnya pengangguran terbuka	1) Tingkat Pengangguran Terbuka	4,33	6,48	104,17	4,00	162,00
		2) Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu	5,65	7,95	71,017	5,50	144,55
	Tujuan 2:						
	Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan	1) Pertumbuhan Ekonomi	5,4-5,7	-2,65	-115,22	5,6 – 6,0	-44,17
		2) Inflasi	3,0±1	1,56	128,21	3,00 ± 1	
		3) PDRB per kapita	39,25	38,60	95,78	45,35	85,12
		4) Indeks Williamson	0,59	0,608	97,04	0,56	108,57

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023	% CAPAIAN Thp Target Akhir RJMD
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Sasaran :						
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	1) Pertumbuhan sektor pertanian	2,90	2,48	227,52	3,10	80,00
		2) Pertumbuhan sektor industri pengolahan	5,10	-3,74	-155,19	5,65	-66,19
		3) Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa	5,67	-3,80	-240,51	5,9	-64,41
		4) Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD	3,15	15,12	480,00	5,20	290,77
		5) Pertumbuhan investasi	9,00	-5,8	-145	10,00	-58,00
		6) Nilai Tukar Petani	102,42	101,49	99,09	103,15	98,39
	Misi 4 : Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan						
	Tujuan 1:						
	Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas danberdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,00	71,87	99,85	73,00	98,45
	Sasaran :						
1	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	1) Rata-rata Lama Sekolah	7,34	7,69	100,52	7,45	103,22
		2) Harapan Lama Sekolah	12,92	12,70	99,69	13,17	96,43
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,09	74,37	100,12	74,10	100,36

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023	% CAPAIAN Thp Target Akhir RJMD
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Meningkatnya akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,06	91,89*	103,25	92,25	99,61
	Tujuan 2 :						
	Mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,87	67,37	100,75	67,26	100,16
	Sasaran :						
1	Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan	1) Indeks Kualitas Air	49,17	50,52	102,75	50,07	100,90
		2) Indeks Kualitas Udara	84,71	84,73	100,02	85,11	99,55
		3) Indeks Tutupan Lahan	66,76	51,13	100,08	66,76	76,59
2	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	3,54	3,54	100,00	3,60	98,33

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Ukuran keberhasilan yang dicapai adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2020 adalah sebesar 71,87 dengan tingkat capaian sebesar 99,85% atau dengan kategori “Baik”, meningkat 0,14% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 71,73. Peningkatan nilai IPM Jawa Tengah tahun 2020 tidak terlepas dari berbagai macam upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan usia harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah.

Derajat kesehatan yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi yang secara tak langsung dapat meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH). Secara keseluruhan AHH Jawa Tengah mengalami peningkatan, namun masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki AHH relatif rendah, seperti di Kabupaten Tegal sebesar 71,58 tahun. Sementara di Kabupaten Sukoharjo sebesar 77,76 tahun. Secara teori, salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan data AHH adalah PDRB per kapita. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah, misalnya biaya kesehatan.

Indikator komposit antara lain Usia Harapan Hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita yang memerlukan sinergitas dengan OPD dan stakeholders lain menjadi penyebab peningkatan capaian IPG.

Solusi untuk mengatasi masalah tersebut melalui :

- 1). Dokumen PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) bagi OPD dengan outcome/impact sangat diperlukan untuk menaikan capaian IPG.
- 2). Kegiatan Pemberdayaan Perempuan di 130 lokasi di Jawa Tengah melibatkan 3.250 orang perempuan rentan produktif (Perempuan Kepala Keluarga, korban kekerasan, disabilitas miskin, IRT/perempuan ODHA, lansia produktif, buruh migran purna serta kerjasama dengan OPD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui Implementasi Serat Kartini (Sekolah perempuan cerdas masa kini).

- 3). Kegiatan IPG secara khusus bertujuan untuk meningkatkan indikator komposit pengeluaran per kapita perempuan.

Belum sepenuhnya Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat melaksanakan atau memenuhi semua indikator dalam pemenuhan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana yang disebabkan beberapa permasalahan antara lain:

- 1). Koordinasi lintas sektor untuk pemenuhan 71 indikator yang dilaksanakan oleh Instansi terkait.
- 2). Pendampingan dari Pemerintah Provinsi atau Pusat sangat dibutuhkan Kabupaten/Kota mengingat terbatasnya anggaran maupun tenaga teknis.
- 3). Dalam penyusunan dokumen pendukung penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota diperlukan penguatan kebijakan dan kelembagaan.
- 4). Untuk mendukung percepatan pemenuhan 71 indikator IKD BPBD Kabupaten/Kota belum seluruhnya mengalokasikan anggaran.

Pemerintah Provinsi maupun Pusat dalam penguatan kapasitas daerah pada penanggulangan bencana dengan peningkatan nilai Indeks Kapasitas Daerah. Adapun solusi yang dilakukan adalah:

- 1). Untuk penghitungan Indeks Ketahanan Daerah dilaksanakan melalui pendampingan ke Kabupaten/Kota dengan melibatkan fasilitator.
- 2). Untuk meningkatkan nilai Indeks Ketahanan Daerah lintas sektor melalui rapat koordinasi lintas sektor.
- 3). Guna penanggulangan bencana perlu ditingkatkan kerjasama antara pemangku kepentingan.
- 4). Upaya mengatasi terjadinya rotasi/mutasi aparatur sumber daya PB yang telah terlatih dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas aparatur PB di seluruh tingkatan melalui diklat teknis dan formal sehingga mempunyai kompetensi yang sama.
- 5). Melalui pendidikan dan pelatihan sumber daya kebencanaan wajib dilakukan setiap periode dan mendorong BNPB untuk melakukan sertifikasi bagi aparatur PB di daerah sehingga dapat dimonitoring kompetensi dan kapasitas masing-masing aparatur PB.

- 6). Untuk pengurangan risiko bencana lebih besar dibandingkan operasional kegiatan penanggulangan yang lain dilakukan dengan memberikan masukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar dapat memberikan alokasi dana.
- 7). Untuk mengalokasikan anggaran yang tepat pada upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan koordinasi dan komunikasi secara efektif kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD.
- 8). Sebagai bagian dukungan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga donor nasional maupun internasional untuk mendukung penguatan kapasitas masyarakat, Program Corporate Social Responsibility (CSR) di berbagai lembaga usaha.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang telah Dicapai

Analisis dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara langsung mendukung ketercapaian tujuan dengan membandingkan antara target dengan realisasi 2020, serta mengaitkannya dengan kemungkinan ketercapaian sasaran pada tahun terakhir Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 – 2023. Analisis terhadap 13 (tiga belas) sasaran strategis dengan 40 (empat puluh) Indikator Kinerja yang ditetapkan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada RPJMD 2018-2023.

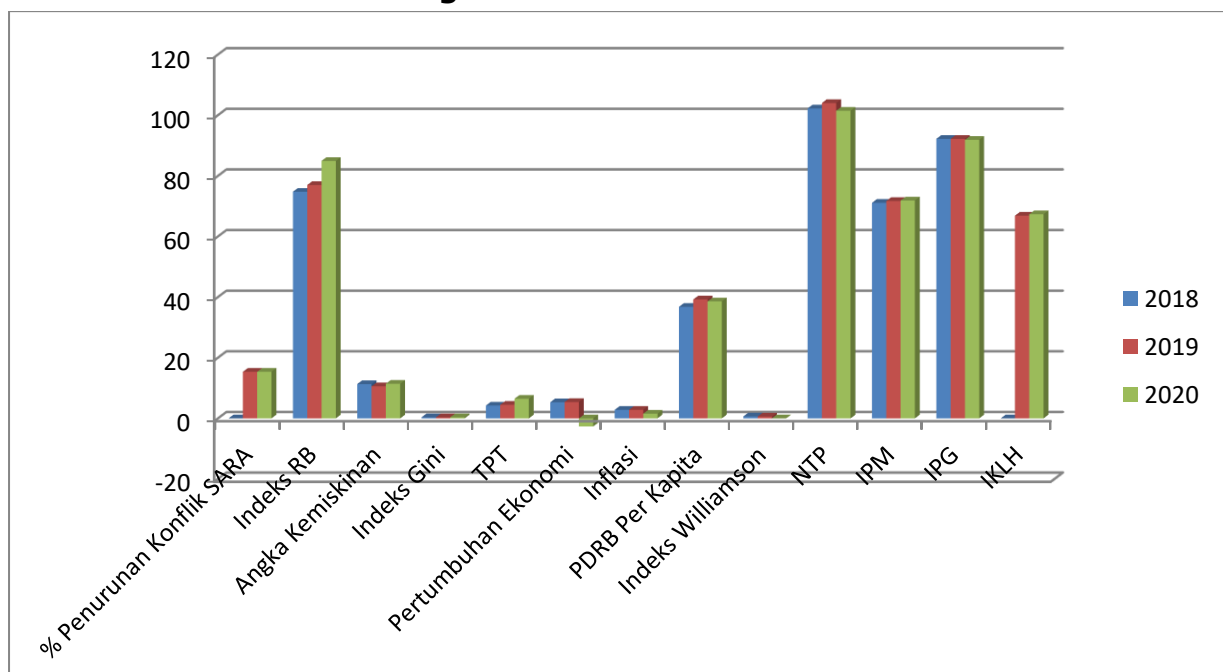
Sebelum melakukan analisa terhadap sasaran strategis yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2018-2023 berikut informasi pencapaian Indikator Kinerja Utama dari tahun 2018 s.d 2020.

Tabel 2.8.
Perbandingan Realisasi IKU 2018-2020

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI		
		2018	2019	2020
1	Persentase penurunan konflik SARA	NA	15,38	15,38
2	Indeks Reformasi Birokrasi	74,75	76,99	84,93
3	Angka Kemiskinan	11,32	10,58	11,84
4	Indeks Gini	0,37	0,36	0,359
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,23	4,49	6,48
6	Pertumbuhan Ekonomi	5,32	5,41	-2,65
7	Inflasi	2,82	2,81	1,56
8	PDRB per kapita	36,78	39,24	38,60
9	Indeks Williamson	0,633	0,60	0,608
10	Nilai Tukar Petani	102,25	104,03	101,49
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,12	71,73	71,87
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,21	91,89	91,89
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	NA	66,88	67,37

Perbandingan capaian indikator kinerja utama empat tahun terakhir dapat digambarkan sebagaimana grafik dibawah ini:

Grafik 2.9.
Perbandingan Rata-rata Realisasi IKU 2018-2020



Berdasarkan Grafik 2.9. tersebut terlihat bahwa selama 3 tahun berjalan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terjaga dengan baik dan dominan tercapai walaupun pada tahun 2020

terjadi Pandemi Covid-19. Indikator Indeks RB terlihat menonjol lebih tinggi capaiannya disebabkan penggunaan indikator alternatif berupa nilai capaian PMPRB yang disebabkan oleh belum dirilisnya Indeks RB oleh Kementerian PAN-RB.

Pandemi Covid-19 yang berdampak buruk pada perekonomian Jawa Tengah mengakibatkan jumlah penganggur meningkat pada tahun 2020. Peningkatan pengangguran di Jawa Tengah bukan karena ketiadaan lapangan kerja. Faktor utama penyebabnya karena kegiatan perekonomian terkendala pandemi Covid-19.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 jumlah pengangguran Jawa Tengah sebanyak 6.48% atau sebanyak 1,21 juta orang, yang berarti meningkat 2,04% atau 396 ribu orang dibandingkan Agustus 2019. Implikasi pandemi bukan saja terjadi terhadap penurunan daya beli, tetapi juga mempengaruhi penurunan kegiatan konsumsi dan penurunan produksi sehingga bermuara pada pengurangan tenaga kerja. Dari hal tersebut, banyak perusahaan tidak sanggup meneruskan usaha/menurunkan aktivitas industri, mengurangi jumlah produktivitas usaha hingga terpaksa melakukan pengurangan jam kerja, merumahkan sementara hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga meningkatkan angka pengangguran.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program sebagai solusi, yaitu:

- a). Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan dengan *Upskilling* dan *Reskilling* dan pemagangan.
- b). Meningkatkan sertifikasi tenaga kerja dan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
- c). Memfasilitasi penempatan tenaga kerja melalui Bursa Kerja online dan job fair.
- d). Melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan.
- e). Memfasilitasi data kartu pra kerja bagi para pekerja yang kena PHK.
- f). Memverifikasi dan layanan penggunaan TKA.
- g). Pengurangan pengangguran melalui kegiatan Padat Karya.
- h). Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.
- i). Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dengan peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk.

- j). Melakukan pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan norma keselamatan kerja, kesehatan kerja, pengawasan dan perlindungan hukum tenaga kerja dalam dan luar negeri.
- k). Menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Atas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam bidang Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerima penghargaan atas prestasi yang dicapai selama Tahun 2020 dari Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu:

- a). Penghargaan Tingkat Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atas prestasinya dalam membina implemantasi K3 di perusahaan. Penyerahan penghargaan dilakukan pada bulan Oktober 2020.
- b). Penghargaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas kinerjanya dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.
- c). Penghargaan Indeks Pembangunan Keteneagakerjaan (IPK).
- d). Penghargaan Perlindungan, dan pemenuhan Hak Bidang Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Dunia Kerja Inklusif.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya atas tujuan strategis dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang telah dicapai adalah sebagai berikut :

- 1). Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Religius, Toleran, dan Guyup.

Masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyub menjadi salah satu modal sosial bagi kehidupan masyarakat di Jawa Tengah. Keberagaman dan kebhinekaan yang dibingkai dalam satu kesatuan ruang Negara Kesatuan Republik Indonesia senantiasa terus diinternalisasi dalam gerak dan langkah sendi kehidupan masyarakat Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara aktif terus membangun komunikasi antar masyarakat dengan mengembangkan ruang-ruang publik dan kegiatan seni rekreasi, serta mendorong kearifan lokal antara lain gerakan gotong royong.

Dari hasil pengukuran untuk tujuan membangun masyarakat Jawa Tengah semakin religius, toleran, dan guyub dari target yang ditetapkan sebesar 15% tercapai sebesar 15,38% dengan tingkat capaian sebesar 102,53% atau dengan kategori **"Sangat Baik"**. Tujuan ini dicapai dengan satu

sasaran strategis dan dua indikator dengan pengukuran sebagaimana Tabel 2.9 di bawah ini :

Tabel 2.9.

Pengukuran Kinerja Tujuan 1
Membangun Masyarakat Jawa Tengah Semakin Religius, Toleran, dan Guyup

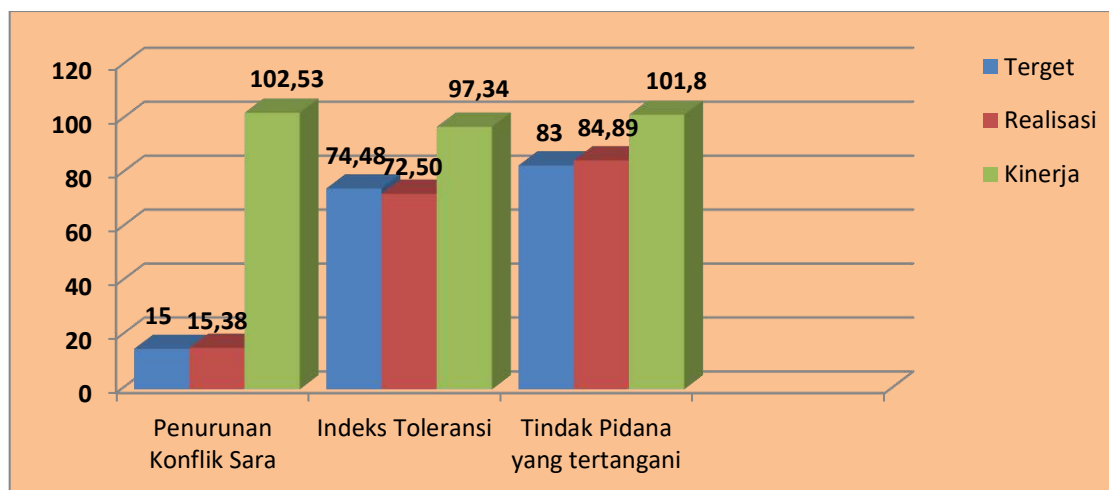
No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				Target Akhir RPJMD	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD
			2019	2020				
				Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Toleransi	Angka	97,45	74,48	72,50*	97,34	76,60	94,65
2	Persentase tindak pidana yang tertangani	%	101,23	83,00	84,49	101,80	90,00	93,88
Rata-rata capaian Sasaran 1.1			99,34			99,57		94,27

Dari Tabel 2.9 dapat diketahui rata-rata tingkat capaian kinerja untuk 2 indikator kinerja sebesar 99,57% atau dengan kategori **"Baik"** dan bila dibandingkan dengan capaian akhir perencanaan jangka menengah yang akan selesai pada tahun 2023 sudah tercapai sebesar 94,27% dan bila dibanding dengan capaian akhir RPJMD di tahun ke-3 sudah tercapai sebesar 94,27%. Untuk indikator Indeks Toleransi sebesar 72,50 (menggunakan Indeks tahun 2019), sedangkan untuk Indikator Tindak Pidana yang Tertangani sudah cukup baik dari target yang ditetapkan sebesar 83,00% terealisasi sebesar 84,89% dengan tingkat capaian sebesar 101,80%.

Sebagai perbandingan untuk realisasi capaian kinerja tujuan 1 selama 3 tahun terakhir dari 2018 s.d 2020 sebagaimana Grafik 2.10 di bawah ini :

Grafik 2.10.

Capaian Tujuan dan Sasaran Misi 1



Sumber : Evaluasi RKPD Prov. Jateng 2020

Di tengah masa pandemi Covid-19 seperti saat ini apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 4,46%, artinya terjadi penurunan konflik yang bernuansa SARA di Jawa Tengah. Hal ini tidak terlepas dari upaya Gubernur Jawa Tengah senantiasa mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk tetap menjaga situasi keamanan yang kondusif, serta menjaga sikap toleransi antar umat beragama demi menjaga keutuhan NKRI. Selain itu, gerakan gotong royong yang nyata terbangun di masyarakat Jawa Tengah dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini adalah Jogo Tonggo. Filosofi dasar Gerakan Jogo Tonggo adalah memberdayakan masyarakat sebagai garda terdepan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungannya. Gerakan ini merupakan gerakan bersama menjaga kesehatan warga, kondusivitas lingkungan, pencegahan konflik antar warga agar tetap terjaga persatuan dan kesatuan warga, kondisi perekonomian masyarakat, kepastian pemenuhan kebutuhan pangan dan bahan pokok, serta kekuatan kearifan lokal dan potensi geografis lingkungan setempat. Gerakan Jogo Tonggo juga memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya hidup bersama dengan saling toleransi antar maupun inter agama, suku, etnis, membangun kebersamaan, solidaritas, dan *sense of crisis*, serta bekerja bergotong royong.

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis guna mendukung pencapaian tujuan 1 pada tahun ke 3 sebesar Rp 10.359.906.000,- terealisasi Rp 9.916.066.700,- sehingga terdapat efisiensi

anggaran sebesar Rp 443.839.300,- atau 4,29%. Sasaran Strategis ini dilaksanakan melalui program :

1. Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan.
2. Penguatan Ketahanan Bangsa.
3. Penguatan Politik Dalam Negeri.

2). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (*Good Governance and Clean Government*)

Reformasi birokrasi menjadi amanat Presiden yang disampaikan pada hari ulang tahun Korpri tahun 2020. Presiden menegaskan bahwa pandemi adalah momentum untuk mempercepat transformasi digital. Sebagian besar birokrat harus bekerja dari rumah, serta menjadikan aparat birokrasi lebih adaptif dan terampil dalam memanfaatkan teknologi dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas. Tidak hanya reformasi birokrasi, Presiden juga mengungkapkan bahwa reformasi struktural harus segera diimplementasikan untuk memangkas pengambilan keputusan yang berbelit sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang prima. Regulasi yang rumit dan menghambat kreativitas kerja harus dipangkas dan disederhanakan. Kelembagaan pemerintahan yang gemuk, tumpang tindih, dan tidak efisien harus segera diintegrasikan. Jenjang eselonisasi yang panjang harus dapat dipangkas untuk mempercepat pengambilan keputusan. SOP yang panjang dan kaku harus dapat diringkas dan lebih fleksibel serta berorientasi pada hasil. Konsekuensinya, kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menyesuaikan.

Di Provinsi Jawa Tengah, percepatan implementasi reformasi birokrasi sudah dimulai bahkan sejak periode pertama Gubernur Ganjar Pranowo dan dilanjutkan pada periode kedua tahun 2018-2023, dengan tagline "Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi" yang merujuk pada perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik dan lebih bersih. Tagline ini diperuntukkan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju pada pelayanan publik yang prima, akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang optimal, kualitas SDM aparatur yang

berkualitas dan berintegritas, serta sistem tata kelola kelembagaan yang efisien.

Pada pembangunan jangka menengah tahun 2018-2023, reformasi birokrasi juga masih tetap menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimana secara eksplisit menjadi misi kedua dalam RPJMD. Berbagai upaya dilakukan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Jawa Tengah antara lain mendorong pelayanan publik yang semakin terbuka, cepat, dan mudah melalui pengembangan berbagai sistem informasi pelayanan publik bagi masyarakat, termasuk pelayanan perijinan satu pintu. Selain itu juga dengan membangun pemerintahan yang terbuka (open government) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik antara lain melalui media teknologi informasi.

Ditengah pandemi Covid-19 ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan kebijakan sistem kerja baru yaitu Work From Home (WFH) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Penerapan digitalisasi tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi juga semakin diperkuat dalam rangka perubahan pola kerja tatanan baru sebagai bentuk adaptasi terhadap pandemi Covid-19, antara lain dengan penggunaan sistem absensi online berbasis android, aplikasi tata naskah dinas elektronik, penerapan rapat/pertemuan secara daring, serta pendidikan dan pelatihan bagi aparatur secara daring. Dalam hal peningkatan akuntabilitas manajemen kinerja juga dilakukan penguatan pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi, yang juga menjadi salah satu upaya adaptasi perubahan akibat pandemi Covid-19. Upaya perwujudan pengawasan dan integritas ASN juga dilakukan berbagai macam kegiatan antara lain pengendalian gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mendorong pembentukan Zona Integritas di tiap-tiap perangkat daerah, internalisasi kurikulum integritas dalam pendidikan dan pelatihan aparatur, penguatan kapasitas APIP, dan sebagainya.

Selain itu, untuk penanganan Covid-19 di tahun 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan penataan kebijakan pembangunan daerah melalui refocusing anggaran yang diarahkan pada upaya pertolongan masyarakat dan sektor yang terdampak pandemi Covid-19 terutama pada sektor kesehatan, jaring ekonomi masyarakat, dan jaring pengaman sosial. Kebijakan ini menggambarkan bahwa birokrasi Jawa Tengah responsif terhadap segala perubahan yang terjadi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil pengukuran untuk tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) dengan satu indikator kinerja dari target yang ditetapkan sebesar 77,00 tercapai sebesar 84,93 dengan tingkat capaian sebesar 110,30% atau dengan kategori "Sangat Baik". Tujuan ini dicapai dengan tiga sasaran strategis dan tujuh indikator dengan pengukuran sebagaimana Tabel 2.10 di bawah ini :

Tabel 2.10.

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis pada Tujuan 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (good governance and clean government)								
No	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian 2019	Capaian 2020			Target Akhir RPJMD	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	103,18	82,70	83,94**	101,50	88,00	95,39
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	139,49	2,88	4,20***	145,83	3,24	129,63
3	Nilai SAKIP	Angka	101,95	82,00	81,56	99,46	85,00	95,95
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	101,43	3,47	3,50	100,86	3,50	100,00
5	Opini BPK	Opini	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00
6	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Angka	145,76	28,00	34,38	122,79	29,00	118,55
7	Indeks Sistem Merit	Angka	104,48	0,70	0,70	100,00	0,71	98,59
Rata-rata capaian Tujuan 2			113,76			110,06		105,44

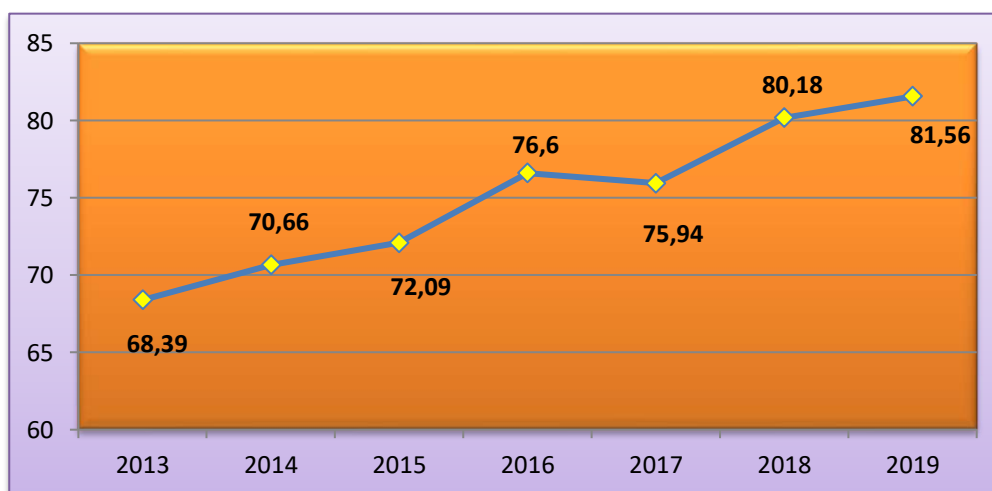
Dari Tabel 2.10 diketahui bahwa dalam mencapai tujuan 2 dijabarkan melalui tiga sasaran strategis dengan rata-rata tingkat capaian kinerja untuk tujuh indikator kinerja sebesar 110,06% atau dengan kategori "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan capaian akhir perencanaan jangka menengah yang akan selesai pada tahun 2023 sudah tercapai sebesar 105,44%. Dari 7 indikator kinerja yang ditetapkan terdapat 3 (tiga) indikator yang capaian

kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu (1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian sebesar 101,50%; (2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan tingkat capaian sebesar 145,83%; dan (3) Nilai Kematangan Organisasi Daerah dengan tingkat capaian sebesar 122,79%.

Realisasi yang jauh melampaui target pada pencapaian indeks SPBE disebabkan pada tahun 2020 pengukuran nilai indeks domain dan aspek SPBE dilakukan dengan metode penilaian mandiri (self asesment) berdasarkan hasil evaluasi tahun 2019, serta menindaklanjuti rekomendasi tahun 2019. Penilaian mandiri dilakukan dengan menggunakan lembar kerja dan mengupload data dukung dari masing-masing aspek pendukung indeks domain dan aspek SPBE, sedangkan pencapaian indeks kematangan organisasi daerah yang juga jauh melampaui target yang ditetapkan disebabkan kesiapan perangkat daerah dalam penyediaan data penilaian 11 variabel kematangan organisasi yang semakin baik.

Angka realisasi pencapaian indikator nilai AKIP menggunakan capaian tahun 2019 dikarenakan nilai AKIP tahun 2020 belum dirilis. Nilai maupun predikatnya meningkat setiap tahun sebagaimana digambarkan dalam Grafik 2.11 di bawah ini:

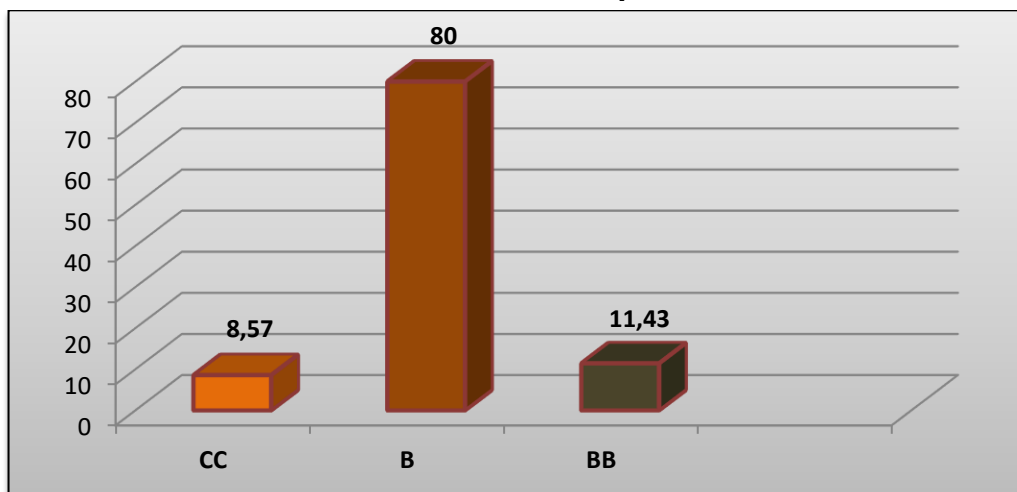
Grafik 2.11.
Peningkatan Predikat SAKIP Provinsi Jawa Tengah 2013-2019



Sumber : Kementerian PAN-RB 2020

Pencapaian indikator nilai AKIP Provinsi Jawa Tengah selain didukung oleh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat juga didukung oleh SAKIP Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Perkembangan pencapaian predikat SAKIP Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sebagaimana Grafik 2.12 di bawah ini :

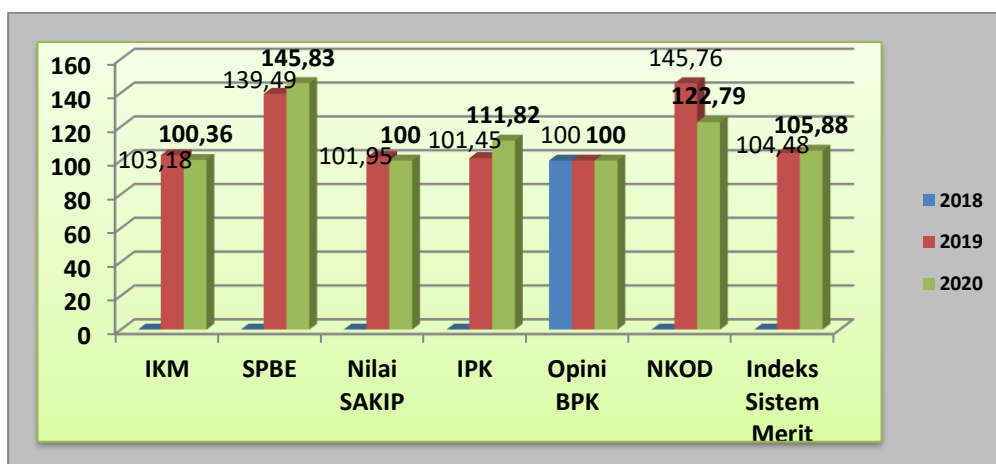
Grafik 2.12.
Predikat SAKIP Kab/Kota 2019



Sumber : Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2019 Kemenpan RB

Sebagai perbandingan untuk realisasi capaian kinerja tujuan 2 selama 3 tahun terakhir dari 2018 s.d 2020 sebagaimana Grafik 3.4 di bawah ini :

Grafik 2.13.
Capaian Tujuan dan Sasaran tujuan 2



Sumber : LKPJ Gubernur Jawa Tengah ATA 2020

Nilai indeks aspek SPBE Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 terdapat aspek yang melebihi/menyamai target nasional dan terdapat nilai yang lebih rendah dari target nasional. Aspek SPBE yang melebihi/menyamai target nasional adalah Aspek Kebijakan Tata Kelola, TIK, Layanan Administrasi Pemerintah, dan Layanan Publik, sedangkan Aspek yang nilainya lebih rendah dari target nasional adalah aspek Kebijakan Layanan dan Aspek Kelembagaan. Manajemen ASN sudah diterapkan di Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan layanan kepegawaian secara online system yang terus dikembangkan.

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada tahun ke-3 ini sebesar Rp 78.242.514.000,- terealisasi sebesar Rp 75.274.460.387,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp 2.968.053.613,- atau 3,79%.

Sasaran Strategis ini dilaksanakan melalui program:

- 1). Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah.
 - 2). Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah.
 - 3). Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 4). Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 5). Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
 - 6). Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - 7). Pengembangan *E-Government*.
 - 8). Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi.
 - 9). Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah.
- 3). Kemiskinan di Jawa Tengah Yang Semakin Menurun Secara Merata

Kondisi perekonomian Jawa Tengah secara umum terpengaruh besar oleh pandemi Covid-19. Segala bentuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 selama tahun 2020 mulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), work from home (bekerja dari rumah), study from home (sekolah dari rumah), pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar menekan kinerja seluruh lapangan usaha, utamanya transportasi dan perdagangan yang bergantung pada

mobilitas masyarakat. Namun kebijakan sekolah dan bekerja dari rumah yang dilakukan secara daring mendorong meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha informasi dan komunikasi. Sementara itu, kebijakan penundaan berbagai proyek pembangunan baik dari swasta maupun pemerintah, serta pengalihan belanja pemerintah menyebabkan tertekannya pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB (sumber: BPS Jawa Tengah, 2021).

Kondisi perekonomian ini yang kemudian berbanding lurus dengan kondisi kemiskinan dan pengangguran. Sampai dengan bulan Maret 2020, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai angka 11,41% atau meningkat dari periode September 2019 yang sebesar 10,58%. Demikian juga tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah di bulan Agustus 2020 mencapai angka 6,48%, lebih tinggi dari angka di bulan Agustus 2019 yang sebesar 4,44%.

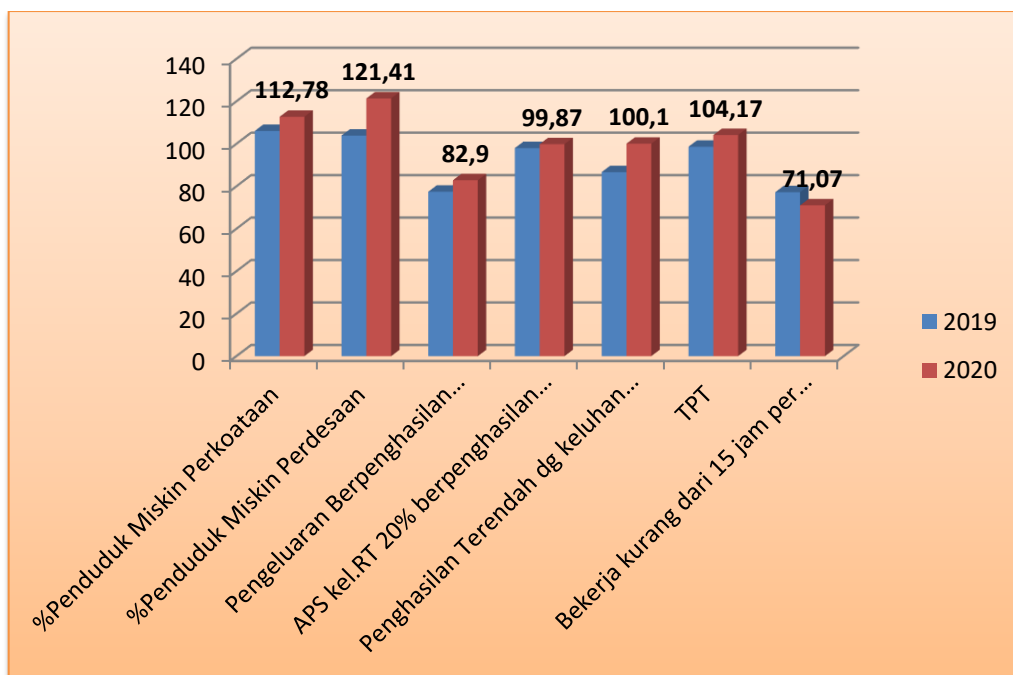
Tujuan menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah secara merata ini diukur ketercapaiannya melalui dua indikator tujuan yaitu (1) Angka Kemiskinan dengan capaian 103,89%; dan (2) Indeks Gini dengan capaian sebesar 103,06% atau kedua-duanya dalam kategori "Sangat Baik". Pencapaian tujuan ini dilakukan melalui 2 sasaran strategis (1) Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan dan kelompok rumah tangga desil terbawah dengan lima indikator kinerja; serta (2) Menurunnya pengangguran terbuka dengan dua indikator kinerja. Hasil pengukuran capaian indikator sasaran sebagaimana pada Tabel 2.11 di bawah ini :

Tabel 2.11.

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis pada Tujuan 3 Menurunkan Kemiskinan di Jawa Tengah Secara Merata								
No	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian 2019	Capaian 2020			Target Akhir RPJMD	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase penduduk miskin perkotaan	%	105,12	11,38-10,44	10,57	90,77	9,17	86,75
2	Persentase penduduk miskin pedesaan	%	103,92	15,54-14,25	13,20	107,95	11,97	90,58
3	Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Ribu Rupiah	77,47	478,76	396,87	82,90	520,15	75,86
4	Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Angka	98,03	61,00	60,92	99,87	61,75	98,56
5	Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan terendah dengan kebutuhan kesehatan	%	86,69	30,80	30,47	100,10	29,75	97,64
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	98,66	5,88-6,79	5,43	104,17	4,00	61,75
7	Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu	%	77,34	6,66	7,05	71,07	5,50	69,18
Rata-rata capaian Tujuan 3			92,59			94,98		82,93

Dari Tabel 2.11 dapat disimpulkan bahwa untuk tujuan menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah secara merata yang diukur dengan 7 indikator sasaran rata-rata tercapai sebesar 94,98% atau kategori "Baik", apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2019 terdapat peningkatan kinerja sebesar 2,39%, sampai dengan bulan Maret 2020. Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai angka 11,41% atau meningkat sebesar 0,83% dibanding capaian per September 2019 yang sebesar 10,58% dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah mencapai 82,93%. Capaian ini diperoleh dari data BPS periode Maret 2020 sehingga belum menunjukkan dampak atas pandemi Covid-19. Perkembangan realisasi capaian kinerja tujuan 3 selama 2 tahun terakhir dari 2019 s.d 2020 sebagaimana Grafik 2.14 di bawah ini :

Grafik 2.14.
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan 3



Sumber : LKPJ Gubernur Jawa Tengah ATA 2020

Strategi untuk menurunkan angka kemiskinan diantaranya melalui penyediaan jaring pengaman sosial yang diarahkan pada bantuan pangan non tunai, bantuan pangan masyarakat terdampak Covid-19 (non DTKS), perluasan sasaran penerima KJS, pemberian tambahan bantuan vitamin bagi kelompok rentan di dalam panti, bantuan operasional bagi TKSK, logistik permakanan/posko logistik, bantuan kepada keluarga terdampak Covid-19 (ODP, PDP, terkonfirmasi) berupa permakanan dan vitamin, serta dukungan operasional Taruna Siaga Bencana, selain itu Program Desa Dampingan 1 OPD 1 Desa Dampingan yang digagas Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2019 berjalan dengan sangat baik sampai dengan tahun 2020 yang diindikasikan dengan dominan meningkatnya status desa dampingan sehingga program ini terus dilanjutkan dengan peningkatan jumlah desa yang didampingi oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.

Untuk mencapai kinerja Misi-3 pada Tujuan-1 tersebut pada tahun 2020 didukung dengan anggaran sebesar Rp 97.711.527.000,- dengan realisasi sebesar Rp 93.250.715.181,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp 4.460.811.819,- atau 4,56%.

Pencapaian Misi-3 Tujuan-1 dilaksanakan melalui program :

- a). Rehabilitasi Sosial.
 - b). Penanganan Fakir Miskin.
 - c). Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - d). Pemberdayaan Sosial.
 - e). Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa.
 - f). Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat.
 - g). Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - h). Peningkatan Kesempatan Kerja.
 - i). Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
 - j). Peningkatan Kepatuhan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan.
- 4). Menciptakan Stabilitas Ekonomi Daerah Yang Berkualitas, Menyebar dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan

Tujuan ini diukur ketercapaiannya melalui empat indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi dengan capaian -170,87%, inflasi dengan capaian sebesar 191,08%. PDRB per kapita dan Indeks Williamson sampai dengan triwulan IV belum tersedia datanya. Tujuan ini dicapai melalui sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dan peran investasi terhadap ekonomi daerah dengan hasil pengukuran capaian indikator sasaran sebagaimana pada Tabel 2.12 di bawah ini :

Tabel 2.12.

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis pada Tujuan 4 Menciptakan Stabilitas Ekonomi Daerah Yang Berkualitas, Menyebar, dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan								
No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020				Target Akhir RPJMD	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD
			% Capaian 2019	Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan Perikanan	%	48,90	1,09	2,48	227,52	3,10	80,00
2	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	107,01	2,41	-3,74	-135,19	5,63	-65,19
3	Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa	%	105,47	1,58	-3,80	-240,51	5,90	-64,41
4	Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD	%	395,67	3,15	15,11	480,00	3,20	472,50
5	Pertumbuhan investasi	%	4,33	4,00	-5,80	-145,00	10,00	-55,00
6	Nilai Tukar Petani	Angka	102,60	102,42	101,49	99,09	103,15	98,39
Rata-rata capaian Tujuan 4			127,06			44,32		77,05

Dari Tabel 2.12 dapat disimpulkan bahwa untuk tujuan menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar dan inklusif berbasis potensi unggulan yang diukur dengan 6 indikator sasaran, rata-rata tercapai sebesar 44,32% atau kategori “Kurang Baik”. Hal ini disebabkan 3 indikator tidak sesuai target yang ditetapkan, yaitu (1) Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dengan capaian sebesar -155,19%; (2) Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa dengan capaian sebesar -240,51%; dan (3) Pertumbuhan Investasi dengan capaian sebesar -145% yang disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi daerah apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2019 terdapat penurunan yang sangat jauh yaitu sebesar 82,74% dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD baru mencapai 77,05%.

Berbagai strategi upaya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menjaga perekonomian daerah, kemiskinan dan pengangguran agar tidak semakin terpuruk akibat pandemi Covid-19. Untuk pemulihan ekonomi masyarakat telah dilakukan beberapa upaya antara lain dengan penyediaan jaring pengaman ekonomi melalui peningkatan kapabilitas IKM dan bantuan raw material, peningkatan kapabilitas IKM Non Agro dan bantuan raw material, bantuan biaya distribusi pangan, tambahan cadangan pangan, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, penguatan BUMDes, lumbung desa, kawasan perdesaan, pasar murah sembako murah, penanggulangan kemiskinan berbasis peternakan, pendampingan bagi pencari kerja terdampak Covid-19, bintek LPK pendukung kartu pra kerja, pelatihan dan bantuan alat kelompok pemuda, pendampingan dan pelatihan online, dukungan pemasaran produk UMKM (marketing online), subsidi bahan baku, serta subsidi bunga pinjaman bagi koperasi.

Pertumbuhan nilai penanaman modal capaiannya sebesar -5,80% kurang dari target yang ditetapkan sebesar 4%. Hal ini disebabkan karena :

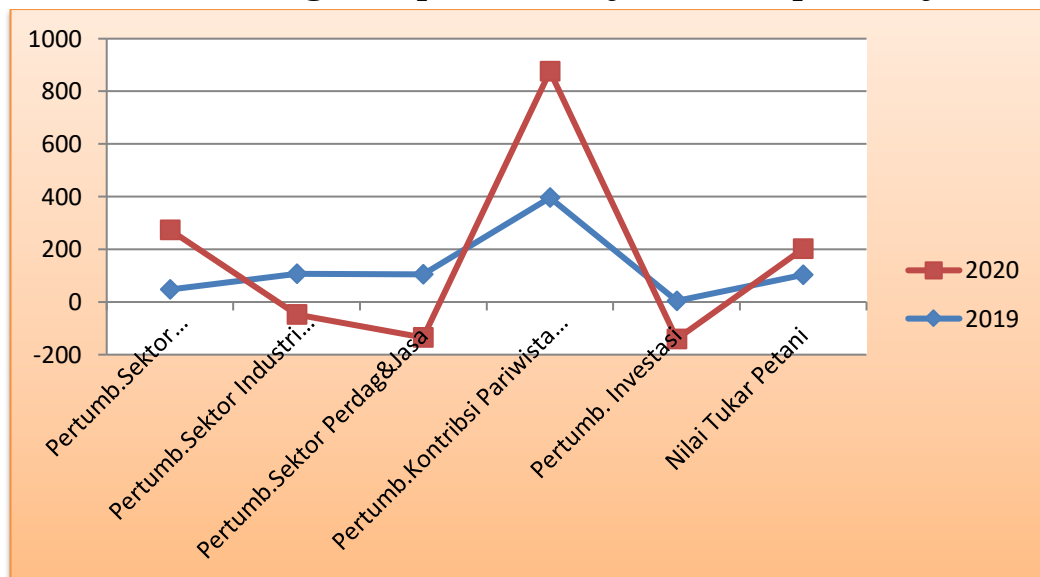
- a). Pelambatan pertumbuhan penanaman modal akibat dampak Covid-19 yang menyebabkan perekonomian global menjadi cenderung melambat.
- b). Terjadinya pembatalan rencana investasi yang diduga karena kondisi finansial perusahaan atau beralihnya rencana investasi.

- c). Terjadi penurunan realisasi investasi PMA/PMDN dari tahun sebelumnya.
- d). Kesulitan memperoleh lahan secara tepat karena adanya benturan RTRW.

Laju pertumbuhan sektor perdagangan di Jawa Tengah masih mengalami kontraksi, yaitu -3,80% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya, laju pertumbuhan industri pengolahan non migas di Jawa Tengah masih mengalami kontraksi, yaitu -3,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena dampak lanjutan pandemi Covid-19. Kebijakan pembatasan aktivitas/sosial sebagai upaya pengendalian/meredam penyebaran Covid-19 menyebabkan penurunan produksi, permintaan dan distribusi barang dan jasa, sebagai akibat terbatasnya pergerakan manusia dan barang. Hal ini berdampak pada penurunan permintaan dalam negeri dan menghambat kegiatan produksi dan investasi, serta gangguan pasokan dan distribusi barang.

Perkembangan realisasi capaian kinerja tujuan 4 selama 3 tahun terakhir dari 2018 s.d 2020 sebagaimana Grafik 2.15 di bawah ini :

Grafik 2.15.
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran pada Tujuan 4



Sektor Pariwisata memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai salah satu sumber penerimaan devisa maupun sebagai pembuka kesempatan kerja dan kesempatan usaha. Selain itu berkembangnya sektor pariwisata menyebabkan berkembangnya sektor-sektor lainnya seperti bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan dan lainnya. Dengan kata lain, Pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu memberikan pertumbuhan ekonomi dengan cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan sektor lainnya di Indonesia. Pembangunan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (RIPPARDA) Tahun 2012-2027 yang terlegalisasi dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012. Adapun dalam mewujudkan pembangunan kepariwisataan di Provinsi Jawa Tengah ditempuh dengan mengembangkan:

- a). Destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.
- b). Pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

- c). Industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya.
- d). Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, optimalisasi pelayanan dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Walaupun didera pandemi Covid 19, sektor pariwisata Provinsi Jawa Tengah masih mampu bertahan dengan pencapaian kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,19% dari target yang telah ditetapkan sebesar 2,99% (atas dasar harga berlaku), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 54.172 orang dari target yang telah ditetapkan sebesar 57.394 orang (94.39%) dan jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebesar 16.089.893 orang atau 107,45% dari target yang telah ditetapkan sebesar 14.973.707 orang. Adapun strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas pencapaian tersebut adalah menerapkan kebijakan protokol kesehatan dengan ketat di destinasi wisata, sarana amenities dan juga fasilitas penunjang lainnya serta melakukan pemasaran pariwisata secara massive di media sosial.

Untuk mencapai kinerja Tujuan-4 sasaran satu tersebut, pada tahun 2020 didukung dengan anggaran sebesar Rp 141.528.418.000,- dengan realisasi sebesar Rp 121.628.462.473,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp 19.899.955.527,- atau 14,06%.

Tujuan dan sasaran ini dilaksanakan melalui program :

- a). Pengembangan Destinasi Pariwisata.
- b). Pengembangan SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
- c). Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
- d). Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal.
- e). Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
- f). Pelayanan Perizinan.
- g). Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.
- h). Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Perizinan.

- i). Pelayanan Data dan Informasi Penanaman Modal dan Perizinan.
- j). Pengembangan Agri Bisnis.
- k). Perikanan Tangkap.
- l). Usaha dan Pengembangan Komoditas.

5). Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia menjadi salah satu fokus pembangunan daerah Jawa Tengah dalam periode RPJMD Tahun 2018-2023. Ukuran keberhasilan yang dicapai adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2020 adalah sebesar 71,87 dengan tingkat capaian sebesar 99,85% atau dengan kategori “Baik”, meningkat 0,14% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 71,73. Peningkatan nilai IPM Jawa Tengah tahun 2020 tidak terlepas dari berbagai macam upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan usia harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah. Pelayanan pendidikan yang telah diupayakan antara lain dengan meningkatkan angka partisipasi sekolah mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah melalui peningkatan kualitas dan distribusi sarana prasarana pendidikan yang sesuai standar, peningkatan kualitas guru dan distribusinya secara merata, peningkatan akses layanan pembiayaan pendidikan dengan pemberian BSM, BOSDa untuk sekolah negeri dan swasta, serta BOP untuk sekolah negeri dan swasta.

Pencapaian tujuan ini didukung dengan tiga sasaran strategis antara lain (1) Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas; (2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan (3) Meningkatnya akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak dan empat indikator kinerja sasaran, dengan hasil pengukuran sebagaimana pada Tabel 2.13 di bawah ini :

Tabel 2.13.

Pengukuran Kinerja Tujuan 5 Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing								
No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				Target Akhir RPJMD	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD
			% Capaian 2019	2020		% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(5)	Target	Realisasi	(8)	(9)	(10)
1	Rata-rata Lama Sekolah	%	103,01	7,65	7,69	100,52	7,45	103,22
2	Harapan Lama Sekolah	%	98,75	12,74	12,70	99,69	13,17	96,43
3	Angka Harapan Hidup	%	100,19	74,28	74,37	100,12	74,10	100,36
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	99,88	89,00	91,89	103,25	92,25	99,61
Rata-rata capaian Tujuan 5			75,41			100,90		99,91

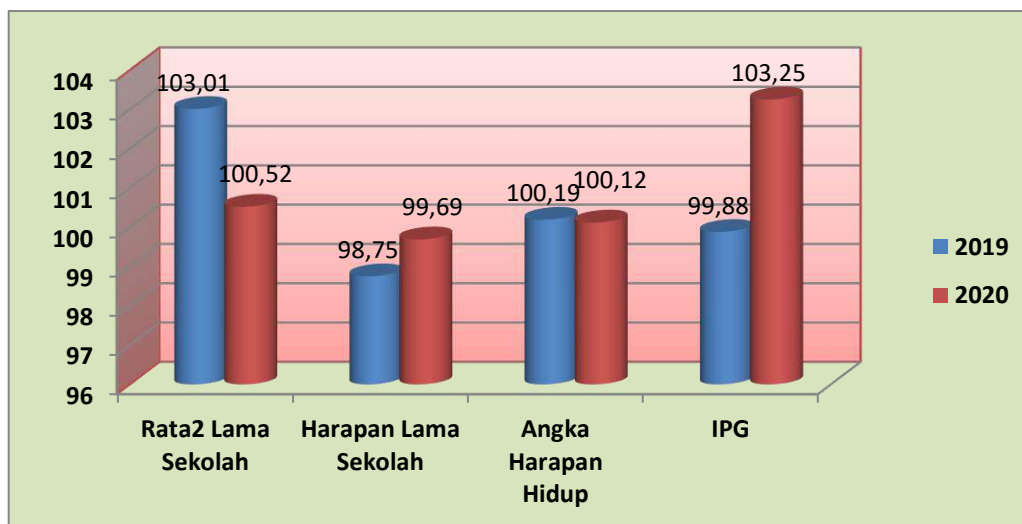
Dari Tabel 2.13 dapat disimpulkan bahwa untuk tujuan membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang diukur dengan 4 indikator sasaran rata-rata tercapai sebesar 100,90% atau kategori "Sangat Baik", apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2019 terdapat peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 24,92% atau dengan kata lain selama tahun 2020 terjadi pembangunan SDM yang cukup pesat dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah mencapai 99,91% artinya perencanaan terlaksana dengan baik. **Peningkatan capaian IPG** sangat dipengaruhi oleh beberapa indikator komposit antara lain Usia Harapan Hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita yang memerlukan sinergitas dengan OPD dan stakeholders lain, sehingga tidak bisa dilakukan oleh dinas perempuan dan anak sendiri dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut melalui :

- Penguatan kelembagaan PUG** melalui penyusunan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) bagi OPD dengan outcome/impact untuk menaikkan capaian IPG.
- Implementasi Serat Kartini (Sekolah perempuan cerdas masa kini) melalui kegiatan Pemberdayaan Perempuan di 130 lokasi di Jawa Tengah dan melibatkan 3.250 orang perempuan rentan produktif (Perempuan Kepala Keluarga, korban kekerasan, disabilitas miskin, IRT/perempuan ODHA, lansia produktif, buruh migran purna dan kerjasama dengan OPD Kabupaten/Kota, Perusahaan mitra dan DPRD Provinsi Jawa Tengah).

c). Kegiatan tersebut bertujuan salah satunya untuk meningkatkan IPG khususnya indikator komposit pengeluaran per kapita perempuan.

Perkembangan persentase capaian kinerja tujuan 5 selama 2 tahun terakhir dari 2019 s.d 2020 sebagaimana Grafik 2.16 di bawah ini :

Grafik 2.16.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5

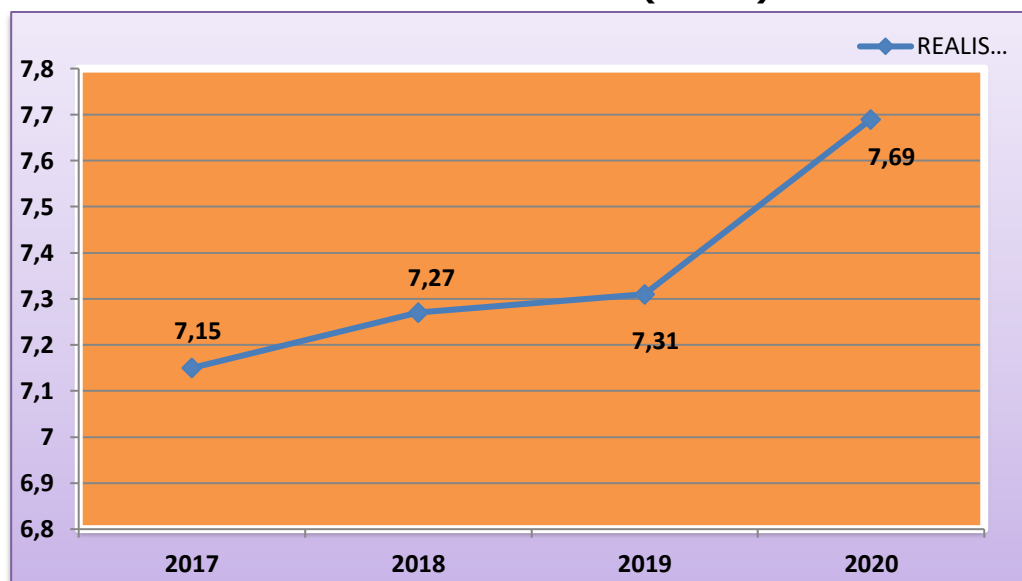


Sumber : LKPJ Gubernur Jawa Tengah ATA 2020

Pembangunan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan juga dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia. Peningkatan kesempatan mendapatkan pendidikan yang setara bagi perempuan, kesempatan yang sama dalam pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu fokus pembangunan gender di Jawa Tengah. Langkah konkrit yang telah dilakukan antara lain pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan yang berkelanjutan.

Untuk indikator rata-rata lama sekolah terjadi penurunan sebagaimana Grafik 2.17 di bawah ini :

Grafik 2.17.
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional
Tahun 2017 – 2020 (Tahun)



Sumber : LKPJ Gubernur Jawa Tengah ATA 2020

Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD tahun 2018-2023, di dalamnya terdapat indikator daerah yang terkait dengan kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup pada saat lahir (life expectancy at birth) diartikan sebagai rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. AHH merupakan salah satu indikator dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan yang dibentuk dari tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. AHH Provinsi Jawa Tengah dalam kurun 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dapat dilihat pada Grafik 2.18 berikut:

Grafik 2.18.
Capaian AHH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2020



Sumber data : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Dari Grafik 2.17 di atas terlihat bahwa AHH Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan, walaupun terlihat fluktuatif per tahunnya. Capaian tahun 2020 sebesar 74,37 melebihi target 74,09 lebih baik dibanding tahun 2019 sebesar 74,23. Persentase capaian sebesar 100,37% sedangkan peningkatan capaian terbesar di tahun 2020 sebesar 0,14.

Derajat kesehatan yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi yang secara tak langsung dapat meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH). Secara keseluruhan AHH Jawa Tengah mengalami peningkatan, namun masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki AHH relatif rendah, seperti di Kabupaten Tegal sebesar 71,58 tahun. Sementara di Kabupaten Sukoharjo sebesar 77,76 tahun. Secara teori, salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan data AHH adalah PDRB per kapita. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah, misalnya biaya kesehatan.

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada tahun ke-3 ini sebesar Rp 2.801.734.196.000,- terealisasi Rp 2.739.805.370.710,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp 61.928.825.290 atau 2,21%.

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelesaikan tujuan dan sasaran ini antara lain (1) Kualitas dan distribusi guru dan tenaga pendidik belum merata, dimana belum semua guru dan tenaga kependidikan mempunyai kualifikasi akademik yang sesuai; (2) Partisipasi anak usia sekolah jenjang pendidikan menengah belum mencapai 100% serta masih terdapat anak usia sekolah yang putus atau tidak sekolah; (3) Masih kurangnya serapan tamatan SMK dalam Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI); (4) Terdapat sarana prasarana sekolah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), dimana masih terdapat sekolah dengan kondisi sarana prasarana pendidikan rusak berat dan sedang.

Adapun upaya mengatasi masalah tersebut yaitu :

- a). Melakukan identifikasi pemetaan kebutuhan dan ketersediaan serta kesesuaian kualifikasi guru dan tenaga pendidik.
- b). Meningkatkan partisipasi sekolah anak usia sekolah dan mengembalikan anak putus atau tidak sekolah melalui:
 - Penyelenggaraan 3 SMK Negeri Boarding.
 - Pembangunan Asrama Siswa Miskin pada 15 SMK Negeri (semi boarding).
 - Pembiayaan studi lanjut bagi siswa miskin pada SMA Taruna Nusantara.
 - Bantuan seragam siswa kurang mampu SMA, SMK, dan SLB Negeri.
 - Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP), Bantuan Operasional Daerah (BOSDA), dan Beasiswa Miskin.
 - Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK,SLB.
 - Penyelenggaraan Sekolah Jarak Jauh.
 - Sekolah Virtual.
- c). Meningkatkan relevansi mutu lulusan SMK dengan DUDI, melalui:
 - Revitalisasi dan Optimalisasi Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - Sertifikasi keahlian bagi siswa SMK.
 - Penyelenggaraan Bursa Kerja bagi lulusan SMK.
- d). Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus dan Hibah.

Tujuan 5 ini dicapai melalui program :

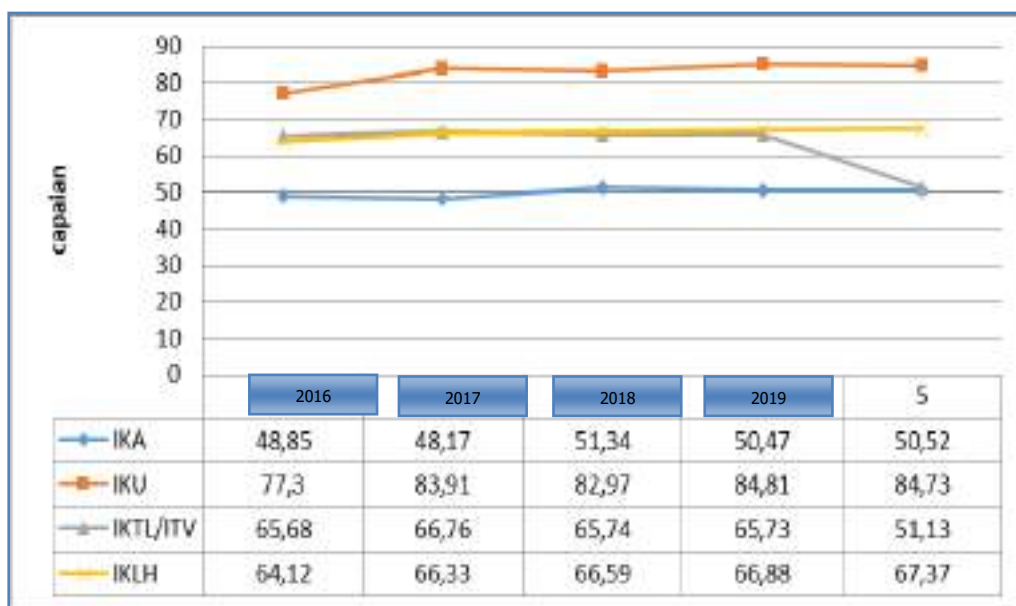
- Pembinaan Pendidikan Khusus.

- Pembinaan SMK.
- Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Pembinaan SMA.
- Manajemen Pelayanan Pendidikan.
- Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
- Pelayanan Kesehatan.
- Sumber Daya Kesehatan.
- Kesehatan Masyarakat.
- Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD.
- Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
- Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak.
- Perlindungan Perempuan Dan Anak.

6). Mewujudkan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Jawa Tengah yang Lestari dan Berkelanjutan

Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek utama dalam pembangunan berkelanjutan mengingat tantangan kondisi dan peningkatan dinamika aktifitas serta peningkatan jumlah penduduk ke depan (BPS: SP2020 36,52 juta), akan semakin berpotensi terhadap kondisi kelestarian lingkungan hidup. Tujuan pembangunan di Jawa Tengah senantiasa berupaya untuk menjaga harmonisasi dan keserasian pembangunan yang memperhatikan dan memperhitungkan keberadaan, kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Kondisi Umum lingkungan hidup Jawa Tengah secara umum masih dalam keadaan yang baik dan terjaga dengan tantangan yang semakin beragam diantaranya meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK), menurunnya kualitas udara, meningkatnya jumlah timbunan sampah limbah padat dan adanya sungai dalam kondisi tercemar.

Grafik 2.19.
Tren Capaian IKLH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020



Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 67,37 dengan tingkat capaian sebesar 102,75% atau dengan kategori "Sangat Baik". Nilai ini jika dibandingkan dengan nilai IKLH dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan. Selama periode tahun 2019-2020 nilai IKLH Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan sebesar 0,49. Besarnya nilai IKLH sangat dipengaruhi oleh komponen penyusun yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Capaian nilai komponen penyusun IKLH 5 tahun terakhir sebagai berikut :

- IKA Jawa Tengah 5 tahun terakhir menunjukkan nilai yang fluktuatif dengan capaian tertinggi pada tahun 2018 yaitu 51,34. Pada tahun 2019 nilai IKA mengalami penurunan 0,87 dan kembali meningkat pada tahun 2020 yaitu sebesar 50,52 atau meningkat 0,05 dibanding tahun 2019. Kondisi ini dipengaruhi oleh buangan air limbah dari berbagai aktivitas usaha dan/atau kegiatan yang bersumber dari *point source* (sumber tetap : industri, rumah sakit, hotel) maupun *non point source* (sumber tidak tetap : pertanian, peternakan).
- Kualitas udara *ambient* Jawa Tengah yang dapat digambarkan dari nilai Indek Kualitas Udara (IKU) selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan kondisi status mutunya masuk kategori baik meskipun nilai

Indeks Pencemar Udara mengalami fluktuatif. Nilai IKU Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 84,73 (**kategori "Baik"**). Apabila dibandingkan dengan IKU tahun 2019, maka nilai IKU tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,08. Meskipun mengalami sedikit penurunan tetapi kualitas udara tahun 2020 masih lebih tinggi dibanding nilai IKU tahun 2016-2018. Nilai tersebut masih dalam klasifikasi kondisi baik, karena dipengaruhi oleh upaya pengendalian pencemaran udara diantaranya melalui pentaatan pemenuhan baku mutu emisi, peningkatan RTH.

- c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan namun mulai tahun 2018-2020 mengalami penurunan. Penurunan capaian pada indikator IKTL ini cukup signifikan pada tahun 2019-2020 sebesar 14,6 dikarenakan terjadi perubahan metode penghitungan dari Indeks Tutupan Vegetasi menjadi Indeks Kualitas Tutupan Lahan sesuai dengan Peraturan Dirjen PPKL KLHK RI Nomor p.1/PPKL/PKLAT/PKL.4/1/2018 tentang Pedoman Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan Tutupan Lahan. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya alih fungsi lahan untuk infrastruktur.

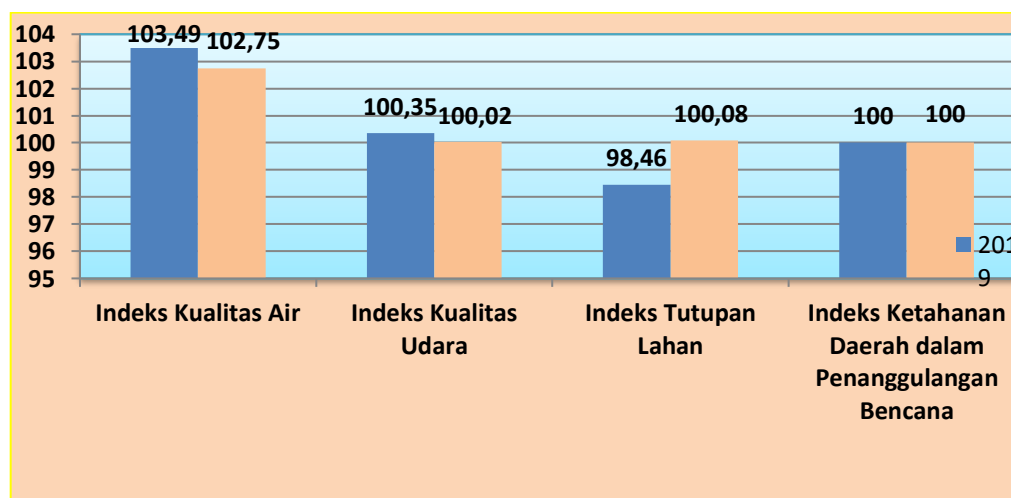
Tujuan ini dicapai melalui dua sasaran (1) Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan; dan (2) Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana serta diukur dengan empat indikator dengan hasil pengukuran sebagaimana pada Tabel 2.14 di bawah ini:

Tabel 2.14.

Pengukuran Kinerja Tujuan 6 Mewujudkan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Yang Lestari dan Berkelanjutan								
No	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian 2019	Capaian 2020			Target Akhir RPJMD	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kualitas Air	Angka	103,49	49,17	50,52	102,75	50,07	100,90
2	Indeks Kualitas Udara	Angka	100,35	84,71	84,73	100,02	85,11	99,55
3	Indeks Tutupan Lahan	Angka	98,46	51,09	51,13	100,08	66,76	78,59
4	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Angka	100,00	3,54	3,54	100,00	3,60	98,33
Rata-rata capaian Tujuan 6			100,58			100,71		93,84

Dari tabel 2.14 dapat disimpulkan bahwa untuk tujuan mewujudkan sumber daya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan yang diukur dengan 4 indikator sasaran rata-rata tercapai sebesar 100,71% atau kategori "Sangat Baik", apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2019 terdapat peningkatan sebesar 0,13% dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah mencapai 93,84% artinya perencanaan terlaksana dengan baik, sedangkan perkembangan persentase capaian kinerja tujuan 6 selama 2 tahun terakhir dari 2019 s.d 2020 sebagaimana grafik 2.20 di bawah ini :

Grafik 2.20.
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran pada Tujuan 6



Sumber : LKPJ Gubernur Jawa Tengah ATA 2020

Untuk mengatasi penurunan risiko bencana dapat dilakukan melalui peningkatan C atau kapasitas, dengan asumsi nilai H dan V adalah konstan atau tetap. Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana diukur melalui indeks ketahanan daerah (IKD). Strategi pemerintah dalam hal ini BNPB dan BPBD terdiri dari 7 (tujuh) fokus prioritas yang terdiri dari 71 indikator pencapaian. Dari 71 indikator tersebut akan diperoleh nilai ketahanan daerah. Tujuh indikator tersebut meliputi: perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, serta pengembangan pelayanan dasar pemerintah.



Pendampingan Perhitungan IKD Kab/Kota se-Jawa Tengah

Untuk meningkatkan IKD, dilaksanakan melalui 4 (empat) sasaran yaitu:

- a). Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.
- b). Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana.
- c). Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana.
- d). Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi.

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada tahun ke-3 ini sebesar Rp 31.807.626.000 dengan realisasi Rp

27.624.670.155 sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp 4.182.955.845,- atau 13,15%. Sasaran Strategis ini dilaksanakan melalui program :

- a). Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas.
- b). Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan.
- c). Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan.
- d). Penyuluhan dan Penegakan Hukum LHK.
- e). Pemanfaatan Hutan.
- f). Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Permasalahan dan Solusi

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah belum sepenuhnya dapat melaksanakan atau memenuhi semua indikator dalam pemenuhan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana yang disebabkan beberapa faktor permasalahan antara lain:

- a). Pemenuhan 71 indikator ini dilaksanakan oleh BPBD dan Instansi terkait, sehingga dibutuhkan koordinasi lintas sektor.
- b). Terbatasnya sumber daya di Kabupaten/Kota, baik anggaran maupun tenaga teknis, sehingga dibutuhkan pendampingan dari Pemerintah Provinsi ataupun Pusat.
- c). Diperlukan perkuatan kebijakan dan kelembagaan dalam penyusunan dokumen pendukung penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota.
- d). BPBD Kabupaten/Kota belum seluruhnya mengalokasikan anggaran untuk mendukung percepatan pemenuhan 71 indikator IKD.

Solusi yang dilakukan baik Provinsi maupun Pusat dalam penguatan kapasitas daerah pada penanggulangan bencana dengan meningkatkan nilai Indeks Kapasitas Daerah sebagai berikut:

- 1). Melaksanakan pendampingan ke Kabupaten/Kota dengan melibatkan fasilitator untuk penghitungan Indeks Ketahanan Daerah.
- 2). Mendorong Kabupaten/Kota aktif dalam melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan nilai Indeks Ketahanan Daerah lintas sektor.

- 3). Meningkatkan kerjasama antara pemangku kepentingan penanggulangan bencana.
- 4). Peningkatan kapasitas aparatur PB di seluruh tingkatan melalui diklat teknis dan formal, sebagai upaya menyikapi terjadinya rotasi/mutasi aparatur sumber daya PB yang telah terlatih sehingga mempunyai kompetensi yang sama.
- 5). Mendorong BNPB untuk melakukan sertifikasi bagi aparatur PB di daerah sehingga dapat dimonitoring kompetensi dan kapasitas masing-masing aparatur PB melalui pendidikan dan pelatihan sumber daya kebencanaan wajib dilakukan setiap periode.
- 6). Memberikan masukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar dapat memberikan alokasi dana untuk pengurangan risiko bencana lebih besar dibandingkan operasional kegiatan penanggulangan yang lain.
- 7). Melakukan koordinasi dan komunikasi secara efektif kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD untuk mengalokasikan anggaran yang tepat pada upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 8). Melakukan kerja sama dengan lembaga donor nasional maupun internasional untuk mendukung penguatan kapasitas masyarakat, Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di berbagai lembaga usaha juga dapat dikelola sebagai bagian dukungan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.

g. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

- 1). Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Religius, Toleran, dan Guyup.

Sasaran untuk mencapai tujuan ini dilaksanakan dengan program :

- a). Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum Dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah
- b). Pemeliharaan Kamtramtibmas Dan Pencegahan Tindak Krimimal
- c). Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan
- d). Program Penguatan Ketahanan Bangsa
- e). Program Penguatan Politik Dalam Negeri

2). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (*Good Governance and Clean Government*)

Sasaran Strategis ini di laksanakan melalui program :

- a). Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
- b). Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah
- c). Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- d). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat
- e). Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3). Kemiskinan di Jawa Tengah Yang Semakin Menurun Secara Merata

4). Menciptakan Stabilitas Ekonomi Daerah Yang Berkualitas, Menyebar dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan

5). Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Tujuan 5 ini dicapai melalui program :

- a). Pembinaan Pendidikan Khusus
- b). Pembinaan SMK
- c). Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
- d). Pembinaan SMA
- e). Manajemen Pelayanan Pendidikan
- f). Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
- g). Pelayanan Kesehatan
- h). Sumber Daya Kesehatan
- i). Kesehatan Masyarakat
- j). Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
- k). Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
- l). Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak
- m). Perlindungan Perempuan Dan Anak

6). Mewujudkan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Jawa Tengah yang Lestari dan Berkelanjutan

Tujuan 6 ini dicapai melalui program :

- a). Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
- b). Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- c). Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi:

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- f. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 198, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6410);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 - j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - l. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan UKM;
 - m. Peraturan menteri pemuda dan olahraga republik indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi dilaksanakan untuk program pembangunan kepemudaan dan keolahragaan;
 - n. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020;
 - o. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lingkup Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perindustrian Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020.
 - p. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan

- Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- q. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19);

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi

Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan amanat undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana pasal 5 ayat (4), bahwa urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran di Provinsi Jawa Tengah.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

Tugas Pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

Tugas Pembantuan

1) Kementerian/Lembaga Pemberi Tugas Pembantuan

- a). Kementerian Pertanian
- b). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a). Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Alokasi anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Rp42.442.770.000,00 dilaksanakan melalui 2 program, yaitu Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat serta Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,62%.

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, alokasi anggaran Rp39.963.670.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,64%. Kegiatan yang mendukung program ini sebanyak 12 kegiatan yaitu kegiatan hijauan pakan ternak dengan keluaran 1 Ha sesuai target; kegiatan mutu dan keamanan pangan dengan keluaran 68 sampel dari target 25 sampel. Tingginya realisasi keluaran disebabkan anggaran yang ada dapat digunakan untuk membiayai pengujian sesuai parameter kebutuhan sehingga sampel uji yang didapat melebihi target (optimalisasi anggaran); kegiatan pencegahan penyakit hewan dengan keluaran 177.500 dosis vaksinasi dari target 175.900. Rincian realisasi keluaran tersebut yaitu vaksinasi Rabies 5.000 dosis, AI 152.750 dosis, Brucellosis 2.250 dosis, Anthrax 10.000 dosis, dan obat 7.500 dosis). Tingginya realisasi keluaran disebabkan anggaran yang ada mampu untuk dibeli obat lebih dari target yang ditentukan (optimalisasi anggaran); kegiatan optimalisasi reproduksi dengan keluaran 608.975 akseptor dari target 453.100 akseptor, sebaran lokasinya di 30 kabupaten/kota di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal,

Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Salatiga, dan Kota Semarang; kegiatan pengembangan ternak ruminansia potong dengan keluaran 1 ekor dari target 1 ekor; kegiatan penyusunan Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) Perbibitan dan Produksi Ternak dengan keluaran 1 NSPK perbibitan sesuai target; kegiatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH dengan keluaran 10 Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner sesuai target; kegiatan pengawasan mutu dan keamanan produk di Laboratorium Pati dengan keluaran 50 sampel sesuai target; kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif dengan keluaran 1 lokasi sesuai target; kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dengan keluaran 1 layanan dari target 1 layanan; kegiatan pengembangan pengolahan pangan dan non pangan dengan keluaran 1 unit dari target 1 unit; kegiatan kelembagaan dan usaha peternakan dengan keluaran 8 lokasi pembinaan dan koordinasi asuransi ternak sesuai target, sebaran lokasinya di 8 kabupaten yaitu Semarang, Kudus, Brebes, Klaten, Wonogiri, Batang, Demak dan Boyolali.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, alokasi anggaran Rp2.479.100.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,27%. Kegiatan yang mendukung program ini sebanyak 3 kegiatan yaitu Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian dengan keluaran irigasi perpompaan di Pati, Magelang dan Wonogiri masing-masing 2 unit, embung pertanian di Jepara, Wonogiri, Boyolali, Karanganyar, Blora, Brebes dan Grobogan, irigasi perpipaan di Blora sebanyak 2 unit; Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dengan keluaran pelayanan dukungan eselon 1 dan Bintek monitoring dan evaluasi dengan keluaran terlaksananya Bintek monitoring dan evaluasi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

b). Dinas Pertanian dan Perkebunan

Alokasi anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Rp224.913.128.000,00 dilaksanakan melalui Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura; Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan; serta Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,71%.

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, alokasi anggaran Rp152.466.682.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,14%. Kegiatan yang mendukung program ini sebanyak 5 kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi dengan keluaran kawasan kedelai seluas 13.510 ha sesuai target, kawasan kacang tanah seluas 1.410 ha sesuai target, kawasan kacang hijau seluas 1.470 ha sesuai target, dan Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di 27 lokasi sesuai target; Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia dengan keluaran Kawasan Padi seluas 18.868 ha sesuai target, Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi di 33 lokasi sesuai target, dan Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) seluas 128.184 ha sesuai target; Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan dengan keluaran Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat seluas 128.184 ha, Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di 1 lokasi sesuai target, serta Areal yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat seluas 108.145 ha sesuai target; Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan dengan keluaran Layanan Dukungan Manajemen Eselon I; serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dengan keluaran Sarana Pascapanen Tanaman

Pangan sebanyak 110 unit sesuai target, Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan sebanyak 24 unit sesuai target, Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan sebanyak 5 sertifikat sesuai target, Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan di 27 lokasi sesuai target, dan Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi selama 12 bulan sesuai target.

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, alokasi anggaran Rp8.222.942.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 88,24%. Kegiatan yang mendukung program ini sebanyak 4 kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat dengan keluaran Kawasan Bawang Merah seluas 0,001 ha di Kabupaten Kudus sesuai target, Kawasan Sayuran Lainnya seluas 5,02 ha di Kabupaten Semarang dan Purbalingga sesuai target, Kawasan Aneka Cabai seluas 0,0001 ha di Kabupaten Kendal, Blora, Purworejo, Wonogiri dan Purbalingga sesuai target, Kawasan Tanaman Obat seluas 10 ha di Kabupaten Wonogiri sesuai target, Kawasan Bawang Putih seluas 50 ha di Kabupaten Temanggung sesuai target; Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura dengan keluaran Layanan Dukungan Manajemen Satker sesuai target; Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dengan keluaran Kawasan Buah Lainnya seluas 0,0001 ha di Kabupaten Blora sesuai target, Kawasan Florikultura seluas 15.000 m² di Kabupaten Pemalang sesuai target, Kawasan Mangga seluas 20 ha di Kabupaten Rembang sesuai target, Kawasan Manggis seluas 30 ha di Kabupaten Purworejo sesuai target, Kawasan Durian seluas 50 ha di Kabupaten Pemalang sesuai target; Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan keluaran Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura sebanyak 26 unit di 8 kabupaten sesuai target, Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura sebanyak 9 unit di 7 kabupaten sesuai target.

Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan, alokasi anggaran Rp15.915.679.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 82,55%. Kegiatan yang mendukung program ini sebanyak 6 kegiatan yaitu Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan keluaran Kawasan Kopi seluas 300 ha di Kabupaten Wonosobo, Karanganyar, Magelang sesuai target. Kawasan Kakao seluas 50 ha di Kabupaten Wonogiri sesuai target. Kawasan Kelapa seluas 200 ha di Kabupaten Cilacap dan Pekalongan sesuai target; Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan dengan keluaran Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun seluas 20 ha di Kabupaten Temanggung sesuai target. Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan sebanyak 6 desa di Kabupaten Wonosobo, Batang, Klaten dan Pati sesuai target; Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan dengan keluaran Layanan Dukungan Manajemen Satker sesuai target; Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah dengan keluaran Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya) seluas 200 ha di 6 kabupaten sesuai target; Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan keluaran Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan sebanyak 9 unit di 7 kabupaten sesuai target. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebanyak 1 lokasi sesuai target; Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan dengan keluaran Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan seluas 77 ha di Kabupaten Pati sesuai target. Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan sebanyak 6 rekomendasi sesuai target. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Perbenihan Perkebunan di 2 lokasi sesuai

target. Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan sebanyak 629.000 batang sesuai target.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, alokasi anggaran Rp48.307.825.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,31%. Kegiatan yang mendukung program ini sebanyak 3 kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian dengan keluaran Jaringan Irigasi Tersier seluas 14.300 ha di 29 kabupaten sesuai target. Irigasi Perpompaan sebanyak 84 unit di 22 kabupaten sesuai target. Embung Pertanian sebanyak 24 unit di 22 kabupaten sesuai target. Irigasi Perpipaan sebanyak 8 unit di Kabupaten Semarang. Pati. Temanggung dan Brebes sesuai target; Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan keluaran Layanan Dukungan Manajemen Satker sesuai target; Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida dengan keluaran e-RDKK Mendukung Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis Penerapan Kartu Tani di 35 lokasi sesuai target. Bimtek. Monitoring dan Evaluasi kegiatan lingkup Pupuk dan Pestisida di 12 lokasi sesuai target. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian di 12 lokasi sesuai target.

c). Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Alokasi anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp49.605.065.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp49.022.489.328,00 (98,83%).

Anggaran tersebut dialokasikan untuk **Program Penyelenggaraan Jalan,** yaitu Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatnya kemantapan dan aksesibilitas jalan nasional agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu

lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan.

Kegiatan yang mendukung program ini Kegiatan Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan, alokasi anggaran sebesar Rp14.666.061.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp14.620.052.700,00 (99,69%) dan Lokasi kegiatan berada di wilayah: Kabupaten Wonosobo, Temanggung, Boyolali, Sukoharjo, dan Klaten.

Kegiatan Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan total alokasi anggaran sebesar Rp19.055.817.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp19.046.677.000,00 (99,95%) dan Lokasi kegiatan berada di wilayah : Kabupaten Wonosobo, Boyolali, dan Klaten.

d). Dinas Pekerjaan Umum SDA dan Tata Ruang

Alokasi anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Rp91.600.978.000,00 dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp89.180.608.000,00 (97,36%).

Kegiatan yang mendukung **Program Pengelolaan Sumber Daya Air** adalah kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA melalui Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara sepanjang 3.334,51 Km. Meliputi kegiatan Operasi Rutin, Pemeliharaan Rutin serta Pemeliharaan Berkala dengan anggaran Rp89.784.828.000,00 sebesar Rp87.813.511.000,00 (97,80%) untuk fisik mencapai 100%. Layanan Dukungan Manajemen Satker 1,00 Layanan dengan anggaran Rp1.816.150.000,00 realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp1.367.097.000,00 (75,27%). Dengan wilayah 31 Daerah Irigasi meliputi Kab. Brebes, Kab.Tegal, Kab. Pemalang, Kab. Pekalongan, Kota

Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Kendal, Kab. Semarang, Kab. Demak, Kab. Kudus, Kab. Demak, Kab. Pati, Kab. Blora, Kab. Grobogan, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen Kab. Magelang, Kota Magelang, Kab. Purbalingga, Kab Banjarnegara, Kab. Banyumas.

Dekonsentrasi

1) Gambaran Umum Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum.

2) Kementerian/Lembaga Pemberi Dekonsentrasi

Dana Dekonsentrasi bersumber dari 14 Kementerian dan 3 Lembaga, yaitu :

- a). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
- b). Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
- c). Kementerian Pariwisata;
- d). Kementerian Perdagangan;
- e). Kementerian Perindustrian;
- f). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- g). Kementerian Kesehatan;
- h). Kementerian Sosial;
- i). Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ;
- j). Kementerian Dalam Negeri;
- k). Kementerian Ketenagakerjaan ;
- l). Kementerian Kelautan;
- m).Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n). Kementerian Pertanian;

- o). Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
- p). Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ;
- q). Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ;

3) Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Total anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 Rp291.967.482.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 99,32% dan realisasi keuangan sebesar 96,29% dilaksanakan oleh 14 SKPD dalam 37 program dan 69 kegiatan.

a. Bappeda

Alokasi anggaran Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah Rp572.216.000,00, melalui **Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Lainnya** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,49%.

Kegiatan yang mendukung Program tersebut adalah Fasilitasi Koordinasi Peningkatan Kualitas Musyawarah Perencanaan dengan keluaran penilaian kualitas atas dokumen RKPD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah baik dari sisi proses maupun substansi dan Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi dengan keluaran terfasilitasinya kegiatan-kegiatan administrasi dan keuangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dukungan penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan. Sedangkan kegiatan Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Sasaran program Pembangunan Nasional yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran.

b. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Alokasi anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp7.496.543.000,00 yang dilaksanakan melalui 3 program, yaitu Program Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan, Program Pembinaan Olahraga Prestasi dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 74,07%.

Program Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan, alokasi anggaran Rp7.363.383.000,00 digunakan untuk membiayai pelaksanaan 2 kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Wawasan Pemuda alokasi anggaran Rp120.588.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 96,89%. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 4 Desember 2020 yang mengalami permasalahan terkait Juknis Pelaksanaan bersamaan dengan revisi DIPA ke 03 tanggal 3 November 2020. Hal tersebut diatasi dengan revisi DIPA ke 04 tanggal 27 November 2020 untuk menyesuaikan anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kegiatan Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga, alokasi anggaran Rp7.242.795.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 73,32%. Selama Pandemi COVID-19 Atlet PPLP Jawa Tengah kembali ke daerah masing-masing, sehingga konsumsi tidak terserap secara optimal dan dialihkan ke bahan makanan selama 3 bulan terakhir, Pelaksanaan Tuan Rumah Kejurnas Bola Voli Indoor dan Judo tidak dilaksanakan, Pengiriman Kejurnas 7 Cabang Olahraga (Atletik, Panahan, Sepak Takraw, Gulat, Pencak Silat, Voli Pasir dan Sepakbola) Tidak Ada Penyelenggaraan Kejurnas di Tingkat Nasional, Solusi Selama masa pandemi COVID-19 Atlet PPLP Jawa Tengah kembali ke daerah asal tetap melakukan latihan mandiri di rumah masing masing dengan program latihan dari pelatih dan diawasi dengan daring (online) serta laporan rutin bulanan melalui dokumentasi dan video kepada Kepala Balai PPLOP Jawa Tengah. Untuk kelancaran latihan mandiri tersebut atlet dan pelatih mendapatkan bantuan pulsa/paket data.

Program Pembinaan Olahraga Prestasi, alokasi anggaran Rp100.000.000,00 digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 92,30%. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah Narasumber Pusat tidak hadir karena Pandemi COVID-19, solusi Narasumber Pusat melaksanakan daring dengan peserta pelatihan.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya, alokasi anggaran Rp33.160.000 digunakan untuk membiayai pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan 100%.

c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp3.672.461.000,00 yang berasal dari alokasi Kementerian Perindustrian sebesar Rp2.706.145.000,00 dan Kementerian Perdagangan sebesar Rp966.316.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 98,44% dan realisasi keuangan sebesar Rp3.392.318.364,00 (92,37%).

Anggaran tersebut dilaksanakan melalui 3 Program yang dilaksanakan yaitu :

Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp243.267.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp185.470.664,00 (76,24%), realisasi keuangan rendah karena efisiensi belanja perjalanan dan beberapa event kegiatan dilaksanakan dengan daring. Output yang dicapai dukungan terhadap penerbitan dan monitoring dokumen ekspor untuk 18 perusahaan eksportir dilaksanakan di Kab.Semarang, Kota Semarang, Demak, Jepara, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, Pati, Wonosobo, dan Boyolali; mengikuti pelaksanaan Rakor Kemendag dan Forum Rakor di Jakarta.

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp723.049.000,00 realisasi fisik sebesar 92,06% dan keuangan sebesar Rp631.984.200,00 (87,41%). Output yang dicapai tersedianya informasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting serta informasi Perdagangan Dalam Negeri dilaksanakan di Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan 35 Kabupaten/ Kota sebanyak 25 Komoditi; tersosialisasinya undang-undang perlindungan konsumen, sebanyak 1 kali dan tersedianya masker untuk masyarakat sebanyak 3.230 buah; Termonitornya 8 pelaku pasar lelang komoditas agro di Kota dan Kabupaten

Tegal. Deviasi fisik karena terdapat kegiatan fasilitasi pasar murah rencana diagendakan dalam rangka hari besar keagamaan Natal/Tahun baru (bulan Nop-Des), dan sesuai Juknis pelaksanaan fasilitasi pasar murah untuk masyarakat dan harus mendatangkan masyarakat (berkerumun) sekitar tempat pelaksanaan, sementara masih dalam kondisi pandemi yang tidak memungkinkan mengumpulkan orang dalam satu area pasar murah, sebagaimana arahan Bapak Gubernur Jawa Tengah melalui Surat Edaran Nomor 440 /0005942 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID 19) di Jawa Tengah.

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan Aneka dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Peningkatan Kompetensi SDM Industri Kecil, Menengah dan Aneka dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.706.145.000,00 realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp2.574.863.500,00 (95,15%). Output yang dicapai meningkatnya SDM IKM sejumlah 390 orang melalui Bintek Produksi bagi Wirausaha IKM Konveksi, Minuman, Pangan, Batik dan Perbengkelan yang terdampak COVID-19 yang dilaksanakan di Kabupaten Semarang. Kudus, Wonosobo, Sukoharjo, Magelang, Kendal, Kebumen, Cilacap, Pemalang, Karanganyar, Purbalingga, Brebes, dan Purworejo serta Kab Banyumas; 30 IKM memahami peluang ekspor dengan mengikuti workshop Ekspor bagi IKM Jawa Tengah di Kota Semarang; Terfasilitasinya 25 IKM dalam memperoleh sertifikat halal di 7 (tujuh) kab/kota yakni Kota Semarang, Kota Magelang, Kab.Semarang, Kendal, Demak, Batang dan Pemalang; Terlayaninya biaya operasional Unit Penyuluh Lapangan (UPL) dan Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) Provinsi Jawa Tengah dan 5 kab/kota yakni Kabupaten Magelang, Blora, Wonosobo, Pekalongan dan Purbalingga; Terfasilitasinya 2 IKM garam dalam mendapatkan SNI di Kab. Demak dan Pati; Meningkatnya kompetensi 26 orang TPL melalui pembekalan TPL secara online di Kota Semarang.

d. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp427.322.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,59%. Alokasi anggaran tersebut dilaksanakan melalui Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal dan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV, dengan target objek pantau 70 Proyek Perusahaan.

Tujuan pelaksanaan program dimaksud antara lain guna pemantauan terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan realisasi investasi PMA di Jawa Tengah.

e. Dinas Koperasi dan UKM

Anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp5.371.153.000,00 yang dilaksanakan melalui program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.334.803.597 (99,32%).

Kegiatan yang mendukung **program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi** adalah Kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah dengan keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Koperasi dan UMKM dengan target 6 dokumen, dengan realisasi hingga akhir Desemberr 2020 sebanyak 6 dokumen; Jumlah Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Daerah dengan target 5 PLUT selama 12 bulan dengan realisasi sesuai target; Jumlah Fasilitas Pameran dan Promosi KUMKM di Daerah dengan target fasilitas 1 Paviliun Provinsi di Gedung SMESCO Jakarta dengan realisasi sesuai target; dan Jumlah Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan dengan target 116 orang selama 12 bulan dengan realisasi sesuai target.

f. Dinas Kesehatan

Alokasi anggaran Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Rp11.904.755.000,00, terdiri dari 7 program dan 25 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 95,42% realisasi keuangan sebesar 75,58%.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Kementerian Kesehatan alokasi anggaran Rp3.836.128.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 88% dan realisasi keuangan sebesar 61,96%. Kegiatan yang mendukung Program tersebut sebanyak 4 Kegiatan yaitu Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara dengan keluaran 1 layanan manajemen keuangan dalam pengelolaan penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan dengan keluaran 1 Layanan Perencanaan, 1 Layanan Pemantauan dan Evaluasi; Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan dengan keluaran 1 Layanan Data dan Informasi; serta Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji dengan keluaran Pelayanan Kesehatan Haji 30.777 Jemaah Haji, dan Penyediaan PKHI selama operasional haji 256 orang.

Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

alokasi anggaran Rp5.349.999,00 dengan realisasi fisik 100% realisasi keuangan 99,98%. Kegiatan yang mendukung Program tersebut adalah Kegiatan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS dengan keluaran dokumen Bahan Dukungan Teknis Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan.

Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat,

alokasi anggaran Rp3.146.310.000,00, realisasi fisik 85% dan realisasi keuangan 73,30%. Kegiatan yang mendukung Program tersebut sebanyak 6 Kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat dengan keluaran 35 layanan Penguatan Intervensi Suplementasi Gizi, 35 Kabupaten/Kota mendapatkan Pembinaan dalam Peningkatan Pengetahuan Gizi Masyarakat, 35 layanan Peningkatan Surveilans Gizi; Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat dengan keluaran 1 Layanan Dukungan Manajemen; Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan keluaran Pembinaan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani bagi Jemaah Haji sebanyak 32.387 Jemaah Haji, Pelaksanaan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja

sebanyak 6.583 tempat kerja, Instansi Pemerintah yang Melaksanakan Pengukuran Kebugaran Jasmani di 145 Instansi; Pembinaan Kesehatan Keluarga dengan keluaran Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di 14 Layanan; Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi di 14 Layanan, Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di 9 Layanan, Pelayanan Kesehatan Balita di 14 Layanan, Tenaga Kesehatan Terlatih Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal 48 orang, Pelayanan Kesehatan Lansia di 12 Layanan; kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan keluaran Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas sebanyak 7 Kabupaten/Kota, 1 Layanan Kampanye Hidup Sehat melalui Berbagai Media, Kabupaten/Kota Melaksanakan Pembinaan Posyandu Aktif sebanyak 16 Kabupaten/Kota; kegiatan Penyehatan Lingkungan dengan keluaran Pengawasan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi Syarat di 35 Kabupaten/Kota, Pengawasan Pasar Sehat di 35 Kabupaten/Kota, Pengawasan Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi Syarat Kesehatan di 35 Kabupaten/Kota, Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) termasuk pembinaan Kab/Kota STOP BABS di 35 Kabupaten/Kota, Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis di Fasyankes di 35 Kabupaten/Kota.

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan, alokasi anggaran Rp467.494.000,00 dengan realisasi fisik 45% dan realisasi keuangan 41,77%. Kegiatan yang mendukung Program tersebut sebanyak 3 Kegiatan yaitu Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer dengan keluaran Pembinaan dalam pelaksanaan intervensi PIS-PK di 7 Kabupaten/Kota; kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dengan 1 Layanan Pembinaan Program dan Rencana Kerja Teknis; serta kegiatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan dengan keluaran Pembinaan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Fasyankes Lain di 1 Fasyankes, Pembinaan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Dasar di 1 FKTP.

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, alokasi anggaran Rp3.167.232.000,00 dengan realisasi fisik 80% dan realisasi keuangan

60,11%. Kegiatan yang mendukung Program tersebut sebanyak 5 Kegiatan yaitu Surveilans dan Kesehatan Karantina dengan keluaran 4 Layanan Kewaspadaan Dini dan Respon Penyakit Potensial KLB, 13 Layanan Imunisasi; kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik dengan keluaran 2 Layanan Intensifikasi Eliminasi Malaria, 7 Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan; kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung dengan keluaran 3 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS, 20 Layanan Pengendalian Penyakit TBC, 10 Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta; kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dengan keluaran 2 Layanan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular, 1 Layanan Deteksi dini kanker, 1 Layanan Deteksi dini gangguan indera; kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan keluaran 1 Layanan Dukungan Manajemen Satker.

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan alokasi anggaran Rp455.820.000,00 dengan realisasi fisik 85% dan realisasi keuangan 82,77%. Kegiatan yang mendukung Program tersebut sebanyak 3 Kegiatan yaitu Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dengan keluaran 1 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang Melaksanakan Program Tata Kelola Obat Publik; kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan keluaran 1 Layanan perencanaan, konsolidasi dan evaluasi terhadap manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; kegiatan Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan keluaran 9 Sarana Produksi Alkes dan PKRT dan Sarana Distribusi Alkes yang dibina.

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK), alokasi anggaran Rp826.422.000,00 dengan realisasi fisik 90% dan realisasi keuangan 87,42%. Kegiatan yang mendukung Program tersebut sebanyak 3 Kegiatan yaitu

Pelatihan SDM Kesehatan dengan keluaran Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebanyak 30 orang; kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan dengan keluaran 1 Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan; kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan keluaran 1 Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di Seluruh Provinsi, 1 Layanan Dukungan Manajemen Satker.

g. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

Alokasi anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp440.905.000,00, dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,88% dilaksanakan melalui **Program Pengembangan Perpustakaan**. Kegiatan yang mendukung Program tersebut adalah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca dengan keluaran perpustakaan yang dibina dan dikembangkan melalui Lomba bidang perpustakaan 35 kabupaten/kota, Sosialisasi Jabatan Fungsional dengan sasaran pustakawna inpassing di 35 Kabupaten/kota, Dukungan kegiatan Duta Baca Jawa Tengah dengan sasaran pegiat literasi dan pengelola perpustakaan tingkat SLTA/SMA/SMK/MA negeri dan swasta, Pemasyarakatan perpustakaan dan minat baca dengan sasaran anggota, calon anggota calon pengurus dan pengurus IPI di 35 kabupaten/kota.

h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil

Alokasi anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Rp119.230.138.000,00, yang digunakan untuk melaksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,17%.

Kegiatan **yang** mendukung **Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa** adalah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan keluaran pendampingan pada 7.809 Desa. Wujud

kegiatan dimaksud adalah pembiayaan honorarium Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang terdiri dari Tenaga Ahli Kabupaten, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dan Satuan Kerja Provinsi sebanyak 3.382 orang, selain itu juga digunakan untuk peningkatan kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP) melalui Rakor dalam pelaksanaan tugas pengawasan penyaluran dan penggunaan Dana Desa dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kemandirian Desa di Provinsi Jawa Tengah.

i. Dinas Sosial

Alokasi **anggaran** Dekonsentrasi pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Rp22.677.090.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 95,08% dan realisasi keuangan sebesar 93,29% yang terdiri dari 6 program dan 10 kegiatan.

Program yang **dilaksanakan** yaitu **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial** dilaksanakan melalui Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp129.620.000,00 dengan keluaran Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang akuntabel dengan dengan realisasi sebesar fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,79%.

Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan melalui: Kegiatan Pelestarian Kepahlawanan, Keberintisan, dan Kesetiakawanan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp238.625.000,00 dengan keluaran Terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,06%. Kegiatan Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.563.900.000,00 dengan keluaran Terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,54%. Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp243.250.000 dengan keluaran terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,91%.

Program Rehabilitasi Sosial dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dengan alokasi anggaran sebesar Rp209.398.000,00 dengan keluaran Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan Napza dengan keluaran Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan Napza dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,27%.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dilaksanakan melalui: Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.404.466.000,00 dengan keluaran Terselenggaranya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana Alam dengan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,12%. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp239.621.000,00 dengan keluaran Terselenggaranya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana Sosial dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,43%. Kegiatan Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.229.790.000,00 dengan keluaran Terlindunginya keluarga miskin dan rentan secara komprehensif dengan realisasi fisik sebesar 89,09% dan keuangan sebesar 88,26%.

Program Perlindungan Sosial Lainnya dilaksanakan melalui kegiatan Penanganan Fakir Miskin Wilayah II dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.218.420.000,00 dengan keluaran Meningkatnya Kapasitas Fakir Miskin Untuk Mengembangkan Kemampuan Dasar dan kemampuan berusaha dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,86%.

Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial melalui kegiatan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dengan keluaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 97,02%.

j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Alokasi anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Rp6.887.335.000,00 yang dilaksanakan melalui 3 program dan 9 kegiatan, dengan realisasi fisik sebesar 97,19% dan realisasi keuangan sebesar 90,82%.

Program yang dilaksanakan adalah **Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp747.790.000,00, realisasi fisik sebesar 94,75% dan realisasi keuangan sebesar 88,74%. Terdapat 5 kegiatan yang mendukung Program tersebut yaitu yaitu Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan dengan keluaran 70% penyelesaian kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan; Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak dengan keluaran 114 perusahaan yang mematuhi norma kerja perempuan dan norma kerja anak; Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan keluaran 456 perusahaan yang mematuhi norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (2200) dengan keluaran 250 perusahaan yang menerapkan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja dan 109 perusahaan di kawasan Industri yang Menerapkan Norma kerja dan Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja; serta Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan keluaran layanan dukungan manajemen Eselon I dan layanan perkantoran.

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.979.225.000,00, realisasi fisik sebesar 97,55% dan realisasi keuangan sebesar 91,03%. Terdapat 3 kegiatan yang mendukung Program terdapat yaitu Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas (4056) dengan keluaran peningkatan mutu dan kualitas pada 60 Lembaga Pelatihan Kerja dan Produktivitas; Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan luar Negeri Binalattas (4057) dengan keluaran 700 orang peserta yang

mengikuti pemagangan dalam negeri; serta Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalattas dengan keluaran 195 orang tenaga kerja di sektor prioritas pada kawasan prioritas yang meningkat produktivitasnya, dan 25 perusahaan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas.

Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp160.320.000,00, realisasi fisik sebesar 95.12% dan realisasi keuangan sebesar 92.61%. Kegiatan yang mendukung Program tersebut yaitu kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dengan keluaran layanan dukungan manajemen Eselon I dan layanan perkantoran.

k. Dinas Kelautan dan Perikanan

Alokasi anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Rp2.365.686.000,00 yang dilaksanakan melalui 6 Program dan 20 Kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 96,73% dan realisasi keuangan sebesar 90,00%. Program yang dilaksanakan yaitu : Program yang dilaksanakan adalah **Program Dukungan Manajemen** dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dari Direktorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI jumlah anggaran sebesar Rp420.716.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 85,45%. Setelah adanya refofusing akibat pandemi covid 19 realisasi masih rendah dikarenakan kegiatan di satker hanya berupa honor untuk petugas validator statistik 35 kab/kota, honor satker, perjalanan dinas yang mengikuti jadwal dari pusat, dan perjalanan antar kab/kota, sehingga dengan adanya zona yang rawan covid kami membatasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan jumlah anggaran sebesar Rp281.204.000,00 realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 99,95%.

Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya jumlah anggaran sebesar Rp1.139.971.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 93,22% dan keuangan

sebesar sebesar 74,65 %. Permasalahan yang terjadi adalah adanya pandemi covid 19 dan pada kegiatan CPIB yang menjadi kewenangan pusat, sehingga belum maksimal dilaksanakan di provinsi.

Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran sebesar Rp216.855.000,00. Realisasi realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 99,00%.

Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran sebesar Rp52.870.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 92,72%, karena adanya pandemi COVID-19 kegiatan pameran ditiadakan pelaksanaannya.

Program Pengelolaan Ruang Laut dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dengan jumlah anggaran sebesar Rp254.250.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 88,23%, karena adanya pandemi beberapa kegiatan yang bekerjasama dengan pusat ditiadakan pelaksanaannya.

I. Dinas Ketahanan Pangan

Alokasi **anggaran** Dekonsentrasi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Rp30.109.660.000,00 dilaksanakan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,82%.

Kegiatan yang mendukung program **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat** adalah kegiatan pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan dengan anggaran sebesar Rp13.595.900.000,00 telah terealisasi secara fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp 99,80%. Kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan yaitu Layanan stabilisasi harga komoditas pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen telah terealisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,96% serta Stabilitas pasokan dan harga pangan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,78%.

Kegiatan pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan dengan anggaran sebesar Rp1.622.029.000,00 telah terealisasi secara fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,61%. Kegiatan ini dicapai melalui dua sub kegiatan yaitu pemantauan stok, akses dan kerawanan pangan dengan realisasi fisik dan realisasi keuangan 100% serta pengembangan korporasi usahatani dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,51%

Kegiatan pengembangan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dengan anggaran sebesar Rp14.035.261.000,00 telah terealisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,77%. Kegiatan ini dicapai melalui empat kegiatan yaitu percepatan panganekaragaman konsumsi pangan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 88,94%, pemantapan ketahanan pangan rumah tangga dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,19%, peningkatan diversifikasi dan kualitas konsumsi pangan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,06% serta pengawasan keamanan dan mutu pangan segar dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,10%.

Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Ketahanan Pangan yang dicapai melalui kegiatan layanan dukungan manajemen eselon I dengan anggaran sebesar Rp856.470.000,00 telah terealisasi baik secara fisik sebesar 100% serta realisasi keuangan sebesar 99,01%.

m. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Alokasi anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Rp726.000.000,00 dilaksanakan melalui Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 99,74%.

Kegiatan yang mendukung **Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** adalah

Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan di Daerah melalui Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Bimbingan Teknis Konseling Keluarga, Kesetaraan Gender dan Hak anak bagi Tenaga Layanan Tingkat Kab/Kota (Video Conference)) dan Bimbingan Teknis Konseling Keluarga Berbasis Kesetaraan Gender dan Hak anak bagi Tenaga Layanan Tingkat Provinsi (tatap muka) peserta.

n. Dinas Pertanian dan Perkebunan

Alokasi anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Rp80.086.218.000,00 terdiri dari 5 program dan 15 kegiatan, dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 97,81%. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian

Sedangkan 15 kegiatan yang mendukung program yaitu: Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian dengan output terlaksananya jumlah kinerja penyuluh yang ditingkatkan sebanyak 4.388 orang, Kelembagaan penyuluhan Pertanian yang melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan petani 69 unit, Areal sertifikasi benih 21.500 ha, Jumlah areal yang diberikan bantuan benih padi bersertifikat 2.120.000 ha, Jumlah areal yang diberikan bantuan benih jagung bersertifikat 2.150.000 ha, Penerapan Penanganan DPI 40 ha, Areal yang difasilitasi untuk penanganan OPT 5.517 ha, Sertifikasi benih hortikultura 368 unit, Area pengendalian OPT Hortikultura 2.060 ha, Sarana klinik PHT 15 unit, Perangkat perlindungan perkebunan 2 unit, e-RDKK mendukung penyaluran pupuk bersubsidi berbasis penerapan kartu tani.

3.1.1 Target Kinerja

Total anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 Rp408.561.941.000,00, dilaksanakan melalui 8 program dan 43 kegiatan.

Total anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 Rp291.967.482.000,00 dilaksanakan melalui 37 program dan 69 kegiatan.
Realisasi

3.1.2 Realisasi

Tugas Pembantuan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,32%. Anggaran tersebut dikelola oleh 4 SKPD, yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang.

Dekonsentrasi dengan realisasi fisik sebesar 99,32% dan realisasi keuangan sebesar 96,29%. Anggaran tersebut dilaksanakan oleh 14 SKPD, yaitu Bappeda, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kesehatan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait dengan capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah provinsi adalah sebagaimana dalam matrik di bawah ini:

MATRIKS
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TA.2020

No	Kementerian/LPNK	Dasar Pelaksanaan TP/Penugasan	Program,Kegiatan, Output dan Rincian Lokasi Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN		SATKER DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH	2,479,100,000	2,460,954,722	99.27		100.00	
			Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian			1,610,000,000	1,610,000,000	99.79		100.00	
			Irigasi Perpompaan	Pati 2 unit, Magelang 2 unit, Wonogiri 2 unit		570,000,000	570,000,000	99.40		100.00	
			Embung Pertanian	Jepara, Wonogiri, Boyolali, Karanganyar, Blora, Brebes, Grobogan		840,000,000	840,000,000	100.00		100.00	
			Irigasi Perpipaan	Blora 2 unit		200,000,000	200,000,000	100.00		100.00	
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian			824,100,000	824,100,000	98.21		100.00	
			Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Disnak Jateng		824,100,000	824,100,000	98.21		100.00	
			Bimtek, Monitoring dan Evaluasi			45,000,000	45,000,000	100.00		100.00	
			Bimtek, Monitoring	Disnak Jateng							

			dan Evaluasi			45,000,000	45,000,000	100.00		100.00	
			PROGRAM PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN			39,963,670,000	39,820,421,507	99.64		100.00	
			Peningkatan Produksi Pakan Ternak			162,564,000	160,991,200	99.03		100.00	
			Hijauan Pakan Ternak	Kegiatan ini terefocussing, namun output masih tetap 1 ha		12,564,000	12,563,400	100.00		100.00	
			Mutu dan Keamanan Pakan	Lab. Pakan provinsi Jateng		150,000,000	148,427,800	98.95		100.00	
			Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan			1,270,304,000	1,267,883,775	99.81		100.00	
			Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	35 kab/kota di Jawa Tengah		1,270,304,000	1,267,883,775	99.81		100.00	
			Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak			36,961,942,000	36,854,758,188	99.71		100.00	
			Optimalisasi Reproduksi	Kab. Banjarnegara, Kab. Banyumas, Kab. Batang, Kab. Blora, Kab. Boyolali, Kab. Brebes, Kab. Cilacap, Kab. Demak, Kab. Grobogan, Kab. Jepara, Kab. Karanganyar, Kab. Kebumen, Kab. Kendal, Kab. Klaten, Kab. Magelang, Kab. Pati, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Purbalingga, Kab. Purworejo, Kab. Rembang, Kab. Semarang, Kab. Sragen, Kab. Sukoharjo, Kab. Tegal, Kab. Temanggung, Kab. Wonogiri, Kab. Wonosobo,		36,822,252,000	36,717,563,204	99.72		100.00	

				Kota Semarang, Kota Salatiga							
			Pengembangan Ternak Ruminansia Potong	Disnak Prov. Jateng		88,500,000	86,555,784	97.80		100.00	
			Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak	Disnak Prov. Jateng		51,190,000	50,639,200	98.92		100.00	
			Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)			276,000,000	275,267,500	99.73		100.00	
			Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Kota Tegal 1 unit, Kota Semarang 5 unit, Sukoharjo 2 unit, Kab. Magelang 1 unit, Karanganyar 1 unit		186,000,000	185,844,200	99.92		100.00	
			Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk	Lab. Pati Disnak Keswan Jateng		40,000,000	39,687,500	99.22		100.00	
			Pengendalian Pemotongan Betina Produktif	Provinsi Jawa Tengah		50,000,000	49,735,800	99.47		100.00	
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan			562,370,000	551,331,112	98.04		100.00	
			Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Disnak Prov. Jateng		562,370,000	551,331,112	98.04		100.00	
			Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak			730,490,000	710,189,732	97.22		100.00	
			Pengembangan Pengolahan Pangan dan Non Pangan	Disnak Prov. Jateng		3,370,000	3,370,000	100.00		100.00	
			Kelembagaan dan Usaha Peternakan	Kab.Semarang, Kudus, Brebes, Klaten, Wonogiri, Batang, Demak, Boyolali		727,120,000	706,819,732	97.21		100.00	
			JUMLAH					99.62		100.00	

						42,442,770,000	42,281,376,229				
2	Kementerian Pertanian	64/Permentan/RC.130/12/2015	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL TANAMAN PANGAN		Dinas Pertanian dan Perkebunan	152,466,682,000	146,587,589,061	96.14		100.00	
			Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Jawa Tengah		21,316,855,000	19,952,515,067	93.60		100.00	
			Kawasan Kedelai	Jawa Tengah		12,617,319,000	12,145,693,100	96.26	Terlaksananya Kawasan Kedelai seluas 13.510 ha	100.00	
			Kawasan Kacang Tanah	Jawa Tengah		4,927,950,000	4,260,405,000	86.45	Terlaksananya Kawasan Kacang Tanah seluas 1.410 ha	100.00	
			Kawasan Kacang Hijau	Jawa Tengah		1,222,350,000	1,145,835,000	93.74	Terlaksananya Kawasan Kacang Hijau seluas 1.470 ha	100.00	

			Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	Jawa Tengah		2,549,236,000	2,400,581,967	94.17	Terlaksana nya Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di 27 lokasi	100.00	
			Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia			23,629,725,000	21,183,745,975	89.65		100.00	
			Kawasan Padi	Jawa Tengah		19,911,560,000	17,623,841,725	88.51	Terlaksana nya Kawasan Padi seluas 18.868 ha	100.00	
			Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi	Jawa Tengah		822,950,000	757,809,250	92.08	Terlaksana nya Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi di 33 lokasi	100.00	
			Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	Jawa Tengah		2,895,215,000	2,802,095,000	96.78	Terlaksana nya Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) seluas 2.050 ha	100.00	
			Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih			93,724,772,000	92,268,885,020	98.45		100.00	

			Tanaman Pangan								
			Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat	Jawa Tengah		32,046,000,000	31,248,187,150	97.51	Terlaksananya Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat seluas 128.184 ha	100.00	
			Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	Jawa Tengah		1,658,297,000	1,613,718,938	97.31	Terlaksananya Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi) di 1 lokasi	100.00	
			Areal yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat	Jawa Tengah		60,020,475,000	59,406,978,932	98.98	Terlaksananya Areal yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat seluas 108.145	100.00	
			Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	Jawa Tengah		3,664,650,000	3,218,330,063	87.82	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	100.00	

									sebanyak 1 Layanan		
			5885 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan			10,130,680,000	9,964,112,936	98.36		100.00	
			Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jawa Tengah		5,139,650,000	5,139,650,000	100.00	Terlaksananya Sarana Pascapanen Tanaman Pangan sebanyak 110 unit	100.00	
			Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jawa Tengah		2,880,000,000	2,836,152,100	98.48	Terlaksananya Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan sebanyak 24 unit	100.00	
			Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Jawa Tengah		241,000,000	206,440,340	85.66	Terlaksananya Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan sebanyak 5 sertifikat	100.00	

			Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	Jawa Tengah		1,066,170,000	1,018,557,878	95.53	Terlaksana nya Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan di 27 lokasi	100.00	
			Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	Jawa Tengah		803,860,000	763,312,618	94.96	Terlaksana nya Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi selama 12 bulan	100.00	
		64/Permentan/ RC.130/12/201 5	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA			8,222,942,000	7,256,206,042	88.24		100.00	
			Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat			2,937,980,000	2,195,217,223	74.72		100.00	
			Kawasan Bawang Merah	Kudus		1,000,000	1,000,000	100.00	Terlaksana nya Kawasan Bawang Merah seluas 0,001 ha	100.00	

			Kawasan Sayuran Lainnya	Kab. Semarang, Purbalingga		265,000,000	256,331,223	97.00	Terlaksananya Kawasan Sayuran Lainnya seluas 5,02 ha	100.00	
			Kawasan Aneka Cabai	Kendal, Blora, Purworejo, Wonogiri, Purbalingga		41,980,000	41,980,000	100.00	Terlaksananya Kawasan Aneka Cabai seluas 0,0001 ha	100.00	
			Kawasan Tanaman Obat	Wonogiri		130,000,000	128,911,000	99.16	Terlaksananya Kawasan Tanaman Obat seluas 10 ha	100.00	
			Kawasan Bawang Putih	Temanggung		2,500,000,000	1,766,995,000	71.00	Terlaksananya Kawasan Bawang Putih seluas 50 ha	100.00	
			Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Jawa Tengah		420,000,000	335,860,000	80.00	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Satker sebanyak 1	100.00	

									layanan		
			Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura			1,196,000,000	1,125,319,700	94.09		100.00	
			Kawasan Buah Lainnya	Blora		6,000,000	6,000,000	100.00	Terlaksana nya Kawasan Buah Lainnya seluas 0,0001 ha	100.00	
			Kawasan Florikultura	Pemalang		292,500,000	268,463,900	92.00	Terlaksana nya Kawasan Florikultura seluas 15.000 m2	100.00	
			Kawasan Mangga	Rembang		160,000,000	132,806,000	83.00	Terlaksana nya Kawasan Mangga seluas 20 ha	100.00	
			Kawasan Manggis	Purworejo		337,500,000	331,320,000	98.00	Terlaksana nya Kawasan Manggis seluas 30 ha	100.00	

			Kawasan Durian	Pemalang		400,000,000	386,729,800	97.00	Terlaksana nya Kawasan Durian seluas 50 ha	100.00	
			Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura			3,668,962,000	3,599,809,119	98.12		100.00	
			Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	Pati, Grobogan, Pemalang, Purworejo, Brebes, jepara, Purbalingga, Kab. Semarang		2,278,962,000	2,226,345,319	98.00	Terlaksana nya Sarana Peningkata n Nilai Tambah Hortikultur a sebanyak 26 unit	100.00	
			Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	Grobogan, Blora, Pemalang, Cilacap, Purbalingga, Demak, Semarang		1,390,000,000	1,373,463,800	99.00	Terlaksana nya Prasarana Peningkata n Nilai Tambah Hortikultur a sebanyak 9 unit	100.00	
		64/Permentan/ RC.130/12/201 5	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN BERKELANJUTAN			15,915,679,000	13,139,158,616	82.55		100.00	
			Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar			576,204,000	511,102,500	88.70		100.00	

			Kawasan Kopi	wonosobo, Karanganyar, Magelang		240,000,000	235,222,000	98.01	Terlaksananya Kawasan Kopi seluas 300 ha	100.00	
			Kawasan Kakao	Wonogiri		135,000,000	112,430,000	83.28	Terlaksananya Kawasan Kakao seluas 50 ha	100.00	
			Kawasan Kelapa	Cilacap, Pekalongan		201,204,000	163,450,500	81.24	Terlaksananya Kawasan Kelapa seluas 200 ha	100.00	
			Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan			1,487,090,000	1,483,802,500	99.78		100.00	
			Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Temanggung		395,890,000	393,522,000	99.40	Terlaksananya Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun seluas 20 ha	100.00	

			Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	Wonosobo, Batang, Klaten, Pati		1,091,200,000	1,090,280,500	99.92	Terlaksananya Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan sebanyak 6 desa	100.00	
			Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan			5,210,830,000	4,879,320,000	93.64	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Satker sebanyak 1 layanan	100.00	
			Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	Temanggung, Klaten, Boyolali, Kendal, Brebes, Purbalinga		528,132,000	494,990,000	93.72	Terlaksananya Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya) seluas 200 ha	100.00	
			Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan			2,211,850,000	2,189,839,237	99.00		100.00	

			Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Kebumen, Purworejo, Banyumas, magelang, Wonosobo, Semarang, Wonogiri		2,178,150,000	2,156,139,237	98.99	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan sebanyak 9 unit	100.00	
			Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan			33,700,000	33,700,000	100.00	Terlaksananya Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebanyak 1 lokasi	100.00	
			5890 Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan			5,901,573,000	3,580,104,379	60.66		100.00	
			Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan	Pati		331,520,000	326,138,250	98.38	Terlaksananya Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan seluas 77 ha	100.00	

			Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan			73,320,000	38,887,970	53.04	Terlaksananya Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan sebanyak 6 rekomendasi	100.00	
			Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Perbenihan Perkebunan			37,733,000	29,285,000	77.61	Terlaksananya Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Perbenihan Perkebunan di 2 lokasi	100.00	
			Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan			5,459,000,000	3,185,793,159	58.36	Terlaksananya Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan sebanyak 629.000 batang	100.00	
		64/Permentan/RC.130/12/2015	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN			48,307,825,000	46,043,328,114	95.31		100.00	
			Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian			29,502,000,000	29,108,405,075	98.67		100.00	

			Jaringan Irigasi Tersier	29 kab Jawa Tengah		15,730,000,000	15,730,000,000	100.00	Terlaksana nya rahabilitasi Jaringan Irigasi Tersier seluas 14.300 ha	100.00	
			Irigasi Perpompaa	22 kab Jawa Tengah		10,092,000,000	9,731,415,075	96.43	Terlaksana nya Irigasi Perpompaa n sebanyak 84 unit	100.00	
			Embung Pertanian	22 kab Jawa Tengah		2,880,000,000	2,880,000,000	100.00	Terlaksana nya Embung Pertanian sebanyak 24 unit	100.00	
			Irigasi Perpipa	Kab. Semarang, Pati, Temanggung, Brebes		800,000,000	766,990,000	95.87	Terlaksana nya Irigasi Perpipaan sebanyak 8 unit	100.00	
			Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian			4,204,745,000	3,752,656,029	89.25	Terlaksana nya Layanan Dukungan Manajeme n Satker sebanyak 1 layanan	100.00	
			Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida			10,095,050,000	9,097,356,310	90.12		100.00	

			e-RDKK Mendukung Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis Penerapan Kartu Tani	Jawa tengah		7,182,300,000	6,889,282,810	95.92	Terlaksananya e-RDKK Mendukung Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis Penerapan Kartu Tani di 35 lokasi	100.00	
			Bimtek, Monitoring dan Evaluasi kegiatan lingkup Pupuk dan Pestisida	Jawa tengah		2,912,750,000	2,208,073,500	75.81	Terlaksananya Bimtek, Monitoring dan Evaluasi kegiatan lingkup Pupuk dan Pestisida di 12 lokasi	100.00	
			3994 Fasilitas Pembiayaan Pertanian	Jawa tengah		4,506,030,000	4,084,910,700	90.65	Terlaksananya Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan lingkup Pembiayaan Pertanian di 12 lokasi	100.00	
	JUMLAH					224,913,128,000	213,026,281,833	94.71		100.00	

3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Keputusan Menteri PUPR Nomor 1070/KPTS/M/ 2020 per tanggal 12 Juni 2020	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		SKPD Tugas Pembantuan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	49,605,065,000	49,022,489,328	98.83		100.00	
			Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional			49,605,065,000	49,022,489,328	98.83		100.00	
			Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan			14,666,061,000	14,620,052,700	99.69			
			Preservasi Jalan Bts. Kab. Banjarnegara- Wonosobo-Temanggung- Secang (Pemeliharaan Rutin)	Kab. Wonosobo dan Kab. Temanggung		701,196,000	701,196,000	100.00	17.67	100.00	
			Preservasi Jalan Sruwen-Kartosuro-Klaten- Prambanan (BTS.DIY) (Pemeliharaan Rutin)	Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo dan Kab. Klaten		1,775,781,000	1,775,780,600	100.00	20.04	100.00	
			Preservasi Jalan Bts. Kab. Banjarnegara- Wonosobo-Temanggung- Secang (Pemeliharaan Rutin Kondisi)	Kab. Wonosobo dan Kab. Temanggung		940,441,000	940,441,000	100.00	11.14	100.00	
			Preservasi Jalan Sruwen-Kartosuro-Klaten- Prambanan (BTS.DIY) (Pemeliharaan Rutin Kondisi)	Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo dan Kab. Klaten		3,520,077,000	3,520,076,700	100.00	20.61	100.00	
			Preservasi Jalan Bts. Kab. Banjarnegara- Wonosobo-Temanggung- Secang (Penunjang/Holding)	Kab. Wonosobo dan Kab. Temanggung		3,876,460,000	3,876,459,400	100.00	30.59	100.00	
			Preservasi Jalan Sruwen-Kartosuro-Klaten- Prambanan (BTS.DIY)	Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo dan Kab. Klaten		3,639,844,000	3,639,844,000	100.00	18.15	100.00	

			(Penunjang/Holding)								
			Pembersihan Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Bts. Kab. Banjarnegara-Wonosobo-Temanggung-Secang	Kab. Wonosobo dan Kab. Temanggung		82,228,000	75,360,000	91.65	5.08	100.00	
			Pembersihan Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Sruwen-Kartosuro-Klaten-Prambanan (BTS.DIY)	Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo dan Kab. Klaten		130,034,000	90,895,000	69.90	9.88	100.00	
			Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan			19,055,817,000	19,046,677,000	99.95			
			Preservasi Jalan Bts. Kab. Banjarnegara-Wonosobo-Temanggung-Secang (Rehabilitasi Mayor Jalan)	Kab. Wonosobo		5,560,311,000	5,556,071,000	99.92	1.49	100.00	
			Preservasi Jalan Sruwen-Kartosuro-Klaten-Prambanan (BTS.DIY) (Rehabilitasi Mayor Jalan)	Kab. Boyolali dan Kab. Klaten		13,287,523,000	13,282,623,000	99.96	3.04	100.00	
			Rehabilitasi Minor Jalur Evakuasi Bencana Erupsi Merapi	Kab. Magelang		207,983,000	207,983,000	100.00	-		Pembayaran Sisa Pekerjaan TA. 2019
			Preservasi Rutin Jembatan			1,548,151,000	1,548,150,800	100.00			
			Preservasi Jalan Bts. Kab. Banjarnegara-Wonosobo-Temanggung-	Kab. Wonosobo dan Kab. Temanggung		777,686,000	777,686,000	100.00	891.90	100.00	

			Secang (Pemeliharaan Rutin Jembatan)								
			Preservasi Jalan Sruwen-Kartosuro-Klaten-Prambanan (BTS.DIY) (Pemeliharaan Rutin Jembatan)	Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo dan Kab. Klaten		770,465,000	770,464,800	100.00	854.10	100.00	
			Preservasi Jembatan			816,115,000	816,114,900	100.00			
			Preservasi Jalan Bts. Kab. Banjarnegara-Wonosobo-Temanggung-Secang (Pemeliharaan Berkala Jembatan)	Kab. Wonosobo dan Kab. Temanggung		591,838,000	591,838,000	100.00	90.90	100.00	
			Preservasi Jalan Sruwen-Kartosuro-Klaten-Prambanan (BTS.DIY) (Pemeliharaan Berkala Jembatan)	Kab. Boyolali dan Kab. Klaten		224,277,000	224,276,900	100.00	91.90	100.00	
			Pelebaran Jalan Menambah Lajur			2,184,759,000	2,184,759,000	100.00			
			Preservasi Jalan Bts. Kab. Banjarnegara-Wonosobo-Temanggung-Secang	Kab. Temanggung		2,184,759,000	2,184,759,000	100.00	0.25	100.00	
			Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan			7,293,312,000	7,104,728,093	97.41			
			Preservasi Jalan Bts. Kab. Banjarnegara-Wonosobo-Temanggung-Secang (Penanganan Drainase)	Kab. Wonosobo		980,024,000	980,024,000	100.00	0.70	100.00	
			Revitalisasi Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Bts. Kab. Banjarnegara-Wonosobo-Temanggung-Secang	Kab. Wonosobo dan Kab. Temanggung		3,408,335,000	3,396,297,093	99.65	7.96	100.00	
			Revitalisasi Drainase Secara Padat Karya Ruas	Kab. Boyolali dan Kab. Klaten		2,904,953,000	2,728,407,000	93.92	6.35	100.00	

			Jalan Sruwen-Kartosuro-Klaten-Prambanan (BTS.DIY)								
	JUMLAH					49,605,065,000	49,022,489,328	98.83		100.00	
4	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	- PERMEN PUPR NOMOR : 33/PRT/M/2015; - PERMEN PUPR NOMOR: 15/PRT/M/2011; - KEPMEN PUPR NOMOR : 299/KPTS/M/2020	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kota Semarang	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	91,600,978,000	89,182,712,181	97,36	-	100.00	
			Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA			91,600,978	89,180,608	97,36	-	100.00	
			Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara 3.334,51 Km			89,784,828	87,813,511	97,80	-	100.00	
			Layanan Dukungan Manajemen Satker 1,00 Layanan			1,816,150	1,367,097	75,27		100.00	
			Rincian Kegiatan								
			OPERASI RUTIN DI.KUMISIK- KAB. TEGAL;Tersebar;Jawa Tengah;31.8800 km;3940.0000 Hektar;F;S;SYC	KAB. TEGAL		504,749	479,074	94,91		100.00	
			OPERASI RUTIN DI WADUK SEMPOR, KAB. KEBUMEN;Tersebar;Jawa	KAB. KEBUMEN		1,516,734	1,493,753	89,76		100.00	

			Tengah;106.09 km;6478 Hektar;F;S;SYC								
			OPERASI RUTIN DI. SERAYU-KAB. BANYUMAS, CILACAP, KEBUMEN;Tersebar;Jawa Tengah;214.24 km;20795 Hektar;F;S;SYC	KAB. BANYUMAS, CILACAP, KEBUMEN;		3,603,834	3,600,000	99,89		100.00	
			OPERASI RUTIN DI.BANJARCAHYANA- KAB. BANJARNEGARA, PURBALINGGA;Tersebar;Jawa Tengah;51.39 km;5001 Hektar;F;S;SYC	KAB. BANJARNEGARA, PURBALINGGA		849,028	844,915	99,52		100.00	
			OPERASI RUTIN DI.SINGOMERTO- KAB. BANJARNEGARA;Tersebar; Jawa Tengah;91.61 km;5863 Hektar;F;S;SYC	KAB. BANJARNEGARA		991,747	991,680	99,99		100.00	
			OPERASI RUTIN DI.TAJUM- KAB. BANYUMAS;Tersebar;Jawa Tengah;43.05 km;3200 Hektar;F;S;SYC	KAB. BANYUMAS		642,056	641,193	99,87		100.00	
			OPERASI RUTIN DI.KALIWADAS- KAB. PEMALANG;Tersebar;Jawa Tengah;182.14 km;7208 Hektar;F;S;SYC	KAB. PEMALANG		961,169	909,082	94,58		100.00	
			OPERASI RUTIN DI.PESANTREN KLETAK- KAB. PEKALONGAN;Tersebar;Jawa Tengah;62.34 km;3517 Hektar;F;S;SYC	KAB. PEKALONGAN		602,187	572,525	95,07		100.00	
			OPERASI RUTIN DI.KUPANG KROMPENG- KAB. BATANG;Tersebar;Jawa	KAB. BATANG		452,657	430,700	95,15		100.00	

			Tengah;50.64 km;3040 Hektar;F;S;SYC								
			OPERASI RUTIN DI.WADUK MALAHAYU- KAB. BREBES;Tersebar;Jawa Tengah;114.095 km;12486 Hektar;F;S;SYC	KAB. BREBES		1,828,836	1,728,268	94,50		100.00	
			OPERASI RUTIN DI.PEMALI- KAB. BREBES;Tersebar;Jawa Tengah;204.669 km;26952 Hektar;F;S;SYC	KAB. BREBES		3,954,046	3,793,289	95,93		100.00	
			OPERASI RUTIN DI.CACABAN (BD.DUKUH JATI)- KAB. TEGAL;Tersebar;Jawa Tengah;82.1 km;7439 Hektar;F;S;SYC	KAB. TEGAL		1,490,106	1,405,737	94,34		100.00	
			OPERASI RUTIN DI.RAMBUT (BD. CIPERO)- KAB. TEGAL;Tersebar;Jawa Tengah;45.225 km;7634 Hektar;F;S;SYC	KAB. TEGAL		1,044,009	982,055	94,07		100.00	
			OPERASI RUTIN DI.GUNG- KAB. TEGAL;Tersebar;Jawa Tengah;194.28 km;6632 Hektar;F;S;SYC	KAB. TEGAL;		694,473	652,851	94,01		100.00	
			OPERASI RUTIN DI.COMAL/SUKAWATI KAB.PEMALANG;Tersebar; Jawa Tengah;58.514 km;8882 Hektar;F;S;SYC	KAB.PEMALANG		1,155,295	1,087,037	94,09		100.00	
			OPERASI RUTIN DI.SUNGAPAN- KAB. PEMALANG;Tersebar;Jaw a Tengah;50.117 km;7086 Hektar;F;S;SYC	KAB. PEMALANG		913,599	860,872	94,23		100.00	

			OPERASI RUTIN DI.SRAGI- KAB. PEKALONGAN;Tersebar;Ja wa Tengah;22.747 km;3212 Hektar;F;S;SYC	KAB. PEKALONGAN		442,144	419,805	94,95		100.00	
			OPERASI RUTIN DI.GLAPAN- KAB. GROBOGAN, KAB. DEMAK;Tersebar;Jawa Tengah;176.161 km;18740 Hektar;F;S;SYC	KAB. GROBOGAN, KAB. DEMAK;		3,250,612	3,223,895	99,18		100.00	
			OPERASI RUTIN DI.JRAGUNG- KAB. DEMAK;Tersebar;Jawa Tengah;35.398 km;4053 Hektar;F;S;SYC	KAB. DEMAK		725,502	723,935	99,78		100.00	
			OPERASI RUTIN DI.BODRI- KAB. KENDAL;Tersebar;Jawa Tengah;83.304 km;8861 Hektar;F;S;SYC	KAB. KENDAL		1,737,464	1,730,378	99,59		100.00	
			OPERASI RUTIN DI. KEDUNG ASEM- KAB. KENDAL, KAB. BATANG;Tersebar;Jawa Tengah;59.324 km;4353 Hektar;F;S;SYC	KAB. KENDAL, KAB. BATANG		1,073,896	1,070,173	99,65		100.00	
			OPERASI RUTIN BALAI PU SDA TARU SELUNA : DI. KLAMBU WILALUNG- KAB. DEMAK, KAB. KUDUS, KAB. PATI;Tersebar;Jawa Tengah;361.61 km;37451 Hektar;F;S;SYC	KAB. DEMAK, KAB. KUDUS, KAB. PATI		4,869,208	4,862,999	99,87		100.00	
			OPERASI RUTIN DI. SEDADI- KAB. GROBOGAN, KAB. DEMAK;Tersebar;Jawa Tengah;108.7 km;16055	KAB. GROBOGAN, KAB. DEMAK		1,960,652	1,955,340	99,73		100.00	

			Hektar;F;S;SYC								
			OPERASI RUTIN DI. SIDOREJO- KAB. GROBOGAN;Tersebar;Jawa Tengah;54.965 km;7938 Hektar;F;S;SYC	KAB. GROBOGAN		938,977	935,060	99,58		100.00	
			OPERASI RUTIN DI. DUMPIL- KAB. GROBOGAN;Tersebar;Jawa Tengah;81.24 km;9818 Hektar;F;S;SYC	KAB. GROBOGAN		1,500,619	1,492,596	99,47		100.00	
			OPERASI RUTIN DI. WADUK GEMBONG- KAB. PATI;Tersebar;Jawa Tengah;55.18 km;4606 Hektar;F;S;SYC	KAB. PATI		572,801	565,452	98,72		100.00	
			OPERASI RUTIN DI. WADUK GUNUNGROWO- KAB. PATI;Tersebar;Jawa Tengah;72.35 km;3922 Hektar;F;S;SYC	KAB. PATI		492,127	485,780	98,71		100.00	
			OPERASI RUTIN BALAI PU SDA TARU PROBOLO : DI WADUK WADASLINTANG KAB. KEBUMEN DAN KAB. PURWOREJO;Tersebar;Ja wa Tengah;421.53 km;31853 Hektar;F;S;SYC	KAB. KEBUMEN DAN KAB. PURWOREJO		5,730,319	5,691,264	90,18		100.00	
			OPERASI RUTIN DI PROGGOMANGGIS- KALIBENING KAB. MAGELANG;Tersebar;Jawa Tengah;69.6 km;3633 Hektar;F;S;SYC	KAB. MAGELANG		766,313	755,127	89,99		100.00	
			OPERASI RUTIN DI BORO- KAB. PURWOREJO;Tersebar;Ja wa Tengah;65.51 km;5136	KAB. PURWOREJO		1,053,060	1,040,048	89,99		100.00	

			Hektar;F;S;SYC								
			OPERASI RUTIN DI KEDUNG PUTRI- KAB.PURWOREJO;Terseba r;Jawa Tengah;84.52 km;4341 Hektar;F;S;SYC	KAB.PURWOREJO		895,288	885,227	90,00		100.00	
			PEMELIHARAAN BERKALA DI.Pesantren Kletak- Kab. Pekalongan;Tersebar;Jaw a Tengah;0 km;0 Hektar;F;K;SYC	Kab. Pekalongan		773,819	621,930	80,37		100.00	
			PEMELIHARAAN BERKALA DI.GLAPAN- KAB. GROBOGAN, KAB. DEMAK;Tersebar;Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;F;K;SYC	KAB. GROBOGAN, KAB. DEMAK		569,233	458,864	80,61		100.00	
			PEMELIHARAAN BERKALA DI. DUMPIL- KAB. GROBOGAN;Tersebar;Jaw a Tengah;0 km;0 Hektar;F;K;SYC	KAB. GROBOGAN		517,980	409,460	79,05		100.00	
			PEMELIHARAAN BERKALA DI.SEMPOR- KAB. KEBUMEN;Tersebar;Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;F;K;SYC	KAB. KEBUMEN		539,935	461,330	85,44		100.00	
			PEMELIHARAAN BERKALA DI. SINGOMERTO, KAB. BANJARNEGARA;Tersebar; Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;F;K;SYC	KAB. BANJARNEGARA		682,683	548,669	80,37		100.00	
			PEMELIHARAAN RUTIN D.I. KUMISIK Kab. Tegal;Tersebar;Jawa	KAB. TEGAL		653,730	651,407	99,64		100.00	

			Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC								
			PEMELIHARAAN RUTIN DI WADUK SEMPOR, KAB. KEBUMEN;Tersebar;Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC	KAB. KEBUMEN		721,967	715,329	98,39		100.00	
			PEMELIHARAAN RUTIN DI.SERAYU- KAB. BANYUMAS, CILACAP, KEBUMEN;Tersebar;Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC	KAB. BANYUMAS,		2,213,472	2,208,982	99,80		100.00	
			PEMELIHARAAN RUTIN DI.BANJARCAHYANA- KAB. BANJARNEGARA, PURBALINGGA;Tersebar;J awa Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC	KAB. BANJARNEGARA, PURBALINGGA		806,484	805,511	99,88		100.00	
			PEMELIHARAAN RUTIN DI.SINGOMERTO- KAB. BANJARNEGARA;Tersebar; Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC	KAB. BANJARNEGARA		903,882	902,965	99,90		100.00	
			PEMELIHARAAN RUTIN DI.TAJUM- KAB. BANYUMAS;Tersebar;Jaw a Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC	KAB. BANYUMAS		475,224	474,544	99,86		100.00	
			PEMELIHARAAN RUTIN DI.KALIWADAS- KAB. PEMALANG;Tersebar;Jaw a Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC	KAB. PEMALANG		1,042,894	1,036,710	99,41		100.00	
			PEMELIHARAAN RUTIN DI.PESANTREN	KAB. PEKALONGAN		1,903,735	1,900,788	99,85		100.00	

			KLETAK- KAB. PEKALONGAN;Tersebar;Ja wa Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC								
			PEMELIHARAAN RUTIN DI. KUPANGKROMPENG- KAB. BATANG;Tersebar;Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC	KAB. BATANG		566,758	563,577	99,31		100.00	
			PEMELIHARAAN RUTIN DI. WADUKMALAHAYU- KAB. BREBES;Tersebar;Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC	KAB. BREBES		2,317,708	2,296,548	89,53		100.00	
			PEMELIHARAAN RUTIN DI.PEMALI- KAB. BREBES;Tersebar;Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC	KAB. BREBES		2,092,120	2,085,100	97,49		100.00	
			PEMELIHARAAN RUTIN DI.CACABAN (BD.DUKUH JATI)- KAB. TEGAL;Tersebar;Jawa Tengah;0 km;0 km;F;S;SYC	KAB. TEGAL		2,235,305	2,232,400	99,80		100.00	
			PEMELIHARAAN RUTIN DI.RAMBUT (BD. CIPERO)- KAB. TEGAL;Tersebar;Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC	KAB. TEGAL		1,059,654	1,056,567	99,71		100.00	
			PEMELIHARAAN RUTIN DI.GUNG- KAB. TEGAL;Tersebar;Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC	KAB. TEGAL		950,805	947,484	99,65		100.00	
			PEMELIHARAAN RUTIN	KAB.PEMALANG		1,008,034	1,005,337	99,66		100.00	

			DI.COMAL/SUKAWATI KAB.PEMALANG;Tersebar; Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC								
			PEMELIHARAAN RUTIN DI.SUNGAPAN- KAB. PEMALANG;Tersebar;Jaw a Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC	KAB. PEMALANG		913,198	910,479	99,70		100.00	
			PEMELIHARAAN RUTIN DI.SRAGI- KAB. PEKALONGAN;Tersebar;Ja wa Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC	KAB. PEKALONGAN		551,554	547,202	99,21		100.00	
			PEMELIHARAAN RUTIN DI.GLAPAN- KAB. GROBOGAN, KAB. DEMAK;Tersebar;Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC	KAB. GROBOGAN, KAB. DEMAK		3,117,773	3,116,917	99,97		100.00	
			PEMELIHARAAN RUTIN DI.JRAGUNG- KAB. DEMAK;Tersebar;Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC	KAB. DEMAK;		628,448	627,886	99,91		100.00	
			PEMELIHARAAN RUTIN DI.BODRI- KAB. KENDAL;Tersebar;Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC	KAB. KENDAL		1,286,030	1,285,759	99,98		100.00	
			PEMELIHARAAN RUTIN DI. KEDUNG ASEM- KAB. KENDAL, KAB. BATANG;Tersebar;Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC	KAB. KENDAL, KAB. BATANG		585,791	585,135	99,89		100.00	
			PEMELIHARAAN RUTIN DI. KLAMBU- KAB. DEMAK, KAB. KUDUS,	KAB. DEMAK, KAB. KUDUS, KAB. PATI;		3,863,418	3,731,631	96,59		100.00	

			KAB. PATI;Tersebar;Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC								
			PEMELIHARAAN RUTIN DI. SEDADI- KAB. GROBOGAN, KAB. DEMAK;Tersebar;Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC	KAB. GROBOGAN, KAB. DEMAK		1,244,995	1,202,059	96,55		100.00	
			PEMELIHARAAN RUTIN DI. SIDOREJO- KAB. GROBOGAN;Tersebar;Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC	KAB. GROBOGAN		853,295	836,563	98,04		100.00	
			PEMELIHARAAN RUTIN DI. DUMPIL- KAB. GROBOGAN;Tersebar; Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC	KAB. GROBOGAN		1,823,855	1,782,084	97,71		100.00	
			PEMELIHARAAN RUTIN DI. WADUK GEMBONG- KAB. PATI;Tersebar;Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC	KAB. PATI;		695,304	588,756	84,68		100.00	
			PEMELIHARAAN RUTIN DI. WADUK GUNUNGROWO- KAB. PATI;Tersebar;Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC	KAB. PATI		601,839	558,848	92,86		100.00	
			PEMELIHARAAN RUTIN BALAI PU SDA TARU PROBOLO : DI WADUK WADASLINTANG KAB. KEBUMEN DAN KAB. PURWOREJO;Tersebar; Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC	KAB. KEBUMEN DAN KAB. PURWOREJO		2,192,026	2,183,215	97,50		100.00	

			PEMELIHARAAN RUTIN DI PROGOMANGGIS- KALIBENING, KAB. MAGELANG;Tersebar;Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC	KAB. MAGELANG		679,996	674,995	98,53		100.00	
			PEMELIHARAAN RUTIN DI BORO- KAB.PURWOREJO;Tersebar; Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC	KAB.PURWOREJO		755,279	750,415	99,02		100.00	
			PEMELIHARAAN RUTIN DI KEDUNG PUTRI- KAB. PURWOREJO;Tersebar;Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;F;S;SYC	KAB. PURWOREJO		721,253	717,793	99,10		100.00	
			Penerapan Sistem Informasi Manajemen Operasi dan Pemeliharaan di Di. Boro, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;Kab. Purworejo;Jawa Tengah;0 km;0 Hektar;NF;S;SYC	KAB. PURWOREJO		21,845	20,162	92,30		100.00	
			ADMINISTRASI KEGIATAN SATKER;Kota Semarang;Jawa Tengah;12 Bulan;12 Bulan;NF;AU;SYC	Kota Semarang		1,604,487	1,204,894	75,10		100.00	
			E-MONITORING;Kota Semarang;Jawa Tengah;28 Laporan;28 Laporan;NF;AU;SYC	Kota Semarang		48,760	48,481	99,43		100.00	
			PEMANTAUAN DAN PELAPORAN;Kota Semarang;Jawa Tengah;4 Laporan;4 Laporan;NF;AU;SYC	Kota Semarang		162,903	113,722	69,81		100.00	

	JUMLAH					91,600,978,000	89,182,712,181	97.36		100.00	
	TOTAL					408,561,941,000	393,512,859,571	96.32		100.00	

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

3.2.1 Target Kinerja

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp981.881.906.000,00 (3,59% dari total APBD) untuk membiayai total 933 kegiatan, dengan realisasi fisik tercapai sebesar 29,81% dan realisasi pencairan keuangan tercapai Rp91.162.177.797,00 (9,28%), meliputi jenis Bantuan:

a. TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan (TMMD)

TMMD sebagai wujud Operasi Bhakti TNI merupakan program kerjasama lintas sektoral antara TNI, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta komponen masyarakat lainnya, yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya membantu meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah miskin, terisolir/terpencil, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena bencana.

Lokasi kegiatan TMMD berada pada Desa/Kelurahan di daerah terisolir/terpencil, daerah perbatasan, daerah pesisir pantai dan daerah kumuh perkotaan serta daerah yang terkena akibat bencana alam atau bencana sosial lainnya, diutamakan pada daerah miskin serta diarahkan untuk kegiatan yang bersifat baru untuk memecahkan permasalahan melalui terobosan kegiatan fisik dan non fisik.

Sasaran kegiatan fisik TMMD diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kebutuhan dasar masyarakat, untuk membuka isolasi daerah terpencil dan mendukung peningkatan perekonomian serta derajat kesehatan. Adapun Sasaran kegiatan non fisik diprioritaskan pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam berbangsa, bernegara dan bela negara serta memiliki ketahanan wilayah yang tangguh.

Alokasi Anggaran Bantuan TMMD pada Tahun 2020 sebesar Rp24.900.000.000,00 (2,54% dari total Bantuan Keuangan kepada

Kabupaten/Kota) untuk membiayai kegiatan di 35 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 3 tahap, terdiri dari 32 Sengkuyung 3 Reguler di setiap tahapnya, dengan realisasi fisik 98,42% dan realisasi pencairan keuangan Rp24.132.000.000,00 (96,92%).

Keluaran kegiatan dalam pelaksanaan TMMD antara lain berupa pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, talud dan gorong-gorong); pembangunan dan perbaikan prasarana dasar (MCK, perpipaan, air bersih, pemugaran rumah tidak layak huni); dan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana peribadatan serta pos keamanan lingkungan.

b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)

Bantuan untuk SPPD diarahkan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas perencanaan pembangunan kabupaten/kota agar perencanaan pembangunan lebih sinergis sehingga pembangunan daerah semakin bermanfaat, efektif dan efisien melalui kegiatan Penghargaan Pangripta Abipraya; Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL); Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (PSIPD); Bantuan Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Kabupaten/Kota; Bantuan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota; dan Penanggulangan masalah Gizi (PMG).

Keluaran kegiatan antara lain berupa Laporan pelaksanaan dan dokumen perencanaan kabupaten/kota; Pelaksanaan Perkembangan Klaster dan Profil investasi kabupaten/kota; Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung serta Data Profil Daerah Kabupaten/Kota; Rencana Aksi Daerah program TPB/SDGs; Laporan tahunan kinerja Tim Koordinasi Kemiskinan (TKPK) dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten/Kota; dan pengendalian dan pengawasan peredaran garam di tingkat desa serta pencegahan stunting di mulai dari tingkat remaja dengan lokus sampai dengan desa.

Akibat terjadinya Pandemi Covid-19, dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran maka Bantuan SPPD termasuk dalam kebijakan refocusing alokasi anggaran, sehingga tahun 2020 kegiatan ini tidak dilaksanakan.

c. Bantuan Sarana Prasarana

Bantuan Sarana Prasarana merupakan bantuan stimulan yang bersumber dari APBD Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membiayai kegiatan prioritas sarana prasarana kewenangan Kabupaten/Kota, peningkatan potensi wilayah, usulan kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi, usulan DPRD hasil reses/kunjungan kerja, dan usulan masyarakat hasil kunjungan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Lokasi kegiatan diutamakan adalah lokasi yang berada pada kawasan perbatasan lintas Provinsi, kawasan perbatasan lintas Kabupaten/Kota, kawasan rawan bencana alam, kawasan pasca bencana alam, kawasan pariwisata, perdesaan, kawasan permukiman termasuk kawasan permukiman kumuh, kawasan padat perkotaan, kawasan nelayan, kawasan pertanian, kawasan peternakan dan kawasan perkebunan

Sasaran kegiatan diarahkan pada kegiatan-kegiatan langsung bermanfaat bagi masyarakat/daerah/wilayah, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, mendorong perekonomian daerah dan menunjang program strategis Provinsi/Nasional.

Alokasi anggaran Bantuan Sarana Prasarana sebesar Rp917.111.906.000,00 (93,40% dari total Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota), yang dimanfaatkan untuk membiayai 388 kegiatan dengan realisasi fisik 25,61% dan realisasi penyaluran keuangan Rp60.738.177.797,00 (6,62%).

Besaran alokasi anggaran Bantuan Sarana Prasarana disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Provinsi, mendasarkan kebijakan dan strategi Perencanaan dan Penganggaran Provinsi, dengan

mempertimbangkan pada: 1) Proporsionalitas keserasian bantuan antar Kabupaten/Kota, mendasarkan indikator: Luas Wilayah; Jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD); Product Domestic Regional Bruto (PDRB); Kontribusi dalam penyediaan Lahan Pertanian Berkelanjutan; Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota; Luas areal daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota; Keterkaitan dengan program/kegiatan/peran/posisi strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan di Provinsi Jawa Tengah; Komitmen Kabupaten/Kota dalam penyediaan dana pendampingan/ sharing pada tahun berjalan untuk kelancaran dan operasionalisasi pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan nilai kemanfaatan/outcomenya; Kinerja pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) tahun sebelumnya; serta Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan dan akhir tahun pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota; 2) Urutan prioritas usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten/Kota pada proses rangkaian Musrenbang Provinsi; 3) Usulan tindak lanjut hasil reses/kunjungan kerja DPRD Provinsi Jawa Tengah yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; serta 4) Usulan tindak lanjut hasil kunjungan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Keluaran kegiatan Bantuan Sarana Prasarana antara lain :

- Bidang Infrastruktur Wilayah, keluaran yang dihasilkan yaitu : terbangunnya prasarana Jalan/Jembatan dan kelengkapannya sebanyak 194 kegiatan di 31 Kabupaten/Kota (antara lain pembangunan/ peningkatan jalan 189 lokasi, dan pembangunan/ rehabilitasi jembatan 5 unit; terwujudnya prasarana Sumber Daya Air (SDA) dan kelengkapannya sebanyak 10 kegiatan di 4 Kabupaten berupa pembangunan dan rehabilitasi embung 6 lokasi, normalisasi kali 2 lokasi, dan rehabilitasi pengaman tebing kali 2

lokasi; terwujudnya prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) sebanyak 18 kegiatan di 9 kabupaten/kota antara lain pembangunan jaringan perpipaan air minum dan air berish 5 lokasi, penataan lingkungan permukiman 9 lokasi, dan rehabilitasi saluran drainase 4 lokasi; terbangunnya sarpras perhubungan sebanyak 13 kegiatan di 8 kabupaten/kota antara lain pengadaan dan pemasangan LPJU 6 lokasi, perluasan lapangan parkir pelabuhan penyeberangan karimunjawa Kabupaten Jepara, dan pengadaan dan pemasangan palang kereta api Kabupaten Sukoharjo.

- Bidang Infrastruktur Ekonomi, keluaran yang dihasilkan yaitu : terbangunnya prasarana penunjang pariwisata sebanyak 4 kegiatan di 4 Kabupaten berupa pembangunan wisata susur sungai lasem Kabupaten Rembang, pembangunan sumur dan penampungan air di DTW Candi Gedongsongo Kabupaten Semarang, pembangunan pemecah gelombang obyek wisata pantai suwuk Kabupaten Kebumen, dan Revitalisasi studio dieng plateu theater Kabupaten Wonosobo; sarpras pertanian sebanyak 66 kegiatan di 10 kabupaten/kota berupa pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi/DI; sarpras pendukung ekonomi kerakyatan sebanyak 4 kegiatan di 4 kabupaten/kota berupa revitalisasi pasar rakyat.
- Bidang Infrastruktur Sosial Budaya, keluaran yang dihasilkan yaitu: terwujudnya sarana dan prasarana kesehatan sebanyak 4 kegiatan di 4 kabupaten berupa pembangunan Puskesmas 3 lokasi, dan pembangunan gedung persalinan Kabupaten Temanggung; terwujudnya prasarana dasar pendidikan sebanyak 4 kegiatan di 3 kabupaten/kota berupa pembangunan sarana prasarana olahraga.
- Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup, keluaran yang dihasilkan yaitu : terbangunnya IPAL komunal/terpadu sebanyak 3 kegiatan di 3 kabupaten/kota; pengelolaan persampahan sebanyak 7 kegiatan di 4 kabupaten/kota berupa pembangunan TPST 3R 6 lokasi, pemb zona *sanitary landfill* TPA Ngronggo Kota Salatiga; dan pemulihan

dan peningkatan fungsi kawasan lindung sebanyak 1 kegiatan di Kota Surakarta berupa backdrop open stage Taman Balekambang.

Dengan terjadinya Pandemi Covid-19, sebagai upaya untuk percepatan/akselerasi penyaluran dan pelaksanaan Bantuan Keuangan guna pemulihan ekonomi daerah dan meningkatkan daya beli masyarakat serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi di daerah, telah diterbitkan Pergub Jateng Nomor 35 tahun 2020 Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Gubernur Jateng Nomor 900/0011263 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Pola Padat Karya di Provinsi Jawa Tengah. Sebanyak 215 kegiatan sarana prasarana pada 27 kabupaten/kota senilai Rp14.686.510.763,00 dilaksanakan dengan menggunakan pola padat karya dengan realisasi sebesar Rp839.151.624,00 dan tenaga kerja yang dapat terserap sebanyak 10.443 orang.

Mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 tahun 2020, sebanyak 40 kegiatan sarana prasarana senilai Rp158.315.694.000,00 pada 15 kabupaten/kota yang dialokasikan pada TA 2020, pelaksanaan fisiknya dilakukan pada tahun 2021, yaitu : Kabupaten Banyumas sejumlah 3 kegiatan; Cilacap sejumlah 2 kegiatan; Kebumen sejumlah 3 Kegiatan; Purbalingga sejumlah 2 kegiatan; Purworejo sejumlah 2 kegiatan; Wonosobo sejumlah 4 kegiatan; Kendal sejumlah 1 kegiatan; Klaten sejumlah 2 kegiatan; Semarang sejumlah 8 kegiatan; Pati sejumlah 1 kegiatan; Rembang sejumlah 1 kegiatan; Sukoharjo sejumlah 3 kegiatan; Kota surakarta sejumlah 1 kegiatan; Kota Magelang sejumlah 1 kegiatan dan Kota Tegal sejumlah 6 kegiatan.

d. Bantuan Pendidikan

Arah kebijakan Bantuan Pendidikan adalah bantuan stimulan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penguatan kapasitas dan tata kelola satuan pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas pengembangan kurikulum pendidikan dan pembinaan kesiswaan.

Jenis kegiatan Bantuan Pendidikan yang diberikan adalah untuk

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini meliputi : Pengembangan Sarana Prasarana PAUD dan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu.
- 2) Program Pendidikan Dasar meliputi : Rehab Ruang Kelas Rusak SD; Rehab Ruang Kelas Rusak SMP; Pembangunan Ruang Perpustakaan SD; Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP; Pengadaan Buku Perpustakaan SD; Pengadaan Buku Perpustakaan SMP; Pengadaan Alat Lab IPA SMP; Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB; Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD; Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP; Pengadaan Alat TIK pembelajaran SD; dan Pengadaan Alat laboratorium Komputer SMP.
- 3) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan yaitu Manajemen Pendataan Pendidikan.

Alokasi anggaran Bantuan Pendidikan pada Tahun 2020 sebesar Rp39.870.000.000,00 (4,06% dari total Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota) untuk membiayai 568 kegiatan di 26 kabupaten/kota dengan realisasi fisik 24,3% dan realisasi penyaluran keuangan Rp6.292.000.000,00 (15,78%), dengan keluaran terwujudnya :

- Program PAUD, keluaran yang dihasilkan yaitu pengembangan sarpras PAUD sebanyak 1 kegiatan di Kabupaten Blora.
- Program Pendidikan Dasar, keluaran yang dihasilkan yaitu Rehab Ruang Kelas Rusak SD sebanyak 116 kegiatan di 16 kabupaten; Rehab Ruang Kelas Rusak SMP sebanyak 46 di 12 kabupaten; Pembangunan Ruang Perpustakaan SD sebanyak 38 kegiatan di 4 kabupaten; Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP sebanyak 1 kegiatan di Kabupaten Jepara; Pengadaan Buku Perpustakaan SD sebanyak 8 kegiatan di 3 kabupaten; Pengadaan Alat Laboratorium

IPA SMP sebanyak 26 kegiatan di 2 kabupaten; Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD sebanyak 146 kegiatan di 8 kabupaten/kota; dan Pengadaan Alat Laboratorium Komputer SMP sebanyak 166 kegiatan di 6 kabupaten/kota.

- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, keluaran yang dihasilkan berupa Manajemen Pendataan Pendidikan pada 19 Kabupaten/Kota.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa merupakan upaya penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan serta pengembangan desa wisata di Jawa Tengah. Pengelolaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa tersebut diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.

Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sejumlah Rp1.187.687.636.000,00 bagi 7.809 di Jawa Tengah. Terdiri dari 6 jenis bantuan, yaitu: Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan, Pengembangan Kawasan Perdesaan, Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan Pengembangan Desa Wisata.

Adanya pandemi COVID-19 membawa dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat desa. Sebagian besar kegiatan pembangunan konstruksi fisik yang semula dianggarkan dalam APBDesa TA. 2020 tidak dapat dilaksanakan, karena alokasi anggaran Dana Desa dirubah serta diprioritaskan penggunaannya untuk pemberian jaminan sosial BLT-DD

(Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) dan pemulihan ekonomi bagi masyarakat desa yang terdampak pandemi COVID-19.

Oleh sebab itu, agar pembangunan di desa tetap berjalan maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil kebijakan untuk tetap merealisasikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang telah dianggarkan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dengan penekanan penggunaannya bagi kegiatan pembangunan konstruksi fisik dan melibatkan tenaga kerja dari warga miskin, pengangguran, warga setengah menganggur, warga terdampak COVID-19, serta warga yang memiliki anggota keluarga dengan kondisi gizi buruk atau stunting.

Realisasi Penyaluran Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa

Realisasi penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp1.168.058.636.000,00 (98,35%). Rincian alokasi anggaran dan progres pelaksanaan kegiatan per jenis bantuan keuangan dimaksud dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan, alokasi bantuan sejumlah Rp.939.292.636.000,00 digunakan untuk membiayai 5.382 titik kegiatan yang tersebar di 3.131 desa (40,11% dari jumlah desa di Jawa Tengah). Peruntukan penggunaan alokasi bantuan tersebut pada 5 bidang kegiatan, yaitu:

➤ **Bidang Infrastruktur**

Alokasi bantuan keuangan peningkatan sarana prasarana perdesaan bidang infrastruktur sejumlah Rp929.408.636.000,00 digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan atau rehabilitasi: jalan desa /jembatan desa /jalan usaha tani/ jalan produksi/ bangunan pelengkap jalan berupa talud/sender jalan/drainase/gorong gorong, embung desa, sarana prasarana lingkungan desa, jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)/jaringan irigasi desa (JIDES), penerangan jalan umum dengan *sollar cell*, pembuatan sumur bor, pembuatan bak penampungan air bersih serta pipaniasi air bersih; dan kegiatan rehabilitasi sarana prasarana gedung/kantor desa.

➤ Bidang Ekonomi

Alokasi bantuan keuangan peningkatan sarana prasarana perdesaan bidang ekonomi sejumlah Rp3.980.000.000,00 digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan atau rehabilitasi: pasar desa dan/atau kios desa, tempat pelelangan ikan/pemancingan ikan/tambatan perahu, dan lumbung pangan desa.

➤ Bidang Pendidikan

Pada bidang pendidikan, alokasi bantuan keuangan sejumlah Rp1.600.000.000,00 digunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan sarana prasarana perpustakaan desa dan sarana prasarana taman bacaan.

➤ Bidang Sosial Budaya

Bantuan keuangan peningkatan sarana prasarana perdesaan bidang sosial budaya sejumlah Rp4.304.000.000,00 digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan atau rehabilitasi penyediaan sarana kesenian.

Dari sebanyak 5.382 titik kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan, realisasi penyaluran bantuannya mencapai sebesar Rp933.198.636.000,00 (99,35%) bagi 5.350 titik kegiatan dengan rincian penggunaan yaitu: pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana lingkungan desa di 51 titik senilai Rp9.600.000.000,00; pembangunan atau rehabilitasi jalan (beton) 1.257 titik senilai Rp209.931.282.000,00; pembangunan atau rehabilitasi jalan (aspal) 1.407 titik senilai Rp256.498.000.000,00; pembangunan atau rehabilitasi jalan (makadam) 49 titik senilai Rp6.875.000.000,00; pembangunan atau rehabilitasi jalan (paving) 77 titik senilai Rp14.661.000.000,00; pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani dan bangunan pelengkap jalan (talud/sender jalan/drainase/ gorong gorong) 277 titik senilai Rp47.602.000.000; JITUT/JIDES 10 titik senilai Rp1.900.000.000,00; pengadaan sarana prasarana perpustakaan desa 10 titik senilai Rp1.850.000.000,00; pembangunan atau rehabilitasi

talud 1.535 titik senilai Rp267.307.671.000,00; pembangunan atau rehabilitasi drainase 385 titik senilai Rp68.093.683.000,00; penanganan sarana air bersih 95 titik senilai Rp15.511.000.000,00; pembangunan poliklinik desa 1 titik senilai Rp200.000.000,00; pembangunan atau rehabilitasi gedung BUMDES 3 titik senilai Rp450.000.000,00; penerangan jalan umum dengan *sollar cell* 39 titik senilai Rp7.405.000.000,00; pembangunan atau rehabilitasi penyediaan sarana kesenian 31 titik senilai Rp4.304.000.000,00; pembangunan atau rehabilitasi pasar desa/kios desa 19 titik senilai Rp3.650.000.000,00; pembangunan atau rehabilitasi embung desa 10 titik senilai Rp1.950.000.000,00; pembangunan atau rehabilitasi jembatan 60 titik senilai Rp9.805.000.000,00; dan rehabilitasi kantor desa 34 titik senilai Rp5.605.000.000,00.

Dapat dijelaskan lebih lanjut, dari sebanyak 2.065 desa yang sudah melaporkan perkembangan pelaksanaan 3.447 titik bantuan keuangan peningkatan sarana prasarana perdesaan, progres kegiatannya yaitu 2.948 titik kegiatan (85,52%) selesai dilaksanakan, 436 titik kegiatan (12,65%) sedang dilaksanakan, dan 60 titik kegiatan (1,74%) belum dilaksanakan.

- b. Bantuan Pengembangan Kawasan Perdesaan,** alokasi bantuan sejumlah Rp2.650.000.000,00 untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) di 53 desa yang melakukan kerjasama antar desa, mengembangkan produk unggulan kawasan dan membangun 12 kawasan perdesaan yang berada di 12 kabupaten di Jawa Tengah.

Realisasi penyaluran bantuan keuangan pengembangan kawasan perdesaan tersebut mencapai sejumlah Rp2.650.000.000,00 (100%) bagi penyertaan modal BUMDesa Bersamadi 53 desa yang tersebar di 12 wilayah kabupaten.

- c. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa dan Peningkatan Kualitas RTLH (PKMD),** alokasi bantuan sejumlah Rp188.200.000.000,00. Pemanfaatan bantuan keuangan ini untuk 7 kegiatan pemberdayaan

masyarakat, dan peningkatan kualitas RTLH. Alokasi bantuan keuangan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sejumlah Rp75.280.000.000,00 bagi 3.764 desa dengan nilai bantuan Rp20.000.000,00 per desa, sedangkan kegiatan peningkatan kualitas RTLH sejumlah Rp112.920.000.000,00 bagi 11.292 unit RTLH milik kepala keluarga miskin dengan nilai bantuan Rp10.000.000,00 per unit RTLH dialokasikan di 3.764 desa yang sama.

Guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi desa yang terdampak pandemi COVID-19, maka pemanfaatan bantuan keuangan kegiatan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan hanya untuk penyertaan modal BUMDesa, dengan realisasi penyaluran bantuan sejumlah Rp73.300.000.000,00 (97,37%) bagi 3.665 desa. Sedangkan untuk kegiatan peningkatan kualitas RTLH realisasi penyalurannya sejumlah Rp101.820.000.000,00 (90,17%) bagi 10.182 unit RTLH yang tersebar di 3.064 desa.

- d. Bantuan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD),** alokasi bantuan sebesar Rp39.045.000.000,00 bagi 7.809 desa. Pemanfaatan bantuan keuangan ini untuk membiayai operasional pelaksanaan kegiatan KPMD dalam pendampingan kepada masyarakat dan desa, dengan nilai bantuan masing-masing Rp5.000.000,00 per desa diperuntukan bagi 5 orang KPMD.

Realisasi penyaluran pemberian bantuan operasional KPMD sejumlah Rp38.590.000.000,00 (98,83%) bagi 7.720 desa.

- e. Bantuan Pengembangan Desa Wisata,** alokasi bantuan sebesar Rp18.500.000.000,00 dipergunakan untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi fasilitas umum untuk kebutuhan wisata dan wisatawan sebanyak 100 kegiatan di 100 desa yang tersebar di 27 wilayah kabupaten. Alokasi bantuan ini dibagi dalam 3 kriteria yaitu Desa Wisata Pemula, sebanyak 85 desa dengan nilai bantuan sebesar Rp100.000.000,00 per desa; Desa Wisata Madya, sebanyak 10 Desa dengan nilai bantuan sebesar Rp500.000.000,00 per desa; dan Desa

Wisata Maju, sebanyak 5 desa dengan nilai bantuan sebesar Rp1.000.000.000,00 per desa.

Alokasi bantuan pengembangan desa wisata tersebut telah direalisasikan penyalurannya sejumlah Rp18.500.000.000,00 (100%) bagi pembangunan/rehabilitasi fasilitas umum untuk kebutuhan wisatawan pada 100 desa yang tersebar di 27 wilayah kabupaten.

Alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang tidak disalurkan sebesar Rp19.629.000.000,00 disebabkan antara lain nomenklatur kegiatan tidak menunjukkan lokasi yang jelas, usulan lokasi kegiatan di kelurahan bukan desa, kegiatan yang diusulkan tidak disertai perencanaan yang matang sehingga mengalami hambatan pada saat akan dilaksanakan, desa belum memiliki BUMDes dan kondisi belum tertata dengan baik, dan kondisi eksisting rumah yang diusulkan tidak memenuhi syarat penerima bantuan RTLH.

3.2.2 Realisasi

Tugas Pembantuan dengan dengan realisasi fisik tercapai sebesar 29,81% dan realisasi pencairan keuangan tercapai Rp91.162.177.797,00 (9,28%). Anggaran tersebut dikelola oleh 8 SKPD, yaitu Dinas PU Bina Marga Cipta Karya, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas PU Sumberdaya Air dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bappeda.

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait dengan capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dalam matrik di bawah ini:

Matriks

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI JAWA TENGAH YANG DILAKSANAKAN OLEH
DAERAH KABUPATEN/KOTA TA.2020**

No	Bidang Urusan	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN TP	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KABUPATEN/ KOTA	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bantuan Non Sarpras dan Non Pendidikan : TMMD dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2020	TMMD program kerjasama lintas sektoral antara TNI, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta komponen masyarakat lainnya. Kegiatan Berupa : a. pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar (jalan, jembatan), talud dan gorong-gorong) b. pembangunan dan perbaikan prasarana dasar (MCK, perpipaan, air bersih, c. pemugaran Rumah Tidak Layak Huni); dan d. pembangunan dan perbaikan sarana prasarana	35 Kabupaten/ Kota	a. Dinas PU dan BMCK b. Dinas Kesehatan c. Dinas Perumahan dan Pemukiman d. Dinas PU SDA Taru	Rp24,900,000,000	Rp24,900,000,000	100%	Terlaksananya : a. betonisasi jalan desa sepanjang 160,4 m; b. pengaspalan jalan desa sepanjang 296 m; c. perkerasan/makadam jalan desa sepanjang 24.573 m; d. pavingisasi jalan desa sepanjang 367 m; pembangunan jembatan desa sepanjang 129 m; e. Pembangunan talud sepanjang 9.166 m; f. pembangunan senderan jalan desa sepanjang 62 m; g. pembangunan drainase jalan desa sepanjang 1.034 m; g. pemugaran/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 221 unit; h. pembangunan jamban/MCK sebanyak	98%	

			peribadatan serta pos keamanan lingkungan.						255 unit; i. perbaikan/ rehab masjid/musholla sebanyak 14 unit; j. pembangunan POS Kamling sebanyak 21 unit; k. pembangunan gedung pengolahan sampah/ Tempat Pembuangan Akhir sebanyak 1 unit dan pembangunan tugu monumen TMMD sebanyak 8 unit.		
			SPPD Kegiatan berupa : a. Penghargaan Pangripta Abipraya; Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL); b. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (PSIPD); b. Bantuan Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Kabupaten/Kota; c. Bantuan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan	35 Kabupaten/ Kota	a. Bappeda b. Dinas Sosial c. Dispermad esdukcapi d. Dinas Kesehatan	-	-	-	-		Akibat terjadinya Pandemi COVID-19, dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran maka Bantuan SPPD termasuk

			Kemiskinan Kabupaten/Kota; dan d. Penanggulangan masalah Gizi (PMG).								dalam kebijakan refocusing alokasi anggaran, sehingga tahun 2020 kegiatan ini tidak dilaksanakan
2	Bantuan Sarana Prasarana	a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2020	Kegiatan prioritas sarana prasarana kewenangan Kabupaten/Kota, peningkatan potensi wilayah, usulan kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi, usulan DPRD hasil reses/kunjungan kerja, dan usulan masyarakat hasil kunjungan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	35 Kabupaten/Kota		Rp917,111,906,000	Rp786,291,195,241	85.74%	> Bidang Infrastruktur Wilayah, keluaran yang dihasilkan yaitu : a. Terbangunnya prasarana Jalan dan Jembatan beserta kelengkapannya sebanyak 190 kegiatan di 30 Kabupaten/Kota (antara lain pembangunan/ peningkatan jalan 185 lokasi, dan pembangunan/rehabilitasi jembatan 5 lokasi); Terwujudnya prasarana Sumber Daya Air (SDA) dan kelengkapannya sebanyak 10 kegiatan di 4 Kabupaten berupa pembangunan dan rehabilitasi embung, normalisasi sungai, dan rehabilitasi pengaman	85.93%	

									tebing sungai; b. Terwujudnya prasarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman sebanyak 16 kegiatan di 8 kabupaten/kota antara lain pembangunan jaringan perpipaan air minum dan air bersih 3 lokasi, penataan lingkungan permukiman 9 lokasi, dan rehabilitasi saluran drainase 4 lokasi; c. Terbangunnya prasarana Perhubungan sebanyak 11 kegiatan di 6 kabupaten/kota antara lain pengadaan dan pemasangan LPJU, perluasan lapangan parkir pelabuhan penyeberangan karimunjawa Kabupaten Jepara, dan pengadaan dan pemasangan palang kereta api Kabupaten Sukoharjo		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									> Bidang Infrastruktur Ekonomi, keluaran yang dihasilkan yaitu : a. Terbangunnya prasarana penunjang pariwisata sebanyak 2 kegiatan di 2 Kabupaten berupa pembangunan sumur dan penampungan air di DTW Candi Gedongsongo Kabupaten Semarang, dan pembangunan pemecah gelombang obyek wisata Pantai Suwuk Kabupaten Kebumen; b. Terbangunnya sarpras pertanian sebanyak 66 kegiatan di 10 kabupaten/kota berupa pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi/DI; c. sarpras pendukung ekonomi kerakyatan sebanyak 4 kegiatan di 4 kabupaten/kota berupa revitalisasi pasar rakyat.		
									> Bidang Infrastruktur Sosial Budaya, keluaran yang dihasilkan yaitu: a. terwujudnya prasarana dasar kesehatan sebanyak 4 kegiatan di 4 kabupaten berupa pembangunan Puskesmas 3 lokasi, dan pembangunan gedung		

									persalinan Kabupaten Temanggung; b. terwujudnya prasarana dasar pendidikan sebanyak 3 kegiatan di 2 kabupaten/kota berupa pembangunan sarana prasarana gedung olahraga.		
									> Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup, keluaran yang dihasilkan yaitu : a. Terbangunnya IPAL komunal/terpadu sebanyak 3 kegiatan di 3 kabupaten/kota; b. pengelolaan persampahan/limbah sebanyak 7 kegiatan di 4 kabupaten/kota berupa pembangunan TPST 3R 6 lokasi, pembangunan zona sanitary landfill TPA Ngronggo Kota Salatiga; dan c. pemulihan dan peningkatan fungsi kawasan lindung sebanyak 1 kegiatan di Kota Surakarta berupa backdrop open stage Taman Balekambang		

3	Bantuan Pendidikan	a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2020	1) Program Pendidikan Anak Usia Dini meliputi : a. Pengembangan Sarana Prasarana PAUD dan b. Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu. 2) Program Pendidikan Dasar meliputi : a. Rehab Ruang Kelas Rusak SD; b. Rehab Ruang Kelas Rusak SMP; c. Pembangunan Ruang Perpustakaan SD; d. Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP; e. Pengadaan Buku Perpustakaan SD; f. Pengadaan Buku Perpustakaan SMP; g. Pengadaan Alat Lab IPA SMP; h. Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB; i. Pengadaan Buku Muatan Lokal Bahasa Jawa SD; j. Pengadaan Buku Muatan Lokal Bahasa Jawa SMP; k. Pengadaan Alat TIK pembelajaran SD; dan	26 Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan	Rp9,870,000,000	Rp34,375,000,000	86.22%	> Program PAUD, keluaran yang dihasilkan yaitu pengembangan sarpras PAUD sebanyak 1 kegiatan di Kabupaten Blora. > Program Pendidikan Dasar: keluaran yang dihasilkan yaitu a. Rehab Ruang Kelas Rusak SD sebanyak 116 kegiatan di 16 kabupaten b. Rehab Ruang Kelas Rusak SMP sebanyak 46 di 12 kabupaten c. Pembangunan Ruang Perpustakaan SD sebanyak 38 kegiatan di 4 kabupaten d. Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP sebanyak 1 kegiatan di Kabupaten Jepara e. Pengadaan Buku Perpustakaan SD sebanyak 8 kegiatan di 3 kabupaten f. Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP sebanyak 26 kegiatan di kabupaten Brebes g. Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD sebanyak 146 kegiatan di 8 kabupaten/ kota h. dan Pengadaan Alat Laboratorium Komputer SMP sebanyak 166	49.08%	
---	--------------------	--	---	--------------------	------------------	-----------------	------------------	--------	--	--------	--

			I. Pengadaan Alat laboratorium Komputer SMP. 3) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan yaitu Manajemen Pendataan Pendidikan.						kegiatan di 7 kabupaten/kota. > Program Manajemen Pelayanan Pendidikan keluaran yang dihasilkan berupa Manajemen Pendataan Pendidikan pada 19 Kabupaten/Kota.		
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

3.3 Permasalahan dan Kendala

3.3.1 Pemasalahan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat

Dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi, terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi, antara lain:

- a. Adanya Keterbatasan kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia pelaksana di Kabupaten/Kota dalam penyelesaian kegiatan baik fisik maupun administrasi;
- b. Adanya pandemi Covid-19, mengakibatkan berkurangnya frekuensi pendampingan lewat kunjungan langsung akibat pembatasan aktivitas kegiatan.

3.3.2 Permasalahan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota

Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 adalah :

- a. Kebijakan refocusing anggaran karena adanya Pandemi Covid-19 berakibat pada keterlambatan pelaksanaan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota.
- b. Adanya refocussing anggaran sharing kegiatan Sarana dan Prasarana yang telah dialokasikan oleh kabupaten/kota.
- c. Keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa berakibat pada mundurnya pelaksanaan kegiatan Sarpras sehingga waktu penyelesaian fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2020.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

3.4.1 Saran dan Tindak Lanjut dari Permasalahan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat

Penyelesaian permasalahan/kendala yang terjadi sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui:

- a. Optimalisasi personil/SDM pelaksana kegiatan.

- b. Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan secara *daring* (online) dan melalui media sosial lainnya.

3.4.2 Saran dan Tindak Lanjut dari Permasalahan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020

Penyelesaian permasalahan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah:

- a. Pelaksanaan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota disesuaikan dengan hasil rasionalisasi anggaran terutama pada kegiatan Sarpras.
- b. Pengalokasian kembali sharing anggaran oleh kabupaten/kota pada anggaran Perubahan TA. 2020
- c. Diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) sebagai dasar kegiatan Sarpras dapat dilaksanakan pada tahun 2021.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Bidang pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar.

Penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan berbagai masalah pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, adapun komponen SPM Bidang Pendidikan yaitu (1) Jenis Pelayanan Dasar; (2) Mutu Pelayanan Dasar; (3) Penerima Pelayanan Dasar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh oleh peserta didik secara minimal yang terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

a. Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan

Merupakan sekolah bagi peserta didik yang berusia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah Atas maupun Kejuruan;

b. Pendidikan Khusus

Merupakan sekolah bagi peserta didik yang berusia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus.

4.1.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada lampiran huruf B nomor 5 (lima) mengenai target dan indikator penerima layanan SPM Bidang Pendidikan, bahwa telah ditetapkan target capaian setiap tahunnya yaitu 100% untuk setiap jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaiannya. Berikut tabel rencana target capaian dan indikator penerima layanan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020:

Tabel 4.1
Rencana Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Daerah Provinsi
Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPAT KAN PELAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	TARGET CAPAIAN	RANCANGAN APBD TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan Menengah Atas	Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah atas	361.311	361.311	100%	849.543.154.944
2	Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah kejuruan	646.462	646.462	100%	1.002.703.489.225
3	Pendidikan Khusus	Jumlah penduduk usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	22.561	15.780	100%	31.925.151.000

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas dapat di deskripsikan bahwa target capaian jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah atas dan yang akan terlayani sebanyak 1.007.773 orang yang

terdiri dari 361.311 orang yang merupakan siswa yang bersekolah di sekolah menengah atas dan 646.462 orang merupakan siswa yang bersekolah sekolah menengah kejuruan.

Target capaian jumlah penduduk usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus dan yang akan terlayani sebanyak 15.780 orang yang terdiri dari jenjang Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

4.1.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah. Berikut ini tabel realisasi capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020:

Tabel 4.2

Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Daerah Provinsi Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET		REALISASI CAPAIAN SPM		CAPAIAN (6): (4)X 100%
			JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	RAPBD 2020	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	APBD TAHUN 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Menengah Atas	Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah atas	361.311	849.543.154.944	361.311	849.543.154.944	100%
2	Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah kejuruan	646.462	1.002.703.489.225	646.462	1.002.703.489.225	100%
3	Pendidikan Khusus	Penduduk usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	15.780	54.266.929.476	15.780	54.266.929.476	100%

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Jateng Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas dapat di deskripsikan bahwa jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah

atas yang akan terlayani dengan jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah atas yang terlayani adalah sebanyak 361.311 anak dan kejuruan yang terlayani adalah yaitu sebanyak 646.462 anak. Sehingga capaian SPM berdasarkan siswa yang terlayani pada Satuan Pendidikan sesuai target tahunan mencapai 100%. Sedangkan realisasi capaian SPM berdasarkan jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun yang berhak mendapat pelayanan Pendidikan Menengah Atas (SMA dan SMK) adalah jumlah orang yang terlayani pada jenis Pendidikan Menengah dan Kejuruan (361.311 + 646.462) dibagi jumlah orang yang berhak mendapatkan pelayanan pada kedua jenis pelayanan tersebut sebagaimana pada kolom 4 tabel 2.1 (1.438.468), yaitu sebesar 70,01% (Angka Partisipasi Kasar).

Jumlah penduduk usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus dan yang akan terlayani sama dengan jumlah warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus yang terlayani yaitu sebanyak 15.780 orang yang terdiri dari jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB, sehingga capaian SPM berdasarkan siswa SLB yang terlayani pada Satuan Pendidikan sesuai target tahunan mencapai 100%. Sedangkan realisasi capaian berdasarkan jumlah penduduk usia 4 – 18 tahun yang harus terlayani atau yang berhak mendapat pelayanan Pendidikan Khusus sebesar 69,94% (Angka Partisipasi Kasar).

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan SPM Bidang Pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, terdiri dari Program Pendidikan Menengah Atas sebesar Rp. 849.543.154.944,- dan Kejuruan sebesar Rp. 1.002.703.489.225,- dan dari Program Pendidikan Khusus sebesar Rp. 54.266.929.476,-.

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang

Pendidikan Tahun 2020 sebanyak 76.549 orang. Berikut Tabel Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah :

Tabel 4.3
Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020 di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jateng

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	DUKUNGAN PERSONIL
1	Pendidikan Menengah Atas	Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah atas	387.607	27.162
2	Pendidikan Khusus	Jumlah penduduk usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	26.744	3.168
3	Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah kejuruan	771.815	46.219

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Jateng Tahun 2020

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah- langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Berikut ini tabel permasalahan yang dialami dalam penerapan dan SPM Bidang Pendidikan.

Tabel 4.4
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020

Permasalahan	Upaya Mengatasi
Kualitas dan distribusi guru dan tenaga pendidik belum merata, dimana belum semua guru dan tenaga kependidikan mempunyai kualifikasi akademik yang sesuai;	Melakukan identifikasi pemetaan kebutuhan dan ketersediaan serta kesesuaian kualifikasi guru dan tenaga pendidik
Partisipasi anak usia sekolah jenjang pendidikan menengah belum mencapai 100% serta masih terdapat anak usia sekolah yang putus atau tidak sekolah;	a. Penyelenggaraan 3 SMK Negeri Boarding; b. Pembangunan Asrama Siswa Miskin pada 15 SMK Negeri (semi boarding); c. Pembiayaan studi lanjut bagi siswa miskin pada SMA Taruna Nusantara; d. Bantuan seragam siswa kurang mampu SMA, SMK, dan SLB Negeri; e. Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP), Bantuan Operasional Daerah (BOSDA), dan Beasiswa Miskin; f. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB; g. Penyelenggaraan Sekolah Jarak Jauh; h. Sekolah Virtual.
Masih kurangnya serapan tamatan SMK dalam Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI);	a. Revitalisasi dan Optimalisasi Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Sertifikasi keahlian bagi siswa SMK; c. Penyelenggaraan Bursa Kerja bagi lulusan SMK.
Terdapat Sarana prasarana sekolah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), dimana masih terdapat sekolah dengan kondisi sarpras pendidikan rusak berat dan sedang.	Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan, Hibah, dan Bantuan Sosial.

Sumber : Identifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan menggunakan acuan Standar Teknis Penerapan SPM yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, SPM Kesehatan terdiri atas SPM Bidang Kesehatan - 15 SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi adalah :

- a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

4.2.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada lampiran huruf B nomor 2 (dua) mengenai target dan indikator penerima layanan SPM Kesehatan, bahwa telah ditetapkan target capaian setiap tahunnya yaitu 100% untuk setiap jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaiannya.

Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana meliputi pelayanan kesehatan pra krisis dan saat tanggap darurat. Pelayanan kesehatan saat pra krisis kesehatan, meliputi edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana. Sedangkan pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat, guna menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut dan mengurangi angka kesakitan dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan, yang meliputi:

- a. Mendapatkan layanan medis dasar dan layanan rujukan bila diperlukan;
- b. Mendapatkan layanan pencegahan penyakit menular dan penyehatan lingkungan;
- c. Mendapatkan layanan gizi darurat;
- d. Mendapatkan layanan kesehatan reproduksi darurat; dan
- e. Mendapatkan layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial; Untuk pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi, Pelayanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi dilaksanakan di luar fasilitas layanan kesehatan dan di dalam fasilitas layanan kesehatan, dengan target pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB.

Berikut ini tabel rencana capaian dan indikator penerima layananSPM Kesehatan Tahun 2020.

Tabel 4.5
Rencana Capaian dan indikator penerima layanan SPM Kesehatan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang yang berhak mendapatkan layanan	Jumlah Orang yang akan Terlayani	Capaian = (5):(4) x 100%	Rancangan APBD Tahun 2020 (RP.000)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan	111.541 Orang	111.541 Orang	100 %	6.867.295.000

2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	152.961 Orang	152.961 Orang	100 %	
---	---	---	---------------	---------------	-------	--

Sumber : Data Perhitungan Rencana Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Daerah Provinsi Tahun 2020.

Berdasarkan Tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa rencana target capaian jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dan yang akan terlayani sebanyak 111.541 orang. Rencana target jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB dan yang akan terlayani sebanyak 152.961 orang.

4.2.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Daerah Provinsi sesuai dengan rencana target capaian dan indikator penerima layanan SPM Bidang Kesehatan Daerah Provinsi tahun 2020. Berikut ini tabel realisasi capaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2020:

Tabel 4.6

Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Realisasi Capaian SPM		APBD 2020 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan	111.541 / 111.541	100 %	5.439.072.113

	provinsi	pelayanan kesehatan			
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	152.961 / 152.961	100%	

Sumber : Data Perhitungan Capaian SPM Bidang Kesehatan Daerah Provinsi Tahun 2020.

Berdasarkan Tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa antara jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang akan terlayani dengan jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang terlayani adalah sama yaitu sebanyak 111.541 orang terdiri atas 210 orang pada tahap pra krisis kesehatan dan 111.331 orang pada saat tanggap darurat krisis kesehatan, sehingga capaian SPM untuk indikator pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi adalah 100%.

Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang akan mendapat pelayanan kesehatan dengan jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan adalah sama yaitu sebanyak 152.961 orang, sehingga capaian SPM untuk indikator pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi adalah 100%.

4.2.4 Alokasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah diperuntukan untuk program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Sumber Daya Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan program/kegiatan SPM yang dilaksanakan di di UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Alokasi Anggaran dimaksud seluruhnya berjumlah Rp. 6.867.295.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.7
Alokasi Anggaran Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

No.	Program Anggaran	Jumlah
1	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	1.159.675.000
2	Sumber Daya Kesehatan	3.793.302.000
3	Pelayanan Kesehatan	1.914.318.000
	Jumlah total	6.867.295.000

Sumber : RKPD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Pada tahun 2020 terjadi kejadian luar biasa pandemi Covid-19 sehingga untuk penanganan pandemi Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan dana untuk kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 yang ditampung dalam anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Jumlah anggaran BTT untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp. 383.944.445.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Obat, alat kesehatan, & bahan laboratorium, sebesar Rp. 375.353.976.400,-;
- b. Kebutuhan karantina ODP dan tenaga medis di aset milik Pemprov, sebesar Rp. 4.759.393.600,-;
- c. Revitalisasi rumah sakit rujukan PDP perbatasan Jateng-Jatim, sebesar Rp. 400.000.000,-;
- d. Insentif tenaga kesehatan, sebesar Rp. 1.793.075.000,-; dan
- e. Open recruitment relawan kesehatan, sebesar Rp. 1.638.000.000,-.

4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat dalam penerapan pencapaian SPM pada dasarnya seluruh personil yang terlibat dalam pelayanan kesehatan dan personil yang terlibat dalam kondisi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan.

Di tataran provinsi personil yang terlibat semua karyawan di lingkungan Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan Provinsi, termasuk personil di Rumah Sakit Daerah milik Provinsi. Di tataran lapangan, melibatkan personil dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Daerah

Kabupaten/Kota dan Puskesmas, termasuk dukungan dari pelayanan kesehatan swasta.

Dukungan personil tergambar dengan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah :

Tabel 4.8
Jumlah Personil Berdasarkan Golongan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

NO	INSTITUSI	GOLONGAN KEPEGAWAIAN				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1	Dinas Kesehatan Prov Jateng	61	140	26	2	229
2	BKPM Wilayah Semarang	16	45	6	2	69
3	BKPM Wilayah Pati	3	35	6	1	45
4	BKPM Wilayah Magelang	4	41	7	1	53
5	BKPM Wilayah Klaten	4	40	2	-	46
6	BKPM Wilayah Ambarawa	9	27	3	-	39
7	BKIM Provinsi	10	37	6	-	53
8	Laboratorium Kesehatan	13	35	15	-	63
9	Bapelkes Provinsi	6	17	13	-	36
	JUMLAH	126	417	84	6	633

Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020

Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPT Dinas (UPTD) berdasarkan golongan, secara berurut dari yang terbanyak adalah golongan III sebanyak 187 orang (65,88%), golongan IV sebanyak 126 orang (19,91%), golongan II sebanyak 84 orang (13,27%), dan golongan I sebanyak 6 orang (0,95%).

Tabel 4.9
Jumlah Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

NO	INSTITUSI	TINGKAT PENDIDIKAN								JML
		S3	S2	S1/D4	D3	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	Dinas Kesehatan Prov Jateng	2	75	94	20	-	27	8	3	229
2	BKPM Wilayah Semarang	-	9	31	19	-	8	2	-	69
3	BKPM Wilayah Pati	-	5	17	13	-	9	-	1	45
4	BKPM Wilayah Magelang	-	8	13	14	-	16	1	1	53
5	BKPM Wilayah Klaten	-	6	11	20	1	8	-	-	46
6	BKPM Wilayah Ambarawa	-	8	12	15	-	3	1	-	39
7	BKIM Provinsi	-	9	13	23	-	7	1	-	53
8	Laboratorium Kesehatan	-	13	18	24	-	4	2	2	63
9	Bapelkes Provinsi	-	8	7	3	-	15	3	-	36
	JUMLAH	2	141	216	151	1	97	18	7	633

Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPTD secara berurut dari yang terbanyak berlatar belakang pendidikan Strata 1 sebanyak 216 orang (34,12%), Diploma III sebanyak 151 orang (23,85%), Strata II sebanyak 141 orang (22,27%), SLTA sebanyak 97 orang (15,32%), SLTP sebanyak 18 orang (2,84%), SD sebanyak 7 orang (1,1%), Strata III sebanyak 2 orang (0,32%), dan Diploma I sebanyak 1 orang (0,16%).

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan:

- 1) Kesulitan dalam penentuan sasaran pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provins.
- 2) Belum ada penetapan dari kepala daerah yang menyatakan bahwa suatu kejadian bencana dan KLB sebagai bencana dan KLB Provinsi.

- 3) Frekuensi dan intensitas kejadian KLB dan bencana merupakan data prediksi berdasar data kejadian sebelumnya sehingga data sasaran pelayanan digunakan prediksi.
 - 4) Keterbatasan dalam sistem pelaporan, sarana mobilitas, dan anggaran`.
- b. Solusi mengatasi permasalahan :
- 1) Penghitungan sasaran pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi berdasarkan data pemetaan wilayah risiko bencana dari BPBD Provinsi Jawa Tengah dan data BPS dan ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 2) Penghitungan capaian akhir penyelenggaraan SPM kesehatan provinsi menggunakan data riil.
 - 3) Penguatan manajemen bencana di kabupaten/kota dan provinsi.
 - 4) Menentukan kriteria KLB provinsi yaitu:
 - a) KLB yang terjadi pada suatu wilayah kabupaten/kota di satu provinsi berpotensi meluas ke kabupaten/kota lainnya berdasarkan hasil analisis dan evaluasi penanggulangan KLB oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
 - b) Skala KLB Provinsi apabila pemerintah daerah kabupaten/kota terdampak KLB tidak/kurang mampu dan mengajukan permintaan bantuan dalam penanggulangan KLB kepada pemerintah daerah provinsi. Pengajuan permintaan bantuan dengan menggunakan formulir yang ditandatangani oleh kepala daerah kabupaten/kota terdampak.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar, terdiri dari :

- 1) Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas Kabupaten/ Kota;
- 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota.

4.3.2 Target Pencapaian SPM

Target capaian pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebesar 1.500 lt/dt atau 120.000 Rumah Tangga, sedangkan untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (SPALD Regional) belum dilaksanakan di Jawa Tengah. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10
Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang yang berhak mendapatkan Pelayanan	Jumlah Orang yang akan Dilayani	Target Capaian	Rancangan APBD Tahun 2020 (RP.000)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kab/Kota	120.000 Sambungan Rumah (600.000 Jiwa)	120.000 Sambungan Rumah (600.000 Jiwa)	100 %	12.192.390
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kab/kota	NA (Tidak ada target dan rencana kegiatan SPALD Regional)	NA (Tidak ada target dan rencana kegiatan SPALD Regional)	100 %	578.926

4.3.3 Realisasi

Realisasi capaian pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebesar 100 %, sedangkan untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (SPALD Regional), karena belum dilaksanakan di Jawa Tengah, anggaran difokuskan

untuk identifikasi, kajian dan penghitungan kebutuhan, maka realisasinya *Not Available* (NA). Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11
Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET CAPAI		REALISASI CAPAIAN SPM		REALISASI CAPAIAN = (4) : (6) X 100 %
			JML ORANG YG AKAN TERLAYANI	RAPBD 2020	JML ORANG YG TERLAYANI	APBD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum curah lintas kabupaten/kota	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh curah lintas Kab/Kota	120.000 Sumbungan Rumah	10.796.719.000	120.000 Sumbungan Rumah	10.796.719.000	100 %

Perhitungan

$$SPM \text{ PROVINSI} = \frac{1500 \text{ l/det}}{1500 \text{ l/det}} \times 100 = \frac{120.000 \text{ RT}}{120.000 \text{ RT}} \times 100 = 100\%$$

4.3.4 Alokasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Jawa Tengah diperuntukan untuk Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana Air Minum dan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyehatan Lingkungan. Alokasi Anggaran dimaksud seluruhnya berjumlah Rp. 10.796.719.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.12
Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

No.	Percapaian SPM Bidang PU	Nama Kegiatan	Anggaran 2020 (000)
1	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas Kabupaten/ Kota	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum	12.192.390
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyehatan Lingkungan	578.926

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020 sebanyak 13 orang. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.13
Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

No	Percapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Dukungan Personil
1	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas Kabupaten/ Kota	678 orang
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota	

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan :

- 1) Kapasitas debit sumber air baku tidak bisa kontinyu sepanjang tahun dan besarnya debit cenderung menurun.
- 2) Kebutuhan pendanaan untuk pembangunan sangat besar.
- 3) Belum ada Kabupaten/ Kota yang mengusulkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/ Kota.

b. Solusi :

- 1) Perlu penambahan kapasitas tampungan pada sumber air baku.
- 2) Usulan pendanaan melalui skema KPBU.

- 3) Mendorong Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik lokal.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat adalah sebagai berikut:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

4.4.2 Target Pencapaian SPM

Target capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Provinsi Jawa

Tengah adalah 100%. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.14
Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang yang berhak mendapatkan Pelayanan	Jumlah Orang yang akan Dilayani	Target Capaian	Rancangan APBD Tahun 2020 (RP.000)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	120 Unit (600 Org)	116 Unit (464 Org)	100 %	3.139.425
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	N/A	N/A	100 %	

4.4.3 Realisasi

Realisasi capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Provinsi Jawa Tengah untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi adalah 100% (120 unit Rumah Layak Huni), sedangkan untuk fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi, karena tidak ada yang terkena dampak program pemerintah dan harus direlokasi, maka realisasinya *Not Available* (NA) .

Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.15
Capaian Realisasi terhadap Target SPM Perumahan Rakyat Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET		REALISASI CAPAIAN SPM		CAPAIAN (6):(4)X 100%
			JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	RAPBD 2020	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	APBD TAHUN 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	116 Unit (464 Org)	3.139.425	116 Unit (464 Org)	3.127.242	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	N/A		N/A		100%

Bantuan peningkatan kualitas rumah terdampak dan resiko bencana di tahun 2020 ditujukan kepada korban bencana banjir dan tanah longsor. Penerima bantuan peningkatan kualitas rumah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.16
Jumlah Penerima Bansos Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko bencana Tahun 2020

NAMA PEKERJAAN	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah Rumah
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Terdampak Bencana (Rehabilitasi)	Pekalongan	Kandangserang	Gembong	16
	Pemalang	Watukumpul	Tundagan	16
	Tegal	Lebaksiu	Kajen	11
	Brebes	Sirampong	Sridadi	16
	Banjarnegara	Kalibening	Kasinoman	15
	Banjarnegara	Kalibening	Sidakangen	15
	Banyumas	Gumelar	Karangkemojing	16
Pembangunan Baru (PB) Rumah Terdampak Bencana (Relokasi)	Purworejo	Kaligesing	Donorejo	11
			TOTAL	120

Sumber: Dinas Perakim 2020

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM perumahan rakyat (pada kegiatan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan relokasi program pemerintah beserta PSU-nya) bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah semula sebesar Rp 3.139.425.000,-. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya refocusing anggaran menjadi lebih kecil menjadi Rp 3.127.242.000,-.

4.4.5 Dukungan Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Perumahan Rakyat sebanyak 84 orang.

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Terdapat dua jenis pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat, yaitu (1) penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana provinsi dan (2) fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

Terkait dengan jenis pelayanan SPM yang pertama yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, dilakukan pada saat masa pasca bencana dan diperlukan surat penetapan bencana dari Gubernur karena dampak bencana meliputi lebih dari satu wilayah administrasi kabupaten/kota. Terkait dengan penetapan bencana dari Gubernur terdapat permasalahan (1) belum ada mekanisme dan tata cara penetapan status bencana daerah dan (2) perlu penyamaan indikator bencana yang ada di SPM dengan indikator yang terdapat di BPBD (keselerasan bentuk bencana), solusi, dan rencana tindak lanjut sebagaimana tabel di bawah ini.

Terdapat empat tahap penerapan SPM, yaitu: (1) pengumpulan data; (2) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (3) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (4) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Dikaitkan dengan korban bencana provinsi yang memiliki dampak bencana lebih dari satu wilayah administrasi kabupaten/kota, pada Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 yang termasuk di dalamnya adalah: (1) gelombang ekstrim dan abrasi; (2) tsunami; (3) letusan gunung Sumbing; (4) letusan gunung Sindoro; (5) letusan gunung Merapi; (6) letusan gunung Slamet; dan (7) letusan gunung Dieng. Dari data tersebut, kendala ada di pengumpulan data yang harus dilakukan secara terus menerus. Keterbatasan data ini menghambat pada penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, sehingga memunculkan permasalahan data yang belum diperbaharui. Solusi dan rencana tindak lanjut sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4.17
Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan SPM Perumahan Rakyat

Permasalahan	Solusi	Recana Tindak lanjut
A .PERENCANAAN		
- Belum ada mekanisme dan tata cara penetapan status bencana daerah untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. - Belum ada koordinasi antara Disperakim dengan BPBD sehingga pengumpulan data korban bencana masih sulit. Pengumpulan data masih berasal dari proposal yang diajukan oleh desa yang terkena bencana	Perlu adanya mekanisme dan tata cara penetapan status bencana daerah untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	1. Perlu peraturan yang menetapkan tentang kriteria status bencana di daerah, khususnya bagi provinsi 2. Perlu koordinasi dan sinkronisasi antar OPD yang menangani bencana.
B. KOORDINASI		
- Perlu penyamaan indikator bencana yang ada di SPM dengan indikator yang terdapat di BPBD (keselerasan bentuk bencana). Indikator ini diharapkan dapat menunjukkan kewenangan dan masing-masing dan pelaksananya. - Belum ada mekanisme pengajuan permohonan bantuan saat bencana dikaitkan dengan keterlibatan kemampuan keuangan daerah.	- Penyamaan indikator bencana yang ada di SPM dengan indikator yang terdapat di BPBD.. - Adanya mekanisme pengajuan permohonan bantuan saat bencana dikaitkan dengan keterlibatan kemampuan keuangan daerah.	1. Perlu sinergitas atau Koordinasi antar OPD yang menangani kebencanaan 2. Perlu ada kejelasan mengenai siapa pihak yang menjadi leading sector dalam penanganan bencana karena nanti berkaitan dengan bentuk penanganan yang dilakukan, misal: apakah pemerintah hanya menyediakan lahan relokasi untuk korban bencana atau sampai membangun rumah, atau justru hanya memfasilitasi saja 3. Perlu adanya mekanisme pengajuan permohonan bantuan saat bencana dikaitkan

		dengan keterlibatan kemampuan keuangan daerah.
C. PELAKSANAAN		
Pelaksanaan kegiatan yang semula dijadwalkan pada Juli 2020 mundur ke bulan Agustus 2020 karena refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.	Dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan.	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan.

Terkait dengan SPM yang kedua, yaitu fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi, pemerintah daerah provinsi belum melaksanakan.

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk implementasi atau penegakan Perda/Perkada.

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 121 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum, meliputi :

- Standar Operasional Satpol PP;
- Standar Sarana Prasarana Satpol PP;
- Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat; dan
- Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Sedangkan Jenis Pelayanan Dasarnya adalah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Jawa Tengah dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi Jawa Tengah.

4.5.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 100 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah 100% jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada. Target capaian standar pelayanan minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.18
Target Capaian Penerapan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Rancangan APBD Tahun 2020
1	2	3	4	5
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	Presentase jumlah penduduk yang memperoleh Pelayanan akibat dampak penegakan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	100 %	25.000.000

Target 100% dari seluruh jumlah warga penduduk Provinsi Jawa Tengah 34.718.204 jiwa yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada. Mindset indikator penerapan SPM pelayanan trantibumlinmas dalam Permendagri 100 Tahun 2018 adalah terbalik, yaitu apabila tidak ada warga yang terkena dampak akibat penegakan Perda dan Perkada maka SOP penegakan produk hukum daerah telah sesuai, dan apabila ada warga Negara yang terkena dampak akibat penegakan produk hokum daerah bisa diartikan dua: 1) penegakan Perda dan Perkada menyimpang dari SOP, dan 2) ketika penegakan Perda dan Perkada sudah sesuai SOP namun ada warga Negara yang terkena dampak bisa disebabkan musibah yang tidak dapat dikendalikan atau diluar kemampuan manusia.

4.5.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan rencana target capaian dan indikator sebesar **100%** karena tidak ada warga Negara yang terkena dampak akibat penegakan Perda dan Perkada selama tahun 2020. Capaian penerapan standar pelayanan minimal pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.19
Capaian Penerapan SPM Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

No.	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	CAPAIAN (%)
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100% (tidak ada masyarakat/warga Negara yang terkena dampak akibat penegakan pelanggaran perda/perkada)

Tabel. Capaian Realisasi Target SPM Satpol PP

No.	Peraturan Daerah	Lokasi		Pelanggar	
		Kabupaten / Kota / Tempat / Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Target	Realisasi
1.	Kegiatan Inventarisasi Pelanggar Perda Prov. Jateng		Target 1.000 Pelanggar		
1.	Perda Nomor 9 Tahun 2013 ttg Garis Sempadan	Sempadan Sungai Juana Kabupaten Kudus	13 s.d 14 Jan 2020	170 pelanggar	
2.	Perda Nomor 8 Tahun 2009 ttg Irigasi	Daerah Irigasi Sembelis Kota Tegal	15 s.d 16 Jan 2020	22 pelanggar	
3.	Perda Nomor 9 Tahun 2013 ttg Garis Sempadan	Saluran Induk Sedadi Kabupaten Grobogan	20 s.d 21 Jan 2020	160 pelanggar	
4.	Perda Nomor 9 Tahun 2013 ttg Garis Sempadan	Ruas Jalan Magelang – Purworejo Kota Magelang	22 s.d 23 Jan 2020	17 pelanggar	
5.	Perda Nomor 8 Tahun 2009 ttg Irigasi	Daerah Irigasi Sudagaran	27 s.d 28 Jan 2020	20 pelanggar	Januari 389 pelanggar

		Kabupaten Purworejo			
6.	Perda Nomor 9 Tahun 2013 ttg Garis Sempadan	Sempadan Jalan Singget – Cepu Kabupaten Blora	3 s.d 4 Feb. 2020	140 pelanggar	
7.	Perda Nomor 9 Tahun 2013 ttg Garis Sempadan	Sempadan Jalan dukuhwaru Kabupaten Tegal	5 s.d 6 Feb. 2020	190 pelanggar	
8.	Perda Nomor 9 Tahun 2013 ttg Garis Sempadan	Sempadan Jalan pendem Kabupaten Jepara	10 s.d 11 Feb. 2020	28 pelanggar	
9.	Perda Nomor 8 Tahun 2009 ttg Irigasi	Daerah Irigasi Jumeneng Kabupaten Sukoharjo	17 s.d 18 Feb. 2020	29 pelanggar	
10.	Perda Nomor 9 Tahun 2013 ttg Garis Sempadan	Sempadan Jalan pati – tayu Kabupaten Pati	19 s.d 20 Feb. 2020	110 pelanggar	Februari 497 pelanggar
11.	Perda Nomor 8 Tahun 2009 ttg Irigasi	Daerah Irigasi Gagak Sipat Kabupaten Boyolali	24 s.d 25 Feb. 2020	70 pelanggar	
12.	Perda Nomor 9 Tahun 2013 ttg Garis Sempadan	Kota Surakarta	26 s.d 27 Feb. 2020		
13.	Perda Nomor 9 Tahun 2013 ttg Garis Sempadan	Kabupaten Rembang	2 s.d 3 Mar. 2020	86 pelanggar	
14.	Perda Nomor 9 Tahun 2013 ttg Garis Sempadan	Kabupaten Purbalingga	4 s.d 5 Mar. 2020	4 pelanggar	
15.	Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	Kabupaten Pekalongan	9 s.d 10 Mar. 2020		
16.	Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	Kabupaten Jepara	11 s.d 12 Mar. 2020	28 pelanggar	Maret 188 pelanggar
			REALISASI	1.074 pelanggar	1.074 pelanggar

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum oleh atuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun

2020 sebesar 25.000.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari anggaran penindakan pelanggaran produk hukum daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau dalam kata lain, anggaran SPM sebesar **2,5%** dari anggaran penindakan pelanggaran produk hukum daerah Provinsi Jawa Tengah.

4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Sumber Daya Manusia yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sebanyak 86 (tujuh belas) orang. Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah yang mendukung Penegakan Produk Hukum Daerah adalah : 86 orang PNS dan 5 orang PPNS. Rician personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah yang mendukung Penegakan Produk Hukum Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20
Jumlah Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

No	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	-
2.	SMP	53 Orang
3.	SMA	33 Orang
4.	DIII	4 Orang
5.	S1/DV	33 Orang
6.	S2	13 Orang
7.	S3	-
	JUMLAH	136 Orang

Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah tahun 2020

Tabel 4.21**Tabel 4.22****Jumlah Personil Berdasarkan Golongan Kepegawaian pada satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020**

No	Golongan	Jumlah
1.	Non Golongan	50 Orang
2.	I	1 Orang
3.	II	31 Orang
4.	III	44 Orang
5.	IV	10 Orang
JUMLAH		136 orang

Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020

4.5.6 Permasalahan dan Solusi**a. Permasalahan**

- 1) Indikator SPM tidak mendorong/mendukung kinerja Satpol PP sesuai tupoksi .
- 2) Masih kurangnya kesadaran daerah untuk menerapkan SPM sub urusan Trantibum, sebagai prioritas pembangunan Bidang Trantibum sub urusan pelayanan dasa, banyak yang belum menganggarkan SPM.
- 3) Regulasi multi tafsir terutama dalam menargetkan indicator pelaksanaan SPM sesuai Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang SPM dan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standat Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 4) Aturan pasal per pasal dalam Permendagri Nomor 121 Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standat Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak konsisten sebagai tindaklanjut Permendagri 100 Tahun 2018 tentang SPM.

b. Solusi

- 1) Indikator SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum direvis agar mudah dilaksanakan
- 2) Revisi Peremendagri agar tidak multi tafsir
- 3) Sosialisasi dilakukan secara intensif dan menyeluruh.

4.6 Urusan Sosial

Bidang sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penetapan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar.

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan sosial di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah - masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial di daerah provinsi terdiri atas:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

4.6.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada lampiran huruf B nomor 5 (lima) mengenai target dan indikator penerima layanan SPM urusan sosial, bahwa telah ditetapkan target capaian setiap tahunnya yaitu 100% untuk

setiap jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaiannya. Berikut ini tabel rencana target capaian dan indikator penerima layanan SPM bidang sosial tahun 2020:

Tabel 4.23
Rencana Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	Jumlah Orang yang berhak mendpt Pelayanan	Jumlah Orang yang akan Terlayani	Target Capaian	Rancangan APBD Tahun 2020 (RP.000)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	4.383 Orang	4.383 Orang	100 %	22.241.879.345
2	Rehabilitasi social dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi social dasar anak terlantar di dalam panti	22.345 Orang	22.345 Orang	100 %	30.134.809.345
3	Rehabilitasi social dasar lanjut usia Terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi social dasar lanjut usia di dalam panti	5.430 Orang	5.430 Orang	100 %	22.395.446.858
4	Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya Gelandangan & pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi social dasar tuna social di dalam panti	830 Orang	830 Orang	100 %	8.998.019.917
5	Perlindungan dan jaminan social pada saat & Setelah tanggap Darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	Jumlah Warga Negara korban Bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	27.439 orang	27.439 orang	100 %	1.721.055

Sumber : Data Perhitungan Rencana Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi Tahun 2020.

Berdasarkan Tabel 2.22 di atas dapat dideskripsikan bahwa rencana target capaian jumlah penyandang disabilitas terlantar yang berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti dan yang akan terlayani sebanyak 3.767 orang yang terdiri dari 1.667 orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan 2.100 orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti milik masyarakat.

Rencana target capaian jumlah anak terlantar yang berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti dan yang akan terlayani sebanyak 2.840 orang yang terdiri dari 1.140 orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan 1.700 orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti milik masyarakat.

Rencana target capaian jumlah lanjut usia terlantar yang berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti dan yang akan terlayani sebanyak 1.795 orang yang terdiri dari 1.395 orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan 400 orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti milik masyarakat.

Rencana target capaian jumlah gelandangan dan pengemis yang berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti dan yang akan terlayani sebanyak 1.950 orang yang terdiri dari 1.700 orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan 250 orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti milik masyarakat.

Rencana target capaian jumlah korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi yang akan dilayani sebanyak 27.439 orang (100 %).

4.6.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial daerah provinsi sesuai dengan rencana target capaian dan indikator penerima layanan SPM bidang sosial daerah provinsi tahun 2020. Berikut ini tabel realisasi capaian SPM bidang sosial tahun 2020:

Tabel 4.24
Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET		REALISASI CAPAIAN SPM		CAPAIAN (6):(4)X 100%
			JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	RAPBD 2020 (000)	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	APBD TAHUN 2020 (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlanter di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlanter yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlanter di dalam panti	4.383 Orang	22.241.879.345	4.383 Orang	22.241.879.345	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlanter di dalam panti	Jumlah Warga Negara anak Terlanter yang mendapatkan rehabilitasi social dasar anak terlanter di dalam panti	22.345 Orang	30.134.809.345	22.345 Orang	30.134.809.345	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia Terlanter di dalam panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlanter yang mendapatkan rehabilitasi social dasar lanjut usia di dalam panti	5.430 Orang	22.395.446.858	5.430 Orang	22.395.446.858	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya Gelandangan & pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi social dasar tuna social di dalam panti	830 Orang	8.998.019.917	830 Orang	8.998.019.917	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET		REALISASI CAPAIAN SPM		CAPAIAN (6)/(4)X
5	Perlindungan dan jaminan social pada saat & Setelah tanggap Darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	Jumlah Warga Negara korban Bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	27.439	1.721.055.000	27.439	1.721.055	100%

Sumber : Data Perhitungan Capaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi Tahun 2020.

Berdasarkan Tabel 2.23 di atas dapat di deskripsikan bahwa antara jumlah penyandang disabilitas terlantar yang akan terlayani dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terlayani dan mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti adalah sama yaitu sebanyak 4.383 orang yang terdiri dari 1.764 orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2.100 orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti milik masyarakat serta 519 orang penerima bantuan pencegahan penyebaran covid-19 didalam panti milik masyarakat. Sehingga realisasi capaian SPM untuk indikator capaian jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti sebesar 100%.

Realisasi capaian antara jumlah anak terlantar yang akan terlayani dengan jumlah anak terlantar yang terlayani dan mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti adalah sama yaitu sebanyak 22.345 orang terdiri dari 1.195 orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan 1.700 orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti milik masyarakat serta 19.450 orang penerima bantuan pencegahan penyebaran covid-19 didalam panti milik masyarakat. Sehingga realisasi capaian

SPM untuk indikator capaian jumlah warga negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti sebesar 100%.

Realisasi capaian antara jumlah lanjut usia terlanter yang akan terlayani dengan jumlah lanjut usia terlanter yang terlayani dan mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti adalah sama yaitu sejumlah 5.430 orang, terdiri atas 400 orang didalam panti milik masyarakat, 1.285 orang didalam panti milik provinsi Jawa Tengah serta 3.745 orang penerima bantuan pencegahan penyebaran covid-19 didalam panti milik masyarakat. Sehingga realisasi capaian SPM untuk indikator capaian jumlah warga negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti sebesar 100%.

Realisasi capaian antara jumlah gelandangan dan pengemis yang akan terlayani dengan jumlah gelandangan dan pengemis yang terlayani dan mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti adalah sama yaitu sebanyak 830 orang, terdiri dari 580 orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan 250 orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti milik masyarakat. Sehingga realisasi capaian SPM untuk indikator capaian jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti sebesar 100%.

Realisasi capaian antara jumlah korban bencana provinsi yang akan mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi dengan jumlah korban bencana provinsi yang terlayani dan mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi adalah sama yaitu sebanyak 27.439 orang (100 %).

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar Rp 53.276.780.000, terdiri dari Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp 51.901.163.000 dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp 1.375.617.000.

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Sumber Daya Manusia yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial pada tahun 2020 sebanyak 616 orang. Berikut ini Tabel rincian dukungan personil penerapan SPM bidang sosial di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 4.25
Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2019 di
Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang yang akan Terlayani	Dukungan Personil
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi social dasar Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	3.767 Orang	161
2	Rehabilitasi social dasar anak Terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi social dasar anak terlantar di dalam panti	2.840 Orang	215
3	Rehabilitasi social dasar lanjut usia Terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi social dasar lanjut usia di dalam panti	1.795 Orang	149
4	Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya Gelandangan & pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi social dasar tuna social di dalam panti	1.950 Orang	76
5	Perlindungan dan jaminan social pada saat & Setelah tanggap Darurat bencana bagi korban bencana daerah	Jumlah Warga Negara korban Bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	27.439 orang	15

provinsi			
JUMLAH		17.002	616

Sumber : Data Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Berikut ini Tabel permasalahan yang dialami dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial:

Tabel 4.26
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2020

No	SUMBER	PERMASALAHAN	LANGKAH PENYELESAIAN
1	2	3	4
1	Internal	1. Prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah, yang berdampak prioritas pemenuhan kualitas kebutuhan dasar dalam SPM yang terpenuhi dalam perencanaan dan penganggaran. 2. Kompetensi SDM yang terlibat dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM belum memadai 3. Belum ada monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM	1. Menyusun skala prioritas dengan mengedepankan kualitas kebutuhan sosial dasar sehingga seluruh kebutuhan dasar pada SPM teralokasikan dalam perencanaan dan penganggaran. 2. Meningkatkan Kompetensi SDM yang terlibat dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, diperlukan mengadakan Workshop, Bintek dan Diklat 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrumen SPM sesuai dengan sasaran/ indikator kinerja
2	Eksternal	1. SPM bidang sosial belum menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Pembangunan	1. Melakukan advokasi, koordinasi dan pendampingan sosial terhadap OPD penyelenggara

		Kesejahteraan Sosial di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	urusan sosial di daerah Kabupaten/Kota serta perencanaan dan pembangunan Provinsi.
		2. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi sasaran/indikator kinerja SPM bidang sosial	2. Melakukan advokasi sosial dan konsultasi kepada pihak terkait (TAPD, Bappeda, Komisi yang membidangi sosial pada legislatif) mengenai pentingnya pemenuhan SPM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

4.7 Program dan Kegiatan

a. Urusan Pendidikan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.27
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4
1	Pembinaan SMA	Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA	814.450.688.000
		Kegiatan Pembinaan kesiswaan SMA	3.599.259.000
		Kegiatan Pemenuhan Sarpras SMA	34.361.227.000
		Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar SMA	175.019.000
		Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMA	142.590.000
		Kegiatan Penguatan Kelembagaan SMA	53.000.000
	Pembinaan SMK	Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK	829.554.884.000
		Kegiatan Pembinaan Kesiswaan SMK	1.490.544.000
		Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK	196.315.325.000
		Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar SMK Berbasis TIK	224.714.000
		Kegiatan Pengembangan	82.182.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4
		Kelembagaan SMK	
		Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMK	1.759.354.000
2	Pembinaan Pendidikan Khusus	Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SLB	29.234.663.000
		Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLB	1.996.412.000
		Kegiatan Penguatan Kelembagaan SLB	70.149.000
		Peningkatan Pembinaan kesiswaan SLB	529.827.000
		Peningkatan Pengembangan Kurikulum SLB	94.100.000

Sumber : RKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

b. Urusan Kesehatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.28
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan Tahun 2020

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pencegahan dan penanggulangan penyakit	Surveilans, imunisasi, dan penanganan KLB dan Bencana	1.159.675.000,-
2	Sumber daya kesehatan	Farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan	3.793.302.000,-
3	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan kesehatan rujukan	1.914.318.000,-
Jumlah			6.867.295.000,-

Sumber : RKPD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

c. Urusan Pekerjaan Umum

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.29
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi	Peningkatan Sarana Prasarana air minum	22.500.000.000,00
	Pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS	510.000.000,00
	Peningkatan Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan	300.000.000,00
JUMLAH		23.310.000.000,00

Sumber: Dokumen RKPD DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

d.Urusan Perumahan Rakyat

Berikut adalah program dan kegiatan serta pendanaan penerapan SPM Perumahan Rakyat tahun 2020:

Tabel 4.30
Program/Kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar pada SPM
Perumahan Rakyat Tahun 2020

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
Pengembangan Perumahan	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	528.025.000,00
	Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	361.035.000,00
	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	2.915.000.00,00
JUMLAH		3.139.425.000,00

SPM Perumahan Rakyat di Dinas Perakim Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 diwujudkan di dalam program pengembangan perumahan. Terdapat tiga kegiatan yang mendukung pelaksanaan SPM di dalam program tersebut, yaitu

pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi; sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi; serta pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi.

e. Urusan Trantibumlinmas

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, yang tertuang dalam Rencana Strategis Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 4.31
Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

No	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum Dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah-Satuan Polisi Pamong Praja	Penindakan Pelanggar Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah	Rp. 25.000.000,-

Sumber : RKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

f. Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 4.32
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Tahun 2020

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usia didalam panti milik masyarakat	25.355.666.000
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas didalam panti milik masyarakat	14.309.647.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang didalam panti milik masyarakat	5.454.293.000
		Rehabilitasi Sosial PMKS didalam panti milik pemerintah	6.781.557.000
2	Perlindungan dan Jaminan Sosia	Penanganan Sosial terhadap korban bencana alam dan Bencana Sosial	1.375.617.000
Jumlah			53.276.780.000

Sumber : RKPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan kinerja pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah selama satu tahun, disusun guna memberikan gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan fungsi penunjang pemerintahan daerah. Namun pada tahun 2020 ini terjadi bencana pandemi *covid-19* yang dialami Provinsi Jawa Tengah, dan juga secara global mempengaruhi berbagai aspek pemerintahan. Hal tersebut berdampak pada krisis multisektor, sehingga berdampak pada ketidaktercapaian indikator kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun kedua RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 yaitu sesuai dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, yang ditujukan untuk **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”**.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tahun 2020 ditunjukkan dengan tingkat ketercapaian indikator kinerja makro Jawa Tengah dan capaian target indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD dan Perjanjian Kinerja Gubernur. Adapun Indikator kinerja makro Jawa Tengah, sesuai dengan data rilis BPS dapat disajikan sebagai berikut, yaitu kemiskinan 11,41 lebih tinggi dibanding kemiskinan nasional sebesar 9,78%, pertumbuhan ekonomi Jawa tengah Pada tahun 2020 mencapai minus 2,65 persen. TPT pada tahun 2020 sebesar 6,48% lebih rendah dibandingkan TPT Nasional sebesar 7,07%, Indek Gini pada Maret 2020 sebesar 0,362, IPM sebesar 71,87, sedangkan PDRB masih menunggu rilis.

Adanya pandemi COVID-19 diawal tahun 2020 dan seiring dengan adanya kebijakan pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan kebijakan belanja daerah yaitu dengan *refocussing* anggaran yang diarahkan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 di sektor kesehatan, jaring pengaman sosial maupun jaring pengaman ekonomi.

Terjadinya Covid-19 selama tahun 2020 telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah merosot dari 5,40% (2019) menjadi minus 2,65%. Menurunnya kinerja perekonomian tersebut menyebabkan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang selama tahun 2014 hingga 2019 terus mengalami tren penurunan, pada tahun 2020 meningkat kembali dari 10,58% pada September 2019 menjadi 11,84% pada September 2020. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pun meningkat dari 4,44% pada Agustus 2019 menjadi 6,48% pada Agustus 2020. Ketimpangan ekonomi juga sedikit meningkat dan ketimpangan antar wilayah juga sedikit melebar. Namun demikian, walaupun terkena imbas negatif dari Covid-19, IPM Jawa Tengah pada 2020 terus meningkat. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dari pemerintah juga terus meningkat. Dampak lain adalah meningkatnya indeks Gini di Jawa Tengah. Indeks Gini di wilayah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan indeks Gini di wilayah perdesaan. Perbedaan tersebut menunjukkan masalah ketimpangan pendapatan atau pengeluaran masyarakat di wilayah perkotaan lebih tinggi dibanding di pedesaan. Hal ini terjadi karena pandemi COVID-19 menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi di sektor jasa dan usaha informal di daerah perkotaan, sementara di perdesaan aktivitas ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian masih bisa bertahan.

Demikian buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 ini kami susun, besar harapan kami buku laporan ini dapat dijadikan sebagai referensi utama dalam pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk penentuan status (peringkat) kinerja daerah secara Nasional di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.